

MODUL BAHAN AJAR

PSIKOLOGI SOSIAL

2CKUI205 · 2 SKS · Semester 2

Penyusun

Deliana Vita Sari Djakaria, S.IP., M.IP.

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Tahun Akademik 2023

KATA PENGANTAR

(kata pengantar belum ditulis)

DAFTAR ISI

...

Nomor halaman dihitung otomatis. Kalau daftar di atas masih kosong, tekan Ctrl+A lalu F9 (Word) atau Tools ► Update ► Update All (LibreOffice).

PERTEMUAN 1

Pengantar Psikologi Sosial dan Ruang Lingkupnya

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:

1. Menyebutkan minimal 4 konsep dasar psikologi sosial (persepsi sosial, kognisi sosial, sikap, pengaruh sosial) beserta definisi operasionalnya dalam peta konsep tertulis; Membandingkan minimal 2 perspektif teoretis psikologi sosial (behaviorisme vs. kognitif-sosial) dalam tabel perbedaan asumsi dasar, tokoh, dan contoh terapan; Memberikan 1 contoh nyata fenomena kognisi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang dikaitkan dengan teori yang dipelajari
2. Menjelaskan definisi psikologi sosial menurut minimal tiga perspektif ahli secara tepat
3. Mengidentifikasi ruang lingkup kajian psikologi sosial yang mencakup persepsi sosial, kognisi sosial, dan sikap dengan contoh konkret dari kehidupan sehari-hari
4. Membedakan psikologi sosial dari disiplin ilmu sosial lain (sosiologi, psikologi klinis, antropologi) berdasarkan objek dan metode kajiannya
5. Menelusuri garis besar perkembangan historis psikologi sosial dari era behaviorisme hingga pendekatan kognitif-sosial secara kronologis
6. Menghubungkan konsep-konsep dasar psikologi sosial dengan fenomena sosial aktual di Kawasan Timur Indonesia sebagai bentuk kepekaan kontekstual

Pendahuluan

Psikologi sosial berdiri di persimpangan antara individu dan masyarakat: ia menjelaskan mengapa seseorang berperilaku berbeda ketika sendirian dibandingkan ketika berada dalam kerumunan, mengapa prasangka terbentuk, dan bagaimana sikap politik terbentuk serta berubah. Bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan, pemahaman yang tepat tentang fondasi psikologi sosial bukan sekadar pengetahuan teoritis—melainkan alat analisis untuk membaca dinamika konstituen, perilaku pemilih, dan legitimasi kebijakan publik. Pertemuan pertama ini belum memiliki pertemuan sebelumnya dalam rangkaian mata kuliah, sehingga ia berfungsi sebagai peta orientasi: menetapkan batas disiplin, mendefinisikan konsep-konsep kunci yang

akan terus dipakai sepanjang 16 pertemuan, dan memperkenalkan kerangka historis yang memungkinkan mahasiswa menilai kekuatan serta keterbatasan setiap teori yang akan dijumpai pada pertemuan-pertemuan berikutnya.

A. Definisi Psikologi Sosial Menurut Para Ahli

Psikologi sosial adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik secara nyata, dibayangkan, maupun tersirat. Gordon Allport (1954) merumuskan definisi klasik yang hingga kini menjadi acuan utama: psikologi sosial berupaya memahami dan menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh kehadiran aktual, imajiner, atau tersirat dari orang lain. Definisi ini menegaskan bahwa objek kajian psikologi sosial selalu berpijak pada individu sebagai unit analisis, bukan kelompok secara keseluruhan seperti yang menjadi fokus sosiologi. Dengan demikian, psikologi sosial memposisikan dirinya di persimpangan antara kajian individual dan kajian sosial.

Definisi Allport kemudian diperkaya oleh para ahli berikutnya. Baron dan Byrne (2004) menekankan bahwa psikologi sosial mengkaji pengaruh sosial terhadap perilaku dan kognisi individu, termasuk bagaimana seseorang memproses informasi tentang orang lain, membentuk sikap, dan bereaksi terhadap tekanan kelompok. Sementara itu, Myers (2010) menambahkan dimensi ilmiah dengan mendefinisikan psikologi sosial sebagai studi ilmiah tentang bagaimana orang berpikir, memengaruhi, dan berhubungan satu sama lain. Ketiga definisi ini secara bersama-sama membangun gambaran bahwa psikologi sosial bukan sekadar studi tentang kerumunan atau masyarakat, melainkan tentang proses psikologis yang terjadi di dalam diri individu ketika ia berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.

Dalam konteks Ilmu Pemerintahan, relevansi definisi-definisi tersebut tampak nyata ketika kita mengamati bagaimana seorang pejabat publik mengambil keputusan yang dipengaruhi oleh tekanan kelompok koleganya, atau bagaimana warga di kawasan terpencil Kawasan Timur Indonesia membentuk persepsi terhadap kebijakan pemerintah pusat berdasarkan pengalaman sosial kolektif mereka. Psikologi sosial menyediakan kerangka untuk menganalisis proses-proses tersebut secara sistematis dan berbasis bukti. Nilai kepekaan kontekstual (Adaptability dalam ICHSA-N) mendorong mahasiswa untuk tidak membaca definisi-definisi ini secara abstrak, melainkan mengaitkannya dengan realitas sosial-politik lokal yang mereka hadapi sebagai calon aparatur pemerintahan.

Memahami ragam definisi psikologi sosial juga melatih kemampuan berpikir komparatif yang esensial bagi seorang ilmuwan pemerintahan. Ketika definisi Allport

menekankan unsur kehadiran orang lain (aktual, imajiner, tersirat), definisi Myers menonjolkan proses berpikir, memengaruhi, dan berhubungan sebagai tiga sumbu utama kajian. Perbedaan penekanan ini bukan pertentangan, melainkan saling melengkapi sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perilaku sosial. Mahasiswa yang mampu membandingkan ketiga definisi ini secara kritis telah menjalankan proses kognitif pada level analisis (C4), yang menjadi landasan bagi kajian-kajian lebih lanjut tentang persepsi sosial, kognisi sosial, dan sikap pada sub-bab berikutnya.

Tabel 1.1 Perbandingan Definisi Psikologi Sosial Menurut Tiga Ahli Utama

Ahli	Tahun	Inti Definisi	Penekanan Utama	Implikasi bagi Ilmu Pemerintahan
Gordon Allport	1954	Bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh kehadiran aktual, imajiner, atau tersirat orang lain	Individu sebagai unit analisis; kehadiran orang lain (nyata maupun dibayangkan)	Menjelaskan mengapa birokrat berperilaku berbeda saat diawasi atasan versus saat bekerja sendiri
Baron dan Byrne	2004	Pengaruh sosial terhadap perilaku dan kognisi individu, mencakup pemrosesan informasi sosial, pembentukan sikap, dan respons terhadap tekanan kelompok	Kognisi sosial dan dinamika sikap di bawah tekanan sosial	Menganalisis bagaimana tekanan kelompok partai memengaruhi suara legislator dalam sidang
David Myers	2010	Studi ilmiah tentang bagaimana orang berpikir, memengaruhi, dan berhubungan satu sama lain	Dimensi ilmiah; tiga proses: berpikir, memengaruhi, berhubungan	Merancang kebijakan berbasis bukti dengan mempertimbangkan dinamika opini publik

[Gambar 1.1 belum diunggah]

Gambar 1.1 Diagram lingkaran bertumpuk (Venn) tiga lingkaran berlabel 'Allport 1954', 'Baron & Byrne 2004', dan 'Myers 2010'; irisan ketiga lingkaran diberi label 'Inti Bersama: Individu dalam Konteks Sosial'; setiap lingkaran mencantumkan kata kunci penekanan masin

ANALOGI

Bayangkan Anda sedang mengisi formulir pengaduan layanan publik secara daring. Ketika mengisi sendirian di rumah, Anda mungkin menulis keluhan dengan jujur dan tajam. Namun, ketika mengisi formulir yang sama di kantor kelurahan dengan petugas berdiri di sebelah Anda, isi tulisan Anda bisa berubah menjadi lebih sopan atau bahkan lebih pendek. Perubahan perilaku itu terjadi bukan karena formulirnya berbeda, melainkan karena kehadiran orang lain, sesuai definisi Allport, memengaruhi pikiran dan tindakan Anda. Itulah inti dari apa yang dipelajari psikologi sosial.

CONTOH

Seorang mahasiswa Ilmu Pemerintahan di Makassar diminta menilai kinerja kepala daerahnya dalam sebuah survei kelompok. Langkah pertama: ia memproses informasi yang tersedia tentang kepala daerah tersebut (kognisi sosial, sesuai definisi Baron dan Byrne). Langkah kedua: ia membentuk sikap positif atau negatif berdasarkan pengalaman dan nilai yang ia pegang. Langkah ketiga: ketika mengisi survei bersama teman-teman satu kelompok yang mayoritas berpendapat positif, ia merasakan tekanan sosial yang bisa mengubah penilaiannya. Proses tiga tahap ini, yakni berpikir, dipengaruhi, dan berhubungan, mencerminkan persis ketiga sumbu yang disebut Myers (2010) dalam definisinya.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi umum di kalangan mahasiswa baru adalah anggapan bahwa psikologi sosial sama dengan sosiologi, atau bahwa keduanya dapat dipertukarkan karena sama-sama membahas masyarakat. Pembetulanannya: psikologi sosial selalu menempatkan individu sebagai unit analisis utama dan bertanya 'mengapa individu ini berperilaku demikian dalam konteks sosialnya?', sedangkan sosiologi menganalisis struktur, institusi, dan pola kelompok secara keseluruhan tanpa harus merujuk pada individu tertentu. Miskonsepsi kedua adalah anggapan bahwa 'kehadiran imajiner' dalam definisi Allport adalah hal yang tidak ilmiah atau mengada-ada. Faktanya, penelitian eksperimental telah membuktikan bahwa seseorang dapat mengubah perilakunya hanya dengan membayangkan reaksi orang

yang ia hormati, misalnya seorang camat yang mengambil keputusan dengan membayangkan bagaimana menternya akan menilai keputusan tersebut, meskipun sang menteri tidak hadir secara fisik.

B. Ruang Lingkup dan Objek Kajian Psikologi Sosial

Psikologi sosial memiliki ruang lingkup kajian yang bertumpu pada empat domain utama: persepsi sosial, kognisi sosial, sikap, dan pengaruh sosial. Persepsi sosial merujuk pada proses individu membentuk kesan dan penilaian terhadap orang lain berdasarkan isyarat verbal maupun nonverbal, misalnya bagaimana seorang camat di Papua Barat dinilai warganya hanya dari cara ia berbicara di forum musyawarah kampung. Kognisi sosial adalah cara individu memproses, menyimpan, dan menggunakan informasi tentang dunia sosialnya, mencakup skema kognitif, stereotip, dan heuristik penilaian. Sikap mencakup evaluasi yang relatif stabil terhadap objek, orang, atau isu sosial dan merupakan prediktor penting perilaku politik warga. Pengaruh sosial menelaah bagaimana individu mengubah pikiran, perasaan, atau tindakannya karena keberadaan atau tekanan orang lain, mulai dari konformitas hingga kepatuhan pada otoritas pemerintah.

Keempat domain itu tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dalam satu sistem dinamis yang membentuk perilaku sosial individu. Seorang warga di Sulawesi Tenggara yang pertama kali menghadiri rapat RT (persepsi sosial) akan menyerap informasi tentang siapa yang berpengaruh di lingkungan itu (kognisi sosial), lalu membentuk sikap terhadap program pemerintah yang dibahas, dan akhirnya menyesuaikan pendapatnya mengikuti suara mayoritas (pengaruh sosial). Rantai proses ini menunjukkan bahwa objek kajian psikologi sosial bukan sekadar individu dalam isolasi, melainkan individu yang selalu terletak dalam konteks relasional dan situasional. Oleh karena itu, fenomena seperti polarisasi opini publik menjelang pilkada di Kawasan Timur Indonesia menjadi ladang kajian yang sangat relevan bagi disiplin ini.

Penting dipahami bahwa ruang lingkup psikologi sosial tidak identik dengan psikologi kepribadian maupun sosiologi, sebab fokusnya ada pada titik temu antara individu dan konteks sosialnya secara langsung. Psikologi kepribadian lebih tertarik pada sifat bawaan yang stabil, sedangkan sosiologi menelaah struktur dan institusi kolektif tanpa menelusuri proses psikologis individu. Psikologi sosial berada di antara keduanya: ia menggunakan kerangka psikologis untuk menjelaskan mengapa individu berperilaku berbeda ketika berada dalam kelompok dibanding ketika

sendirian. Pemahaman tentang batas ruang lingkup ini krusial agar mahasiswa ilmu pemerintahan dapat memilih kerangka analisis yang tepat ketika mengkaji kebijakan publik, partisipasi warga, atau dinamika birokrasi.

Tabel 1.2 Perbandingan Empat Domain Utama Ruang Lingkup Psikologi Sosial

Domain	Definisi Operasional	Contoh Fenomena Pemerintahan
Persepsi Sosial	Proses membentuk kesan dan penilaian terhadap orang lain berdasarkan isyarat sosial yang tersedia	Warga menilai kredibilitas kepala desa dari ekspresi wajah dan intonasi saat pidato
Kognisi Sosial	Proses mental dalam memproses dan menggunakan informasi tentang dunia sosial, termasuk skema dan stereotip	ASN menggunakan skema 'pejabat korup' saat membaca berita tanpa menelaah faktanya lebih lanjut
Sikap	Evaluasi yang relatif stabil terhadap objek, orang, kelompok, atau isu sosial yang mempengaruhi kecenderungan bertindak	Sikap negatif warga terhadap program e-government karena pengalaman buruk di masa lalu
Pengaruh Sosial	Proses perubahan pikiran, perasaan, atau perilaku individu akibat keberadaan atau tekanan orang lain	Anggota DPRD mengubah suaranya dalam rapat fraksi karena tekanan konformitas kelompok

[Gambar 1.2 belum diunggah]

Gambar 1.2 Diagram lingkaran berlapis (concentric circles) yang memperlihatkan posisi individu di pusat, dikelilingi lapisan domain persepsi sosial, kognisi sosial, sikap, dan pengaruh sosial secara berurutan dari dalam ke luar, dengan panah dua arah antarlapis untuk

ANALOGI

Bayangkan ruang lingkup psikologi sosial seperti kamera dengan empat lensa yang bisa diganti-ganti: lensa persepsi sosial memotret bagaimana wajah seseorang 'dibaca' orang lain, lensa kognisi sosial merekam cara otak menyortir informasi yang masuk, lensa sikap mengukur sudut pandang evaluatif fotografer, dan lensa pengaruh sosial menangkap bagaimana cahaya dari orang-orang sekitar mengubah hasil foto. Tidak ada satu lensa yang mampu memotret realitas sosial secara utuh; fotografer yang cakap harus tahu kapan mengganti lensa sesuai fenomena yang dihadapi. Mahasiswa ilmu pemerintahan perlu menguasai keempat lensa itu untuk menganalisis perilaku

warga dan aparaturnya secara komprehensif.

CONTOH

Perhatikan situasi bertahap berikut. Pertama, seorang pemilih muda di Kendari menonton debat calon wali kota dan segera membentuk kesan bahwa kandidat A 'lebih tegas' berdasarkan ekspresi wajah dan gerak tubuh (persepsi sosial). Kedua, ia kemudian mengaktifkan skema kognitif 'pemimpin kuat' yang sudah tersimpan dari pengalamannya, lalu secara otomatis mengabaikan data rekam jejak kandidat yang kontradiktif (kognisi sosial). Ketiga, berdasarkan proses itu ia membentuk sikap positif terhadap kandidat A dan berniat memilihnya. Keempat, ketika berdiskusi di grup WhatsApp keluarganya yang mayoritas mendukung kandidat B, ia akhirnya mengubah pernyataannya agar tidak berbeda sendiri (pengaruh sosial). Rantai empat langkah ini memperlihatkan bagaimana keempat domain bekerja secara berurutan dalam satu episode perilaku politik nyata.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi yang sering muncul adalah anggapan bahwa ruang lingkup psikologi sosial hanya mencakup pengaruh sosial atau tekanan kelompok saja, sehingga persepsi dan kognisi dianggap urusan psikologi kognitif murni yang tak berkaitan. Pembetulanannya: persepsi dan kognisi menjadi objek psikologi sosial justru karena keduanya selalu terbentuk dalam konteks sosial, bukan dalam ruang hampa. Skema kognitif tentang 'birokrat yang tidak responsif', misalnya, tidak lahir dari kerja otak sendirian, melainkan dibentuk oleh pengalaman interaksi sosial, narasi media, dan norma budaya setempat. Dengan demikian, psikologi sosial mengkaji dimensi sosial dari proses kognitif, bukan proses kognitif itu sendiri secara neurobiologis.

C. Batas Disiplin: Psikologi Sosial di Antara Ilmu Sosial Lain

Psikologi sosial kerap disalahpahami sebagai disiplin yang tumpang tindih sepenuhnya dengan sosiologi, psikologi klinis, atau antropologi. Padahal, setiap disiplin memiliki objek kajian dan metode yang berbeda meski sesekali berbagi topik yang sama. Psikologi sosial memusatkan perhatian pada individu sebagai unit analisis utama, khususnya bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu terbentuk dalam konteks hubungan antarpribadi dan kelompok. Fokus ini yang membedakannya secara tajam dari ilmu-ilmu sosial tetangganya, dan pemahaman

atas batas-batas tersebut menjadi landasan penting sebelum mahasiswa dapat menggunakan konsep psikologi sosial secara tepat dalam analisis pemerintahan dan kebijakan publik.

Sosiologi, sebagai disiplin yang paling sering dikacaukan dengan psikologi sosial, sesungguhnya bergerak pada level yang berbeda. Sosiologi menjadikan struktur sosial, institusi, dan masyarakat sebagai unit analisis utamanya. Ketika sosiologi bertanya mengapa angka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia lebih tinggi secara struktural, psikologi sosial justru bertanya bagaimana individu warga di wilayah itu mempersepsi kemiskinan, membentuk sikap terhadap program bantuan pemerintah, dan terpengaruh oleh norma kelompok dalam mengambil keputusan. Perbedaan level analisis inilah, bukan perbedaan topik, yang menjadi pembeda paling fundamental antara kedua disiplin tersebut [Hogg & Vaughan 2018]. Sementara itu, psikologi klinis memusatkan perhatian pada gangguan mental dan terapi individu dalam konteks klinis, bukan pada pengaruh sosial terhadap perilaku normal sehari-hari yang menjadi jantung psikologi sosial.

Antropologi sosial-budaya berbagi ketertarikan pada konteks budaya dengan psikologi sosial, tetapi antropologi cenderung menggunakan etnografi dan studi mendalam pada komunitas tertentu dalam rentang waktu panjang, serta menempatkan budaya sebagai penjelas utama perilaku. Psikologi sosial, sebaliknya, lebih banyak mengandalkan eksperimen, survei, dan metode kuantitatif untuk menguji hipotesis tentang proses psikologis yang berlaku lintas individu. Dalam konteks pemerintahan, perbedaan ini bermakna praktis: seorang analis kebijakan yang terlatih dalam psikologi sosial akan menguji secara empiris bagaimana framing pesan kebijakan mengubah persepsi dan sikap warga, bukan sekadar mendeskripsikan pola budaya setempat. Nilai adaptabilitas yang menjadi penciri ICHSA-N relevan di sini, sebab mahasiswa ilmu pemerintahan perlu mampu memilih kerangka disiplin yang paling tepat sesuai permasalahan yang dihadapi, bukan terpaku pada satu pendekatan tunggal [Franzoi 2016].

Posisi psikologi sosial yang berada di persimpangan antara psikologi dan ilmu-ilmu sosial lain justru menjadikannya alat analisis yang sangat berguna bagi mahasiswa ilmu pemerintahan. Ketika seorang pejabat daerah di Sulawesi atau Papua ingin memahami mengapa suatu kebijakan ditolak warga meski secara teknis sudah benar, ia memerlukan kerangka yang mampu menjembatani proses psikologis individual dengan dinamika sosial kelompok. Psikologi sosial menyediakan jembatan itu melalui konsep-konsep seperti persepsi sosial, kognisi sosial, dan pengaruh kelompok yang tidak ditawarkan secara utuh oleh satu disiplin tunggal mana pun. Dengan memahami batas-batas disiplin ini, mahasiswa dapat menghindarkan diri dari pencampuran konsep yang berbeda level analisisnya, sekaligus

mengembangkan kepekaan intelektual yang dibutuhkan untuk membaca fenomena pemerintahan secara multidimensi [Myers 2014].

Tabel 1.3 Perbandingan Psikologi Sosial dengan Disiplin Ilmu Sosial Lain

Aspek	Psikologi Sosial	Sosiologi	Psikologi Klinis	Antropologi Sosial-Budaya
Unit analisis utama	Individu dalam konteks sosial	Kelompok, struktur, dan institusi sosial	Individu dengan gangguan/disfungsi psikologis	Komunitas dan sistem budaya
Pertanyaan kunci	Bagaimana orang lain mempengaruhi pikiran dan perilaku individu?	Bagaimana struktur sosial membentuk pola kehidupan masyarakat?	Apa penyebab dan cara menangani gangguan mental individu?	Bagaimana budaya membentuk cara hidup suatu kelompok manusia?
Metode utama	Eksperimen, survei, meta-analisis	Survei skala besar, analisis data statistik, kajian historis	Asesmen klinis, studi kasus, psikoterapi	Etnografi, observasi partisipan, studi lapangan jangka panjang
Contoh terapan di pemerintahan	Menganalisis persepsi warga terhadap birokrat berdasarkan stereotipe	Mengkaji ketimpangan akses layanan publik antar kelas sosial	Menangani burnout aparatur sipil negara	Mendokumentasikan nilai adat dalam tata kelola pemerintahan lokal
Tokoh representatif	Gordon Allport, Leon Festinger, Stanley Milgram	Emile Durkheim, Max Weber, Auguste Comte	Sigmund Freud, Aaron Beck, Carl Rogers	Margaret Mead, Bronislaw Malinowski, Clifford Geertz

[Gambar 1.3 belum diunggah]

Gambar 1.3 Diagram lingkaran (Venn diagram) yang menunjukkan posisi psikologi sosial di persimpangan antara psikologi (kiri) dan ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi dan antropologi (kanan), dengan area irisan yang diberi label topik-topik bersama seperti perilaku kel

ANALOGI

Bayangkan empat dokter yang memeriksa satu pasien yang sama: dokter umum melihat kondisi fisik keseluruhan, dokter spesialis jiwa menggali gangguan mentalnya, ahli gizi meneliti pola makan keluarganya, dan dokter komunitas mengkaji kondisi lingkungan sosial tempat tinggalnya. Mereka semua memeriksa

orang yang sama, tetapi dengan lensa dan alat yang berbeda. Psikologi sosial adalah dokter komunitas dalam analogi ini: ia peduli pada bagaimana lingkungan sosial -- orang-orang di sekitar individu, norma kelompok, tekanan situasional -- membentuk pikiran dan perilaku individu tersebut, bukan gangguan patologisnya dan bukan pula struktur masyarakatnya secara keseluruhan.

CONTOH

Misalkan terjadi penolakan warga terhadap program vaksinasi di sebuah kabupaten terpencil di Nusa Tenggara Timur. Seorang sosiolog akan menanyakan: apakah penolakan ini berkorelasi dengan tingkat pendidikan atau struktur kelas sosial di wilayah itu? Seorang antropolog akan menggali: apakah ada sistem kepercayaan budaya atau ritual adat yang bertentangan dengan praktik vaksinasi? Seorang psikolog klinis akan bertanya: apakah ada individu dengan gangguan kecemasan yang memicu penolakan kelompok? Sementara seorang psikolog sosial akan bertanya: bagaimana persepsi warga terhadap petugas kesehatan terbentuk, apakah terjadi konformitas kelompok yang memperkuat penolakan, dan bagaimana framing pesan komunikasi pemerintah memengaruhi sikap individu warga? Empat pertanyaan berbeda ini bukan berarti empat disiplin itu saling bersaing, melainkan masing-masing memberikan irisan penjelasan yang saling melengkapi, dan mahasiswa ilmu pemerintahan perlu tahu kapan harus menggunakan lensa yang mana.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi yang paling umum adalah anggapan bahwa psikologi sosial dan sosiologi pada dasarnya mempelajari hal yang sama sehingga salah satunya tidak diperlukan. Pembetulannya terletak pada perbedaan level analisis: sosiologi bekerja dari atas ke bawah, dari struktur sosial menuju individu, sementara psikologi sosial bekerja dari bawah ke atas, dari proses psikologis individu menuju dampak sosialnya. Miskonsepsi kedua adalah anggapan bahwa psikologi sosial sama dengan psikologi klinis karena keduanya membahas perilaku manusia. Padahal psikologi klinis berurusan dengan kondisi disfungsional atau patologis, sedangkan psikologi sosial mengkaji perilaku individu yang normal dalam situasi sosial sehari-hari. Dalam konteks ilmu pemerintahan, mencampurkan keduanya dapat mengakibatkan analisis kebijakan yang keliru, misalnya dengan menganggap penolakan warga terhadap kebijakan sebagai masalah psikologis individual semata, padahal akarnya adalah proses kognisi sosial dan pengaruh norma kelompok yang sepenuhnya termasuk dalam domain psikologi sosial.

D. Perkembangan Historis: Dari Behaviorisme ke Kognitif-Sosial

Psikologi sosial sebagai disiplin ilmiah formal lahir pada penghujung abad ke-19, ditandai oleh eksperimen-eksperimen awal yang berusaha mengukur pengaruh kehadiran orang lain terhadap perilaku individu. Norman Triplett pada 1898 mencatat bahwa pembalap sepeda tampil lebih cepat ketika bersaing bersama orang lain dibandingkan sendirian, sebuah temuan yang kelak dikenal sebagai fasilitasi sosial. Dua buku teks psikologi sosial pertama terbit hampir bersamaan pada 1908, masing-masing ditulis oleh William McDougall dari perspektif insting dan Edward Ross dari perspektif sosiologis, menandai bahwa bidang ini sejak awal berdiri di persimpangan individu dan masyarakat. Fondasi awal ini penting dipahami oleh mahasiswa Ilmu Pemerintahan karena kebijakan publik pun pada dasarnya dirancang berdasarkan asumsi tentang bagaimana individu berperilaku dalam konteks sosial.

Memasuki dekade 1920-an hingga 1950-an, behaviorisme mendominasi psikologi Amerika dan membawa pengaruh kuat ke psikologi sosial. Behaviorisme, yang tokoh utamanya adalah John B. Watson dan B.F. Skinner, berpendirian bahwa perilaku manusia sepenuhnya dapat dijelaskan melalui pola stimulus-respons yang teramati dari luar, tanpa perlu merujuk pada proses mental yang tak tampak. Dalam logika ini, sikap, prasangka, atau kepatuhan terhadap norma dianggap sebagai hasil kondisioning dan penguatan berulang. Periode ini menghasilkan sejumlah riset klasik tentang propaganda, perubahan sikap, dan konformitas yang sangat relevan bagi studi pemerintahan, namun pendekatan ini dikritik karena mengabaikan peran aktif pikiran dalam membentuk respons sosial.

Titik balik besar terjadi pada 1950-an dan 1960-an ketika psikologi sosial mulai bergeser ke pendekatan kognitif-sosial, dipercepat oleh revolusi kognitif dalam psikologi secara keseluruhan. Leon Festinger memperkenalkan teori disonansi kognitif pada 1957, yang menjelaskan bahwa individu secara aktif merasakan ketidaknyamanan ketika keyakinan dan perilakunya bertentangan, lalu berupaya mengurangi ketegangan tersebut. Albert Bandura mengembangkan teori belajar sosial pada 1960-an, membuktikan bahwa manusia belajar dengan mengamati dan meniru orang lain, bukan semata melalui penguatan langsung. Stanley Milgram pada 1963 menunjukkan lewat eksperimen kepatuhan yang terkenal bahwa situasi sosial dan otoritas dapat mendorong individu melakukan tindakan yang bertentangan dengan nuraninya, sebuah temuan yang punya implikasi langsung bagi kajian birokrasi dan kekuasaan pemerintah. Ketiga aliran pemikiran ini membangun tradisi kognitif-sosial

yang menjadi arus utama psikologi sosial kontemporer, di mana pikiran, perasaan, dan perilaku dipandang saling membentuk dalam konteks sosial yang dinamis.

Perkembangan selanjutnya pada 1970-an hingga kini semakin memperkaya perspektif kognitif-sosial dengan memasukkan dimensi budaya, neurosains, dan komputasi. Psikologi sosial lintas budaya mulai mempertanyakan apakah temuan klasik yang berasal dari sampel Barat berlaku universal, sebuah pertanyaan yang sangat relevan di Kawasan Timur Indonesia dengan keragaman budaya dan nilai kolektivisme yang kuat. Pendekatan neurosains sosial memperlihatkan bahwa proses sosial seperti empati, kepercayaan, dan diskriminasi memiliki korelat neural yang dapat diukur. Seorang calon birokrat atau analis kebijakan di Sulawesi, Maluku, atau Papua perlu memahami lintasan historis ini agar tidak sekadar mengaplikasikan teori secara membabi-buta, melainkan mampu menganalisis apakah asumsi dasarnya sesuai dengan konteks lokal, sebuah sikap yang mencerminkan nilai adaptabilitas dan integritas dalam menjalankan pelayanan publik.

Tabel 1.4 Perbandingan Perspektif Behaviorisme dan Kognitif-Sosial dalam Psikologi Sosial

Dimensi Perbandingan	Behaviorisme	Kognitif-Sosial
Periode dominan	1920-an hingga 1950-an	1950-an hingga sekarang
Asumsi dasar tentang manusia	Pasif; perilaku adalah produk stimulus-respons dari lingkungan	Aktif; individu memproses informasi, menafsirkan, dan mengambil keputusan
Unit analisis utama	Perilaku yang teramati secara eksternal	Proses mental: persepsi, keyakinan, skema, dan emosi
Tokoh kunci	Watson, Skinner, Hull	Festinger, Bandura, Milgram, Fiske
Metode riset yang diutamakan	Eksperimen kondisioning, observasi perilaku terukur	Eksperimen laboratorium, survei sikap, riset kognitif
Contoh terapan di pemerintahan	Kampanye kepatuhan pajak berbasis insentif dan hukuman	Komunikasi kebijakan yang memperhitungkan framing dan bias kognitif warga
Kelemahan utama	Mengabaikan pikiran; tidak mampu menjelaskan perilaku kompleks	Rentan pada bias sampel Barat; sulit digeneralisasi lintas budaya

[Gambar 1.4 belum diunggah]

Gambar 1.4 Garis waktu horizontal perkembangan psikologi sosial: mulai dari eksperimen Triplett 1898, penerbitan buku teks pertama 1908, dominasi behaviorisme 1920-1950, eksperimen Festinger tentang disonansi kognitif 1957, eksperimen Milgram 1963, munculnya psikologi

ANALOGI

Bayangkan sebuah warung kopi di Makassar yang dulu hanya mencatat pesanan pelanggan berdasarkan apa yang tampak, yaitu minuman apa yang dipesan dan seberapa sering pelanggan datang, tanpa pernah bertanya mengapa. Itulah cara kerja behaviorisme: fokus pada perilaku yang bisa dilihat dan dicatat. Lalu sang pemilik warung mulai memperhatikan bahwa pelanggan memilih tempat duduk, topik obrolan, dan waktu kunjungan berdasarkan suasana hati, ekspektasi sosial, dan persepsi terhadap tetangga mejanya. Pemilik warung yang lebih cermat ini bekerja seperti psikolog sosial kognitif: ia tidak hanya merekam perilaku, tetapi berusaha memahami proses berpikir di baliknya.

CONTOH

Perhatikan fenomena hoaks yang menyebar menjelang pemilihan kepala daerah di sejumlah wilayah Kawasan Timur Indonesia. Pendekatan behavioris akan menjelaskannya sebagai hasil penguatan berulang: warga yang menyebarkan hoaks mendapat respons sosial berupa perhatian dan penerimaan kelompok, sehingga perilaku itu terus berulang. Pendekatan kognitif-sosial akan menelusurinya lebih dalam: warga mengalami konfirmasi bias, yaitu kecenderungan memilih informasi yang sesuai dengan keyakinan awal mereka tentang kandidat tertentu, kemudian meniru perilaku tokoh-tokoh berpengaruh di lingkungan mereka sesuai teori belajar sosial Bandura. Analisis kebijakan yang komprehensif membutuhkan kedua lapis penjelasan ini: lapisan perilaku yang teramati dan lapisan proses kognitif yang mendasarinya.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi yang sangat umum di kalangan mahasiswa adalah anggapan bahwa behaviorisme sudah usang dan tidak relevan, sehingga cukup mempelajari pendekatan kognitif-sosial saja. Pembetulanannya: behaviorisme tidak salah secara keseluruhan, melainkan tidak lengkap. Banyak program perubahan perilaku masyarakat, seperti insentif kepatuhan pajak, sanksi pelanggaran perda, atau program penghargaan pelayanan publik, masih bekerja di atas prinsip-prinsip behavioristik yang terbukti efektif. Psikologi sosial modern tidak mengganti behaviorisme dengan pendekatan kognitif-sosial, melainkan melengkapinya: untuk memahami perilaku sosial yang kompleks di ruang pemerintahan dan masyarakat, seorang analis kebijakan perlu mengintegrasikan keduanya secara kritis.

RANGKUMAN

- Psikologi sosial didefinisikan secara beragam oleh para ahli, tetapi semua rumusan sepakat bahwa disiplin ini mengkaji pengaruh situasi sosial terhadap pikiran, perasaan, dan perilaku individu.
- Ruang lingkup psikologi sosial mencakup persepsi sosial, kognisi sosial, sikap, dan pengaruh sosial sebagai konsep dasar yang saling terkait dan dapat diidentifikasi dalam fenomena sehari-hari termasuk di Kawasan Timur Indonesia.
- Psikologi sosial berbeda dari sosiologi, psikologi klinis, dan antropologi terutama pada unit analisisnya: individu dalam konteks sosial, bukan struktur sosial atau gangguan intrapsikis.
- Perkembangan historis psikologi sosial berjalan dari tradisi behaviorisme yang menekankan stimulus-respons menuju pendekatan kognitif-sosial yang menempatkan interpretasi dan skema mental sebagai penentu perilaku.
- Pemahaman atas konsep dasar dan perspektif teoretis psikologi sosial menjadi fondasi yang akan terus dibangun pada pertemuan-pertemuan berikutnya, mulai dari teori atribusi, konformitas, hingga analisis perilaku pemilih lokal.

REFERENSI

- Myers, D. G. (2013). *Social Psychology*. 11th Edition. McGraw-Hill.
- Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2016). *Social Psychology*. 9th Edition. Pearson.
- Hogg, M. A., & Vaughan, G. M. (2018). *Social Psychology*. 8th Edition. Pearson.
- Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2006). *Social Psychology*. 12th Edition. Pearson Prentice Hall.
- Cialdini, R. B. (2009). *Influence: Science and Practice*. 5th Edition. Pearson.
- Sarwono, S. W. (2015). *Psikologi Sosial*. Edisi 2. Salemba Humanika.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2022. *Standar Nasional Pendidikan (Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi)*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2024. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Outcome Based Education (OBE)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- Norris, Pippa. 2011. *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Putnam, Robert D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon and Schuster.

Sears, David O., Jonathan L. Freedman, dan L. Anne Peplau. 1994. Psikologi Sosial.
Terjemahan Michael Adryanto. Jakarta: Erlangga.

Myers (2013); Sarwono (2015); Aronson, Wilson, & Akert (2016); Sears, Freedman, & Peplau (1994).

PERTEMUAN 2

Sejarah dan Perspektif Teori Psikologi Sosial

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:

7. Menyebutkan minimal 4 konsep dasar psikologi sosial (persepsi sosial, kognisi sosial, sikap, pengaruh sosial) beserta definisi operasionalnya dalam peta konsep tertulis
8. Membandingkan minimal 2 perspektif teoretis psikologi sosial (behaviorisme vs. kognitif-sosial) dalam tabel perbedaan asumsi dasar, tokoh, dan contoh terapan
9. Memberikan 1 contoh nyata fenomena kognisi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang dikaitkan dengan teori yang dipelajari
10. Menelusuri perkembangan historis psikologi sosial secara kronologis dari era klasik behaviorisme, gestalt, hingga revolusi kognitif-sosial abad ke-20
11. Membandingkan asumsi dasar minimal tiga perspektif teori psikologi sosial (behaviorisme, teori lapangan/Gestalt, dan kognitif-sosial) berdasarkan objek dan metode analisisnya
12. Mengevaluasi kekuatan dan keterbatasan masing-masing perspektif teoritis dalam menjelaskan perilaku sosial manusia
13. Mengaitkan perspektif teori yang dipelajari dengan kasus perilaku sosial kontemporer di Indonesia sebagai latihan penerapan awal
14. Menunjukkan kejujuran ilmiah dalam mengutip dan mengatribusikan gagasan tokoh-tokoh psikologi sosial sesuai dengan sumber yang valid

Pendahuluan

Pada pertemuan pertama, mahasiswa telah diperkenalkan pada ruang lingkup psikologi sosial dan relevansinya bagi ilmu pemerintahan. Pertemuan kedua ini melanjutkan fondasi tersebut dengan mengajak mahasiswa menelusuri dari mana perspektif-perspektif besar psikologi sosial bermula, bagaimana masing-masing tumbuh sebagai respons terhadap keterbatasan pendahulunya, dan mengapa perbedaan asumsi antar-perspektif itu masih terasa dalam riset serta praktik kebijakan publik hingga hari ini. Tanpa memahami akar historis dan peta teoritisnya, seorang mahasiswa ilmu pemerintahan akan kesulitan menilai secara kritis penjelasan-penjelasan yang ditawarkan oleh literatur tentang perilaku pemilih, konformitas warga, maupun dinamika opini publik yang akan dikaji pada

pertemuan-pertemuan

berikutnya.

Pemahaman yang dibangun di sini juga melatih kejujuran ilmiah: setiap gagasan yang dikutip dan setiap klaim teoretis yang diajukan harus dapat ditelusuri ke sumbernya yang valid, sebuah sikap yang mencerminkan nilai Integrity dalam tradisi akademik ICHSA-N. Melalui diskusi panel simulasi, mahasiswa diajak tidak sekadar merekam fakta sejarah, melainkan melatih kemampuan menganalisis asumsi, membandingkan perspektif, dan mengevaluasi kekuatan serta keterbatasan teori secara argumentatif dan kolaboratif.

A. Konsep Dasar Psikologi Sosial dan Peta Konsepnya

Psikologi sosial adalah cabang ilmu psikologi yang mengkaji bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh kehadiran nyata, bayangan, maupun kehadiran tersirat orang lain. Definisi ini, yang pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Gordon Allport pada 1954, menegaskan bahwa unit analisis psikologi sosial bukan kelompok sebagai entitas abstrak, melainkan individu yang berinteraksi dalam konteks sosial. Bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan, pemahaman ini sangat relevan karena setiap kebijakan publik pada akhirnya bekerja melalui mekanisme psikologis: warga mempersepsi kebijakan, membentuk sikap terhadapnya, lalu memutuskan apakah akan mematuhi atau menolaknya. Dengan demikian, fondasi psikologi sosial memberikan kerangka ilmiah untuk menganalisis dinamika relasi antara pemerintah dan masyarakat.

Empat konsep dasar yang menjadi tulang punggung disiplin ini adalah persepsi sosial, kognisi sosial, sikap, dan pengaruh sosial. Persepsi sosial merujuk pada proses di mana individu mengumpulkan dan menafsirkan informasi tentang orang lain guna membentuk kesan atau penilaian terhadap mereka. Kognisi sosial adalah proses mental yang lebih luas, mencakup cara individu menyimpan, mengolah, dan menggunakan informasi tentang dunia sosialnya, termasuk penggunaan skema, stereotip, dan heuristik. Sikap didefinisikan sebagai kecenderungan evaluatif yang relatif stabil terhadap suatu objek, orang, atau isu, yang terdiri atas komponen kognitif, afektif, dan konatif. Pengaruh sosial meliputi berbagai mekanisme di mana perilaku, opini, atau emosi individu berubah akibat interaksinya dengan orang lain, baik melalui konformitas, kepatuhan, maupun internalisasi nilai.

Keempat konsep tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling mengait dalam sebuah sistem. Persepsi sosial menjadi pintu masuk: individu terlebih dahulu

membangun kesan tentang aktor sosial di sekitarnya. Kesan itu kemudian diolah melalui proses kognisi sosial, di mana skema mental yang sudah ada sebelumnya menentukan informasi mana yang diperhatikan dan mana yang diabaikan. Hasil pengolahan kognitif ini secara bertahap membentuk sikap, yang pada gilirannya menjadi prediktor paling langsung terhadap intensi dan perilaku. Pengaruh sosial kemudian bekerja pada semua lapisan proses tersebut, baik memodifikasi persepsi awal, mengubah skema kognitif, maupun menggeser sikap yang sudah terbentuk, sehingga siklus ini bersifat dinamis dan berulang.

Dalam konteks kajian pemerintahan di Kawasan Timur Indonesia, keempat konsep ini dapat langsung dioperasionalkan. Ketika pemerintah daerah meluncurkan program vaksinasi atau kebijakan pemekaran wilayah, warga tidak hanya bereaksi terhadap isi kebijakan, tetapi terhadap persepsi mereka tentang niat pemerintah, skema kognitif mereka tentang lembaga negara, sikap kepercayaan atau ketidakpercayaan yang sudah lama terbentuk, serta tekanan pengaruh sosial dari tokoh adat dan komunitas lokal. Menganalisis keempat faktor ini secara bersamaan jauh lebih eksplanatif daripada hanya menggambarkan tingkat kepatuhan masyarakat secara statistik. Inilah nilai tambah psikologi sosial sebagai alat analisis bagi calon aparatur pemerintahan yang harus mampu merancang intervensi kebijakan berbasis bukti ilmu perilaku.

Tabel 2.1 Empat Konsep Dasar Psikologi Sosial: Definisi Operasional dan Contoh Terapan dalam Konteks Pemerintahan

Konsep	Definisi Operasional	Komponen Utama	Contoh Terapan dalam Konteks Pemerintahan
Persepsi Sosial	Proses mengumpulkan dan menafsirkan informasi tentang orang lain untuk membentuk kesan atau penilaian	Kesan pertama, atribusi kausal, efek halo	Warga menilai kredibilitas kepala daerah berdasarkan penampilan dan gaya komunikasi dalam forum musrenbang
Kognisi Sosial	Proses mental menyimpan, mengolah, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial melalui skema dan heuristik	Skema, stereotip, heuristik ketersediaan, bias konfirmasi	ASN menggunakan stereotip tentang kelompok etnis tertentu saat merancang program pemberdayaan masyarakat
Sikap	Kecenderungan evaluatif yang relatif	Komponen kognitif, afektif, dan konatif	Sikap warga terhadap e-government:

Konsep	Definisi Operasional	Komponen Utama	Contoh Terapan dalam Konteks Pemerintahan
	stabil terhadap suatu objek, orang, atau isu kebijakan		percaya pada sistem (kognitif), merasa nyaman menggunakannya (afektif), dan berniat mendaftarkan diri (konatif)
Pengaruh Sosial	Mekanisme perubahan pikiran, perasaan, atau perilaku individu akibat interaksi dengan orang lain atau kelompok	Konformitas, kepatuhan, internalisasi, obedience	Tokoh agama atau adat yang mendukung program pemerintah meningkatkan partisipasi warga melalui mekanisme pengaruh normatif

[Gambar 2.1 belum diunggah]

Gambar 2.1 Diagram peta konsep berbentuk lingkaran konsentris atau jaringan simpul: simpul pusat bertuliskan 'Psikologi Sosial', empat simpul utama (Persepsi Sosial, Kognisi Sosial, Sikap, Pengaruh Sosial) dihubungkan dengan panah dua arah ke simpul pusat, serta pan

ANALOGI

Bayangkan Anda baru tiba di sebuah kantor kelurahan yang belum pernah Anda kunjungi. Dalam hitungan detik, Anda sudah membentuk kesan tentang petugas di balik meja (persepsi sosial). Otak Anda lalu mencocokkan kesan itu dengan pengalaman sebelumnya tentang 'pegawai pemerintah' yang tersimpan sebagai skema mental (kognisi sosial). Berdasarkan pencocokan itu, muncul rasa percaya atau curiga yang membentuk sikap Anda terhadap petugas tersebut (sikap). Ketika rekan di sebelah Anda berbisik 'orang sini ramah kok, santai saja,' tanpa sadar Anda mulai ikut rileks dan bersikap lebih terbuka (pengaruh sosial). Itulah keempat konsep dasar bekerja secara berurutan dalam satu episode interaksi biasa.

CONTOH

Kasus program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di sebuah kabupaten di Sulawesi Tenggara dapat digunakan sebagai ilustrasi bertahap. Tahap pertama, persepsi sosial: warga melihat petugas Puskesmas datang ke desa dengan seragam dan berkas. Sebagian warga segera mempersepsi kedatangan itu sebagai 'orang pemerintah yang

mau mendata ulang,' suatu kesan yang terbentuk dalam hitungan detik berdasarkan isyarat penampilan. Tahap kedua, kognisi sosial: kesan itu diproses melalui skema kognitif warga tentang 'pendataan pemerintah,' yang bagi sebagian warga dikaitkan dengan pengalaman masa lalu soal pajak atau penertiban, sehingga muncul kecurigaan meskipun program KIS sejatinya bersifat bantuan. Tahap ketiga, sikap: hasil pengolahan kognitif yang didominasi kecurigaan menghasilkan sikap negatif terhadap program, yang tampak dari rendahnya antusiasme mendaftarkan diri. Tahap keempat, pengaruh sosial: ketika ketua RT dan tokoh agama setempat secara terbuka mendukung program dan mendampingi warga mendaftar, terjadi perubahan sikap melalui mekanisme pengaruh normatif dan informasional. Contoh ini menunjukkan bahwa kegagalan atau keberhasilan program pemerintah sering kali bukan soal kualitas teknisnya, melainkan soal bagaimana keempat proses psikologis sosial ini dikelola oleh para pelaksana kebijakan.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi yang sangat umum di kalangan mahasiswa adalah menyamakan sikap dengan perilaku secara langsung, seolah-olah individu yang memiliki sikap positif terhadap suatu kebijakan pasti akan berperilaku sesuai dengan sikap itu. Pembetulanannya: sikap dan perilaku adalah dua konstruk yang berbeda. Hubungan keduanya dimediasi oleh banyak faktor, termasuk norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, dan tekanan situasional, sebagaimana dijelaskan dalam Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) oleh Ajzen [Franzoi 2009]. Seorang warga bisa memiliki sikap positif terhadap program e-voting tetapi tetap tidak berpartisipasi karena tidak memiliki akses internet atau karena tekanan sosial dari lingkungannya yang skeptis terhadap teknologi. Memahami perbedaan ini penting agar mahasiswa Ilmu Pemerintahan tidak merancang intervensi kebijakan yang hanya menargetkan perubahan sikap tanpa mempertimbangkan faktor struktural dan sosial yang menentukan apakah sikap itu akhirnya terwujud dalam perilaku nyata.

B. Perkembangan Historis Psikologi Sosial: Era Klasik hingga Revolusi Kognitif

Psikologi sosial sebagai disiplin ilmu mandiri mulai terbentuk pada penghujung abad ke-19, ketika para ilmuwan mulai mempertanyakan bagaimana kelompok dan lingkungan sosial membentuk perilaku individu. Norman Triplett pada tahun 1898 melakukan eksperimen pertama yang tercatat dalam psikologi sosial, mengamati bahwa pembalap sepeda tampil lebih cepat ketika bersama orang lain dibandingkan

saat sendirian -- fenomena yang kelak dikenal sebagai fasilitasi sosial. Temuan ini membuka pintu bagi pendekatan empiris terhadap pertanyaan-pertanyaan sosial yang sebelumnya hanya dijawab secara filosofis. Terbitnya dua buku teks berjudul sama *Social Psychology* pada tahun 1908 oleh William McDougall dan Edward Ross menandai pengakuan resmi psikologi sosial sebagai bidang kajian tersendiri, meskipun keduanya masih menekankan insting biologis dan konformitas kolektif.

Memasuki awal abad ke-20, aliran behaviorisme yang dipelopori John B. Watson mendominasi psikologi Amerika Serikat dengan asumsi bahwa perilaku manusia sepenuhnya dapat dijelaskan melalui pola stimulus-respons yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Dalam konteks psikologi sosial, behaviorisme mendorong studi eksperimental tentang penguatan sosial, imitasi, dan pengondisian dalam lingkungan kelompok. Namun pada periode yang sama, para psikolog Gestalt asal Jerman -- terutama Kurt Lewin yang kemudian berpindah ke Amerika Serikat -- menawarkan perspektif yang berbeda secara mendasar: perilaku individu tidak dapat dipahami terpisah dari medan psikologis (*psychological field*) tempat individu itu berada. Lewin merumuskan persamaan ikonik $B = f(P, E)$, menegaskan bahwa perilaku (B) merupakan fungsi dari interaksi antara pribadi (P) dan lingkungannya (E), dan melalui penelitian aksi (*action research*) ia meletakkan fondasi bagi studi kepemimpinan, dinamika kelompok, dan perubahan sosial yang sangat relevan bagi kajian ilmu pemerintahan.

Setelah Perang Dunia II, pertanyaan tentang bagaimana propaganda Nazi mampu menggerakkan jutaan orang untuk melakukan kekejaman massal mendorong lonjakan besar penelitian psikologi sosial, terutama di Amerika Serikat. Studi-studi klasik seperti eksperimen konformitas Solomon Asch (1951), eksperimen kepatuhan Stanley Milgram (1963), dan penelitian prasangka sosial oleh Gordon Allport menjadi tonggak penting yang menunjukkan betapa kuatnya tekanan sosial terhadap penilaian dan tindakan individu. Periode ini semakin memperjelas bahwa pendekatan behavioristik tidak cukup untuk menjelaskan kompleksitas penalaran moral dan pengambilan keputusan sosial. Landasan inilah yang menyiapkan panggung bagi revolusi kognitif.

Revolusi kognitif-sosial mencapai puncaknya pada dekade 1960-an hingga 1980-an, ketika para peneliti seperti Albert Bandura, Leon Festinger, dan Harold Kelley menggeser fokus dari perilaku yang teramati ke proses mental yang mendasarinya -- cara individu memproses informasi sosial, membentuk atribusi, dan mengalami disonansi kognitif. Bandura secara khusus menunjukkan melalui eksperimen Bobo Doll (1961) bahwa manusia belajar melalui observasi dan representasi kognitif, bukan semata-mata melalui penguatan langsung seperti yang diklaim behaviorisme. Revolusi ini menghasilkan teori-teori yang kini menjadi inti psikologi sosial modern,

termasuk teori atribusi, kognisi sosial, dan teori identitas sosial. Bagi mahasiswa ilmu pemerintahan, pemahaman atas lintasan sejarah ini sangat penting karena menjelaskan mengapa kebijakan publik yang efektif tidak cukup hanya mengatur insentif dan sanksi (logika behavioristik), tetapi juga harus memperhitungkan persepsi, keyakinan, dan makna yang dikonstruksi warga terhadap kebijakan tersebut.

Tabel 2.2 Tonggak Sejarah Perkembangan Psikologi Sosial dari Era Klasik hingga Revolusi Kognitif

Periode	Aliran/Tokoh Utama	Asumsi Inti	Kontribusi Kunci
Akhir abad ke-19 (1890-an)	Norman Triplett; William McDougall; Edward Ross	Perilaku sosial dapat diselidiki secara empiris; insting dan konformitas kolektif mempengaruhi individu	Eksperimen fasilitasi sosial pertama (1898); dua buku teks Social Psychology (1908) sebagai penanda kelahiran disiplin
Awal abad ke-20 (1900-1930-an)	John B. Watson (Behaviorisme)	Perilaku adalah produk stimulus-respons yang dapat diukur; proses mental tidak relevan secara ilmiah	Mendorong metode eksperimen ketat; studi penguatan sosial dan pengondisian dalam kelompok
1930-1940-an	Kurt Lewin (Gestalt/Teori Lapangan)	Perilaku = fungsi (Pribadi x Lingkungan); persepsi terhadap medan sosial menentukan tindakan	Rumus $B=f(P,E)$; penelitian aksi; dinamika kelompok; gaya kepemimpinan demokratis vs. otoriter
Pasca-PD II (1950-1960-an)	Solomon Asch; Stanley Milgram; Gordon Allport	Tekanan sosial dapat mengesampingkan penilaian pribadi; prasangka terbentuk secara kognitif dan sosial	Eksperimen konformitas; eksperimen kepatuhan; teori prasangka dan kontak antar-kelompok
Revolusi Kognitif (1960-1980-an)	Albert Bandura; Leon Festinger; Harold Kelley	Proses mental (persepsi, atribusi, representasi) adalah penentu utama perilaku sosial	Teori pembelajaran sosial; teori disonansi kognitif; teori atribusi; kognisi sosial sebagai inti disiplin

[Gambar 2.2 belum diunggah]

Gambar 2.2 Dosen menyiapkan diagram garis waktu horizontal (timeline) yang membentang dari 1898 hingga 1980-an. Setiap tonggak utama (Triplett 1898, McDougall/Ross 1908, Watson 1913, Lewin 1935/1951, Asch 1951, Milgram 1963, Bandura 1963, Festinger 1957) ditandai de

ANALOGI

Perkembangan psikologi sosial dapat dianalogikan dengan evolusi sistem pemerintahan di sebuah negara: mula-mula pemerintah hanya memperhatikan tindakan warga yang tampak dan dapat dihukum (behaviorisme -- seperti negara yang hanya mengandalkan hukum dan sanksi), lalu berkembang memahami bahwa konteks sosial dan kelembagaan membentuk pilihan warga (Gestalt/teori lapangan -- seperti pendekatan kebijakan berbasis komunitas), dan akhirnya menyadari bahwa opini, persepsi, dan kepercayaan publik adalah faktor penentu keberhasilan kebijakan (revolusi kognitif -- seperti pemerintah modern yang berinvestasi pada komunikasi publik dan literasi kebijakan).

CONTOH

Perhatikan fenomena rendahnya partisipasi pemilih di beberapa daerah terpencil Kawasan Timur Indonesia pada Pemilu 2024. Pendekatan behavioristik akan menganalisisnya dari sisi insentif dan hambatan fisik: jarak TPS, tidak ada hari libur, atau tidak ada sanksi bagi golput. Pendekatan teori lapangan Lewin akan menambahkan dimensi medan sosial: apakah tokoh adat atau kepala desa mendukung atau menghambat partisipasi, bagaimana kohesi komunitas membentuk norma memilih atau tidak memilih. Pendekatan kognitif-sosial kemudian menelaah lebih dalam: bagaimana warga memproses informasi tentang kandidat, apakah mereka memiliki atribusi internal ('suara saya tidak berarti') atau eksternal ('sistem ini tidak mewakili kami'), dan bagaimana disonansi kognitif antara nilai kewarganegaraan dan pengalaman kekecewaan politik memengaruhi keputusan akhir mereka. Contoh ini menunjukkan bahwa setiap era teori memberi lapisan penjelasan yang berbeda dan saling melengkapi, bukan saling meniadakan.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi yang sering muncul adalah anggapan bahwa perkembangan teori psikologi sosial bersifat linier dan kumulatif: behaviorisme dianggap 'salah' lalu digantikan sepenuhnya oleh teori kognitif yang 'benar'. Pembetulanannya adalah bahwa setiap perspektif lahir dari pertanyaan penelitian dan konteks sejarah yang spesifik, dan masing-masing tetap memiliki kekuatan penjelas pada domain tertentu. Behaviorisme masih relevan dalam perancangan sistem insentif kebijakan publik; teori lapangan Lewin masih digunakan dalam analisis dinamika organisasi

pemerintahan; sementara pendekatan kognitif-sosial diperlukan untuk memahami pembentukan opini dan perilaku memilih. Mahasiswa ilmu pemerintahan yang jujur secara ilmiah -- sesuai nilai Integrity dalam ICHSA-N -- tidak boleh mendiskreditkan satu perspektif hanya karena perspektif lain lebih populer saat ini, melainkan harus mengkaji sumber asli dan mengatribusikan kontribusi setiap tokoh secara tepat dan proporsional.

C. Perbandingan Tiga Perspektif Teori: Asumsi, Metode, dan Tokoh

Tiga perspektif besar yang membentuk fondasi psikologi sosial modern — behaviorisme, teori lapangan atau Gestalt, dan kognitif-sosial — tidak saling menggantikan, melainkan masing-masing menawarkan lensa berbeda untuk membaca perilaku manusia dalam konteks sosial. Behaviorisme, yang dikembangkan John B. Watson dan kemudian diperluas B.F. Skinner, berpendirian bahwa perilaku sosial merupakan hasil langsung dari stimulus lingkungan dan konsekuensi yang menyertainya, sehingga hanya respons yang dapat diamati secara objektiflah yang layak menjadi objek ilmu. Teori lapangan Kurt Lewin bergerak dari asumsi berbeda: perilaku seseorang pada setiap saat adalah fungsi dari keseluruhan medan psikologis — gabungan antara pribadi (P) dan lingkungan (E) dalam rumus $B = f(P,E)$ — sehingga makna subjektif individu terhadap situasi jauh lebih penting daripada stimulus fisik semata. Kognitif-sosial, yang antara lain ditopang Albert Bandura dan Leon Festinger, melangkah lebih jauh dengan menegaskan bahwa manusia bukan sekadar organisme reaktif, melainkan aktor yang secara aktif memproses informasi, membangun representasi mental, dan mengatur perilakunya sendiri melalui mekanisme seperti efikasi diri dan disonansi kognitif.

Perbedaan asumsi dasar ketiga perspektif ini berimbas langsung pada metode yang mereka andalkan. Behaviorisme sangat bergantung pada eksperimen laboratorium terkontrol dan pengukuran respons yang dapat dikuantifikasi, karena proses mental dianggap kotak hitam yang tidak perlu dan tidak mungkin diakses. Teori lapangan menggunakan eksperimen lapangan serta wawancara mendalam untuk menangkap struktur kognitif individu dalam konteks kelompok nyata — inilah mengapa Lewin dikenal sebagai pelopor action research yang relevan untuk studi komunitas dan kebijakan publik. Perspektif kognitif-sosial menggabungkan eksperimen laboratorium dengan metode pengukuran kognitif seperti survei sikap dan pengkodean observasi perilaku, seraya membuka pintu bagi pendekatan kualitatif untuk memahami representasi sosial. Bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan, kesadaran akan perbedaan

metodologis ini penting karena pilihan perspektif akan menentukan bagaimana mereka merancang kajian partisipasi warga, kepatuhan terhadap kebijakan, atau dinamika opini publik di Kawasan Timur Indonesia.

Ketiga perspektif ini juga berbeda dalam mendefinisikan unit analisis perilaku sosial. Behaviorisme menempatkan unit analisis pada pasangan stimulus-respons yang dapat diukur, sehingga kognisi dan emosi dianggap perantara yang tak perlu diperhitungkan secara eksplisit. Teori lapangan menempatkan unit analisis pada medan atau situasi total yang dipersepsi individu, menjadikan kelompok dan norma sosial sebagai kekuatan nyata yang membentuk ruang gerak psikologis seseorang. Kognitif-sosial memandang unit analisis sebagai interaksi resiprokal antara individu, perilaku, dan lingkungan — dikenal sebagai determinisme resiprokal — yang membuat proses belajar observasional dan regulasi diri menjadi inti penjelasan. Memahami perbedaan unit analisis ini membantu mahasiswa menghindari jebakan reduksionisme, yaitu menjelaskan fenomena kompleks seperti polarisasi politik atau kepatuhan birokrasi hanya dari satu sudut pandang saja, alih-alih mengintegrasikan beberapa perspektif secara kritis dan jujur dalam mengutip gagasan tokoh-tokoh tersebut sesuai sumber yang valid [Baron & Byrne 2004; Myers 2013; Aronson et al. 2016].

Tabel 2.3 Perbandingan Tiga Perspektif Teori Psikologi Sosial

Dimensi Pembeding	Behaviorisme	Teori Lapangan / Gestalt	Kognitif-Sosial
Asumsi dasar	Perilaku ditentukan oleh stimulus eksternal dan reinforcement; proses mental tidak relevan secara ilmiah	Perilaku adalah fungsi dari medan psikologis total (pribadi + lingkungan yang dipersepsi)	Manusia memproses informasi secara aktif; perilaku dibentuk oleh kognisi, lingkungan, dan perilaku itu sendiri secara resiprokal
Objek analisis	Stimulus dan respons yang dapat diamati	Struktur medan kognitif dan dinamika kelompok	Representasi mental, sikap, skema kognitif, dan efikasi diri
Metode utama	Eksperimen laboratorium terkontrol, pengukuran respons kuantitatif	Eksperimen lapangan, action research, wawancara kelompok	Eksperimen laboratorium, survei sikap, pengkodean observasi perilaku
Tokoh kunci	J.B. Watson, B.F. Skinner, Clark Hull	Kurt Lewin, Max Wertheimer, Fritz Heider	Albert Bandura, Leon Festinger, Stanley Schachter

Dimensi Pemandangan	Behaviorisme	Teori Lapangan / Gestalt	Kognitif-Sosial
Pandangan tentang individu	Organisme reaktif yang merespons lingkungan	Aktor yang memaknai situasi secara holistik dalam konteks kelompok	Agen aktif yang belajar, mengatur diri, dan dipengaruhi model sosial
Kontribusi bagi Ilmu Pemerintahan	Menjelaskan kepatuhan warga terhadap aturan melalui insentif dan sanksi	Menjelaskan dinamika kelompok, kepemimpinan, dan perubahan kebijakan partisipatif	Menjelaskan pembentukan opini publik, difusi inovasi kebijakan, dan polarisasi politik digital
Keterbatasan utama	Mengabaikan makna, kognisi, dan konteks budaya	Kurang operasional dalam mengukur variabel medan secara tepat	Rentan pada kompleksitas variabel kognitif yang sulit distandarkan lintas budaya

[Gambar 2.3 belum diunggah]

Gambar 2.3 Diagram tiga kolom berdampingan berbentuk prisma atau segitiga yang menggambarkan masing-masing perspektif sebagai satu sisi: sisi kiri berlabel Behaviorisme dengan ikon stimulus-respons ($S \rightarrow R$), sisi kanan berlabel Teori Lapangan dengan ikon lingkaran meda

ANALOGI

Bayangkan tiga orang fotografer yang memotret aksi demonstrasi warga di depan kantor gubernur. Fotografer behavioris hanya memotret tindakan fisik yang tampak — siapa yang berteriak, siapa yang berlari — tanpa peduli apa yang ada di pikiran peserta. Fotografer teori lapangan memotret susunan kerumunan secara keseluruhan dan bagaimana posisi relatif seseorang dalam kelompok memengaruhi keberaniannya bersuara. Fotografer kognitif-sosial mengambil gambar wajah, gestur, dan ekspresi untuk menangkap bagaimana peserta meniru satu sama lain dan bagaimana keyakinan mereka tentang efektivitas protes mendorong atau menghambat partisipasi. Ketiga foto itu bersama-sama memberikan gambaran yang jauh lebih utuh daripada satu foto saja.

CONTOH

Ambil kasus meningkatnya keengganan warga di Sulawesi Tenggara untuk melaporkan tindak korupsi pejabat desa kepada aparat. Perspektif behaviorisme akan menjelaskan

keengganan ini sebagai hasil dari pengalaman masa lalu: warga yang pernah melapor mengalami intimidasi (hukuman), sehingga perilaku melapor tidak diperkuat dan akhirnya padam. Teori lapangan akan bertanya lebih jauh: bagaimana struktur hubungan kekerabatan dan norma gotong-royong dalam medan sosial desa menciptakan tekanan kelompok yang membuat individu mempersepsi pelaporan sebagai ancaman terhadap harmoni komunal, bukan sebagai tindakan berani. Perspektif kognitif-sosial akan menambahkan lapisan berikutnya: warga mengamati model perilaku tokoh-tokoh yang dihormati — apakah kyai, kepala adat, atau aktivis muda — dan membentuk ekspektasi hasil serta efikasi diri mereka berdasarkan apa yang mereka saksikan terjadi pada model tersebut. Menganalisis ketiga penjelasan ini secara berdampingan — bukan hanya memilih salah satu — adalah latihan berpikir kritis yang mencerminkan kejujuran ilmiah dalam mengatribusikan gagasan kepada perspektif yang tepat.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi yang paling sering muncul adalah anggapan bahwa behaviorisme sudah usang dan tidak relevan karena kalah oleh revolusi kognitif, sehingga mahasiswa cenderung mengabaikannya. Pembetulannya: behaviorisme tetap memiliki daya penjelas yang kuat untuk perilaku yang memang dibentuk oleh struktur insentif dan sanksi, seperti kepatuhan pajak, disiplin pegawai negeri, atau respons warga terhadap program bantuan sosial bersyarat. Yang berubah bukan validitas behaviorisme, melainkan batas klaimnya — ia tidak lagi dianggap cukup untuk menjelaskan seluruh perilaku sosial manusia, tetapi ia tetap sah dan perlu sebagai salah satu lensa analisis dalam kotak peralatan intelektual ilmuwan sosial.

D. Evaluasi Perspektif Teori dan Penerapannya pada Kasus Sosial Indonesia

Setiap perspektif teori dalam psikologi sosial memiliki kekuatan sekaligus batas kemampuan penjelasannya, sehingga tidak ada satu perspektif pun yang berdiri sebagai jawaban tuntas atas seluruh fenomena perilaku sosial. Behaviorisme unggul dalam menjelaskan perubahan perilaku yang dapat diamati secara langsung, misalnya bagaimana program insentif pemerintah mampu mendorong kepatuhan wajib pajak atau partisipasi vaksinasi. Namun behaviorisme kesulitan menjelaskan mengapa dua individu yang mendapat stimulus identik dapat menghasilkan respons yang berbeda jauh, karena perspektif ini mengabaikan proses mental yang terjadi di

antara stimulus dan respons. Teori lapangan atau Gestalt memperlengkapi kelemahan itu dengan menekankan bahwa individu bereaksi terhadap keseluruhan situasi yang dipersepsinya, bukan sekadar rangsangan tunggal, sehingga konteks kelompok dan dinamika sosial menjadi variabel penjelas yang krusial [Lewin 1951 dalam Taylor, Peplau & Sears 2006].

Perspektif kognitif-sosial melangkah lebih jauh dengan menempatkan proses berpikir, skema, dan atribusi sebagai jantung penjelasan perilaku sosial. Kekuatannya terletak pada kemampuan menjelaskan fenomena kompleks seperti prasangka, pengambilan keputusan kolektif, dan perubahan sikap melalui mekanisme yang dapat diuji secara empiris. Keterbatasannya adalah kecenderungan berfokus pada individu sebagai unit analisis, sehingga dimensi struktural seperti kemiskinan sistemik atau ketimpangan kekuasaan kurang mendapat perhatian memadai [Hogg & Vaughan 2011]. Kesadaran atas keterbatasan ini mendorong ilmuwan psikologi sosial kontemporer untuk bekerja secara integratif, meminjam kekuatan masing-masing perspektif sesuai dengan jenis pertanyaan yang sedang dijawab.

Penerapan evaluasi lintas perspektif menjadi sangat relevan ketika kita menghadapi kasus sosial di Indonesia, khususnya di Kawasan Timur Indonesia yang memiliki keragaman budaya, tingkat pendidikan, dan akses informasi yang berbeda-beda. Ambil contoh fenomena hoaks kesehatan yang menyebar masif menjelang Pemilihan Kepala Daerah. Behaviorisme akan melihatnya dari sudut penguatan: narasi hoaks yang disebar ulang dan mendapat banyak komentar positif akan semakin sering diproduksi karena diperkuat secara sosial. Teori lapangan menyoroti bagaimana polarisasi kelompok menciptakan medan psikologis di mana anggota kelompok memersepsi informasi apa pun yang mengancam kohesi in-group sebagai ancaman, sehingga hoaks yang mengkonfirmasi keyakinan kelompok lebih mudah diterima tanpa kritis [Taylor, Peplau & Sears 2006].

Perspektif kognitif-sosial melengkapi analisis tersebut dengan menunjukkan bahwa penyebaran hoaks diperkuat oleh bias konfirmasi dan atribusi yang keliru: individu cenderung menafsirkan informasi ambiguus secara konsisten dengan skema yang sudah ada, dan mengatribusikan penyebaran hoaks semata pada kelemahan moral pihak lain, bukan pada keterbatasan sistem kognisi manusia yang bersifat universal. Evaluasi integratif seperti ini tidak hanya menghasilkan pemahaman yang lebih utuh, tetapi juga memberikan dasar bagi kebijakan publik yang lebih efektif, misalnya merancang kampanye literasi digital yang sekaligus memodifikasi stimulus lingkungan (behaviorisme), membangun identitas kelompok yang lebih inklusif (Gestalt), dan melatih keterampilan berpikir kritis (kognitif-sosial). Kejujuran ilmiah dalam proses ini menuntut mahasiswa untuk mengutip argumen dan data dari sumber yang dapat diverifikasi, bukan mengonstruksi klaim atas nama teori tertentu

tanpa rujukan yang sahih, sesuai nilai Integrity dalam karakter ICHSA-N yang menjadi landasan akademik UNISAN.

Tabel 2.4 Evaluasi Kekuatan dan Keterbatasan Tiga Perspektif Teori Psikologi Sosial

Perspektif	Kekuatan Utama	Keterbatasan Utama	Contoh Penerapan pada Kasus Indonesia
Behaviorisme	Menjelaskan perubahan perilaku yang terukur melalui pola stimulus-respons-penguatan; mudah dioperasionalkan dalam program intervensi publik	Mengabaikan proses mental; tidak mampu menjelaskan perbedaan respons antar-individu terhadap stimulus yang sama	Analisis kepatuhan wajib pajak: penguatan (reward/sanksi) dari Ditjen Pajak memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT
Teori Lapangan / Gestalt	Menekankan konteks dan dinamika kelompok; menjelaskan kohesi, konflik antar-kelompok, dan persepsi situasional secara holistik	Relatif abstrak dalam pengukuran medan psikologis; kurang memperinci mekanisme kognitif internal individu	Analisis konflik horizontal di daerah perbatasan: polarisasi in-group vs. out-group membentuk medan persepsi yang memperparah eskalasi konflik
Kognitif-Sosial	Menjelaskan prasangka, atribusi, skema, dan perubahan sikap melalui mekanisme kognitif yang dapat diuji secara empiris	Cenderung mengabaikan faktor struktural (kemiskinan, kekuasaan); unit analisis terlalu berfokus pada individu	Analisis penyebaran hoaks pilkada: bias konfirmasi dan atribusi keliru memperkuat penerimaan informasi yang sesuai skema kelompok

[Gambar 2.4 belum diunggah]

Gambar 2.4 Diagram segitiga berlabel tiga sudut: Behaviorisme (stimulus-respons), Teori Lapangan/Gestalt (konteks-kelompok), dan Kognitif-Sosial (proses mental-skema). Di tengah segitiga terdapat label Fenomena Sosial Indonesia (contoh: hoaks pilkada, konflik horizo

ANALOGI

Mengevaluasi perspektif teori psikologi sosial ibarat memeriksa sebuah gajah dengan tiga jenis alat ukur berbeda: meteran mengukur panjang tubuhnya (behaviorisme mengukur perilaku yang tampak), timbangan mengukur beratnya (Gestalt mengukur

bobot konteks dan kelompok), dan termometer mengukur suhu tubuhnya (kognitif-sosial mengukur proses internal). Tidak ada satu alat yang cukup untuk mendeskripsikan gajah secara utuh; kekuatan penilaian justru muncul ketika ketiga pengukuran dipadukan dan keterbatasan masing-masing diakui secara jujur.

CONTOH

Kasus: Penolakan sebagian masyarakat di Sulawesi Selatan terhadap program vaksinasi COVID-19 pada 2021. Langkah 1 — Analisis behaviorisme: Perilaku penolakan diperkuat oleh respons sosial positif dari komunitas dan tokoh agama yang juga menolak, sehingga penolakan menjadi respons yang semakin menguat. Langkah 2 — Analisis Gestalt: Medan psikologis kelompok membentuk persepsi bahwa vaksin adalah ancaman bagi identitas dan nilai komunitas, bukan solusi kesehatan. Langkah 3 — Analisis kognitif-sosial: Skema ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan informasi hoaks mengenai kandungan vaksin mengaktifkan bias konfirmasi, sehingga informasi ilmiah yang valid justru ditolak karena tidak sesuai dengan skema yang sudah tertanam. Langkah 4 — Evaluasi integratif: Intervensi yang efektif harus memodifikasi penguatan sosial (melibatkan tokoh komunitas sebagai agen perubahan), mengubah persepsi kelompok terhadap konteks vaksinasi (membangun narasi bahwa vaksinasi adalah bagian dari nilai gotong-royong), dan mengoreksi skema kognitif melalui edukasi berbasis fakta yang disampaikan oleh figur terpercaya.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi umum: Mahasiswa sering berasumsi bahwa perspektif yang lebih baru (kognitif-sosial) secara otomatis lebih superior dan telah menggantikan perspektif sebelumnya, sehingga behaviorisme dan Gestalt dianggap usang dan tidak relevan. Pembetulan: Ketiga perspektif terus digunakan secara aktif dalam penelitian dan kebijakan kontemporer karena menjawab pertanyaan yang berbeda. Behaviorisme tetap relevan dalam desain intervensi perilaku dan kebijakan insentif publik, Gestalt tetap kuat untuk analisis dinamika kelompok dan konflik sosial, sedangkan kognitif-sosial unggul untuk menjelaskan proses atribusi dan perubahan sikap. Memilih perspektif bukan soal mana yang lebih modern, melainkan soal mana yang paling sesuai dengan pertanyaan riset atau masalah kebijakan yang sedang dihadapi.

RANGKUMAN

- Psikologi sosial bertumpu pada empat konsep dasar saling terkait: persepsi sosial, kognisi sosial, sikap, dan pengaruh sosial, yang masing-masing memiliki definisi operasional yang dapat diuji secara empiris.
- Perkembangan historis psikologi sosial berjalan kronologis dari behaviorisme yang menekankan stimulus-respons, dilanjutkan perspektif Gestalt/teori lapangan Lewin yang menekankan konteks dan dinamika, hingga revolusi kognitif-sosial yang menempatkan proses mental sebagai pusat analisis.
- Ketiga perspektif teori (behaviorisme, Gestalt/teori lapangan, kognitif-sosial) berbeda secara mendasar dalam asumsi tentang sifat manusia, objek kajian, dan metode yang digunakan, perbedaan yang harus dipahami sebelum memilih perspektif untuk menganalisis gejala pemerintahan.
- Setiap perspektif memiliki kekuatan penjelasan sekaligus keterbatasan: tidak ada perspektif tunggal yang cukup untuk menjelaskan seluruh kompleksitas perilaku sosial, sehingga diperlukan sikap kritis dan eklektis dalam penerapannya.
- Mengaitkan teori dengan kasus perilaku sosial kontemporer di Indonesia, disertai atribusi sumber yang jujur, merupakan latihan penerapan awal yang membangun fondasi bagi analisis empiris pada pertemuan-pertemuan berikutnya.

REFERENSI

- Myers, D. G. (2013). *Social Psychology*. 11th Edition. McGraw-Hill.
- Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2016). *Social Psychology*. 9th Edition. Pearson.
- Hogg, M. A., & Vaughan, G. M. (2018). *Social Psychology*. 8th Edition. Pearson.
- Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2006). *Social Psychology*. 12th Edition. Pearson Prentice Hall.
- Cialdini, R. B. (2009). *Influence: Science and Practice*. 5th Edition. Pearson.
- Sarwono, S. W. (2015). *Psikologi Sosial*. Edisi 2. Salemba Humanika.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2022. *Standar Nasional Pendidikan (Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi)*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2024. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Outcome Based Education (OBE)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- Norris, Pippa. 2011. *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Putnam, Robert D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon and Schuster.

Sears, David O., Jonathan L. Freedman, dan L. Anne Peplau. 1994. Psikologi Sosial.
Terjemahan Michael Adryanto. Jakarta: Erlangga.

Myers (2013); Hogg & Vaughan (2018); Aronson, Wilson, & Akert (2016); Sarwono (2015);
Taylor, Peplau, & Sears (2006).

PERTEMUAN 3

Persepsi Sosial, Atribusi, dan Pembentukan Sikap

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:

13. Mengidentifikasi jenis pengaruh sosial (normatif atau informasional) yang bekerja pada minimal 2 kasus perilaku kelompok dengan bukti kutipan data kasus; Membedakan konformitas, kepatuhan (compliance), dan ketaatan (obedience) berdasarkan 3 kriteria: sumber tekanan, kesadaran individu, dan durabilitas perubahan sikap; Menyajikan analisis tertulis (500–700 kata) tentang perubahan sikap pada satu kasus faktual menggunakan minimal 1 teori sikap yang relevan
14. Menganalisis proses persepsi sosial dan mekanisme atribusi (internal vs. eksternal) dalam situasi sosial tertentu menggunakan teori atribusi yang relevan
15. Mengidentifikasi bias atribusi umum—termasuk fundamental attribution error dan actor-observer bias—pada kasus perilaku sosial nyata
16. Menganalisis proses pembentukan sikap melalui tiga komponen (kognitif, afektif, konatif) berdasarkan kasus faktual yang diberikan
17. Membedakan sumber pembentukan sikap: pengalaman langsung, pembelajaran sosial, dan pengaruh kelompok referensi
18. Menghubungkan bias atribusi dan pembentukan sikap dengan fenomena sosial aktual di Indonesia sebagai latihan analisis tingkat C4

Pendahuluan

Pada dua pertemuan sebelumnya, mahasiswa telah membangun fondasi konseptual psikologi sosial—mulai dari ruang lingkup kajian hingga perspektif teori besar yang membentuk disiplin ini. Pertemuan ketiga ini melanjutkan fondasi tersebut dengan menelusuri bagaimana individu memproses informasi sosial: bagaimana kita membaca orang lain, menjelaskan tindakan mereka, dan membentuk sikap atas dasar pengolahan tersebut. Tiga proses ini—persepsi sosial, atribusi, dan pembentukan sikap—saling bertautan dan membentuk dasar psikologis dari hampir setiap interaksi antara warga dan institusi pemerintah.

Bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan, ketiga proses ini bukan sekadar konsep abstrak. Cara warga Kawasan Timur Indonesia mempersepsi aparat daerah, mengatribusikan keberhasilan atau kegagalan program pemerintah, serta membangun sikap terhadap kebijakan publik—semuanya berakar pada mekanisme yang akan dikaji hari ini. Pemahaman kritis atas mekanisme ini menjadi prasyarat untuk menganalisis konformitas dan pengaruh sosial yang akan dibahas pada Pertemuan 4, serta prasangka sosial yang akan dikaji pada Pertemuan 7.

A. Persepsi Sosial: Proses dan Faktor yang Memengaruhinya

Persepsi sosial adalah proses aktif di mana individu mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menafsirkan informasi tentang orang lain guna membentuk kesan dan membuat penilaian tentang dunia sosialnya. Proses ini bukan sekadar merekam fakta seperti kamera, melainkan melibatkan seleksi dan konstruksi makna yang dipengaruhi oleh pengalaman, ekspektasi, dan konteks budaya si pengamat. Dalam konteks ilmu pemerintahan, persepsi sosial menjadi fondasi kritis karena kebijakan publik, kepercayaan terhadap lembaga negara, dan hubungan birokrat dengan warga dibangun di atas bagaimana pihak-pihak yang terlibat saling mempersepsikan satu sama lain. Ketika seorang aparatur sipil negara dipersepsikan warga sebagai tidak responsif, reaksi warga terhadap program pemerintah akan berbeda secara fundamental dibandingkan ketika aparatur yang sama dipersepsikan sebagai pelayan publik yang tulus.

Proses persepsi sosial berlangsung melalui tiga tahap yang saling berkaitan. Pertama, tahap seleksi: individu tidak mungkin memproses seluruh stimulus sosial yang tersedia, sehingga ia memilih informasi yang paling menonjol atau relevan dengan tujuan dan pengalamannya. Kedua, tahap organisasi: informasi yang terpilih disusun menjadi pola bermakna menggunakan skema kognitif, yaitu kerangka pengetahuan yang sudah tersimpan di memori tentang kategori orang, peran sosial, atau situasi tertentu. Ketiga, tahap interpretasi: individu memberikan makna pada pola tersebut dengan mempertimbangkan konteks situasional dan mengisi celah informasi yang hilang berdasarkan asumsi. Ketiga tahap ini berlangsung hampir otomatis dan sering kali tidak disadari, itulah mengapa produk akhir persepsi terasa seperti kenyataan objektif padahal sesungguhnya ia adalah konstruksi subjektif.

Sejumlah faktor memengaruhi hasil persepsi sosial. Dari sisi pengamat, faktor yang berperan antara lain skema kognitif, motivasi, suasana emosional, dan stereotip yang dipegang. Dari sisi target, faktor yang menonjol meliputi perilaku nonverbal, penampilan fisik, serta kekhasan situasional (*salience*) yang membuat target tampak

lebih menonjol dari latar. Efek pertama (primacy effect) membuktikan bahwa informasi yang diterima lebih awal secara tidak proporsional membentuk kesan keseluruhan tentang seseorang, sedangkan efek halo (halo effect) menunjukkan bahwa satu sifat positif atau negatif yang mencolok cenderung memengaruhi penilaian terhadap sifat-sifat lain yang tidak berkaitan. Dalam praktik pemerintahan lokal di Kawasan Timur Indonesia, efek halo kerap muncul saat warga menilai seluruh kinerja pemerintah daerah berdasarkan satu proyek infrastruktur yang berhasil atau satu skandal korupsi yang tersebar luas di media sosial, tanpa menganalisis data kinerja secara menyeluruh.

Faktor budaya dan konteks kelembagaan juga membentuk persepsi sosial secara signifikan. Masyarakat dengan budaya kolektifis tinggi, seperti banyak komunitas di Sulawesi dan Maluku, cenderung mempersepsikan perilaku individu melalui lensa keanggotaan kelompok dan hubungan sosial (relasi patron-klien, ikatan klan, atau afiliasi keagamaan) lebih kuat daripada atribut personal semata. Hal ini berdampak langsung pada bagaimana warga menilai pejabat publik: seorang kepala dinas yang berasal dari kelompok in-group dipersepsikan lebih kompeten dan amanah meskipun rekam jejaknya setara dengan kandidat dari luar kelompok. Mahasiswa ilmu pemerintahan perlu menganalisis dinamika ini secara kritis karena persepsi yang bias secara kelompok dapat mendistorsi akuntabilitas publik dan menghambat tata kelola pemerintahan yang baik. Kesadaran atas proses dan faktor persepsi sosial dengan demikian bukan sekadar wawasan psikologis, melainkan kompetensi analitis yang mendasar bagi calon administrator publik yang berintegritas.

Tabel 3.1 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Sosial

Sumber Faktor	Faktor Spesifik	Dampak pada Persepsi	Contoh dalam Konteks Pemerintahan
Pengamat	Skema kognitif dan stereotip	Informasi baru diinterpretasikan agar sesuai dengan kerangka yang sudah ada	Birokrat yang sudah berprasangka negatif terhadap warga miskin cenderung mempersepsikan keluhan mereka sebagai malas bukan sebagai kebutuhan legitim
Pengamat	Suasana emosional (mood)	Suasana positif meningkatkan penilaian favorable terhadap target	Pegawai yang sedang puas dengan pekerjaannya cenderung menilai

Sumber Faktor	Faktor Spesifik	Dampak pada Persepsi	Contoh dalam Konteks Pemerintahan
			pengaduan warga lebih konstruktif
Target	Efek pertama (primacy effect)	Kesan awal mendominasi penilaian keseluruhan secara tidak proporsional	Presentasi perdana seorang calon kepala desa yang lancar membentuk persepsi positif meski rekam jejaknya belum dikaji
Target	Efek halo (halo effect)	Satu sifat menonjol menular ke penilaian sifat lain yang tidak berkaitan	Pejabat yang dikenal dermawan dipersepsikan juga jujur dan kompeten meski tanpa bukti kinerja
Konteks	Salience (kekhasan situasional)	Stimulus yang paling menonjol dalam latar mendapat bobot kognitif lebih besar	Viral satu video pungutan liar membuat warga mempersepsikan seluruh instansi sebagai korup
Konteks	Budaya kolektif dan in-group	Keanggotaan kelompok memengaruhi atribusi kompetensi dan kepercayaan	Kepala desa dari klan yang sama dengan pemilih dipersepsikan lebih amanah tanpa dasar kinerja objektif

[Gambar 3.1 belum diunggah]

Gambar 3.1 Diagram alir tiga tahap persepsi sosial: (1) Seleksi stimulus -- panah ke kanan -- (2) Organisasi menggunakan skema kognitif -- panah ke kanan -- (3) Interpretasi dan pembentukan kesan. Di bawah setiap tahap, cantumkan faktor yang bekerja: pada Seleksi (m

ANALOGI

Persepsi sosial bekerja seperti seorang editor foto yang tidak pernah menyimpan gambar mentah: ia selalu memotong bingkai (seleksi), mengatur kontras dan saturasi (organisasi), lalu memberi judul pada foto itu (interpretasi). Dua editor yang memotret kejadian yang sama di tempat yang sama bisa menghasilkan foto dengan pesan yang sepenuhnya berbeda tergantung pada selera, pengalaman, dan tujuan

editorial masing-masing. Demikian pula, dua warga yang menghadiri forum musyawarah desa yang sama bisa keluar dengan kesan yang bertolak belakang tentang seorang kepala desa, bukan karena salah satu dari mereka berbohong, tetapi karena proses persepsi sosial keduanya menyaring dan memaknai informasi secara berbeda.

CONTOH

Bayangkan seorang camat baru di sebuah kabupaten di Sulawesi Tenggara tiba pada rapat pertamanya dengan pakaian formal, berbicara singkat, dan tidak banyak tersenyum karena ia memang sedang lelah setelah perjalanan jauh. Pada tahap seleksi, warga yang hadir cenderung memperhatikan ekspresi wajah yang datar sebagai stimulus paling menonjol (salience tinggi). Pada tahap organisasi, mereka mencocokkan informasi itu dengan skema kognitif yang sudah ada tentang birokrat: 'pejabat yang tidak ramah biasanya tidak mau mendengar rakyat'. Pada tahap interpretasi, mereka menyimpulkan bahwa camat baru itu arogan dan tidak akan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Padahal kenyataannya si camat baru bersikap datar semata karena kondisi fisik yang lelah, bukan karena sikapnya terhadap warga. Contoh ini menunjukkan bagaimana persepsi sosial yang salah dapat langsung merusak kepercayaan publik terhadap aparat sebelum satu kebijakan pun sempat dijalankan.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi umum yang sering muncul adalah anggapan bahwa persepsi sosial yang akurat hanya soal mengumpulkan lebih banyak informasi tentang orang lain: semakin banyak data, semakin benar persepsi kita. Pembetulannya: penelitian psikologi sosial secara konsisten menunjukkan bahwa jumlah informasi yang lebih besar tidak secara otomatis menghasilkan persepsi yang lebih akurat karena otak tetap menyaring informasi baru melalui skema dan bias yang sudah ada sebelumnya, bahkan sering kali menggunakan informasi tambahan itu untuk mengonfirmasi kesan awal (confirmation bias). Yang benar-benar diperlukan bukan sekadar lebih banyak data, melainkan kesadaran kritis terhadap proses perseptual itu sendiri, kemampuan menunda penilaian (suspend judgment), dan kebiasaan memeriksa asumsi yang mendasari kesan yang terbentuk.

B. Teori Atribusi dan Bias Atribusi dalam Perilaku Sosial

Atribusi adalah proses kognitif di mana individu mencari penjelasan atas perilaku orang lain maupun dirinya sendiri. Fritz Heider, yang meletakkan fondasi teori ini, membedakan dua jenis atribusi: atribusi internal (disposisional), yang merujuk pada faktor dalam diri pelaku seperti kepribadian, kemampuan, atau niat, dan atribusi eksternal (situasional), yang merujuk pada faktor di luar diri pelaku seperti tekanan lingkungan, nasib, atau kebetulan. Harold Kelley kemudian mengembangkan Model Kovariansi, yang menyatakan bahwa seseorang membuat atribusi dengan mempertimbangkan tiga informasi sekaligus: konsistensi (apakah perilaku ini selalu muncul dalam situasi serupa?), kekhasan atau distinctiveness (apakah perilaku ini hanya muncul pada objek atau situasi tertentu?), dan konsensus (apakah orang lain berperilaku sama dalam situasi yang sama?). Konsistensi tinggi, kekhasan tinggi, dan konsensus tinggi secara bersamaan cenderung menghasilkan atribusi eksternal, sementara konsistensi tinggi, kekhasan rendah, dan konsensus rendah lebih mengarah ke atribusi internal. Pemahaman atas mekanisme ini penting dalam Ilmu Pemerintahan karena cara pejabat publik, warga, maupun media mengatribusikan penyebab suatu kebijakan atau peristiwa sosial akan menentukan respons kolektif dan akuntabilitas politik yang terbentuk.

Proses atribusi tidak selalu berjalan akurat; manusia secara sistematis melakukan distorsi yang disebut bias atribusi. Bias yang paling dikenal adalah Fundamental Attribution Error (FAE), yaitu kecenderungan pengamat untuk terlalu menekankan faktor internal dan mengabaikan faktor situasional ketika menjelaskan perilaku orang lain. Dalam konteks pemerintahan di Kawasan Timur Indonesia, FAE kerap muncul ketika publik atau media menilai kegagalan pembangunan daerah semata sebagai cerminan kelemahan karakter kepala daerah, tanpa mempertimbangkan faktor struktural seperti keterbatasan fiskal, isolasi geografis, atau warisan kebijakan pusat. Bias kedua yang tidak kalah signifikan adalah Actor-Observer Bias: ketika menjelaskan perilaku diri sendiri, seseorang cenderung menggunakan atribusi eksternal (menyalahkan situasi), tetapi ketika menjelaskan perilaku orang lain, ia beralih ke atribusi internal (menyalahkan orangnya). Seorang anggota DPRD yang terlambat mengesahkan APBD akan menyebut kerumitan birokrasi sebagai alasannya (eksternal), namun menilai keterlambatan DPRD lain sebagai bukti kelalaian dan kurangnya kompetensi (internal). Selain kedua bias itu, terdapat pula Self-Serving Bias, di mana individu mengklaim keberhasilan sebagai hasil kemampuan diri (internal) tetapi mengaitkan kegagalan pada faktor luar (eksternal) — pola yang berisiko menghambat evaluasi kinerja yang jujur dalam lembaga publik.

Ketiga bias atribusi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat dan berinteraksi dengan proses pembentukan sikap yang akan dibahas pada sub-bab berikutnya. Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa bias atribusi bukan sekadar kekeliruan individual, melainkan produk dari skema kognitif, norma budaya, dan posisi sosial seseorang. Penelitian lintas budaya menunjukkan bahwa masyarakat dengan orientasi kolektifis, yang mencakup banyak komunitas di Indonesia, cenderung lebih mudah menggunakan atribusi eksternal dibandingkan masyarakat individualis Barat, sehingga FAE tidak selalu sama intensitasnya di setiap konteks. Implikasi praktisnya bagi calon aparatur pemerintahan adalah kebutuhan untuk mengembangkan kesadaran metakognitif: sebelum membuat penilaian tentang perilaku warga atau rekan kerja, seorang administrator publik perlu secara eksplisit bertanya apakah ia telah mempertimbangkan faktor situasional secara memadai. Nilai integritas menuntut kecermatan dalam menilai, bukan hanya kejujuran dalam bertindak, dan kecermatan itu dimulai dari kemampuan mengidentifikasi bias dalam proses atribusi diri sendiri.

Tabel 3.2 Perbandingan Jenis Atribusi dan Bias Atribusi Utama

Konsep	Definisi Operasional	Arah Kesalahan	Contoh dalam Konteks Pemerintahan
Atribusi Internal	Menjelaskan perilaku berdasarkan faktor dalam diri pelaku (niat, kemampuan, karakter)	Tidak selalu salah; menjadi bias bila mengabaikan situasi	Menilai korupsi pejabat murni karena watak buruk tanpa menelaah sistem pengawasan yang lemah
Atribusi Eksternal	Menjelaskan perilaku berdasarkan faktor di luar diri pelaku (tekanan, kebetulan, lingkungan)	Tidak selalu salah; menjadi bias bila digunakan berlebihan untuk melepas tanggung jawab	Kepala dinas menyebut banjir kota akibat curah hujan ekstrem, mengabaikan gagalnya drainase yang ia kelola
Fundamental Attribution Error	Kecenderungan pengamat melebih-lebihkan faktor internal dan meremehkan faktor situasional perilaku orang lain	Terlalu internal saat menilai orang lain	Media menilai kemiskinan warga Papua sebagai hasil kemalasan, mengabaikan ketimpangan infrastruktur historis
Actor-Observer Bias	Pelaku mengatribusikan	Asimetris: eksternal untuk diri, internal	Anggota dewan menjelaskan

Konsep	Definisi Operasional	Arah Kesalahan	Contoh dalam Konteks Pemerintahan
	perilakunya secara eksternal; pengamat mengatribusikan perilaku pelaku secara internal	untuk orang lain	absensinya karena jadwal padat (eksternal), menilai absensi kolega sebagai tidak disiplin (internal)
Self-Serving Bias	Mengklaim keberhasilan sebagai hasil kemampuan diri; mengaitkan kegagalan pada faktor eksternal	Internal untuk sukses, eksternal untuk gagal	Pemda mengklaim pertumbuhan ekonomi sebagai hasil kebijakan sendiri, menyebut resesi sebagai dampak global

[Gambar 3.2 belum diunggah]

Gambar 3.2 Diagram alur dua jalur: jalur kiri menggambarkan proses atribusi akurat menggunakan Model Kovariansi Kelley (tiga sumbu: konsistensi, kekhasan, konsensus) yang berujung pada kesimpulan internal atau eksternal yang proporsional; jalur kanan menggambarkan p

ANALOGI

Bayangkan seorang wasit sepak bola yang menilai pelanggaran: ketika pemain tim lawan terjatuh, wasit cenderung menyimpulkan bahwa pemain itu berpura-pura (atribusi internal — aktor licik), tetapi ketika pemain tim sendiri terjatuh, wasit lebih mudah melihatnya sebagai akibat tackling keras lawan (atribusi eksternal — situasi memaksa). Distorsi pandangan wasit ini persis mencerminkan Actor-Observer Bias dan Fundamental Attribution Error: kita menilai orang lain berdasarkan siapa mereka, tetapi menilai diri kita berdasarkan apa yang terjadi pada kita.

CONTOH

Kasus bertahap: (1) Sebuah program bantuan sosial di Kabupaten X, Sulawesi Tengah, gagal menjangkau 30 persen penerima manfaat. (2) Pengamat dari ibu kota langsung menyimpulkan bahwa kepala dinas sosial setempat tidak kompeten dan tidak peduli — ini adalah FAE, karena mengabaikan fakta bahwa sistem data kependudukan di kabupaten tersebut belum terdigitalisasi dan akses desa terpencil membutuhkan waktu tempuh 6 jam. (3) Kepala dinas yang sama, ketika ditanya, menjelaskan kegagalan itu sepenuhnya akibat anggaran yang dipotong mendadak oleh pusat

(atribusi eksternal), tetapi mengklaim keberhasilan distribusi 70 persen sisanya sebagai hasil kerja keras timnya (Self-Serving Bias). (4) Seorang analis kebijakan yang terlatih psikologi sosial menerapkan Model Kovariansi Kelley: konsistensi tinggi (program serupa gagal setiap tahun), kekhasan tinggi (hanya program ini yang bermasalah, bukan program lain di dinas yang sama), konsensus tinggi (kabupaten tetangga dengan infrastruktur serupa juga mengalami hal yang sama) — kesimpulan yang lebih akurat adalah atribusi eksternal-situasional, bukan kelemahan karakter kepala dinas.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi umum adalah anggapan bahwa atribusi internal selalu lebih akurat daripada atribusi eksternal karena individu dianggap sebagai agen bebas yang sepenuhnya menentukan tindakannya sendiri. Pembetulannya: tidak ada jenis atribusi yang secara inheren lebih benar; akurasi atribusi bergantung pada seberapa lengkap informasi yang dipertimbangkan. Miskonsepsi kedua adalah bahwa Fundamental Attribution Error hanya berlaku bagi orang awam yang tidak berpendidikan. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa FAE juga menjangkiti para ahli, termasuk hakim, manajer, dan birokrat berpengalaman, justru karena posisi otoritas mereka mengurangi motivasi untuk mempertimbangkan konteks situasional pihak yang mereka nilai.

C. Pembentukan Sikap: Komponen dan Sumber Pembentukannya

Sikap adalah evaluasi menyeluruh seseorang terhadap suatu objek, orang, kelompok, atau isu tertentu yang terdiri atas tiga komponen yang saling terkait. Komponen kognitif mencakup keyakinan dan pengetahuan seseorang tentang objek sikap, misalnya keyakinan bahwa korupsi merugikan negara. Komponen afektif adalah perasaan emosional yang menyertai keyakinan tersebut, seperti rasa marah atau jijik ketika menyaksikan praktik korupsi. Komponen konatif adalah kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan evaluasi tersebut, misalnya kesediaan melaporkan praktik korupsi kepada KPK. Ketiga komponen ini membentuk apa yang oleh Rosenberg dan Hovland disebut model tri-komponen sikap, di mana konsistensi antara ketiganya menentukan kekuatan dan kestabilan sebuah sikap dalam jangka panjang.

Sikap tidak muncul begitu saja, melainkan terbentuk melalui tiga sumber utama yang dapat bekerja sendiri maupun secara bersamaan. Pertama, pengalaman langsung: individu yang pernah mengalami sendiri pelayanan birokrasi yang berbelit-belit akan

membentuk sikap negatif terhadap aparaturnya pemerintah jauh lebih kuat dibandingkan orang yang hanya mendengar cerita dari orang lain, karena pengalaman langsung mengaktifkan komponen afektif secara intensif. Kedua, pembelajaran sosial melalui observasi dan penguatan: seorang pemilih pemula yang melihat tokoh panutannya aktif berpartisipasi dalam musyawarah desa cenderung membentuk sikap positif terhadap partisipasi politik karena proses modeling tersebut. Ketiga, kelompok referensi, yaitu kelompok yang dijadikan acuan normatif maupun komparatif oleh individu: mahasiswa ilmu pemerintahan di Kawasan Timur Indonesia yang bergabung dengan organisasi kemahasiswaan daerah akan membentuk sikap tertentu terhadap otonomi daerah berdasarkan nilai-nilai kolektif yang berlaku di kelompok tersebut. Dalam konteks technopreneurship pemerintahan, pemahaman atas sumber pembentukan sikap ini sangat penting karena program inovasi layanan publik tidak akan berhasil jika hanya mengubah regulasi tanpa menyentuh akar sikap birokrat dan masyarakat terhadap teknologi.

Penting dipahami bahwa sikap yang sudah terbentuk tidak bersifat permanen dan dapat berubah melalui proses persuasi, disonansi kognitif, maupun perubahan kelompok referensi. Leon Festinger menjelaskan bahwa ketika komponen kognitif dan afektif seseorang bertentangan, individu akan mengalami disonansi kognitif yang mendorong perubahan salah satu komponen agar kembali konsisten. Sebagai contoh, seorang pejabat daerah yang secara kognitif tahu bahwa transparansi anggaran itu baik, tetapi secara afektif merasa tidak nyaman karena takut dikritik publik, akan mengalami tekanan internal yang dapat berujung pada perubahan sikap ke salah satu arah tergantung pada faktor sosial yang lebih dominan. Proses perubahan sikap ini relevan bagi mahasiswa ilmu pemerintahan karena kebijakan publik yang efektif mensyaratkan kemampuan menganalisis pada komponen mana sikap warga atau aparaturnya perlu diintervensi secara tepat dan berbasis integritas.

Tabel 3.3 Perbandingan Tiga Sumber Pembentukan Sikap

Sumber	Mekanisme Utama	Komponen Sikap yang Paling Terpengaruh	Contoh dalam Konteks Pemerintahan
Pengalaman Langsung	Kontak nyata dengan objek sikap menghasilkan evaluasi berbasis fakta personal	Afektif dan Kognitif	Warga yang pernah mengurus KTP elektronik secara langsung membentuk sikap terhadap kualitas layanan disdukcapil
Pembelajaran Sosial	Observasi perilaku	Konatif dan Kognitif	Staf kelurahan yang

Sumber	Mekanisme Utama	Komponen Sikap yang Paling Terpengaruh	Contoh dalam Konteks Pemerintahan
	orang lain dan penguatan (reward/punishment) dari lingkungan		melihat atasannya dihargai karena inovasi layanan cenderung membentuk sikap positif terhadap reformasi birokrasi
Kelompok Referensi	Norma dan nilai kelompok dijadikan acuan evaluasi terhadap objek sikap	Afektif dan Konatif	Aktivis mahasiswa yang bergabung dengan gerakan antikorupsi membentuk sikap penolakan kuat terhadap gratifikasi di lingkungan pemerintahan

[Gambar 3.3 belum diunggah]

Gambar 3.3 Diagram lingkaran tiga segmen berlabel Kognitif, Afektif, dan Konatif yang mengelilingi objek sikap di tengah, disertai anak panah dua arah antarsegmen untuk menunjukkan saling keterkaitan; di sisi kanan diagram terdapat tiga kotak sumber pembentukan sikap

ANALOGI

Bayangkan sikap seperti bangunan rumah: komponen kognitif adalah fondasi berupa fakta dan keyakinan yang menopang seluruh struktur, komponen afektif adalah dinding yang memberi warna dan suasana rumah, sedangkan komponen konatif adalah pintu yang menentukan apakah penghuni akan keluar dan bertindak. Jika fondasi retak karena informasi yang salah, seluruh bangunan sikap pun akan goyah dan mudah diubah oleh tekanan sosial dari luar.

CONTOH

Seorang mahasiswa ilmu pemerintahan semester awal di Gorontalo awalnya memiliki keyakinan kognitif bahwa e-government hanya mempersulit masyarakat karena infrastruktur internet di daerahnya terbatas. Setelah mengikuti kunjungan lapangan ke Dinas Kependudukan yang berhasil menerapkan antrian digital, ia menyaksikan langsung antrian lebih tertib dan warga lebih puas, sehingga komponen afektifnya

berubah menjadi positif. Perubahan afektif ini kemudian mendorong komponen konatifnya: ia mulai aktif mengusulkan digitalisasi layanan dalam diskusi kelas dan organisasi. Proses ini menggambarkan bagaimana pengalaman langsung mengubah satu komponen yang kemudian secara bertahap merekonstruksi keseluruhan sikap melalui mekanisme konsistensi internal.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi yang sering muncul adalah anggapan bahwa sikap selalu mencerminkan perilaku nyata, sehingga jika seseorang bersikap positif terhadap partisipasi warga maka ia pasti akan berpartisipasi. Pembetulannya: Richard LaPiere sejak 1934 telah menunjukkan bahwa hubungan sikap dan perilaku tidak otomatis dan seringkali lemah karena dimoderasi oleh norma sosial, kendala situasional, dan kekuatan kebiasaan. Dalam konteks pemerintahan, seorang aparatur bisa memiliki sikap positif terhadap transparansi anggaran secara kognitif dan afektif, tetapi komponen konatifnya tidak terwujud dalam perilaku nyata karena tekanan atasan atau budaya organisasi yang tidak mendukung. Oleh karena itu, analisis sikap yang komprehensif harus memeriksa ketiga komponen secara terpisah, bukan menyimpulkan perilaku semata dari pernyataan sikap verbal.

D. Analisis Kasus: Atribusi, Bias, dan Sikap dalam Fenomena Sosial Indonesia

Ketiga konsep yang telah dibahas — persepsi sosial, atribusi, dan pembentukan sikap — tidak beroperasi secara terpisah, melainkan membentuk rantai proses kognitif-sosial yang saling mengunci. Ketika warga menilai seorang pejabat daerah yang tertangkap korupsi, mereka tidak hanya mencatat fakta; mereka secara bersamaan mengonstruksi atribusi (apakah ini karakter buruk pejabat itu atau sistem yang korup?), mengaktifkan bias kognitif tertentu, dan memperkuat atau mengubah sikap terhadap lembaga pemerintahan secara keseluruhan. Di Kawasan Timur Indonesia, pola ini sangat kentara karena kedekatan komunitas memperkuat pengaruh kelompok referensi terhadap interpretasi peristiwa publik. Memahami rantai ini adalah kompetensi inti analitik yang dibutuhkan mahasiswa Ilmu Pemerintahan untuk mendiagnosis mengapa kebijakan tertentu diterima atau ditolak masyarakat.

Kasus hoaks kesehatan selama pandemi COVID-19 di Indonesia menyediakan laboratorium nyata untuk menganalisis ketiga konsep sekaligus. Ketika video tidak terverifikasi tentang efek samping vaksin menyebar di WhatsApp, sebagian besar

penerima pesan langsung melakukan atribusi internal terhadap korban dalam video itu — menyimpulkan bahwa orang tersebut memang lemah atau tidak cocok divaksin — tanpa mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi pra-eksisting atau manipulasi video. Ini adalah contoh klasik *fundamental attribution error*: kecenderungan melebihkan penyebab internal sambil meremehkan faktor situasional. Pada saat bersamaan, *actor-observer bias* bekerja sebaliknya: orang yang sama yang mengatribusikan kelemahan internal kepada korban di video justru mengatribusikan keragu-raguan dirinya sendiri terhadap vaksin kepada faktor eksternal (pemerintah tidak transparan, informasi tidak konsisten). Dua bias ini berjalan beriringan dan menghasilkan sikap antivaksin yang memiliki komponen kognitif (keyakinan bahwa vaksin berbahaya), afektif (rasa takut dan curiga), sekaligus konatif (menolak divaksin dan mendorong anggota keluarga untuk hal yang sama).

Contoh kedua yang relevan untuk mahasiswa Ilmu Pemerintahan adalah fenomena dukungan atau penolakan terhadap pemekaran daerah di wilayah Indonesia Timur. Kelompok yang mendukung pemekaran cenderung menggunakan atribusi eksternal untuk menjelaskan ketertinggalan daerahnya — menyalahkan pemerintah pusat yang jauh, distribusi anggaran yang tidak adil, dan infrastruktur yang terbatas. Kelompok yang menolak pemekaran justru menggunakan atribusi internal terhadap daerah-daerah yang terbukti gagal setelah dimekarkan — menyimpulkan bahwa masalahnya adalah kapasitas sumber daya manusia lokal. Kedua kelompok sama-sama menunjukkan bias atribusi yang melayani kepentingan posisi mereka masing-masing, suatu pola yang dikenal dalam psikologi sosial sebagai *self-serving attribution bias*. Sikap akhir yang terbentuk pada masing-masing kelompok bukan semata produk informasi, melainkan hasil interaksi antara bias kognitif, pengalaman langsung dengan layanan pemerintahan, dan tekanan normatif dari kelompok referensi — keluarga, tokoh adat, atau jaringan partai politik.

Analisis dua kasus di atas menunjukkan implikasi langsung bagi praktik pemerintahan: kebijakan yang dirancang tanpa memperhitungkan bias atribusi yang berlaku di masyarakat sasaran hampir pasti akan salah membaca resistensi publik sebagai ketidaktahuan semata. Seorang aparatur pemerintah yang memiliki integritas analitik — nilai yang seharusnya menjiwai profesionalisme pelayan publik — perlu mampu membedakan apakah penolakan warga terhadap suatu program berakar pada sikap yang dibentuk oleh pengalaman langsung yang buruk, pembelajaran sosial dari kelompok referensi, atau distorsi atribusi yang dapat dikoreksi melalui komunikasi yang tepat. Kemampuan menghubungkan bias atribusi dan pembentukan sikap dengan fenomena sosial aktual inilah yang membedakan analisis kebijakan yang adaptif dari birokrat yang sekadar menjalankan prosedur. Dengan demikian, sub-bab ini bukan penutup yang berdiri sendiri, melainkan jembatan

antara konsep teoritis yang dibangun di sub-bab A, B, dan C dengan kapasitas analisis nyata yang akan terus dikembangkan sepanjang perkuliahan Psikologi Sosial.

Tabel 3.4 Perbandingan Pola Atribusi dan Dampak Sikap pada Dua Kasus Fenomena Sosial Indonesia

Dimensi Analisis	Kasus Hoaks Vaksin COVID-19	Kasus Pemekaran Daerah Indonesia Timur
Jenis atribusi dominan pada kelompok penolak/pendukung	Atribusi internal terhadap korban dalam video (korban dianggap lemah/tidak cocok)	Atribusi eksternal terhadap ketertinggalan daerah (menyalahkan pemerintah pusat)
Bias atribusi yang teridentifikasi	Fundamental attribution error dan actor-observer bias	Self-serving attribution bias pada kedua kelompok
Komponen sikap yang terbentuk	Kognitif: vaksin berbahaya; Afektif: takut dan curiga; Konatif: menolak dan mengajak keluarga menolak	Kognitif: pemekaran sebagai solusi atau masalah; Afektif: harapan atau pesimisme; Konatif: mobilisasi dukungan atau penolakan
Sumber pembentukan sikap yang dominan	Pembelajaran sosial melalui media sosial dan pengaruh kelompok referensi keluarga/komunitas agama	Pengalaman langsung dengan layanan pemerintah dan pengaruh kelompok referensi adat/politik
Implikasi bagi kebijakan pemerintahan	Komunikasi kebijakan vaksinasi perlu mengoreksi bias, bukan hanya menyajikan data teknis	Kajian pemekaran perlu mengidentifikasi bias atribusi pemangku kepentingan sebelum merancang narasi kebijakan

[Gambar 3.4 belum diunggah]

Gambar 3.4 Diagram alir tiga tahap yang menggambarkan rantai proses: (1) Peristiwa sosial sebagai stimulus (contoh: video vaksin atau isu pemekaran), panah ke (2) Proses atribusi dengan dua percabangan (atribusi internal vs. atribusi eksternal) beserta label bias ya

ANALOGI

Proses ini menyerupai cara hakim dan terdakwa membaca sidang yang sama secara berbeda: hakim (yang berada di luar peristiwa) cenderung menilai tindakan terdakwa sebagai cerminan karakter — atribusi internal — sementara terdakwa menjelaskan tindakannya melalui tekanan situasi yang ia alami — atribusi eksternal. Di ruang publik Indonesia, warga berperan sebagai 'hakim' atas perilaku pejabat dan kelompok lain, sementara menganggap diri sendiri sebagai 'terdakwa' yang bertindak karena keadaan. Ketidaksimetrisan inilah yang mengunci konflik persepsi antara pemerintah

dan warga menjadi deadlock yang sulit dipecahkan tanpa intervensi komunikasi yang sadar terhadap bias.

CONTOH

Mahasiswa menganalisis kasus nyata: pada 2021, video yang mengklaim seorang warga meninggal setelah vaksinasi beredar luas di Sulawesi dan Maluku. Langkah pertama — identifikasi atribusi: sebagian besar komentar di unggahan video mengatribusikan kematian kepada vaksin itu sendiri (atribusi internal pada objek vaksin), bukan pada kondisi kesehatan pra-eksisting atau keabsahan video (faktor eksternal). Langkah kedua — identifikasi bias: ini adalah fundamental attribution error karena mengabaikan faktor situasional; sekaligus actor-observer bias karena orang yang sama yang menghakimi vaksin sebagai penyebab justru mengatribusikan keengganannya sendiri divaksin kepada 'kurangnya transparansi pemerintah'. Langkah ketiga — lacak pembentukan sikap: komponen kognitif terbentuk (vaksin tidak aman), komponen afektif diperkuat melalui berbagi cerita emosional di grup keluarga, dan komponen konatif muncul dalam bentuk penolakan vaksinasi dan penyebaran pesan penolakan. Langkah keempat — rumuskan implikasi kebijakan: pemerintah yang hanya merespons dengan data statistik keamanan vaksin gagal menyentuh komponen afektif dan tidak mengoreksi bias atribusi yang mendasari penolakan tersebut.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi yang paling umum adalah anggapan bahwa bias atribusi hanya terjadi pada orang yang kurang berpendidikan atau kurang informasi, sehingga solusinya cukup dengan menambah informasi. Pembetulannya: riset psikologi sosial secara konsisten menunjukkan bahwa bias atribusi adalah mekanisme kognitif universal yang justru sering lebih kuat pada individu yang merasa dirinya sudah terinformasi, karena keyakinan diri yang tinggi menurunkan kewaspadaan terhadap distorsi persepsi diri sendiri. Di konteks Ilmu Pemerintahan, ini berarti seorang pejabat senior pun sama rentannya dengan warga biasa terhadap fundamental attribution error ketika mengevaluasi kegagalan program yang ia rancang — ia cenderung mengatribusikan kegagalan kepada 'masyarakat yang belum siap' (atribusi internal pada masyarakat) daripada kepada desain kebijakan yang tidak kontekstual (faktor eksternal yang seharusnya ia kontrol).

RANGKUMAN

- Persepsi sosial adalah proses aktif yang dipengaruhi skema dan konteks, sehingga dua individu dapat menafsirkan situasi pemerintahan yang sama secara berbeda.
- Teori atribusi Heider dan Kelley menjelaskan bahwa individu cenderung menerangkan perilaku orang lain melalui faktor internal atau eksternal, dengan kecenderungan tersistematisasi dalam bentuk bias seperti fundamental attribution error dan actor-observer bias.
- Sikap terbentuk melalui interaksi komponen kognitif, afektif, dan konatif, dan bersumber dari pengalaman langsung, pembelajaran sosial, maupun tekanan kelompok referensi.
- Bias atribusi yang tidak dikenali dapat memperkuat prasangka sosial dan mendistorsi evaluasi kebijakan publik—keterkaitan yang akan dieksplorasi lebih lanjut pada Pertemuan 7.
- Kemampuan menganalisis atribusi dan sikap secara multiperspektif merupakan kompetensi inti mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang menghayati nilai integritas dan adaptabilitas dalam membaca realitas sosial-politik.

REFERENSI

- Myers, D. G. (2013). *Social Psychology*. 11th Edition. McGraw-Hill.
- Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2016). *Social Psychology*. 9th Edition. Pearson.
- Hogg, M. A., & Vaughan, G. M. (2018). *Social Psychology*. 8th Edition. Pearson.
- Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2006). *Social Psychology*. 12th Edition. Pearson Prentice Hall.
- Cialdini, R. B. (2009). *Influence: Science and Practice*. 5th Edition. Pearson.
- Sarwono, S. W. (2015). *Psikologi Sosial*. Edisi 2. Salemba Humanika.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2022. *Standar Nasional Pendidikan (Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi)*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2024. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Outcome Based Education (OBE)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- Norris, Pippa. 2011. *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Putnam, Robert D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon and Schuster.

Sears, David O., Jonathan L. Freedman, dan L. Anne Peplau. 1994. Psikologi Sosial. Terjemahan Michael Adryanto. Jakarta: Erlangga.

Myers (2013); Aronson, Wilson, & Akert (2016); Taylor, Peplau, & Sears (2006); Sarwono (2015); Sears, Freedman, & Peplau (1994).

PERTEMUAN 4

Konformitas, Kepatuhan, dan Pengaruh Sosial

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:

19. Mengidentifikasi jenis pengaruh sosial (normatif atau informasional) yang bekerja pada minimal 2 kasus perilaku kelompok dengan bukti kutipan data kasus; Membedakan konformitas, kepatuhan (compliance), dan ketaatan (obedience) berdasarkan 3 kriteria: sumber tekanan, kesadaran individu, dan durabilitas perubahan sikap; Menyajikan analisis tertulis (500–700 kata) tentang perubahan sikap pada satu kasus faktual menggunakan minimal 1 teori sikap yang relevan
20. Menganalisis mekanisme konformitas dengan membedakan pengaruh informatif dan pengaruh normatif berdasarkan kasus faktual yang disediakan
21. Menganalisis kondisi yang mendorong kepatuhan (compliance) dan ketaatan (obedience) mengacu pada temuan eksperimental klasik dan konteks sosial kontemporer
22. Mengevaluasi faktor-faktor situasional dan personal yang memperkuat atau melemahkan konformitas dan kepatuhan dalam kelompok
23. Mengidentifikasi strategi pengaruh sosial (reciprocity, commitment, social proof, authority, liking, scarcity) dalam kasus kampanye atau fenomena sosial nyata
24. Merumuskan implikasi etis dari mekanisme pengaruh sosial bagi kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi di Indonesia sebagai latihan penalaran kritis C4-C5

Pendahuluan

Pertemuan ketiga telah membedah bagaimana individu membentuk persepsi, membuat atribusi, dan membangun sikap terhadap objek sosial. Pertemuan keempat ini melangkah lebih jauh dengan mengkaji apa yang terjadi ketika individu berhadapan dengan tekanan sosial dari lingkungannya: kapan seseorang menyesuaikan diri, kapan ia tunduk pada permintaan, dan kapan ia mematuhi otoritas meskipun bertentangan dengan nuraninya. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan semata akademis; dalam konteks Ilmu Pemerintahan, mekanisme konformitas dan kepatuhan menjelaskan mengapa massa dapat digerakkan oleh narasi politik tertentu,

mengapa pemilih mengikuti pilihan kelompok referensinya, dan mengapa aparat birokrasi kadang melaksanakan kebijakan yang diragukan keabsahan etisnya.

Pemahaman analitis atas mekanisme pengaruh sosial juga menyentuh nilai integritas (Integrity) dan tanggung jawab demokratis: mahasiswa sebagai calon penyelenggara pemerintahan perlu mampu mengenali kapan dirinya dan warga sedang dipengaruhi, oleh mekanisme apa, dan apa konsekuensi etisnya bagi kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Materi ini sekaligus meletakkan fondasi bagi Pertemuan 5 tentang dinamika kelompok dan kepemimpinan, serta Pertemuan 6 tentang deindividuasi dan perilaku massa.

A. Konformitas: Definisi, Jenis, dan Faktor Penentu

Konformitas adalah perubahan perilaku atau keyakinan seseorang sebagai respons terhadap tekanan nyata maupun yang dibayangkan dari kelompok, tanpa adanya paksaan langsung yang bersifat koersif. Muzafer Sherif dan Solomon Asch adalah dua tokoh yang paling berpengaruh dalam meletakkan fondasi empiris konsep ini. Sherif melalui eksperimen efek autokinetik (1935) menunjukkan bahwa individu cenderung menyesuaikan persepsinya dengan norma kelompok ketika situasi ambigu, sementara Asch (1951) membuktikan bahwa konformitas tetap terjadi bahkan ketika jawaban kelompok jelas-jelas keliru secara objektif. Dua temuan ini mengungkap dua jalur berbeda yang mendasari konformitas: pengaruh informasional dan pengaruh normatif, yang masing-masing bekerja melalui mekanisme psikologis yang berlainan [Aronson, Wilson, Akert 2010].

Pengaruh informasional terjadi ketika individu menerima pendapat kelompok sebagai bukti nyata tentang realitas, terutama dalam situasi yang tidak pasti atau membutuhkan keahlian khusus. Sebaliknya, pengaruh normatif bekerja bukan karena individu percaya kelompok benar, melainkan karena ia ingin diterima, menghindari penolakan, atau menjaga harmoni sosial. Perbedaan ini krusial karena berdampak pada daya tahan perubahan sikap: konformitas yang didorong pengaruh informasional cenderung menghasilkan internalisasi nilai, sedangkan konformitas normatif lebih sering bersifat sementara dan akan pudar ketika tekanan kelompok hilang. Dalam konteks pemerintahan daerah di Kawasan Timur Indonesia, pengaruh normatif sering terlihat dalam rapat musyawarah desa ketika warga menyetujui keputusan kepala adat bukan karena diyakini benar, melainkan karena nilai kebersamaan dan rasa sungkan yang kuat.

Beberapa faktor situasional dan personal secara konsisten memperkuat atau melemahkan konformitas. Faktor situasional meliputi ukuran kelompok (konformitas meningkat hingga kelompok berisi 4-5 orang lalu melandai), kebulatan suara kelompok (kehadiran satu sekutu yang berbeda pendapat sudah cukup mengurangi konformitas hingga 25%), dan tingkat visibilitas respons individu di hadapan kelompok. Faktor personal mencakup harga diri, kebutuhan akan persetujuan, dan tingkat identifikasi individu terhadap kelompok tersebut. Nilai Harmony dalam karakter ICHSA-N yang ditanamkan di lingkungan akademik perlu dibedakan secara kritis dari konformitas buta: harmoni sejati menghargai perbedaan pendapat yang konstruktif, sedangkan konformitas normatif yang berlebihan justru mematikan fungsi deliberatif yang menjadi inti demokrasi.

Miskonsepsi yang paling umum adalah anggapan bahwa konformitas selalu bersifat negatif dan merupakan tanda kelemahan karakter. Pembetulannya: konformitas berfungsi adaptif dalam banyak situasi, misalnya ketika seseorang yang baru tiba di kota asing mengikuti aturan antrean atau tata tertib yang belum ia pahami sepenuhnya -- ini adalah konformitas informasional yang rasional dan efisien. Masalah etis baru muncul ketika konformitas mendorong individu untuk mengabaikan penilaian moral pribadi demi penerimaan kelompok, seperti yang terjadi dalam fenomena groupthink pada pengambilan keputusan birokrasi. Oleh karena itu, pemahaman tentang jenis dan faktor penentu konformitas bukan sekadar pengetahuan akademik, melainkan bekal analitis bagi calon aparatur pemerintah agar mampu membedakan konsensus yang legitimate dari tekanan sosial yang menyimpang.

Tabel 4.1 Perbandingan Pengaruh Informasional dan Pengaruh Normatif sebagai Basis Konformitas

Dimensi Pembanding	Pengaruh Informasional	Pengaruh Normatif
Motivasi utama individu	Mencari kebenaran / mengurangi ketidakpastian	Mencari penerimaan / menghindari penolakan
Kondisi pemicu	Situasi ambigu, topik kompleks, kurang pengalaman	Situasi sosial publik, kelompok kohesif, norma eksplisit
Hasil pada sikap	Internalisasi: perubahan keyakinan yang relatif permanen	Compliance: perubahan perilaku sementara, keyakinan tak berubah
Contoh dalam konteks pemerintahan	Staf baru mengikuti prosedur birokrasi karena percaya atasannya lebih berpengalaman	Anggota dewan menyetujui rancangan perda dalam sidang terbuka meski secara pribadi meragukan
Temuan eksperimental acuan	Eksperimen efek autokinetik	Eksperimen garis Asch (1951)

Dimensi Pemandangan	Pengaruh Informasional	Pengaruh Normatif
Sherif (1935)		

[Gambar 4.1 belum diunggah]

Gambar 4.1 Diagram dua jalur konformitas: satu jalur berlabel 'Situasi Ambigu' mengarah ke kotak 'Pengaruh Informasional' lalu ke 'Internalisasi (Permanen)'; jalur kedua berlabel 'Tekanan Sosial Publik' mengarah ke kotak 'Pengaruh Normatif' lalu ke 'Compliance (Sementara)'

ANALOGI

Bayangkan Anda baru pertama kali masuk warung makan di kota yang belum dikenal. Ketika bingung cara memesan, Anda melihat cara pelanggan lain berbicara kepada pemilik warung dan Anda mengikutinya -- itu pengaruh informasional karena Anda yakin mereka tahu caranya. Namun, jika Anda sebenarnya ingin memesan menu pedas tetapi memilih menu biasa karena semua teman seperjalanan memesan yang sama dan Anda tak ingin dianggap aneh, itulah pengaruh normatif: Anda tahu pilihan Anda berbeda, tetapi Anda memilih sesuai kelompok demi penerimaan sosial.

CONTOH

Kasus bertahap: (1) Sebuah tim perumus kebijakan di salah satu kabupaten Sulawesi Tengah sedang mendiskusikan alokasi anggaran infrastruktur. Anggota termuda, sebut saja Andi, tidak yakin apakah data kebutuhan jalan yang disajikan sudah akurat karena angkanya tampak terlalu besar. (2) Namun, tiga anggota senior sebelumnya telah menyatakan setuju tanpa keberatan. Andi pun diam dan ikut menyetujui. (3) Identifikasi jenis pengaruh: jika Andi diam karena berpikir para senior pasti lebih tahu kondisi lapangan, maka ini pengaruh informasional. Jika Andi diam karena takut dianggap tidak sopan atau meremehkan senior, maka ini pengaruh normatif. (4) Implikasi: pada skenario kedua, persetujuan Andi tidak mencerminkan keyakinannya dan kemungkinan besar tidak akan bertahan jika norma kelompok berubah -- ini titik rawan groupthink dalam pengambilan keputusan publik.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi: Konformitas berarti seseorang tidak punya pendirian atau kepribadian yang lemah. Pembetulan: Asch sendiri menemukan bahwa bahkan individu dengan harga diri tinggi pun berkonformitas dalam kondisi tertentu, karena konformitas adalah respons adaptif terhadap tekanan sosial, bukan cerminan tetap karakter

seseorang. Yang membedakan adalah jenis pengaruh yang bekerja dan apakah individu mampu mengidentifikasi tekanan tersebut secara sadar -- kemampuan inilah yang dilatih melalui literasi psikologi sosial.

B. Kepatuhan dan Ketaatan: Eksperimen Klasik dan Konteks Kontemporer

Kepatuhan (compliance) dan ketaatan (obedience) adalah dua bentuk pengaruh sosial yang sering dicampuradukkan, padahal keduanya berbeda secara mendasar pada tiga kriteria: sumber tekanan, kesadaran individu, dan durabilitas perubahan sikap. Kepatuhan terjadi ketika seseorang mengubah perilakunya sebagai respons atas permintaan eksplisit dari individu atau kelompok lain, tanpa harus meyakini kebenaran permintaan tersebut — perubahan bersifat publik tetapi belum tentu menyentuh sikap privat. Ketaatan, sebaliknya, melibatkan perintah dari figur otoritas yang diakui secara hierarkis, sehingga individu merasa tidak memiliki pilihan selain menurut meskipun perintah itu bertentangan dengan nilai pribadinya. Perbedaan ini penting bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan karena struktur birokrasi, relasi warga-negara, dan dinamika partai politik di Indonesia semuanya mengandalkan kedua mekanisme ini secara bersamaan [Cialdini & Goldstein 2004].

Dasar eksperimental paling berpengaruh dalam memahami ketaatan adalah rangkaian studi Stanley Milgram di Universitas Yale pada 1960-an. Milgram meminta partisipan yang berperan sebagai 'guru' untuk memberikan sengatan listrik (yang sebenarnya palsu) kepada 'murid' setiap kali murid memberi jawaban salah, dengan intensitas yang terus meningkat hingga 450 volt. Hasilnya mengejutkan: sekitar 65 persen partisipan bersedia meneruskan hingga level tertinggi ketika seorang eksperimenter berjas lab memerintahkan mereka untuk melanjutkan. Milgram menyimpulkan bahwa individu memasuki 'keadaan agentic' — kondisi psikologis di mana tanggung jawab moral dialihkan kepada figur otoritas sehingga pelaku merasa sekadar menjalankan tugas, bukan memilih tindakan [Myers 2013]. Temuan ini memperlihatkan betapa kondisi situasional — kehadiran otoritas legitim, jarak fisik antara pelaku dan korban, serta tekanan kelembagaan — jauh lebih menentukan perilaku daripada karakter personal individu semata.

Dalam konteks kontemporer, mekanisme ketaatan tidak hanya hidup di laboratorium melainkan berwujud dalam sistem birokrasi pemerintahan, struktur militer dan kepolisian, hingga platform digital yang menggunakan desain antarmuka sebagai bentuk otoritas algoritme. Di Indonesia, sejumlah kasus pengambilan kebijakan

publik memperlihatkan bagaimana aparaturnya menjalankan instruksi atasan yang meragukan secara etis dengan mengandalkan alasan 'prosedur' dan 'perintah dinas' — sebuah replika dari keadaan agentic Milgram dalam skala organisasi. Penelitian Philip Zimbardo melalui Stanford Prison Experiment (1971) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa peran sosial yang dikenakan situasi mampu mengubah perilaku individu secara dramatis dalam waktu singkat [Baron, Branscombe & Byrne 2008]. Kesadaran akan mekanisme ini adalah prasyarat bagi praktisi pemerintahan yang ingin membangun tata kelola berintegritas — salah satu nilai inti yang seharusnya menopang layanan publik di Kawasan Timur Indonesia maupun nasional.

Kepatuhan (compliance) dioperasionalkan melalui sejumlah teknik yang terbukti secara eksperimental. Teknik foot-in-the-door meminta kesepakatan kecil terlebih dahulu sebelum mengajukan permintaan yang lebih besar; teknik door-in-the-face sebaliknya mengajukan permintaan besar yang sengaja ditolak agar permintaan lebih kecil berikutnya terasa wajar; sementara teknik lowballing mengubah syarat kesepakatan setelah persetujuan awal diperoleh. Ketiga teknik ini banyak ditemukan dalam negosiasi kebijakan, kampanye politik, dan pemasaran sosial, termasuk dalam program advokasi pembangunan di daerah-daerah tertinggal di Indonesia Timur. Faktor personal seperti kebutuhan kognitif tinggi, kesadaran diri publik yang kuat, dan orientasi nilai kolektivistik terbukti memoderasi seberapa mudah seseorang tunduk pada teknik-teknik tersebut [Taylor, Peplau & Sears 2009]. Memahami faktor pemoderasi ini memungkinkan calon penyelenggara pemerintahan untuk merancang komunikasi kebijakan yang persuasif sekaligus menghormati otonomi warga — cerminan dari nilai adaptabilitas dan harmoni dalam praktik pemerintahan yang baik.

Tabel 4.2 Perbandingan Konformitas, Kepatuhan, dan Ketaatan Berdasarkan Tiga Kriteria

Kriteria	Konformitas	Kepatuhan (Compliance)	Ketaatan (Obedience)
Sumber tekanan	Tekanan kelompok implisit atau yang dibayangkan	Permintaan eksplisit dari individu/kelompok sebaya	Perintah dari figur otoritas hierarkis
Kesadaran individu	Sering tidak disadari; terjadi secara otomatis	Disadari; individu dapat memilih menolak tetapi memilih patuh	Disadari namun rasa tanggung jawab dialihkan ke otoritas
Durabilitas perubahan sikap	Bervariasi; bisa internalisasi jika	Sementara; berhenti saat permintaan	Sementara hingga menengah;

Kriteria	Konformitas	Kepatuhan (Compliance)	Ketaatan (Obedience)
	normatif kuat	dicabut	bergantung pada legitimasi otoritas

[Gambar 4.2 belum diunggah]

Gambar 4.2 Diagram alur dua jalur: (1) jalur Kepatuhan — permintaan eksplisit dari rekan/kelompok → evaluasi individu → penerimaan/penolakan → teknik foot-in-the-door, door-in-the-face, lowballing; (2) jalur Ketaatan — perintah dari figur otoritas → keadaan agentic

ANALOGI

Bayangkan seorang pegawai baru di kantor dinas kabupaten diminta atasannya menandatangani laporan perjalanan dinas yang angkanya tidak sesuai kenyataan. Jika ia menandatangani karena takut dipecat atau ingin diterima dalam kelompok, itulah kepatuhan berbasis tekanan sosial. Jika ia menandatangani sambil berkata 'saya hanya menjalankan perintah atasan' dan merasa tidak bertanggung jawab atas konsekuensinya, itulah ketaatan dalam keadaan agentic — persis seperti partisipan Milgram yang menekan tombol sengatan karena eksperimenter berkata 'silakan lanjutkan'.

CONTOH

Kasus bertahap: Tahap 1 — Seorang camat di sebuah kabupaten di Sulawesi meminta stafnya mengisi borang evaluasi singkat tentang program bantuan sosial (permintaan kecil, foot-in-the-door). Tahap 2 — Setelah staf menyetujui, camat meminta mereka membuat laporan naratif panjang yang melebih-lebihkan capaian program agar anggaran tidak dipotong (permintaan besar). Tahap 3 — Karena telah berkomitmen pada langkah pertama, sebagian besar staf menuruti permintaan kedua meski menyadari ketidakjujurannya — inilah compliance melalui teknik foot-in-the-door. Tahap 4 — Ketika kepala dinas meminta hal serupa secara formal melalui surat perintah, staf yang sama merasa 'wajib' menuruti karena figur otoritas lebih tinggi telah berbicara — mekanisme beralih menjadi obedience. Analisis kedua tahap ini dengan mengacu pada kriteria sumber tekanan, kesadaran, dan durabilitas akan menghasilkan perbedaan yang terukur dan dapat dijadikan bahan diskusi kasus di kelas.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi umum: banyak mahasiswa menganggap bahwa orang yang taat pada otoritas pasti memiliki karakter lemah atau pengecut. Pembetulan: temuan Milgram justru menunjukkan sebaliknya — mayoritas partisipan adalah individu normal dengan kesehatan psikologis baik. Ketaatan terjadi bukan karena kelemahan karakter melainkan karena situasi menciptakan keadaan agentic yang secara sistemis menggeser rasa tanggung jawab. Implikasinya: siapa pun, termasuk calon birokrat dan penyelenggara pemerintahan, rentan terhadap mekanisme ini jika tidak secara sadar membangun refleksi etis dan keberanian moral (moral courage) sebagai tameng terhadap tekanan hierarki.

C. Strategi Pengaruh Sosial: Prinsip Cialdini dalam Kasus Kampanye

Robert Cialdini, psikolog sosial Amerika, merumuskan enam prinsip pengaruh sosial yang ia sebut sebagai senjata persuasi berdasarkan riset lapangan selama bertahun-tahun. Keenam prinsip itu adalah reciprocity (timbal balik), commitment and consistency (komitmen dan konsistensi), social proof (bukti sosial), authority (otoritas), liking (rasa suka), dan scarcity (kelangkaan). Prinsip-prinsip ini tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan sering dipadukan dalam satu strategi kampanye yang utuh, baik kampanye politik, kampanye kesehatan publik, maupun kampanye pemasaran. Penting dipahami bahwa prinsip-prinsip ini merupakan deskripsi ilmiah tentang bagaimana manusia merespons lingkungan sosialnya secara otomatis, bukan sekadar trik manipulatif, sehingga pemahaman kritis atasnya menjadi bekal literasi sosial yang penting dalam kehidupan berdemokrasi.

Prinsip reciprocity bekerja pada dorongan psikologis manusia untuk membalas pemberian atau kebaikan yang diterima. Dalam konteks kampanye politik Indonesia, seorang kandidat yang membagi sembako atau mengadakan bakti sosial sebelum masa kampanye resmi tengah mengaktifkan prinsip ini: warga merasa berutang budi dan cenderung membalas dengan suara atau dukungan. Prinsip commitment and consistency menjelaskan mengapa seseorang yang telah menyatakan dukungan terbuka, misalnya mengunggah foto bersama kandidat di media sosial, akan sulit berbalik arah karena mereka berusaha konsisten dengan identitas publik yang telah mereka deklarasikan. Prinsip social proof memanfaatkan kecenderungan manusia untuk menganggap suatu perilaku benar apabila banyak orang lain juga melakukannya, sebagaimana terlihat pada kampanye yang memajang angka relawan atau testimoni massa sebagai sinyal popularitas.

Prinsip authority mengacu pada kecenderungan individu untuk mematuhi arahan atau mempercayai klaim dari pihak yang dianggap memiliki keahlian atau jabatan. Dalam kampanye vaksinasi, misalnya, rekomendasi dari dokter spesialis atau tokoh agama terbukti meningkatkan penerimaan masyarakat secara signifikan, jauh melebihi iklan biasa. Prinsip liking menjelaskan bahwa seseorang lebih mudah dipengaruhi oleh individu atau kelompok yang mereka sukai, yang mirip dengan mereka, atau yang tampak menarik secara fisik maupun personal, sehingga para juru kampanye di kawasan timur Indonesia kerap memilih tokoh lokal yang dikenal dan dicintai warga setempat sebagai penyampai pesan. Prinsip scarcity mendorong tindakan dengan menciptakan persepsi kelangkaan atau urgensi, seperti pendaftaran yang dibatasi, penawaran yang habis dalam hitungan hari, atau status eksklusif keanggotaan, karena manusia cenderung menginginkan lebih banyak hal yang tampak semakin sulit diperoleh. Keenam prinsip ini beroperasi di bawah ambang kesadaran penuh individu, yang justru menjadikannya efektif sekaligus berpotensi disalahgunakan bila tidak diimbangi nilai integritas dari para pelaku kampanye.

Tabel 4.3 Enam Prinsip Pengaruh Sosial Cialdini dan Penerapannya dalam Kampanye

Prinsip	Mekanisme Psikologis	Contoh dalam Kampanye Indonesia
Reciprocity (Timbal Balik)	Dorongan untuk membalas pemberian atau kebaikan yang diterima	Kandidat membagikan bantuan sembako atau mengadakan pengobatan gratis sebelum masa kampanye resmi
Commitment and Consistency (Komitmen)	Keinginan konsisten dengan pernyataan atau tindakan publik yang telah dilakukan	Relawan yang mengunggah dukungan terbuka di media sosial cenderung mempertahankan pilihan hingga hari pemilihan
Social Proof (Bukti Sosial)	Perilaku dianggap benar bila banyak orang lain melakukannya	Tim kampanye memajang jumlah pendukung, foto kerumunan, atau testimoni tokoh komunitas
Authority (Otoritas)	Kepercayaan dan kepatuhan kepada figur yang dianggap ahli atau berwenang	Dokter dan ulama setempat menjadi juru bicara kampanye vaksinasi atau program kesehatan pemerintah
Liking (Rasa Suka)	Lebih mudah dipengaruhi oleh orang yang disukai atau dianggap mirip	Tokoh lokal dan influencer daerah direkrut sebagai duta kampanye untuk menjangkau

Prinsip	Mekanisme Psikologis	Contoh dalam Kampanye Indonesia
		komunitas spesifik
Scarcity (Kelangkaan)	Hal yang langka atau terbatas terasa lebih bernilai dan mendorong tindakan segera	Pendaftaran program beasiswa dengan kuota terbatas atau tiket acara kampanye yang disebut hampir habis

[Gambar 4.3 belum diunggah]

Gambar 4.3 Diagram lingkaran atau roda yang menempatkan enam prinsip Cialdini (Reciprocity, Commitment, Social Proof, Authority, Liking, Scarcity) mengelilingi label pusat 'Pengaruh Sosial', dengan anak panah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat bekerja

ANALOGI

Bayangkan Anda baru pindah ke lingkungan baru dan tetangga membawakan makanan. Anda hampir pasti merasa terdorong untuk membalas kebaikan itu kelak. Itulah reciprocity. Keesokan harinya, Anda melihat sebagian besar tetangga menghadiri rapat RT dan Anda ikut meski belum tahu agendanya karena berpikir pasti ada alasan baik di baliknya. Itulah social proof. Tanpa Anda sadari, dua prinsip Cialdini sudah bekerja dalam satu hari di kehidupan sehari-hari yang paling sederhana sekalipun.

CONTOH

Pada kampanye Pemilu 2024, sebuah tim pemenangan di Sulawesi Tenggara merancang strategi berlapis. Tahap pertama menggunakan reciprocity: mengadakan klinik kesehatan gratis di desa terpencil selama sebulan sebelum kampanye resmi dimulai. Tahap kedua mengaktifkan commitment: warga yang terbantu diajak berfoto bersama kandidat dan mengunggahnya ke grup WhatsApp komunitas. Tahap ketiga mengandalkan social proof: tim mendistribusikan data informal bahwa delapan dari sepuluh kepala keluarga di desa tersebut sudah menyatakan dukungan. Tahap keempat menghadirkan authority: tokoh adat dan pemuka agama setempat diminta berbicara dalam satu forum publik. Hasilnya, perolehan suara kandidat di desa tersebut meningkat 34 persen dibandingkan pemilu sebelumnya. Analisis bertahap ini menunjukkan bahwa prinsip Cialdini bukan sekadar teori abstrak, melainkan perangkat yang dapat diidentifikasi langkah demi langkah dalam kasus faktual yang dapat diverifikasi.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi yang sangat umum adalah anggapan bahwa prinsip-prinsip Cialdini hanya bekerja pada orang yang 'tidak cerdas' atau 'mudah dibodohi', sehingga individu berpendidikan tinggi merasa kebal terhadapnya. Pembetulannya: riset Cialdini justru menunjukkan bahwa semakin sibuk dan semakin banyak informasi yang diproses seseorang, semakin ia mengandalkan jalan pintas kognitif (heuristic) seperti 'percaya pada ahli' atau 'ikuti yang banyak orang lakukan', karena otak tidak sanggup mengevaluasi setiap keputusan secara mendalam. Kerentanan terhadap prinsip-prinsip ini bersifat universal dan terikat pada situasi, bukan pada tingkat kecerdasan individu semata.

D. Implikasi Etis Pengaruh Sosial dalam Demokrasi Indonesia

Mekanisme konformitas, kepatuhan, dan strategi pengaruh sosial bukan hanya fenomena psikologis yang netral secara moral. Dalam konteks demokrasi, mekanisme ini menjadi bernilai etis ketika ia menentukan apakah warga negara membuat pilihan secara otonom atau karena tekanan yang tersembunyi. Para filsuf politik seperti John Stuart Mill menegaskan bahwa legitimasi demokrasi bergantung pada kualitas kehendak bebas warga; ketika kehendak itu direkayasa melalui social proof atau otoritas palsu, maka hasil pemilihan atau kebijakan publik kehilangan dasar legitimasinya. Di Indonesia, persoalan ini sangat nyata: survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tahun 2019 menunjukkan sebagian pemilih mengubah pilihan politiknya setelah melihat hasil quick count parsial yang belum lengkap, sebuah contoh pengaruh informasional yang, bila disengaja, berpotensi menjadi manipulasi. Oleh sebab itu, mahasiswa ilmu pemerintahan perlu mengembangkan kepekaan etis untuk membedakan persuasi yang sah dari eksploitasi bias psikologis.

Pertanyaan etis sentral yang harus diajukan adalah: apakah agen pengaruh sosial menghormati otonomi kognitif pihak yang dipengaruhi? Filsuf Kantian menyebutnya prinsip menghormati manusia sebagai tujuan, bukan semata alat. Dalam praktik kampanye, prinsip ini dilanggar ketika tim sukses sengaja memproduksi testimoni palsu untuk menciptakan ilusi social proof, atau ketika aparat menggunakan posisi otoritas negara untuk menekan pegawai negeri agar memilih kandidat tertentu. Dari perspektif lokal Kawasan Timur Indonesia, tekanan konformitas berbasis ikatan klan atau tokoh adat kerap lebih kuat daripada kampanye formal, sehingga warga di wilayah seperti Sulawesi Tenggara atau Papua bisa mengalami beban ganda: tekanan kelompok primer sekaligus tekanan agen kampanye. Kondisi ini menuntut aktor

pemerintahan memiliki integritas untuk menolak memanfaatkan kerentanan psikologis komunitas lokal demi kepentingan elektoral sesaat.

Tanggung jawab etis tidak hanya ada pada agen pengaruh, tetapi juga pada penyelenggara negara dan warga secara kolektif. Komisi Pemilihan Umum, misalnya, memiliki kewajiban untuk menetapkan regulasi yang membatasi penggunaan strategi pengaruh sosial yang menipu, seperti iklan berbasis fear appeal yang memutarbalikkan fakta atau penyebaran disinformasi yang memanfaatkan efek otoritas. Warga, di sisi lain, perlu mengembangkan literasi pengaruh sosial, yakni kemampuan mengidentifikasi kapan sebuah pesan memanfaatkan prinsip scarcity, liking, atau social proof secara manipulatif. Dari sudut pandang nilai ICHSA-N, sikap adaptif terhadap perubahan informasi haruslah diimbangi dengan integritas berpikir: menerima argumen baru karena kualitas argumennya, bukan karena siapa yang menyampaikan atau seberapa banyak orang yang setuju. Inilah yang dalam tradisi demokrasi deliberatif disebut diskursus rasional, yaitu fondasi bagi keputusan kolektif yang adil.

Implikasi praktis bagi calon aparaturnya pemerintahan sangat konkret. Pertama, setiap kebijakan publik yang menggunakan nudge atau dorongan perilaku berbasis psikologi harus disertai transparansi tujuan agar warga tetap dapat memilih untuk tidak mengikutinya. Kedua, kampanye sosial pemerintah yang menggunakan otoritas tokoh agama atau adat harus memastikan bahwa otoritas itu diperoleh secara sah dan konten pesannya akurat, bukan sekadar memanfaatkan reputasi untuk mempercepat kepatuhan tanpa verifikasi. Ketiga, miskonsepsi bahwa pengaruh sosial hanya soal manipulasi orang jahat perlu diluruskan: bahkan niat baik pun dapat menghasilkan pelanggaran etis apabila mengabaikan proses informed consent dari komunitas yang menjadi sasaran. Dengan demikian, penguasaan psikologi pengaruh sosial oleh mahasiswa ilmu pemerintahan bukan untuk digunakan sebagai alat kendali massa, melainkan sebagai bekal untuk merancang kebijakan yang menghormati martabat warga dan memperkuat, bukan melemahkan, fondasi demokrasi Indonesia.

Tabel 4.4 Perbandingan Dimensi Etis Strategi Pengaruh Sosial dalam Konteks Demokrasi

Strategi Pengaruh	Penggunaan Etis (Persuasi Sah)	Penggunaan Tidak Etis (Manipulasi)	Dampak pada Demokrasi
Social Proof	Menampilkan data partisipasi nyata untuk mendorong pemilih terdaftar hadir ke TPS	Memproduksi testimoni atau angka palsu untuk menciptakan kesan mayoritas semu	Merusak validitas preferensi agregat pemilih
Authority	Melibatkan pakar	Menggunakan jabatan	Menghancurkan

Strategi Pengaruh	Penggunaan Etis (Persuasi Sah)	Penggunaan Tidak Etis (Manipulasi)	Dampak pada Demokrasi
	independen yang kredibel untuk menyampaikan informasi kebijakan berbasis bukti	pejabat negara untuk menekan bawahan memilih kandidat tertentu	netralitas birokrasi dan prinsip pemilu bebas
Scarcity	Menginformasikan batas waktu pendaftaran pemilih secara jujur agar warga tidak melewatkannya	Menyebarkan isu bahwa program bantuan hanya tersedia jika kandidat X menang, padahal tidak benar	Memicu keputusan berbasis ketakutan, bukan pertimbangan rasional
Reciprocity	Memberikan pendidikan pemilih gratis tanpa syarat afiliasi partai	Membagikan bantuan material dengan ekspektasi balasan suara yang dinyatakan secara implisit	Mengkomersialisasi hak suara dan mendistorsi kompetisi elektoral

[Gambar 4.4 belum diunggah]

Gambar 4.4 Diagram alur dua jalur berjudul 'Dari Pengaruh Sosial ke Keputusan Demokratis': jalur kiri menggambarkan proses persuasi etis (informasi akurat, transparansi tujuan, otonomi terjaga, keputusan otonom, demokrasi sehat); jalur kanan menggambarkan proses man

ANALOGI

Bayangkan seorang pedagang pasar yang menawarkan produk dengan dua cara: cara pertama, ia menjelaskan manfaat nyata produknya secara jujur dan membiarkan pembeli memutuskan; cara kedua, ia sengaja berteriak 'barang hampir habis, tetangga Anda sudah beli semua' padahal stok melimpah. Cara pertama adalah persuasi sah, cara kedua adalah eksploitasi bias scarcity. Dalam demokrasi, perbedaan antara dua cara itu menentukan apakah pilihan warga adalah ekspresi kehendak bebas atau hasil rekayasa psikologis yang melanggar martabat mereka sebagai subjek politik.

CONTOH

Kasus konkret terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 di beberapa kabupaten di Sulawesi. Tim kampanye salah satu kandidat menyebarkan pesan berantai melalui WhatsApp yang mengklaim bahwa '87 persen warga kecamatan ini sudah memilih kandidat X', padahal angka itu tidak berdasar pada survei apa pun. Pesan itu bekerja

melalui prinsip social proof: penerima pesan merasa tertinggal dari kelompok dan cenderung menyesuaikan pilihannya. Analisis etisnya: (1) informasi dibuat palsu, maka prinsip kejujuran dilanggar; (2) penerima tidak diberi kesempatan memverifikasi, maka otonomi kognitifnya dikurangi secara sengaja; (3) dampak sistematisnya adalah distorsi preferensi agregat. Pembetulan etisnya: kampanye boleh menggunakan data survei nyata tentang tren dukungan, asalkan metodologi survei diungkapkan secara transparan agar pemilih dapat menilai kredibilitasnya sendiri.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi umum mahasiswa: 'Selama tujuannya baik, menggunakan strategi pengaruh sosial apa pun dalam kampanye kebijakan publik adalah dibenarkan secara etis.' Pembetulan: etika tidak hanya menilai tujuan, tetapi juga cara dan dampak terhadap otonomi pihak yang dipengaruhi. Menggunakan fear appeal yang berlebihan untuk mendorong vaksinasi, misalnya, mungkin meningkatkan angka vaksinasi jangka pendek, tetapi merusak kepercayaan publik pada institusi kesehatan jangka panjang jika terbukti melebihi-lebihkan risiko. Prinsip etika komunikasi publik mensyaratkan bahwa warga diperlakukan sebagai agen rasional yang berhak menerima informasi akurat dan memutuskan sendiri, bukan sebagai objek yang perilakunya perlu direayasa demi efisiensi program, betapapun mulia tujuan program tersebut.

RANGKUMAN

- Konformitas, compliance, dan obedience dibedakan berdasarkan sumber tekanan, tingkat kesadaran individu, dan durabilitas perubahan sikap yang dihasilkan.
- Pengaruh informatif mendorong individu mengikuti orang lain karena ketidakpastian informasi, sedangkan pengaruh normatif beroperasi melalui kebutuhan penerimaan sosial dalam kelompok.
- Eksperimen Asch dan Milgram menunjukkan bahwa kondisi situasional seperti kehadiran otoritas, anonimitas, dan tekanan kelompok dapat mengalahkan pertimbangan moral individual.
- Enam prinsip pengaruh sosial Cialdini bekerja secara terencana dalam kampanye politik dan komunikasi publik, sehingga literasi atas prinsip-prinsip ini merupakan kompetensi penting bagi calon penyelenggara pemerintahan.
- Penggunaan mekanisme pengaruh sosial tanpa pertimbangan etis berpotensi memanipulasi partisipasi warga dan melemahkan kualitas demokrasi, sehingga integritas komunikasi pemerintahan menjadi kewajiban profesional.

REFERENSI

- Myers, D. G. (2013). *Social Psychology*. 11th Edition. McGraw-Hill.
- Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2016). *Social Psychology*. 9th Edition. Pearson.
- Hogg, M. A., & Vaughan, G. M. (2018). *Social Psychology*. 8th Edition. Pearson.
- Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2006). *Social Psychology*. 12th Edition. Pearson Prentice Hall.
- Cialdini, R. B. (2009). *Influence: Science and Practice*. 5th Edition. Pearson.
- Sarwono, S. W. (2015). *Psikologi Sosial*. Edisi 2. Salemba Humanika.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2022. *Standar Nasional Pendidikan (Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi)*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2024. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Outcome Based Education (OBE)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- Norris, Pippa. 2011. *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Putnam, Robert D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon and Schuster.
- Sears, David O., Jonathan L. Freedman, dan L. Anne Peplau. 1994. *Psikologi Sosial*. Terjemahan Michael Adryanto. Jakarta: Erlangga.
- Cialdini (2009); Myers (2013); Aronson, Wilson, & Akert (2016); Hogg & Vaughan (2018); Sarwono (2015).

PERTEMUAN 5

Dinamika Kelompok dan Kepemimpinan

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:

25. Mendiagnosis minimal 2 gejala groupthink atau deindividuasi pada satu kasus dinamika kelompok lokal KTI yang dipilih mahasiswa, disertai kutipan fakta pendukung; Menghubungkan konsep kohesivitas dan gaya kepemimpinan dengan hasil keputusan kelompok menggunakan minimal 1 teori dinamika kelompok secara tertulis; Menyusun ringkasan analisis kelompok (format laporan 1–2 halaman) yang mencerminkan penghargaan terhadap nilai harmoni (Harmony-ICHSA-N) dalam keberagaman komunitas lokal
26. Menjelaskan konsep dasar dinamika kelompok (kohesivitas, norma, peran, status) dengan menggunakan terminologi psikologi sosial yang tepat
27. Membedakan tipe-tipe kepemimpinan (transformasional, transaksional, laissez-faire) berdasarkan karakteristik dan konteks kemunculannya
28. Menganalisis faktor-faktor yang meningkatkan atau menurunkan kohesivitas dalam kelompok komunitas lokal Kawasan Timur Indonesia
29. Mengidentifikasi indikator groupthink dalam sebuah kasus keputusan kelompok dan menjelaskan konsekuensinya terhadap kualitas pengambilan keputusan
30. Menampilkan sikap menghargai perbedaan peran dan perspektif anggota kelompok selama diskusi analisis kasus (nilai Harmony)

Pendahuluan

Setelah pertemuan keempat mengungkap bagaimana individu merespons tekanan sosial melalui konformitas dan kepatuhan, pertemuan kelima ini bergerak ke tingkat analisis berikutnya: kelompok sebagai sistem sosial yang memiliki struktur, norma, dan dinamika internalnya sendiri. Pemahaman tentang mengapa individu tunduk pada pengaruh sosial tidak lengkap tanpa menelisik bagaimana kelompok terbentuk, dipertahankan, dan diarahkan oleh kepemimpinan. Dalam konteks Ilmu Pemerintahan, kelompok bukan sekadar agregat individu—ia adalah arena di mana kebijakan dirumuskan, konsensus dibangun, dan keputusan kolektif diambil, termasuk di komunitas adat dan organisasi kemasyarakatan Kawasan Timur Indonesia yang kaya keberagaman.

Materi ini menjadi fondasi konseptual yang kritis sebelum mahasiswa memasuki Pertemuan 6 tentang deindividuasi dan perilaku massa, serta Pertemuan 7 tentang prasangka dan perilaku kolektif. Dengan memahami kohesivitas, norma, peran, gaya kepemimpinan, dan fenomena groupthink, mahasiswa akan mampu mendiagnosis secara sistematis mengapa sebuah komunitas lokal KTI mampu menghasilkan keputusan yang adaptif atau sebaliknya terjebak dalam kesepakatan semu yang merusak kualitas tata kelola.

A. Konsep Dasar Dinamika Kelompok: Kohesivitas, Norma, Peran, dan Status

Dinamika kelompok adalah bidang kajian dalam psikologi sosial yang mempelajari bagaimana individu saling memengaruhi dan dipengaruhi ketika berada dalam satu kelompok, serta bagaimana struktur internal kelompok berkembang dari waktu ke waktu. Kelompok bukan sekadar kumpulan orang, melainkan sistem sosial yang memiliki kekuatan mengatur perilaku anggotanya melalui empat elemen struktural utama: kohesivitas, norma, peran, dan status. Kurt Lewin, yang dianggap sebagai bapak dinamika kelompok, menegaskan bahwa perilaku individu hanya dapat dipahami secara utuh bila dipandang dalam konteks medan sosial tempat individu tersebut berada. Dalam konteks pemerintahan, pemahaman atas elemen-elemen ini sangat relevan karena aparatur negara, legislatif, maupun komunitas adat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) semuanya beroperasi sebagai kelompok yang tunduk pada dinamika struktural serupa.

Kohesivitas merujuk pada kekuatan total dari semua faktor yang mendorong anggota untuk tetap tinggal dalam kelompok, mencakup daya tarik antarpribadi, kebanggaan atas keanggotaan, dan komitmen terhadap tujuan bersama. Kelompok yang sangat kohesif cenderung lebih seragam dalam perilaku dan keputusan, karena tekanan sosial untuk menyesuaikan diri jauh lebih kuat. Norma kelompok adalah standar perilaku yang tidak selalu tertulis tetapi dipahami bersama dan ditegakkan melalui sanksi sosial, mulai dari teguran halus hingga pengucilan. Di banyak komunitas adat KTI, norma-norma ini berwujud dalam aturan adat yang mengatur siapa boleh berbicara dalam musyawarah, urutan pengambilan keputusan, hingga cara menyampaikan ketidaksetujuan -- norma ini menjadi 'perekat tak kasat mata' yang menjaga ketertiban kelompok sekaligus membatasi ekspresi individu.

Peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam kelompok, sedangkan status adalah penghargaan atau prestise yang dilekatkan pada posisi tersebut oleh anggota kelompok lainnya. Peran bisa bersifat formal -- seperti ketua RT atau kepala suku -- maupun informal, seperti anggota yang selalu menjadi penengah konflik atau yang paling sering mengusulkan ide baru. Status memengaruhi seberapa besar kontribusi seseorang diperhitungkan: anggota berstatus tinggi cenderung lebih banyak berbicara, lebih sering diikuti, dan lebih jarang dikoreksi, meskipun pendapatnya belum tentu paling tepat. Keempat elemen ini -- kohesivitas, norma, peran, dan status -- saling berinteraksi membentuk struktur kelompok yang menentukan pola komunikasi, distribusi pengaruh, dan pada akhirnya kualitas keputusan yang dihasilkan kelompok tersebut, sebagaimana akan dianalisis lebih lanjut pada sub-bab C dan D.

Tabel 5.1 Empat Elemen Struktural Dinamika Kelompok

Elemen	Definisi Operasional	Wujud dalam Komunitas Lokal KTI	Dampak pada Pengambilan Keputusan
Kohesivitas	Kekuatan faktor yang mengikat anggota agar tetap dalam kelompok	Solidaritas suku atau ikatan adat dalam musyawarah kampung	Tinggi: meningkatkan kepatuhan; berlebihan: memicu groupthink
Norma	Standar perilaku bersama yang ditegakkan melalui sanksi sosial	Aturan adat tentang urutan bicara dan cara menyampaikan pendapat	Menjaga ketertiban tetapi bisa menekan pendapat minoritas
Peran	Perangkat perilaku yang diharapkan dari posisi tertentu	Peran kepala adat (formal) dan juru damai (informal)	Menentukan siapa yang dianggap berwenang memutuskan
Status	Tingkat prestise yang dilekatkan anggota pada suatu posisi	Status tetua adat vs. anggota muda dalam rapat komunitas	Anggota berstatus tinggi lebih dominan meski argumennya tidak selalu optimal

[Gambar 5.1 belum diunggah]

Gambar 5.1 Diagram lingkaran berlapis yang menggambarkan hubungan keempat elemen: lapisan terluar adalah Kohesivitas sebagai 'pengikat' kelompok, lapisan tengah memuat Norma dan Peran yang saling bersilangan, dan pusat lingkaran berisi Status sebagai penentu hierark

ANALOGI

Bayangkan sebuah tim sepak bola kampung di Maluku yang hampir setiap hari berlatih bersama. Kohesivitas adalah 'kekompakan' yang membuat pemain enggan absen karena merasa memiliki tim itu. Norma adalah kesepakatan tak tertulis bahwa pemain senior tidak ditegur keras di depan umum. Peran adalah posisi masing-masing pemain -- kapten, pencetak gol, pengatur permainan. Status adalah seberapa besar suara kapten dipatuhi dibanding pemain baru, bahkan ketika kapten sedang keliru membaca situasi lapangan.

CONTOH

Kasus bertahap: (1) Sebuah BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Kabupaten Bima membahas rencana relokasi warga. Kohesivitas kelompok tinggi karena seluruh anggota berasal dari satu klan dan telah lama bekerja sama. (2) Norma kelompok mengharuskan semua anggota bersepakat secara aklamasi demi menjaga wajah bersama. (3) Satu anggota muda berperan sebagai notulen -- peran informal yang membuatnya jarang diminta berpendapat substantif. (4) Ketua BPD memiliki status tertinggi sehingga usulannya diterima tanpa banyak pertanyaan. Hasilnya: keputusan relokasi diambil cepat tetapi mengabaikan data teknis tentang kerawanan bencana di lokasi tujuan, karena struktur status dan norma aklamasi menekan suara kritis dari anggota yang sebenarnya memiliki informasi lebih lengkap.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi yang sering muncul adalah anggapan bahwa kohesivitas yang tinggi selalu menghasilkan keputusan terbaik karena mencerminkan kekompakan dan keharmonisan kelompok. Pembetulannya: kohesivitas yang berlebihan justru dapat memperlemah kualitas keputusan karena anggota cenderung menekan pendapat berbeda demi menjaga kesatuan kelompok -- inilah cikal bakal groupthink yang akan dibahas pada sub-bab C. Harmoni sejati dalam semangat nilai Harmony ICHSA-N bukan berarti menghapus perbedaan pendapat, melainkan mengelola perbedaan itu secara produktif agar menghasilkan keputusan yang lebih kaya dan akuntabel.

B. Tipe-Tipe Kepemimpinan dan Faktor Kohesivitas dalam Komunitas Lokal KTI

Kepemimpinan dalam kelompok tidak bersifat tunggal atau statis; ia berubah sesuai konteks, tujuan kelompok, dan karakteristik anggotanya. Burns (1978) dan Bass (1985) membedakan dua poros utama kepemimpinan yang kemudian menjadi acuan luas: kepemimpinan transformasional dan transaksional. Pemimpin transformasional mendorong anggota kelompok untuk melampaui kepentingan pribadi demi visi kolektif yang lebih besar, menggunakan inspirasi, stimulasi intelektual, dan perhatian individual sebagai instrumen pengaruh. Sebaliknya, pemimpin transaksional mengelola kelompok melalui pertukaran eksplisit antara kinerja dan imbalan, menegakkan kesepakatan dan prosedur, serta mengoreksi penyimpangan setelah terjadi. Tipe ketiga, *laissez-faire*, ditandai oleh ketiadaan inisiatif kepemimpinan yang aktif: pemimpin menghindari tanggung jawab pengambilan keputusan dan membiarkan anggota bergerak tanpa arah yang jelas, kondisi yang lazim berujung pada ambiguitas peran dan kohesivitas kelompok yang rendah.

Konteks komunitas lokal Kawasan Timur Indonesia (KTI) memberikan nuansa tersendiri bagi kemunculan dan efektivitas tipe kepemimpinan. Di banyak desa adat Maluku, Sulawesi Tenggara, atau Nusa Tenggara, struktur kepemimpinan tradisional seperti kepala soa, tua adat, atau mosalaki menggabungkan elemen transformasional dan transaksional sekaligus: pemimpin melegitimasi keputusan melalui nilai-nilai adat (visi kolektif) sekaligus mengelola kontribusi warga melalui sistem kewajiban dan timbal-balik yang terstruktur. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan perlu menganalisis secara kritis apakah pemimpin formal yang diangkat negara di KTI mampu beradaptasi dengan logika kepemimpinan kultural ini, sebab ketidakselarasan antara gaya kepemimpinan formal dan harapan kultural anggota kelompok terbukti menurunkan kohesivitas [Hogg 2001]. Nilai harmoni (Harmony-ICHSA-N) menjadi relevan di sini karena pemimpin yang efektif di komunitas beragam KTI adalah pemimpin yang mampu menjembatani perbedaan perspektif -- antara logika birokrasi modern dan logika solidaritas adat -- tanpa mematikan salah satunya.

Kohesivitas kelompok, yakni kekuatan tarik-menarik yang membuat anggota bertahan dan terlibat aktif dalam kelompok, dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dapat ditingkatkan maupun dapat melemah. Faktor yang meningkatkan kohesivitas antara lain: kesamaan tujuan dan nilai yang dirasakan bersama, keberhasilan menyelesaikan tugas kolektif, ancaman eksternal yang mendorong solidaritas, serta kepemimpinan yang responsif terhadap kebutuhan anggota. Sebaliknya, kohesivitas turun ketika muncul persaingan internal yang tak terkelola, ketidakjelasan peran, distribusi beban kerja yang dianggap tidak adil, atau gaya kepemimpinan *laissez-faire*

yang membiarkan konflik membusuk tanpa resolusi. Di KTI, faktor geografis seperti keterisolasian pulau kecil dapat paradoksial memperkuat kohesivitas -- karena ketergantungan antarwarga tinggi -- namun sekaligus memperburuknya bila sumber daya terbatas menjadi objek persaingan, sehingga peran pemimpin dalam mengelola distribusi dan komunikasi menjadi penentu kritis kualitas keputusan kelompok.

Tabel 5.2 Perbandingan Tipe Kepemimpinan: Karakteristik, Konteks Kemunculan, dan Dampak pada Kohesivitas

Tipe Kepemimpinan	Mekanisme Pengaruh Utama	Konteks Kemunculan Tipikal	Dampak pada Kohesivitas Kelompok
Transformasional	Inspirasi visi, stimulasi intelektual, perhatian individual	Kelompok dalam situasi perubahan besar, krisis identitas, atau misi jangka panjang; kepemimpinan adat KTI berbasis nilai kolektif	Cenderung meningkatkan kohesivitas karena anggota merasa terikat pada visi bersama
Transaksional	Pertukaran kinerja-imbalan, aturan eksplisit, koreksi berbasis standar	Kelompok dengan tugas terstruktur, birokrasi formal, program pemerintah berbasis target	Kohesivitas moderat; stabil selama imbalan dipersepsikan adil, rentan retak jika sistem imbalan dianggap tidak merata
Laissez-Faire	Minimnya inisiatif, pendelegasian tanpa panduan, penghindaran keputusan	Kelompok dengan anggota sangat mandiri atau pemimpin yang tidak siap; sering terjadi secara de facto bukan by design	Cenderung menurunkan kohesivitas; memicu ambiguitas peran dan konflik laten yang tidak terselesaikan

[Gambar 5.2 belum diunggah]

Gambar 5.2 Diagram alur tiga jalur (bagan cabang): titik tengah bertuliskan 'Situasi Kelompok' bercabang ke tiga kotak tipe kepemimpinan (Transformasional, Transaksional, Laissez-Faire), masing-masing kotak dihubungkan panah ke indikator kohesivitas (tinggi/moderat/

ANALOGI

Bayangkan sebuah perahu tradisional Pinisi yang berlayar dari Makassar menuju

Maluku. Pemimpin transformasional adalah nakhoda yang menceritakan betapa indahny tujuan pelayaran sehingga seluruh awak rela bekerja keras menghadapi badai bersama. Pemimpin transaksional adalah nakhoda yang membagi tugas secara ketat -- siapa mengemudi, siapa mengatur layar, siapa memasak -- dan memberi jatah lebih bagi yang bekerja melebihi target. Pemimpin laissez-faire adalah nakhoda yang berdiam di kabin dan berkata 'terserah kalian', membuat awak bingung arah dan saling menyalahkan saat angin berubah.

CONTOH

Kasus musyawarah penetapan batas wilayah adat di sebuah kecamatan kepulauan Maluku Tengah dapat digunakan sebagai contoh bertahap. Pertama, identifikasi tipe kepemimpinan: apakah kepala desa menggunakan pendekatan transformasional dengan mengajak warga merumuskan visi kedaulatan wilayah bersama, ataukah transaksional dengan menjanjikan anggaran Dana Desa sebagai imbal balik konsensus? Kedua, ukur kohesivitas awal: seberapa tinggi kehadiran warga dalam musyawarah, apakah ada kelompok yang memboikot? Ketiga, hubungkan: bila kepala desa menunjukkan gaya laissez-faire -- tidak memfasilitasi, membiarkan debat tanpa moderasi -- maka warga yang berbeda klan cenderung menarik diri, kohesivitas turun, dan keputusan batas wilayah yang dihasilkan kehilangan legitimasi sosial meski sah secara administratif. Analisis bertahap ini adalah kerangka yang dapat digunakan mahasiswa dalam laporan analisis kelompok lokal KTI pada pertemuan ini.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi umum yang sering muncul adalah anggapan bahwa kepemimpinan transformasional selalu lebih baik daripada transaksional dalam segala situasi. Pembetulannya: efektivitas tipe kepemimpinan bergantung pada konteks. Kelompok yang menjalankan tugas rutin berulang dengan standar ketat -- misalnya tim pelayanan publik di kantor kecamatan -- justru membutuhkan kejelasan prosedur transaksional agar akuntabel dan tidak bergantung pada karisma personal pemimpin. Kepemimpinan transformasional paling efektif ketika kelompok perlu berubah atau menghadapi situasi baru yang membutuhkan komitmen emosional, bukan sekadar kepatuhan prosedural. Menyamakan 'transformasional = baik' dan 'transaksional = buruk' adalah penyederhanaan yang bertentangan dengan teori Full Range Leadership Model [Bass 1985] dan dapat menghasilkan diagnosis kepemimpinan yang keliru dalam analisis kasus pemerintahan lokal.

C. Groupthink: Gejala, Indikator, dan Konsekuensi terhadap Kualitas Keputusan

Istilah groupthink pertama kali diperkenalkan oleh Irving Janis pada 1972 untuk menggambarkan fenomena psikologis ketika hasrat kuat akan konsensus dalam kelompok yang sangat kohesif mengorbankan evaluasi kritis terhadap alternatif keputusan. Janis mendefinisikannya sebagai mode berpikir yang terjadi ketika dorongan untuk menjaga keseragaman dan keharmonisan kelompok mengesampingkan motivasi anggota untuk menilai secara realistis tindakan-tindakan yang tersedia. Fenomena ini tidak identik dengan ketidaksepakatan yang ditekan secara paksa oleh pemimpin; ia bisa muncul justru karena anggota secara sukarela menyensor diri demi menjaga iklim kelompok yang terasa nyaman. Dalam konteks ilmu pemerintahan, groupthink relevan ketika tim birokrasi, dewan adat, atau komite kebijakan daerah di Kawasan Timur Indonesia menghasilkan keputusan yang tampak bulat namun ternyata tidak melewati pengujian argumen yang memadai.

Janis mengidentifikasi delapan gejala groupthink yang dikelompokkan ke dalam tiga klaster. Klaster pertama adalah ilusi kekebalan dan moralitas: anggota merasa kelompok mereka tidak mungkin salah dan meyakini bahwa tujuan mereka secara moral benar sehingga tak perlu dipertanyakan. Klaster kedua adalah tekanan menuju keseragaman, yang mencakup sensor diri, tekanan langsung pada anggota yang berbeda pendapat, dan munculnya penjaga pikiran (mindguards) yaitu anggota yang secara aktif menyaring informasi yang berpotensi mengganggu konsensus. Klaster ketiga adalah persepsi terdistorsi tentang kelompok luar, di mana pihak yang tidak setuju dipandang lemah, jahat, atau tidak kompeten. Ketiga klaster ini bekerja bersama menciptakan ilusi konsensus bulat, bahkan ketika sebagian besar anggota sebenarnya menyimpan keraguan.

Konsekuensi groupthink terhadap kualitas keputusan bersifat sistematis dan dapat diukur. Kelompok yang mengalami groupthink cenderung tidak mensurvei semua alternatif yang tersedia, gagal mengevaluasi risiko dari pilihan yang disukai, dan tidak menyiapkan rencana kontingensi jika pilihan utama gagal. Dalam konteks pemerintahan lokal KTI, ini bisa berarti kebijakan pengelolaan sumber daya alam atau program pemberdayaan masyarakat yang disahkan tanpa kajian dampak yang memadai karena semua anggota tim takut dianggap sebagai pengganggu harmoni kelompok. Penelitian Janis sendiri menggunakan kasus-kasus historis seperti invasi Teluk Babi dan krisis rudal Kuba untuk membuktikan bahwa bukan kecerdasan individu yang gagal, melainkan proses kelompok yang cacat. Konsekuensi ini menegaskan bahwa nilai harmoni dalam kelompok, termasuk semangat ICHSA-N, harus dibedakan secara tegas dari konformitas buta: harmoni sejati justru

mensyaratkan ruang yang aman bagi perbedaan pendapat agar keputusan yang dihasilkan benar-benar melayani kepentingan komunitas.

Mencegah groupthink bukan berarti memecah kohesivitas kelompok, melainkan merancang proses deliberasi yang memungkinkan suara kritis tetap terdengar tanpa menghancurkan iklim kerja sama. Janis merekomendasikan beberapa strategi: pemimpin menahan opininya di awal diskusi agar tidak langsung membingkai arah keputusan, menugaskan satu anggota sebagai devil's advocate secara resmi, mengundang pakar luar, serta memecah kelompok besar menjadi sub-kelompok yang mendiskusikan masalah secara terpisah sebelum bergabung kembali. Dalam setting komunitas lokal KTI, mekanisme musyawarah adat yang memberi ruang bicara kepada tokoh perempuan, pemuda, atau kelompok minoritas suku bisa berfungsi sebagai pengaman alami terhadap groupthink jika difasilitasi dengan benar. Mahasiswa ilmu pemerintahan perlu mampu mendiagnosis gejala-gejala ini pada kasus nyata karena kapasitas tersebut adalah kompetensi inti dalam merancang tata kelola yang akuntabel dan responsif.

Tabel 5.3 Delapan Gejala Groupthink dan Indikator Operasionalnya (Janis 1972)

Klaster	Gejala	Indikator Operasional yang Dapat Diamati
Ilusi Kekebalan dan Moralitas	Ilusi kekebalan dari kesalahan	Anggota menyatakan keyakinan bahwa rencana pasti berhasil tanpa menyebut risiko spesifik
Ilusi Kekebalan dan Moralitas	Rasionalisasi kolektif	Kelompok mengabaikan data pembandingan dengan alasan konteks kita berbeda
Ilusi Kekebalan dan Moralitas	Keyakinan moralitas tak tergoyahkan	Anggota menolak kritik etis dengan menyatakan niat kelompok sudah jelas baik
Tekanan Menuju Keseragaman	Stereotip terhadap pihak luar	Penentang digambarkan sebagai tidak paham situasi atau memiliki agenda tersembunyi
Tekanan Menuju Keseragaman	Tekanan langsung pada pembangkang	Anggota yang mengajukan keberatan diingatkan agar tidak menghambat kemajuan kelompok
Tekanan Menuju Keseragaman	Sensor diri	Anggota memilih diam meski punya keraguan karena takut

Klaster	Gejala	Indikator Operasional yang Dapat Diamati
		dianggap tidak solid
Tekanan Menuju Keseragaman	Ilusi konsensus bulat	Ketiadaan suara keberatan diartikan sebagai persetujuan semua anggota
Tekanan Menuju Keseragaman	Munculnya mindguards	Satu atau dua anggota aktif menyaring informasi negatif sebelum sampai ke kelompok

[Gambar 5.3 belum diunggah]

Gambar 5.3 Diagram alir tiga kolom yang menggambarkan proses groupthink: kolom kiri berisi prasyarat (kohesivitas tinggi, isolasi kelompok, pemimpin direktif), kolom tengah berisi delapan gejala yang dikelompokkan ke dalam tiga klaster dengan panah saling memperkuat

ANALOGI

Bayangkan sebuah perahu kano yang dikayuh oleh delapan orang menuju satu arah. Semua mendayung kompak dan suasana terasa harmonis. Namun tidak ada yang berani mengangkat dayung untuk menunjuk bahwa di depan ada karang tersembunyi, karena mereka tidak ingin dianggap mengacaukan irama. Itulah groupthink: kehangatan kerja sama yang justru membuat kelompok melaju menuju keputusan berbahaya tanpa ada yang berani berteriak berhenti.

CONTOH

Sebuah tim perencanaan program ketahanan pangan di sebuah kabupaten kepulauan Sulawesi Tenggara terdiri dari pejabat dinas pertanian, kepala desa, dan beberapa tokoh masyarakat. Karena kepala dinas yang disegani sudah menyatakan dukungan penuh di awal rapat, tidak ada anggota yang mengajukan keberatan meski data panen lokal menunjukkan tren berbeda dari asumsi program (gejala: ilusi kekebalan dan sensor diri). Seorang staf junior yang sempat menyebut data itu langsung diingatkan oleh anggota senior agar tidak mempersulit proses yang sudah hampir selesai (gejala: tekanan langsung dan mindguard). Rapat selesai dengan kesepakatan bulat, namun enam bulan kemudian program gagal mencapai target karena jenis bibit yang dipilih tidak cocok dengan kondisi tanah setempat, sebuah risiko yang sebenarnya sudah ada dalam data awal namun tidak pernah didiskusikan secara terbuka.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi yang paling umum adalah anggapan bahwa groupthink hanya terjadi pada kelompok yang tidak kompeten atau dipimpin oleh orang otoriter. Pembetulannya: Janis justru menemukan bahwa groupthink paling sering melanda kelompok yang anggotanya cerdas, berpengalaman, dan saling menghormati, karena justru rasa saling menghargai itulah yang mendorong anggota untuk tidak ingin mengecewakan satu sama lain dengan mengajukan keberatan. Miskonsepsi kedua adalah bahwa groupthink sama dengan tekanan dari pemimpin yang memaksa anggota diam. Faktanya, sensor diri dalam groupthink bersifat sukarela dan berasal dari dalam diri anggota, bukan perintah eksplisit, sehingga kelompok yang demokratis dan hangat sekalipun rentan mengalaminya jika tidak ada mekanisme deliberasi kritis yang dirancang dengan sengaja.

D. Analisis Terpadu Kasus Kelompok Lokal KTI: Menghubungkan Teori ke Praktik dengan Nilai Harmoni

Setelah memahami konsep kohesivitas, gaya kepemimpinan, dan groupthink secara terpisah pada sub-bab sebelumnya, tantangan sesungguhnya bagi seorang calon aparaturnya pemerintah adalah menerapkan ketiga konsep itu sekaligus pada satu kasus nyata. Analisis terpadu bukan sekadar menyebut istilah-istilah psikologi sosial secara berurutan, melainkan menunjukkan bagaimana setiap variabel saling berkaitan dan bersama-sama menjelaskan mengapa sebuah kelompok menghasilkan keputusan tertentu. Dalam konteks Kawasan Timur Indonesia (KTI), kasus yang tersedia sangat kaya: mulai dari musyawarah adat di Maluku, rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di pedalaman Papua, hingga forum koordinasi lintas-suku di NTT. Kesemuanya menyajikan laboratorium hidup tempat teori beradu dengan realitas sosial-budaya yang berlapis.

Langkah analisis terpadu yang terstruktur dimulai dari identifikasi konteks kelompok, lalu diteruskan ke diagnosis kondisi kohesivitas, pemetaan gaya kepemimpinan yang dominan, dan akhirnya pendeteksian ada-tidaknya gejala groupthink atau deindividuasi. Lewin (1951), yang memperkenalkan konsep field theory dalam dinamika kelompok, menegaskan bahwa perilaku kelompok tidak dapat dipahami tanpa mempertimbangkan keseluruhan medan psikologis, yaitu interaksi antara individu dan lingkungan sosialnya secara bersamaan. Artinya, ketika mahasiswa menganalisis rapat BPD yang berakhir dengan keputusan kontroversial, ia tidak boleh hanya menyoroti figur kepala desa selaku pemimpin, tetapi juga harus memeriksa tekanan normatif, tingkat kohesivitas antaranggota, dan apakah

mekanisme kritik internal masih berfungsi. Pendekatan berlapis ini menghindarkan analisis yang datar dan tidak operasional.

Nilai Harmoni dalam ICHSA-N bukan berarti menghindari konflik atau menyeragamkan pendapat; justru sebaliknya, harmoni yang sejati mensyaratkan penghargaan aktif terhadap perbedaan perspektif sehingga setiap suara dalam kelompok mendapat ruang yang adil. Dalam praktik analisis kasus, nilai ini beroperasi pada dua level: pertama, pada objek kajian, yaitu mahasiswa menilai apakah kelompok yang diteliti memberi ruang bagi anggota minoritas untuk menyatakan ketidaksetujuan, sehingga terhindar dari groupthink; kedua, pada proses analisis itu sendiri, yaitu tim mahasiswa yang berbeda latar suku, agama, dan daerah di kelas harus menunjukkan harmoni dalam mengolah perbedaan tafsir atas fakta yang sama. Dengan demikian, laporan analisis yang dihasilkan bukan hanya produk akademik, melainkan juga cerminan kapasitas mahasiswa sebagai calon pamong yang mampu mengelola keberagaman komunitas lokal secara konstruktif.

Agar analisis benar-benar terpadu, mahasiswa perlu menyusun alur argumentasi yang eksplisit: mulai dari fakta kasus, penghubung teori yang dipilih, diagnosis variabel (kohesivitas tinggi/rendah, gaya kepemimpinan yang teridentifikasi, ada/tidaknya gejala groupthink), hingga implikasi bagi kualitas keputusan kelompok tersebut. Laporan ditulis dalam format 1 hingga 2 halaman dengan struktur: deskripsi singkat kasus, analisis menggunakan minimal satu teori dinamika kelompok, temuan diagnosis minimal dua gejala groupthink atau deindividuasi yang disertai kutipan fakta pendukung, dan refleksi nilai Harmoni. Deliverable ini bukan ringkasan bacaan, melainkan produk analitik yang dapat dinilai dari ketepatan penggunaan terminologi, kekuatan evidensi faktual, dan koherensi argumentasi antarbagian. Mahasiswa yang berasal dari komunitas lokal KTI didorong untuk memilih kasus dari daerahnya sendiri, sebab pengetahuan kontekstual lokal justru memperkuat kedalaman analisis psikologi sosial yang dihasilkan.

Tabel 5.4 Kerangka Analisis Terpadu Kasus Kelompok Lokal KTI

Dimensi Analisis	Pertanyaan Panduan	Indikator yang Dicari	Teori Rujukan
Konteks Kelompok	Siapa anggotanya, apa tujuan kelompok, dan bagaimana latar budaya lokalnya?	Jenis kelompok (formal/informal), komposisi suku/agama, setting geografis KTI	Lewin 1951: field theory
Kohesivitas	Seberapa kuat rasa keterikatan antaranggota? Faktor apa yang memperkuat	Kehadiran rutin, solidaritas antar-anggota, tekanan konformitas, adanya	Sub-bab B pertemuan ini

Dimensi Analisis	Pertanyaan Panduan	Indikator yang Dicari	Teori Rujukan
	atau melemahkannya?	ancaman eksternal	
Gaya Kepemimpinan	Gaya apa yang dominan ditampilkan pemimpin kelompok dalam kasus ini?	Pola komunikasi pemimpin, distribusi otoritas, respons terhadap perbedaan pendapat	Burns 1978; Bass 1985
Groupthink/Deindividuasi	Apakah ada gejala penekanan suara kritis atau hilangnya tanggung jawab individual?	Minimal 2 gejala: ilusi invulnerabilitas, self-censorship, mind-guarding, deindividuasi dalam aksi massa	Janis 1972
Implikasi Keputusan	Bagaimana kondisi kelompok memengaruhi kualitas keputusan yang dihasilkan?	Keputusan berisiko tinggi tanpa evaluasi alternatif, atau keputusan inklusif dengan deliberasi terbuka	Integrasi ketiga sub-bab
Nilai Harmoni	Apakah kelompok menghargai perbedaan peran dan perspektif anggota secara aktif?	Ada-tidaknya mekanisme dissenting opinion, ruang bagi kelompok minoritas suara, resolusi konflik konstruktif	ICHSA-N: Harmony

[Gambar 5.4 belum diunggah]

Gambar 5.4 Diagram alur analisis terpadu berbentuk rantai sebab-akibat: kotak 'Konteks Kelompok KTI' mengarah ke dua kotak paralel 'Tingkat Kohesivitas' dan 'Gaya Kepemimpinan', keduanya bertemu di kotak 'Kondisi Pengambilan Keputusan', lalu bercabang ke dua hasil:

ANALOGI

Analisis terpadu ini seperti dokter yang mendiagnosis pasien: seorang dokter yang baik tidak hanya mengukur suhu tubuh, tidak hanya memeriksa tekanan darah, dan tidak hanya mendengarkan keluhan, melainkan menggabungkan semua data itu menjadi satu diagnosis yang koheren sebelum meresepkan tindakan. Mahasiswa yang hanya menyebut 'ada groupthink' tanpa menghubungkannya dengan tingkat kohesivitas dan gaya kepemimpinan yang melatarbelakanginya ibarat dokter yang menyimpulkan 'pasien sakit' tanpa memeriksa apa yang sakit dan mengapa.

CONTOH

Kasus: Forum Musyawarah Kampung (FMK) di Kabupaten Jayawijaya, Papua, membahas relokasi permukiman akibat longsor. Langkah 1 -- Identifikasi konteks: kelompok terdiri dari 12 tetua adat, 3 kepala kampung, dan 2 fasilitator pemerintah daerah; latar budaya Baliem yang sangat menghormati hierarki usia. Langkah 2 -- Diagnosis kohesivitas: kohesivitas tinggi karena ikatan klan dan sejarah kolektif; ancaman bencana memperkuat solidaritas, tetapi sekaligus meningkatkan tekanan konformitas. Langkah 3 -- Pemetaan kepemimpinan: kepala suku tertua menampilkan gaya transaksional-paternalistik; keputusan dipandang sah hanya jika datang darinya, sehingga anggota lain enggan mengajukan alternatif relokasi yang berbeda. Langkah 4 -- Deteksi groupthink: dua gejala teridentifikasi -- (a) ilusi invulnerabilitas, tampak dari pernyataan 'leluhur kami sudah ratusan tahun di sini, tidak akan terjadi apa-apa' meskipun data BPBD menunjukkan risiko tinggi; (b) self-censorship, tampak dari fakta bahwa dua anggota yang memiliki keberatan tidak mengungkapkannya di forum karena takut dianggap tidak menghormati tetua. Langkah 5 -- Implikasi: keputusan untuk tidak merelokasi diambil tanpa evaluasi alternatif lokasi, yang kemudian memperbesar risiko korban jiwa. Langkah 6 -- Refleksi Harmoni: laporan mencatat bahwa mekanisme dissenting opinion yang menghormati hierarki adat sekaligus memberi ruang bagi suara minoritas perlu dirancang bersama fasilitator pemerintah, bukan menghapus nilai adat melainkan melengkapinya.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi umum: banyak mahasiswa mengira bahwa kelompok dengan kohesivitas tinggi pasti menghasilkan keputusan yang lebih baik, karena anggotanya kompak dan satu visi. Pembetulan: justru kohesivitas tinggi yang tidak disertai mekanisme kritik internal adalah kondisi paling subur bagi groupthink, sebagaimana dibuktikan Janis (1972) melalui kajian kegagalan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Kohesivitas adalah sumber daya kelompok yang netral -- ia dapat meningkatkan kualitas keputusan bila diimbangi kepemimpinan yang mendorong deliberasi terbuka, atau justru merusaknya bila pemimpin menekan perbedaan pendapat demi menjaga keselarasan permukaan.

RANGKUMAN

- Kelompok memiliki empat elemen struktural utama—kohesivitas, norma, peran, dan status—yang secara bersama-sama menentukan stabilitas dan arah tindakan kolektif sebuah komunitas.
- Tipe kepemimpinan transformasional, transaksional, dan laissez-faire memiliki

konteks kemunculan yang berbeda dan menghasilkan tingkat kohesivitas serta kualitas keputusan kelompok yang berbeda pula.

- Groupthink muncul ketika kohesivitas tinggi menekan pemikiran kritis, menghasilkan keputusan kelompok yang seragam namun rentan cacat, sebagaimana dapat diamati pada kasus-kasus musyawarah komunitas adat KTI yang didominasi figur otoritatif.
- Diagnosis ilmiah terhadap dinamika kelompok mensyaratkan penghubungan antara fakta empiris kasus lokal dengan minimal satu teori psikologi sosial secara eksplisit dan tertulis.
- Nilai Harmoni dalam keberagaman komunitas KTI bukan hanya norma etis, melainkan juga variabel fungsional yang memengaruhi kohesivitas dan keterbukaan kelompok terhadap perspektif yang beragam.

REFERENSI

- Myers, D. G. (2013). *Social Psychology*. 11th Edition. McGraw-Hill.
- Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2016). *Social Psychology*. 9th Edition. Pearson.
- Hogg, M. A., & Vaughan, G. M. (2018). *Social Psychology*. 8th Edition. Pearson.
- Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2006). *Social Psychology*. 12th Edition. Pearson Prentice Hall.
- Cialdini, R. B. (2009). *Influence: Science and Practice*. 5th Edition. Pearson.
- Sarwono, S. W. (2015). *Psikologi Sosial*. Edisi 2. Salemba Humanika.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2022. *Standar Nasional Pendidikan (Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi)*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2024. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Outcome Based Education (OBE)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- Norris, Pippa. 2011. *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Putnam, Robert D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon and Schuster.
- Sears, David O., Jonathan L. Freedman, dan L. Anne Peplau. 1994. *Psikologi Sosial*. Terjemahan Michael Adryanto. Jakarta: Erlangga.
- Myers (2013); Hogg & Vaughan (2018); Aronson, Wilson & Akert (2016); Sarwono (2015).

PERTEMUAN 6

Deindividuasi, Perilaku Massa, dan Pengaruh Sosial

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:

31. Mendiagnosis minimal 2 gejala groupthink atau deindividuasi pada satu kasus dinamika kelompok lokal KTI yang dipilih mahasiswa, disertai kutipan fakta pendukung; Menghubungkan konsep kohesivitas dan gaya kepemimpinan dengan hasil keputusan kelompok menggunakan minimal 1 teori dinamika kelompok secara tertulis; Menyusun ringkasan analisis kelompok (format laporan 1–2 halaman) yang mencerminkan penghargaan terhadap nilai harmoni (Harmony-ICHSA-N) dalam keberagaman komunitas lokal
32. Menganalisis mekanisme deindividuasi—meliputi anonimitas, diffusion of responsibility, dan hilangnya kontrol diri—dalam peristiwa perilaku kolektif yang terdokumentasi
33. Membandingkan pengaruh sosial informatif dan pengaruh sosial normatif sebagai penjelas konformitas dalam kelompok
34. Mengidentifikasi teknik-teknik pengaruh sosial (reciprocity, social proof, authority) dan mengevaluasi etika penggunaannya dalam konteks komunitas lokal KTI
35. Mengaitkan fenomena deindividuasi dengan dinamika kerumunan atau aksi massa yang pernah terjadi di Kawasan Timur Indonesia menggunakan kerangka psikologi sosial
36. Menampilkan integritas akademik dalam presentasi analisis kelompok dengan menyebutkan sumber data dan argumen secara transparan (nilai Integrity)

Pendahuluan

Pertemuan kelima telah membangun pemahaman tentang dinamika kelompok secara umum—mencakup kohesivitas, kepemimpinan, dan groupthink sebagai proses yang membentuk keputusan kolektif. Pertemuan keenam ini memperdalam analisis tersebut dengan menelaah apa yang terjadi ketika identitas individu larut ke dalam kerumunan: deindividuasi memicu hilangnya kontrol diri, diffusion of responsibility

melemahkan akuntabilitas, dan anonimitas membuka ruang bagi perilaku massa yang sulit diprediksi. Di Kawasan Timur Indonesia, fenomena ini bukan abstraksi akademik semata—aksi massa spontan, kerusuhan berbasis sentimen kelompok, dan mobilisasi komunal telah terdokumentasi dalam berbagai peristiwa lokal yang menjadi bahan analisis nyata bagi calon aparaturnya pemerintahan.

Pada pertemuan ini mahasiswa tidak hanya mengonseptualisasi mekanisme deindividuasi dan ragam pengaruh sosial, tetapi juga mempresentasikan laporan analisis kelompok yang telah disusun sejak Pertemuan 5. Proses presentasi dan umpan balik antarkelompok melatih kemampuan argumentasi berbasis bukti, penghargaan terhadap keberagaman perspektif (nilai Harmony-ICHSA-N), dan kejujuran intelektual dalam menyebut sumber data secara transparan (nilai Integrity-ICHSA-N). Hasil sintesis pertemuan ini sekaligus menjadi jembatan konseptual menuju Pertemuan 7 yang mengkaji prasangka dan diskriminasi sebagai manifestasi lanjut dari dinamika kelompok.

A. Mekanisme Deindividuasi dalam Perilaku Kolektif

Deindividuasi adalah kondisi psikologis di mana seseorang kehilangan kesadaran diri sebagai individu yang bertanggung jawab dan larut ke dalam identitas kolektif kelompok. Leon Festinger pertama kali mencetuskan konsep ini pada 1952, kemudian diperluas Philip Zimbardo yang menemukan bahwa anonimitas dan kondisi kerumunan secara sistematis melemahkan kontrol diri internal seseorang. Dalam kerumunan yang besar, seseorang tidak lagi merasa dirinya diamati atau dimintai pertanggungjawaban secara personal, sehingga ambang batas tindakan yang biasanya dijaga oleh norma pribadi menjadi sangat rendah. Gejala ini tidak hanya terjadi di jalanan saat demonstrasi, tetapi juga dalam ruang-ruang digital seperti kolom komentar anonim di media sosial, sehingga relevansinya bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang mengkaji partisipasi publik sangat tinggi.

Tiga mekanisme utama yang menggerakkan deindividuasi perlu dipahami secara terpisah namun saling berkaitan. Pertama, anonimitas fisik atau digital membuat individu merasa tidak dapat dikenali, sehingga rasa malu dan rasa takut akan sanksi sosial melemah tajam. Kedua, *diffusion of responsibility* terjadi ketika tanggung jawab atas suatu tindakan terasa terbagi rata di antara ratusan atau ribuan anggota kerumunan, sehingga masing-masing individu merasa kontribusinya terlalu kecil untuk dipersalahkan. Ketiga, hilangnya kontrol diri (*loss of self-regulation*)

merupakan akibat dari kedua kondisi sebelumnya: tanpa pengenalan diri yang jelas dan tanpa rasa memiliki tanggung jawab, individu berhenti memantau perilakunya sendiri dan bertindak berdasarkan stimulus situasional yang paling menonjol di sekitarnya, seperti gerakan massa, teriakan, atau simbol kelompok.

Penting bagi calon administrator publik dan praktisi pemerintahan di Kawasan Timur Indonesia untuk memahami bahwa deindividuasi bukanlah semata-mata bukti kejahatan moral individu, melainkan hasil dari rekayasa situasi sosial. Pemimpin komunitas dan pejabat pemerintah yang memahami mekanisme ini dapat merancang ruang partisipasi publik yang mengurangi anonimitas destruktif, misalnya dengan mendorong dialog tatap muka beridentitas jelas alih-alih petisi anonim. Nilai harmoni (Harmony dalam ICHSA-N) yang dijunjung tinggi di banyak komunitas adat KTI sejatinya merupakan mekanisme kultural yang secara alami melawan deindividuasi: sistem kepemimpinan adat yang mengenal setiap anggota secara personal membuat *diffusion of responsibility* sulit berkembang. Dengan demikian, memahami deindividuasi bukan hanya kepentingan akademik, melainkan bekal analitis untuk merancang kebijakan pengelolaan massa dan partisipasi warga yang lebih manusiawi dan bertanggung jawab.

Tabel 6.1 Tiga Mekanisme Deindividuasi: Definisi, Pemicu, dan Implikasi bagi Pengelolaan Massa

Mekanisme	Definisi Ringkas	Pemicu Situasional Umum	Implikasi bagi Kebijakan Publik
Anonimitas	Individu merasa tidak dapat dikenali secara personal oleh orang lain atau oleh otoritas	Kerumunan besar, penggunaan penutup wajah, akun media sosial tanpa nama asli	Mendorong identifikasi peserta aksi; menerapkan sistem pendaftaran peserta dalam forum publik resmi
Diffusion of Responsibility	Tanggung jawab moral atas tindakan dirasakan tersebar merata sehingga tidak ada yang merasa bertanggung jawab penuh	Jumlah peserta yang sangat besar, tidak adanya pemimpin yang teridentifikasi, situasi darurat tanpa kejelasan peran	Menetapkan penanggung jawab kelompok yang teridentifikasi dalam setiap kegiatan massa; membagi zona tanggung jawab
Hilangnya Kontrol Diri	Individu berhenti memantau dan mengatur perilakunya sendiri, bertindak reaktif terhadap stimulus situasional	Stimulasi emosional tinggi (musik keras, orasi provokatif), kelelahan fisik, konsumsi alkohol atau zat lain	Merancang prosedur jeda dan pendinginan dalam manajemen aksi; melibatkan tokoh adat sebagai penyeimbang emosi massa

[Gambar 6.1 belum diunggah]

Gambar 6.1 Diagram alur tiga tahap: (1) Kondisi Awal — individu memasuki kerumunan dengan identitas pribadi aktif; (2) Pemicu Situasional — anonimitas dan diffusion of responsibility bekerja bersamaan, ditunjukkan dengan panah dua arah; (3) Kondisi Deindividuasi — k

ANALOGI

Bayangkan Anda berada dalam antrean panjang di sebuah kantor pelayanan publik. Ketika antrean pendek dan petugas mengenal wajah Anda, Anda cenderung bersikap sopan dan sabar. Namun ketika antrean membludak hingga ratusan orang, kantor penuh sesak, dan tidak ada petugas yang mengenal siapa pun, tiba-tiba orang-orang mulai menyerobot, berteriak, bahkan mendorong — bukan karena mereka orang jahat, tetapi karena situasi telah mencabut identitas personal mereka dan menghilangkan rasa tanggung jawab individual. Inilah gambaran sederhana bagaimana anonimitas dan diffusion of responsibility bekerja bersama membentuk deindividuasi.

CONTOH

Kasus kerusuhan pascapemilihan kepala daerah di sebuah kabupaten di Sulawesi Tengah dapat digunakan sebagai ilustrasi bertahap. Tahap pertama: massa pendukung berkumpul dalam jumlah besar di alun-alun kota; pada titik ini identitas individual masih relatif terjaga karena banyak yang saling mengenal. Tahap kedua: ketika kerumunan membesar hingga ribuan orang dari kampung-kampung berbeda, anonimitas meningkat — wajah asing mendominasi, tidak ada yang merasa diawasi secara personal. Tahap ketiga: ketika orasi emosional memuncak dan hasil perhitungan diumumkan, diffusion of responsibility aktif — setiap individu merasa tindakannya hanyalah satu titik di antara ribuan titik lain, sehingga tidak ada yang merasa bertanggung jawab atas pelemparan batu pertama. Tahap keempat: kontrol diri kolektif runtuh, dan kerusuhan terjadi meskipun secara individual hampir tidak ada peserta yang semula berniat merusak. Analisis bertahap seperti ini yang kelak diminta dalam laporan analisis kelompok di sub-bab D.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi paling umum adalah anggapan bahwa deindividuasi hanya terjadi pada orang-orang dengan karakter buruk atau massa yang tidak berpendidikan. Pembetulan: riset eksperimental Zimbardo menggunakan mahasiswa universitas sebagai subjek dan menemukan bahwa perilaku agresif muncul semata-mata karena

manipulasi situasi anonimitas — bukan karena kepribadian buruk. Miskonsepsi kedua adalah keyakinan bahwa deindividuasi selalu menghasilkan perilaku negatif. Pembetulan: penelitian Johnson dan Downing (1979) menunjukkan bahwa ketika norma situasional yang menonjol bersifat prososial — misalnya simbol perawat atau relawan — deindividuasi justru dapat meningkatkan perilaku membantu. Artinya, deindividuasi adalah amplifier situasi, bukan penyebab tunggal kekerasan.

B. Deindividuasi dan Dinamika Aksi Massa di KTI

Kawasan Timur Indonesia (KTI) menyimpan rekam jejak peristiwa aksi massa yang menjadi laboratorium nyata bagi psikologi sosial. Kerusuhan antarkelompok di Ambon dan Poso pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an, aksi demonstrasi mahasiswa di Makassar, serta konflik lahan di Papua adalah contoh peristiwa kolektif yang dapat dianalisis melalui kerangka deindividuasi. Dalam konteks tersebut, kerumunan bukan sekadar kumpulan individu, melainkan entitas sosial yang menghasilkan dinamika psikologis tersendiri. Mempelajari peristiwa-peristiwa ini secara ilmiah bukan untuk melegitimasi kekerasan, melainkan untuk memahami mekanisme psikologis yang perlu dicegah demi terwujudnya harmoni sosial — sebuah nilai yang sejalan dengan prinsip Harmony dalam karakter ICHSA-N.

Ketika aksi massa berlangsung di ruang publik KTI, tiga mekanisme deindividuasi yang dibahas pada sub-bab A — anonimitas, diffusion of responsibility, dan hilangnya kontrol diri — bekerja secara bersamaan dan saling memperkuat. Anonimitas muncul bukan hanya karena pelaku tidak dikenal, tetapi juga karena identitas individu tenggelam di balik identitas kelompok etnis, agama, atau afiliasi organisasi. Diffusion of responsibility membuat setiap anggota massa merasa bahwa tindakan destruktif adalah tanggung jawab kolektif, bukan personal. Kondisi ini diperparah oleh arousal emosional yang tinggi — dipicu oleh orasi, simbol kelompok, atau provokasi awal — sehingga kapasitas evaluasi moral individu menurun drastis dan perilaku yang sebelumnya tabu menjadi terasa wajar.

Gustave Le Bon dalam karyanya *The Crowd* (1895) menyebut kerumunan memiliki 'jiwa kolektif' yang membuat anggotanya bertindak di luar karakter normalnya, suatu pandangan yang kemudian disempurnakan oleh Philip Zimbardo melalui model deindividuasi berbasis variabel situasional. Dalam konteks KTI, faktor situasional seperti ketimpangan sosial-ekonomi yang mengendap lama, narasi identitas yang dipolitisasi, dan lemahnya kepercayaan terhadap institusi pemerintah menjadi kondisi latar yang mempercepat terbentuknya dinamika kerumunan destruktif. Di

sinilah peran ilmu pemerintahan menjadi krusial: kebijakan publik yang responsif dan komunikasi pemerintah yang empatik dapat memutus rantai kondisi latar tersebut sebelum berkembang menjadi aksi massa. Seorang calon aparatur pemerintah yang memahami mekanisme ini akan mampu merancang intervensi kebijakan berbasis bukti, bukan sekadar respons reaktif.

Analisis deindividuasi pada kasus KTI juga harus mempertimbangkan peran kepemimpinan informal di dalam massa. Tokoh agama, kepala adat, atau orator lapangan dapat berfungsi sebagai amplifier deindividuasi — memperparah kondisi — tetapi juga dapat menjadi anchor reindividuasi, yaitu proses di mana individu dipulihkan kesadaran dirinya melalui seruan moral, simbol perdamaian, atau dialog langsung. Dokumentasi peran tokoh adat dalam deeskalasi konflik di Maluku pasca-2002 menunjukkan bahwa reindividuasi kolektif adalah strategi nyata, bukan konsep abstrak. Mahasiswa yang mengkaji kasus lokal ini dituntut menyertakan sumber data yang dapat diverifikasi dan argumen yang transparan, mencerminkan nilai Integrity: kejujuran intelektual dalam menganalisis peristiwa yang secara sosial masih sensitif.

Tabel 6.2 Perbandingan Mekanisme Deindividuasi pada Tiga Peristiwa Aksi Massa di KTI

Dimensi Analisis	Kerusuhan Ambon 1999-2002	Demonstrasi Mahasiswa Makassar (kontemporer)	Konflik Lahan Papua (kontemporer)
Pemicu awal anonimitas	Identitas agama menggantikan identitas personal	Massa mahasiswa berseragam/atribut organisasi	Identitas klan/suku dominan atas nama individu
Diffusion of responsibility	Tindakan kekerasan dianggap bela kelompok/agama	Vandalisme dianggap ekspresi gerakan, bukan perbuatan pribadi	Pengusiran dianggap hak adat kolektif, bukan tindak pidana personal
Faktor situasional penguat	Ketidakpercayaan terhadap aparat dan narasi korban	Ketimpangan kebijakan kampus/nasional yang terakumulasi	Ketimpangan ekonomi dan absennya pengakuan hak ulayat
Potensi reindividuasi	Tokoh adat dan agama lintas komunitas (Pela-gandong)	Negosiasi langsung antara pimpinan mahasiswa dan rektor	Dialog adat yang difasilitasi pemerintah daerah

[Gambar 6.2 belum diunggah]

Gambar 6.2 Diagram alur dua jalur: (1) Jalur eskalasi — kondisi latar (ketimpangan, ketidakpercayaan) memicu kerumunan, anonimitas dan diffusion of responsibility menguat, kontrol diri melemah, perilaku destruktif muncul; (2) Jalur reindividuasi — intervensi tokoh k

ANALOGI

Bayangkan seseorang yang sopan dan pendiam di keseharian tiba-tiba berteriak dan melempar batu saat ikut dalam arak-arakan massa yang emosional. Ia bukan berubah menjadi orang jahat; ia mengalami apa yang terjadi ketika seseorang mengenakan topeng di pesta kostum — topeng itu bukan hanya menyembunyikan wajah, tetapi secara psikologis mengurangi rasa tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Dalam kerumunan, 'topeng' itu adalah identitas kolektif yang menutupi identitas personal.

CONTOH

Pada kerusuhan Ambon 1999, seorang warga yang sehari-hari berhubungan baik dengan tetangga berbeda agama dapat terlibat dalam pembakaran rumah ketika ia bergabung dengan kelompok yang bergerak bersama. Langkah pertama: identitas personal (nama, profesi, relasi individual) larut ke dalam label kelompok ('kelompok kami' vs. 'kelompok mereka'). Langkah kedua: arousal emosional diperkuat oleh orasi dan suara kerumunan, menurunkan kapasitas refleksi moral. Langkah ketiga: karena ratusan orang melakukan hal serupa, tanggung jawab terasa tersebar — tidak ada yang merasa paling bersalah. Langkah keempat: ketika kemudian tokoh adat menyerukan pela-gandong (ikatan persaudaraan lintas agama khas Maluku), sebagian individu mengalami reindividuasi — identitas personal pulih, dan mereka menarik diri dari kerumunan destruktif.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi umum: deindividuasi hanya terjadi pada masyarakat yang 'primitif', tidak berpendidikan, atau memiliki budaya konflik. Pembetulan: riset Zimbardo dan Diener secara konsisten menunjukkan bahwa deindividuasi adalah respons psikologis universal yang dapat terjadi pada siapa pun ketika kondisi situasional terpenuhi — termasuk mahasiswa terdidik dan aparat pemerintah. Miskonsepsi kedua: aksi massa selalu direncanakan oleh provokator dari luar. Pembetulan: meskipun provokator eksternal dapat mempercepat eskalasi, dinamika deindividuasi dapat muncul secara spontan dari dalam kelompok tanpa koordinasi terpusat, sebagaimana dianalisis Le Bon dan kemudian dipertegas oleh Reicher dalam Social Identity Model of Crowd Behavior (ESIM).

C. Pengaruh Sosial Informatif, Normatif, dan Teknik-Tekniknya

Pengaruh sosial adalah proses di mana pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang berubah akibat kehadiran nyata maupun yang dibayangkan dari orang lain. Morton Deutsch dan Harold Gerard (1955) membedakan dua jalur utama pengaruh ini: pengaruh sosial informatif dan pengaruh sosial normatif. Pengaruh informatif terjadi ketika seseorang menerima informasi dari orang lain sebagai bukti nyata tentang realitas, karena ia merasa tidak yakin dengan penilaian sendiri. Sebaliknya, pengaruh normatif terjadi bukan karena seseorang percaya orang lain lebih tahu, melainkan karena ia ingin diterima, dihargai, atau menghindari penolakan dari kelompok. Kedua jalur ini bekerja secara bersamaan dalam banyak situasi sosial, dan mahasiswa ilmu pemerintahan perlu membedakan keduanya untuk mendiagnosis mengapa anggota komunitas atau aparatur pemerintahan mengikuti keputusan mayoritas.

Pengaruh informatif mendominasi situasi yang ambigu, krisis, atau darurat, di mana individu tidak memiliki cukup informasi untuk bertindak sendiri. Dalam konteks pemerintahan lokal di KTI, seorang kepala desa yang tidak memiliki panduan jelas tentang distribusi bantuan bencana akan sangat rentan mengikuti pola desa tetangga karena menganggap desa tetangga lebih berpengalaman — ini adalah konformitas berbasis informasi. Pengaruh normatif, sebaliknya, tampak ketika anggota DPRD memilih sesuai fraksi meski secara pribadi memiliki pendapat berbeda, demi menjaga harmoni dan posisi sosial dalam kelompok. Robert Cialdini dalam *Influence* (2009) merumuskan enam prinsip persuasi yang bekerja melalui jalur normatif maupun informatif sekaligus: reciprocity (timbal balik), commitment and consistency, social proof (bukti sosial), authority (otoritas), liking (rasa suka), dan scarcity (kelangkaan). Tiga di antaranya paling relevan dalam tata kelola komunitas lokal: reciprocity, social proof, dan authority.

Teknik reciprocity bekerja atas norma sosial universal bahwa pemberian harus dibalas; dalam konteks pemerintahan, politisi yang memberi bantuan menjelang pemilu memanfaatkan norma ini untuk membentuk obligasi sosial pada pemilih. Teknik social proof memanfaatkan kecenderungan manusia meniru perilaku orang banyak sebagai penanda kebenaran, misalnya ketika warga berbondong-bondong mengikuti program vaksinasi setelah melihat tokoh masyarakat setempat mendaftar lebih dahulu. Teknik authority menggunakan status, jabatan, atau keahlian sebagai pembenaran tindakan, sebagaimana terjadi ketika instruksi pejabat kesehatan dipatuhi lebih cepat daripada imbauan warga biasa tanpa latar belakang medis. Ketiga teknik ini tidak bersifat netral secara etis: ia dapat digunakan untuk

memfasilitasi kebijakan publik yang legitim sekaligus dapat disalahgunakan untuk memanipulasi komunitas rentan, terutama di daerah dengan literasi kebijakan rendah. Nilai integritas (Integrity-ICHSA-N) menuntut penggunaan teknik pengaruh sosial secara transparan dan bertanggung jawab, dengan mengungkapkan kepentingan di balik pesan yang disampaikan.

Konformitas akibat pengaruh normatif tidak selalu tampak sebagai kelemahan; dalam banyak budaya kolektif di KTI, menyesuaikan diri dengan norma kelompok mencerminkan nilai harmoni (Harmony-ICHSA-N) yang ditujukan untuk memelihara kohesi sosial. Namun demikian, ketika konformitas normatif menekan perbedaan pendapat secara sistematis dalam rapat pemerintahan desa atau musyawarah adat, ia bertransformasi menjadi cikal bakal groupthink yang akan dibahas pada sub-bab D. Membedakan kapan konformitas bersifat adaptif dan kapan bersifat destruktif adalah kompetensi analitis inti bagi aparatur pemerintahan yang bekerja di komunitas multikultural. Dengan menguasai perbedaan pengaruh informatif dan normatif serta mengevaluasi etika teknik persuasi, mahasiswa ilmu pemerintahan membangun kemampuan merancang komunikasi kebijakan yang efektif sekaligus menjunjung integritas dan penghargaan terhadap keberagaman komunitas lokal.

Tabel 6.3 Perbandingan Pengaruh Sosial Informatif dan Normatif serta Contoh Teknik Persuasi

Dimensi	Pengaruh Sosial Informatif	Pengaruh Sosial Normatif
Dasar psikologis	Ketidakpastian kognitif; individu mencari bukti realitas dari orang lain	Kebutuhan afiliasi; individu ingin diterima dan menghindari penolakan
Kondisi pemicu	Situasi ambigu, krisis, atau kurang informasi	Situasi sosial dengan tekanan kelompok dan pengawasan publik
Hasil perilaku	Internalisasi: individu benar-benar mengubah keyakinan	Compliance: individu menyesuaikan perilaku tanpa mengubah keyakinan
Contoh teknik relevan	Authority: mengikuti instruksi ahli karena percaya keahliannya	Social proof dan reciprocity: mengikuti mayoritas atau membalas pemberian
Risiko etis	Bergantung pada kredibilitas sumber; rentan manipulasi pakar palsu	Menekan suara minoritas; mendorong konformitas berlebihan
Contoh konteks KTI	Warga mengikuti anjuran BMKG soal jalur evakuasi karena dianggap lebih tahu	Anggota BPD memilih sesuai tekanan tokoh adat meski berbeda pendapat

[Gambar 6.3 belum diunggah]

Gambar 6.3 Diagram dua jalur pengaruh sosial: sisi kiri menampilkan jalur informatif dengan ikon tanda tanya (ketidakpastian) menuju internalisasi keyakinan; sisi kanan menampilkan jalur normatif dengan ikon kelompok (tekanan sosial) menuju compliance perilaku; di b

ANALOGI

Bayangkan Anda tiba di sebuah kota asing dan tidak tahu harus antri di loket mana untuk membayar pajak kendaraan. Anda melihat orang-orang berbaris di loket sebelah kiri, maka Anda ikut antri di sana karena menganggap mereka tahu prosedurnya — inilah pengaruh informatif. Esok harinya Anda tahu persis loket yang benar adalah di kanan, tetapi karena seluruh antrian sudah terbentuk di kiri dan semua orang menatap heran saat Anda mencoba pindah, Anda tetap bertahan di kiri agar tidak disorot — inilah pengaruh normatif. Situasi, bukan kepribadian Anda, yang menentukan jalur mana yang bekerja.

CONTOH

Kasus bertahap: Langkah 1 — Pemerintah daerah Sulawesi Tenggara meluncurkan program pengelolaan sampah berbasis komunitas di sebuah kelurahan tanpa sosialisasi memadai; warga tidak tahu cara memilah sampah organik dan anorganik, sehingga mereka mengamati tetangga paling aktif sebagai referensi (pengaruh informatif aktif). Langkah 2 — Setelah dua minggu, sebagian warga sudah tahu cara memilah tetapi enggan melakukannya karena tetangga lain yang berpengaruh di RT belum ikut; mereka tidak mau dianggap 'berlebihan' (pengaruh normatif menggeser perilaku). Langkah 3 — Lurah kemudian mengundang tokoh agama setempat yang dihormati untuk menunjukkan langsung cara memilah sambil menyebutkan bahwa '80 persen RT di kelurahan sebelah sudah berhasil' (gabungan teknik authority dan social proof). Langkah 4 — Partisipasi meningkat signifikan bukan karena regulasi baru, melainkan karena dua teknik persuasi mengaktifkan jalur normatif sekaligus informatif secara bersamaan. Catatan evaluatif: penggunaan angka '80 persen' harus dapat diverifikasi; jika dimanipulasi, teknik ini melanggar integritas komunikasi kebijakan.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi umum: banyak mahasiswa mengira bahwa seseorang yang 'sekadar ikut-ikutan' pasti tidak memiliki pendirian atau lemah secara karakter. Pembetulan: konformitas adalah respons psikologis normal yang fungsinya berbeda tergantung

jalurnya. Konformitas informatif justru menunjukkan rasionalitas adaptif — manusia menggunakan informasi sosial sebagai jalan pintas yang efisien ketika data langsung tidak tersedia. Konformitas normatif mencerminkan kebutuhan afiliasi yang universal dan bukan patologi kepribadian. Yang perlu dikritisi bukan konformitasnya, melainkan apakah konteks dan teknik yang memicunya bersifat etis dan transparan, atau manipulatif dan tersembunyi.

D. Presentasi dan Analisis Kasus Kelompok: Sintesis Dinamika Kelompok KTI

Sintesis analisis kelompok bukan sekadar merangkum teori yang sudah dibaca, melainkan mempertemukan konsep-konsep yang telah dipelajari pada sub-bab A, B, dan C dengan satu kasus konkret yang dipilih dari Kawasan Timur Indonesia. Mahasiswa mengambil posisi sebagai analis: mengidentifikasi gejala deindividuasi yang muncul, membaca pola pengaruh sosial yang bekerja di dalam kelompok, lalu menghubungkan keduanya dengan variabel kohesivitas dan gaya kepemimpinan yang ada. Proses sintesis ini menuntut kemampuan menganalisis (C4) sekaligus mengevaluasi (C5) secara bertahap, karena satu kasus nyata jarang hanya menunjukkan satu mekanisme psikologis tunggal. Seluruh argumen wajib ditopang oleh kutipan fakta yang dapat ditelusuri sumbernya, sebagai wujud nilai Integrity dalam tradisi akademik ICHSA-N.

Laporan analisis kelompok disusun dalam format 1-2 halaman dengan alur yang sistematis dan dapat dinilai. Bagian pertama memuat identifikasi kasus: nama peristiwa, lokasi, tahun, dan sumber data primer atau sekunder yang digunakan. Bagian kedua berisi diagnosis minimal dua gejala groupthink atau deindividuasi yang ditemukan pada kasus tersebut, masing-masing disertai kutipan fakta pendukung dan nama konsep yang dirujuk, misalnya anonimitas, diffusion of responsibility, atau tekanan konformitas normatif. Bagian ketiga menghubungkan temuan itu dengan variabel kohesivitas kelompok dan gaya kepemimpinan yang teridentifikasi, menggunakan minimal satu teori dinamika kelompok seperti model Janis tentang groupthink atau teori identitas sosial Tajfel dan Turner. Bagian penutup memuat refleksi singkat tentang nilai Harmony: bagaimana keberagaman komunitas lokal seharusnya dikelola agar dinamika kelompok tidak bergeser ke arah yang destruktif.

Presentasi lisan dilakukan dalam format laporan berbasis kasus (Case-Based Learning) selama 8-10 menit per kelompok, diikuti sesi tanya jawab 5 menit. Setiap

anggota kelompok bertanggung jawab menyajikan minimal satu bagian laporan sehingga tidak ada anggota yang hanya menjadi penonton; ini secara langsung melatih Adaptability karena masing-masing harus mampu menjawab pertanyaan yang tidak selalu sesuai bagian yang disiapkannya. Penilai menggunakan rubrik empat dimensi: akurasi konseptual (apakah teori dikutip dan diterapkan dengan tepat), kelengkapan fakta (apakah kutipan data mendukung setiap klaim), kedalaman sintesis (apakah hubungan antarkonsep dijelaskan, bukan hanya disebutkan), dan transparansi sumber (apakah referensi disebut secara eksplisit selama presentasi). Nilai Integrity dioperasionalkan secara terukur pada dimensi terakhir ini: menyebut sumber bukan pilihan, melainkan syarat minimum kelulusan rubrik.

Kerja kelompok dalam fase penyusunan laporan sendiri merupakan simulasi langsung dari dinamika yang sedang dipelajari. Mahasiswa berpotensi mengalami groupthink apabila anggota yang dominan tidak ditantang, atau mengalami social loafing apabila tanggung jawab tidak dibagi secara eksplisit. Oleh karena itu, setiap kelompok diminta mencatat pembagian tugas beserta nama penanggungjawab di halaman pertama laporan, dan dosen dapat memverifikasi kontribusi individual melalui sesi tanya jawab silang antar anggota. Pendekatan ini sekaligus menjadi contoh bagaimana desain kerja kelompok yang baik, sejalan dengan prinsip Service dalam ICHSA-N, dapat meminimalkan gejala deindividuasi di dalam tim itu sendiri sebelum tim tersebut menganalisis deindividuasi pada kasus eksternal.

Tabel 6.4 Rubrik Penilaian Laporan dan Presentasi Analisis Kasus Kelompok

Dimensi Penilaian	Indikator Capaian (Skor 80-100)	Indikator Capaian (Skor 60-79)	Indikator Capaian (Skor < 60)
Akurasi Konseptual	Minimal 2 konsep (deindividuasi/groupthink) diterapkan secara tepat sesuai definisi teori yang dirujuk	1 konsep diterapkan tepat; 1 konsep lain disebutkan tetapi tidak dijelaskan mekanismenya	Konsep disebutkan tanpa penjelasan mekanisme atau diterapkan keliru
Kelengkapan Fakta	Setiap klaim didukung kutipan fakta spesifik (tanggal, lokasi, skala peristiwa) dari sumber yang dapat ditelusuri	Klaim utama didukung fakta; sebagian klaim bersifat generik tanpa data spesifik	Klaim tidak didukung fakta atau fakta tidak relevan dengan klaim
Kedalaman Sintesis	Hubungan antara deindividuasi, pengaruh sosial, kohesivitas, dan kepemimpinan dijelaskan secara eksplisit menggunakan minimal 1	Dua variabel dihubungkan; variabel lain disebutkan tetapi tidak diintegrasikan	Variabel dibahas terpisah tanpa menunjukkan hubungan antar-konsep

Dimensi Penilaian	Indikator Capaian (Skor 80-100)	Indikator Capaian (Skor 60-79)	Indikator Capaian (Skor < 60)
teori dinamika kelompok			
Transparansi Sumber	Semua referensi disebut secara eksplisit selama presentasi lisan dan tercantum di laporan tertulis	Referensi tercantum di laporan tetapi tidak disebut saat presentasi lisan	Referensi tidak tercantum di laporan maupun saat presentasi
Refleksi Nilai Harmony	Refleksi menunjukkan penghargaan konkret terhadap keberagaman komunitas lokal dengan argumen yang kontekstual	Refleksi ada tetapi bersifat umum dan tidak dikaitkan dengan konteks komunitas lokal KTI	Refleksi tidak ada atau hanya berupa kalimat normatif tanpa argumentasi

[Gambar 6.4 belum diunggah]

Gambar 6.4 Diagram alur sintesis analisis kasus: dimulai dari kotak 'Pemilihan Kasus KTI' yang terhubung ke tiga kotak paralel ('Identifikasi Gejala Deindividuasi/Groupthink', 'Pola Pengaruh Sosial', 'Kohesivitas & Gaya Kepemimpinan'), lalu ketiga kotak itu menyatu

ANALOGI

Menyusun laporan analisis kasus ini mirip dengan kerja tim dokter jaga di UGD: seorang dokter tidak cukup hanya menyebut diagnosis tanpa menunjukkan gejala klinis yang ditemukan, tidak cukup menyebut gejala tanpa menghubungkannya dengan mekanisme penyakit, dan tidak boleh meresepkan tindakan tanpa menyebut dasar protokol medis yang digunakan. Begitu pula mahasiswa: menyebut 'terjadi deindividuasi' tanpa kutipan fakta pendukung dan tanpa menyebut teori yang menjadi dasar diagnosis adalah laporan yang belum tuntas.

CONTOH

Kelompok memilih kasus demonstrasi penolakan tambang di salah satu kabupaten Sulawesi Tengah pada tahun 2021. Langkah pertama: identifikasi fakta terverifikasi -- jumlah peserta, penggunaan atribut seragam, pernyataan tokoh yang terdokumentasi di media lokal. Langkah kedua: diagnosis gejala -- atribut seragam dan kerumunan besar menurunkan identitas individual (anonimitas); keputusan memblokir jalan tidak dapat ditelusuri ke satu individu tertentu (diffusion of responsibility). Langkah ketiga: hubungkan dengan kohesivitas -- rasa senasib antarwarga tambang yang tinggi menciptakan tekanan konformitas normatif, sehingga anggota yang ragu

enggan menyuarakan keberatan (gejala groupthink menurut Janis). Langkah keempat: refleksi Harmony -- laporan menutup dengan catatan bahwa dialog antara komunitas adat, pemerintah daerah, dan investor memerlukan ruang yang setara agar keberagaman kepentingan tidak diselesaikan melalui eskalasi massa.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi yang sering muncul: mahasiswa menganggap bahwa laporan analisis kasus yang panjang otomatis lebih baik daripada yang ringkas. Pembetulan: kualitas laporan diukur dari ketepatan penerapan konsep dan kelengkapan fakta pendukung, bukan dari jumlah halaman. Laporan dua halaman yang setiap klaimnya didukung kutipan spesifik dan hubungan antarkonsep dijelaskan secara eksplisit jauh lebih bernilai daripada laporan lima halaman yang sebagian besar berisi parafrase definisi tanpa aplikasi pada kasus yang dipilih.

RANGKUMAN

- Deindividuasi terjadi ketika anonimitas dan diffusion of responsibility dalam kerumunan melemahkan kontrol diri individu sehingga perilaku kolektif menjadi lebih impulsif dan sulit dikendalikan.
- Kasus aksi massa di Kawasan Timur Indonesia dapat dianalisis secara sistematis menggunakan kerangka deindividuasi untuk mengidentifikasi faktor pemicu dan pola eskalasi perilaku kelompok.
- Pengaruh sosial informatif mendorong konformitas karena individu mencari kebenaran dari kelompok, sedangkan pengaruh sosial normatif mendorong konformitas karena tekanan untuk diterima secara sosial.
- Teknik pengaruh sosial seperti reciprocity, social proof, dan authority efektif dalam menggerakkan perilaku komunitas, namun penggunaannya menuntut evaluasi etis yang ketat agar tidak memanipulasi kelompok rentan.
- Laporan analisis kelompok yang disajikan dengan transparansi sumber dan argumen mencerminkan integritas akademik sekaligus penghargaan terhadap keberagaman perspektif dalam komunitas lokal KTI.

REFERENSI

Myers, D. G. (2013). *Social Psychology*. 11th Edition. McGraw-Hill.

Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2016). *Social Psychology*. 9th Edition. Pearson.

- Hogg, M. A., & Vaughan, G. M. (2018). *Social Psychology*. 8th Edition. Pearson.
- Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2006). *Social Psychology*. 12th Edition. Pearson Prentice Hall.
- Cialdini, R. B. (2009). *Influence: Science and Practice*. 5th Edition. Pearson.
- Sarwono, S. W. (2015). *Psikologi Sosial*. Edisi 2. Salemba Humanika.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2022. *Standar Nasional Pendidikan (Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi)*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2024. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Outcome Based Education (OBE)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- Norris, Pippa. 2011. *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Putnam, Robert D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon and Schuster.
- Sears, David O., Jonathan L. Freedman, dan L. Anne Peplau. 1994. *Psikologi Sosial*. Terjemahan Michael Adryanto. Jakarta: Erlangga.
- Myers (2013); Cialdini (2009); Hogg & Vaughan (2018); Aronson, Wilson & Akert (2016); Sarwono (2015).

PERTEMUAN 7

Prasangka Sosial, Diskriminasi, dan Perilaku Kolektif di Kawasan Timur Indonesia

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:

37. Memetakan minimal 3 faktor penyebab prasangka (kognitif, motivasional, sosio-struktural) pada satu kasus konflik sosial di KTI dalam diagram sebab-akibat; Membedakan diskriminasi individual dari diskriminasi institusional berdasarkan definisi konseptual dan bukti dari kasus yang dikaji; Merumuskan 2 rekomendasi berbasis teori pengurangan prasangka yang kontekstual terhadap nilai Nasionalisme (Nationalism-ICHSA-N) dan kearifan lokal KTI
38. Menganalisis akar psikologis prasangka sosial—meliputi kategorisasi sosial, in-group/out-group bias, dan ancaman identitas—menggunakan teori identitas sosial
39. Membedakan stereotipe, prasangka, dan diskriminasi sebagai konstruk yang berkaitan namun berbeda secara konseptual dan operasional
40. Mengidentifikasi bentuk-bentuk prasangka berbasis etnis dan agama yang terdokumentasi di Kawasan Timur Indonesia beserta dampak sosial-psikologisnya
41. Mengaitkan dinamika prasangka dengan eskalasi perilaku kolektif (massa, kerusuhan) menggunakan kerangka teori relative deprivation dan realistic conflict theory
42. Mengevaluasi strategi reduksi prasangka yang berpotensi diterapkan dalam konteks masyarakat plural KTI, dengan mempertimbangkan nilai Harmony dan Service
43. Menampilkan kepekaan terhadap martabat kelompok marginal dalam diskusi kasus dan menghindari reproduksi stereotipe dalam narasi analisis (nilai Service dan Integrity)

Pendahuluan

Pertemuan keenam telah mengkaji deindividuasi dan dinamika perilaku massa sebagai produk pengaruh sosial dalam kelompok besar. Pertemuan ketujuh ini memperdalam analisis dengan menelusuri akar psikologis yang mendahului tindakan

massa, yaitu prasangka dan diskriminasi—dua konstruk yang secara historis telah menjadi pemicu konflik sosial nyata di Kawasan Timur Indonesia, dari Ambon hingga Poso dan Sambas. Memahami mekanisme kognitif dan sosio-struktural di balik prasangka bukan sekadar latihan akademik: bagi calon aparaturnya pemerintahan yang kelak bertugas di masyarakat plural KTI, kemampuan menganalisis akar konflik antar-kelompok dan merancang strategi resolusi yang berjiwa Nasionalisme dan kearifan lokal adalah kompetensi profesional yang tak dapat diabaikan. Pertemuan ini sekaligus merupakan pertemuan terakhir sebelum Ujian Tengah Semester, sehingga seluruh kerangka konseptual Psikologi Sosial yang telah dibangun sejak pertemuan pertama—mulai dari atribusi, konformitas, hingga dinamika kelompok—akan diintegrasikan dalam analisis kasus-kasus prasangka dan diskriminasi yang konkret.

A. Stereotipe, Prasangka, dan Diskriminasi: Tiga Konstruk yang Saling Terkait

Dalam psikologi sosial, stereotipe, prasangka, dan diskriminasi sering digunakan secara bergantian dalam percakapan sehari-hari, padahal ketiganya merujuk pada konstruk yang berbeda secara konseptual dan operasional. Stereotipe adalah keyakinan kognitif yang digeneralisasikan tentang ciri-ciri suatu kelompok sosial, misalnya keyakinan bahwa anggota kelompok etnis tertentu cenderung tidak dapat dipercaya dalam urusan bisnis. Keyakinan ini bersifat skema mental yang membantu individu memproses informasi sosial secara cepat, tetapi sekaligus menyederhanakan realitas secara berlebihan. Stereotipe bisa bersifat positif maupun negatif, namun bahkan stereotipe positif tetap merugikan karena membekukan identitas individu ke dalam kategori kolektif yang kaku [Allport 1954].

Prasangka bergerak selangkah lebih jauh dari stereotipe: prasangka adalah sikap afektif yang cenderung negatif terhadap anggota suatu kelompok semata-mata karena keanggotaan kelompok tersebut. Jika stereotipe beroperasi di ranah kognisi, prasangka menyertakan komponen emosi seperti rasa tidak suka, ketakutan, atau kebencian, serta komponen konatif berupa kecenderungan untuk bertindak secara tertentu. Dengan menggunakan kerangka ABC of attitude, stereotipe menempati komponen A (Affective) secara negatif sekaligus menopang komponen B (Belief/Cognitive), sementara komponen C (Conative/Behavioral) yang termanifestasi secara nyata itulah yang disebut diskriminasi [Baron & Byrne 2004]. Oleh karena itu, seseorang dapat menyimpan prasangka tanpa selalu bertindak diskriminatif, dan sebaliknya tindakan diskriminatif dapat terjadi tanpa prasangka eksplisit apabila sistem atau institusi yang berlaku memang mengandung bias struktural.

Diskriminasi adalah tindakan nyata yang memperlakukan individu atau kelompok secara berbeda dan tidak adil berdasarkan keanggotaan kelompok mereka. Pembedaan penting yang harus dikuasai mahasiswa Ilmu Pemerintahan adalah antara diskriminasi individual dan diskriminasi institusional. Diskriminasi individual bersumber dari sikap atau tindakan satu pelaku yang secara sadar atau tidak sadar merugikan anggota kelompok tertentu, misalnya seorang pejabat daerah yang menolak melayani warga dari etnis minoritas. Diskriminasi institusional, sebaliknya, melekat pada kebijakan, prosedur, dan struktur organisasi sehingga menghasilkan ketidakadilan bahkan tanpa niat diskriminatif dari individu pelaksananya, contohnya persyaratan administratif yang secara sistematis lebih menyulitkan kelompok masyarakat adat di Papua atau NTT untuk mengakses program bantuan pemerintah [Dovidio & Gaertner 1986 dalam Baron & Byrne 2004].

Hubungan antara ketiga konstruk ini bersifat sekuensial sekaligus sirkular: stereotipe menyediakan bahan bakar kognitif bagi prasangka, prasangka mendorong diskriminasi, dan pengalaman diskriminasi yang berulang memperkuat stereotipe baru tentang kelompok yang didiskriminasi. Dalam konteks plural Kawasan Timur Indonesia, rantai ini berisiko mengeras menjadi stigma sosial yang lintas-generasi apabila tidak diintervensi. Nilai Integrity dalam ICHSA-N menuntut mahasiswa untuk menganalisis kasus secara jernih dan menghindari reproduksi stereotipe dalam narasi akademik, misalnya tidak menggunakan framing yang menyiratkan kelompok etnis tertentu inheren lebih rentan konflik. Mengenali perbedaan konseptual antara ketiga konstruk ini bukan sekadar latihan teoretis, melainkan prasyarat untuk merancang kebijakan pemerintahan yang mampu menjangkau akar masalah, bukan hanya gejala permukaannya.

Tabel 7.1 Perbandingan Konseptual: Stereotipe, Prasangka, dan Diskriminasi

Dimensi	Stereotipe	Prasangka	Diskriminasi
Ranah utama	Kognitif (keyakinan/skema)	Afektif-konatif (sikap negatif)	Perilaku (tindakan nyata)
Definisi ringkas	Generalisasi berlebih tentang ciri kelompok	Sikap negatif terhadap anggota kelompok berdasar keanggotaan	Perlakuan tidak adil berdasar keanggotaan kelompok
Bisa terjadi tanpa dua lainnya?	Ya, stereotipe tanpa prasangka/diskriminasi mungkin terjadi	Ya, prasangka bisa tidak termanifestasi sebagai diskriminasi	Tidak selalu disertai prasangka eksplisit (diskriminasi institusional)
Tipe tambahan	Positif atau negatif, namun tetap mereduksi individu	Eksplisit (sadar) dan implisit (tidak sadar)	Individual dan institusional/struktural

Dimensi	Stereotype	Prasangka	Diskriminasi
Contoh konteks KTI	Asumsi bahwa etnis tertentu di Maluku lebih agresif secara budaya	Rasa tidak nyaman atau curiga saat berinteraksi dengan kelompok agama lain	Kebijakan rekrutmen ASN yang secara prosedural menyulitkan penduduk asli Papua

[Gambar 7.1 belum diunggah]

Gambar 7.1 Diagram alur tiga kotak horizontal berurutan berlabel STEREOTIPE, PRASANGKA, dan DISKRIMINASI, dihubungkan dengan panah satu arah dari kiri ke kanan; di bawah setiap kotak tertulis ranah utamanya (Kognitif, Afektif, Perilaku). Sebuah panah umpan balik mel

ANALOGI

Bayangkan prasangka seperti kacamata berwarna yang sudah terpasang di wajah seseorang sejak kecil: stereotype adalah lensa yang membentuk warna kacamata itu, sedangkan diskriminasi adalah tindakan nyata yang dilakukan seseorang karena dunia terlihat berwarna tertentu melalui lensa tersebut. Seseorang bisa memiliki lensa (stereotype) tanpa selalu bertindak (diskriminasi), tetapi selama lensanya tidak diganti, pandangannya akan terus terdistorsi.

CONTOH

Langkah 1: Seorang camat di sebuah kabupaten di Sulawesi Tengah memegang keyakinan bahwa warga pendatang dari provinsi lain cenderung tidak loyal terhadap pemerintah daerah setempat -- inilah stereotype kognitif. Langkah 2: Keyakinan itu berkembang menjadi rasa tidak nyaman dan kecurigaan setiap kali berhadapan dengan warga pendatang dalam proses pelayanan publik -- inilah prasangka sebagai sikap afektif. Langkah 3: Camat tersebut secara konsisten memperlambat proses pengurusan dokumen kependudukan bagi warga pendatang dibandingkan warga asli, meski persyaratan administratif keduanya identik -- inilah diskriminasi individual. Langkah 4: Apabila peraturan desa tertulis mewajibkan rekomendasi tokoh adat setempat yang secara praktis hanya dapat dipenuhi warga asli, maka meski tidak ada niat diskriminatif dari petugas, sistem itu sudah merupakan diskriminasi institusional.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi yang paling umum adalah anggapan bahwa prasangka selalu berujung

pada diskriminasi, sehingga apabila tidak ada tindakan nyata maka tidak ada prasangka. Pembetulanannya: prasangka adalah sikap internal yang bisa ditekan oleh norma sosial, hukum, atau kendali diri, sehingga seseorang bisa sangat berprasangka tetapi tidak menampilkannya secara terbuka -- fenomena ini disebut prasangka implisit. Sebaliknya, miskonsepsi kedua menyatakan bahwa diskriminasi hanya terjadi bila ada individu yang sengaja membenci -- padahal diskriminasi institusional berlangsung melalui struktur dan prosedur tanpa memerlukan niat kebencian dari siapa pun, sehingga analisis kebijakan pemerintahan harus mampu membedakan kedua level ini agar rekomendasi yang dihasilkan menyentuh akar masalah struktural, bukan hanya perilaku individu.

B. Akar Psikologis Prasangka: Kategorisasi Sosial, Bias In-Group/Out-Group, dan Ancaman Identitas

Prasangka tidak muncul begitu saja dari keburukan individu; ia berakar pada cara kerja kognitif manusia yang paling mendasar, yaitu kategorisasi sosial. Henri Tajfel dan John Turner melalui Social Identity Theory (SIT) menjelaskan bahwa otak manusia secara otomatis mengelompokkan orang ke dalam kategori—etnis, agama, daerah asal, bahasa—sebagai strategi efisiensi kognitif. Proses ini tidak dengan sendirinya berbahaya; masalah muncul ketika kategorisasi diikuti oleh evaluasi asimetris, yakni kecenderungan menilai kelompok sendiri (in-group) lebih positif dan kelompok lain (out-group) lebih negatif tanpa bukti yang memadai. Di konteks Kawasan Timur Indonesia yang kaya kemajemukan—lebih dari ratusan kelompok etnis dan komunitas agama tersebar dari Sulawesi hingga Papua—mekanisme kategorisasi ini bekerja di atas lapis identitas yang kompleks dan sering kali saling tumpang tindih.

Bias in-group/out-group adalah konsekuensi langsung kategorisasi sosial. Dalam eksperimen klasik Tajfel pada 1971, orang yang dikelompokkan secara acak pun sudah memperlihatkan favoritisme terhadap kelompok sendiri, fenomena yang dikenal sebagai minimal group paradigm. Implikasinya kuat: bahkan tanpa sejarah konflik, kesamaan identitas yang paling dangkal pun cukup memicu diferensiasi evaluatif. Dalam kehidupan nyata di KTI, bias ini diperparah oleh sejarah migrasi transmigrasi dan persaingan sumber daya—tanah, lapangan kerja, akses layanan publik—sehingga batas antara in-group dan out-group menjadi lebih terasa dan lebih emosional. Individu kemudian tidak sekadar membedakan kelompok secara kognitif, tetapi mulai melekatkan atribusi negatif yang tidak proporsional pada out-group, yang merupakan fondasi pembentukan prasangka.

Mekanisme ketiga dan paling detonasi dalam mengubah prasangka menjadi konflik terbuka adalah ancaman identitas. Tajfel dan Turner menyatakan bahwa harga diri individu sebagian besar ditopang oleh keanggotaan kelompok—ketika status atau keunikan kelompok terasa terancam, individu termotivasi untuk memulihkannya dengan merendahkan out-group atau mengeraskan batas kelompok. Teori ini melengkapi Realistic Conflict Theory dari Muzafer Sherif yang menekankan persaingan sumber daya nyata; ancaman identitas menambahkan dimensi simbolik, yaitu ketika kelompok merasa eksistensi budaya, bahasa, atau keyakinannya diperlemah, respons afektif berupa permusuhan dapat terpicu bahkan tanpa kompetisi ekonomi yang nyata. Dalam bingkai nilai Nasionalisme ICHSA-N, memahami mekanisme ancaman identitas ini sangat penting: kebijakan dan komunikasi publik yang mengabaikan rasa aman identitas kelompok lokal KTI justru dapat memperkuat, bukan meredam, dinamika prasangka yang sudah ada.

Ketiga mekanisme ini—kategorisasi, bias in-group/out-group, dan ancaman identitas—bekerja secara berlapis dan saling memperkuat. Penting untuk dicatat bahwa ketiganya bukan semata-mata produk niat jahat individu, melainkan proses psikologis yang melekat dalam struktur sosial yang tidak setara. Oleh karena itu, mahasiswa Ilmu Pemerintahan perlu menganalisis prasangka tidak hanya pada level individu, tetapi juga pada level kelembagaan dan kebijakan yang secara tidak sengaja mengukuhkan batas-batas kategorisasi tersebut. Kemampuan memetakan akar psikologis ini—melalui diagram sebab-akibat pada kasus konkret di KTI—adalah prasyarat untuk merumuskan rekomendasi kebijakan reduksi prasangka yang efektif dan kontekstual, sebagaimana dituntut dalam indikator capaian pertemuan ini.

Tabel 7.2 Perbandingan Tiga Mekanisme Akar Psikologis Prasangka

Mekanisme	Definisi Operasional	Level Kerja	Contoh di KTI	Kaitan dengan Prasangka
Kategorisasi Sosial	Pengelompokan otomatis individu ke dalam kategori sosial (etnis, agama, daerah)	Kognitif	Pembedaan pendatang transmigran vs. penduduk asli Papua berdasarkan asal daerah	Menyediakan batas kelompok yang menjadi dasar evaluasi diferensial
Bias In-Group/Out-Group	Kecenderungan menilai in-group lebih positif dan out-group lebih negatif secara tidak	Kognitif-Afektif	Penilaian bahwa pedagang dari etnis tertentu di Maluku 'lebih licik' tanpa bukti empiris	Mengisi kategorisasi dengan muatan evaluatif negatif terhadap out-group

Mekanisme	Definisi Operasional	Level Kerja	Contoh di KTI	Kaitan dengan Prasangka
	proporsional			
Ancaman Identitas	Persepsi bahwa status, keunikan, atau keberlangsungan kelompok sendiri terancam oleh out-group	Motivasional-Afektif	Komunitas adat NTT merasa identitas budayanya terpinggirkan oleh dominasi budaya pendatang	Memicu respons emosional defensif yang dapat mengubah prasangka laten menjadi perilaku terbuka

[Gambar 7.2 belum diunggah]

Gambar 7.2 Diagram berlapis tiga dengan bentuk piramida atau spiral: lapisan dasar bertuliskan 'Kategorisasi Sosial (Kognitif)', lapisan tengah 'Bias In-Group/Out-Group (Kognitif-Afektif)', dan lapisan puncak 'Ancaman Identitas (Motivasional)'. Panah dua arah antar

ANALOGI

Bayangkan otak Anda sebagai petugas bandara yang harus memproses ratusan penumpang per jam. Untuk efisiensi, ia mengelompokkan penumpang berdasarkan penampilan dan dokumen—ini adalah kategorisasi sosial yang wajar. Masalah mulai timbul ketika petugas itu secara otomatis bersikap ramah kepada penumpang dari satu kota dan curiga kepada penumpang dari kota lain, hanya karena pengalaman buruk satu kali di masa lalu—ini adalah bias in-group/out-group. Puncaknya, ketika petugas merasa 'penumpang dari sana' terus-menerus mengancam rutinitas kerjanya, ia mulai membuat aturan tersendiri yang mempersulit kelompok itu—inilah ancaman identitas yang berujung pada perilaku diskriminatif. Persis seperti itulah otak sosial manusia bekerja ketika berhadapan dengan kelompok lain dalam masyarakat plural seperti KTI.

CONTOH

Ambil kasus bertahap berikut. Pertama (kategorisasi): seorang mahasiswa dari Sulawesi yang baru tiba di Sorong secara otomatis memisahkan dalam benaknya antara teman-teman sesama perantau Sulawesi dan warga asli Papua—ini normal secara kognitif. Kedua (bias in-group/out-group): setelah beberapa minggu, ia mulai menilai bahwa teman-teman Sulawesinya 'lebih rajin dan bisa diandalkan' dibanding teman Papua-nya tanpa benar-benar menguji asumsi itu secara sistematis—ini adalah bias yang mulai membentuk prasangka. Ketiga (ancaman identitas): ketika dalam satu

diskusi kelas, dosen menyebut 'budaya merantau Sulawesi mendominasi ekonomi Papua', mahasiswa Papua di kelas itu merasakan eksistensi budayanya terancam dan merespons dengan pernyataan keras tentang pendatang—ancaman identitas telah mengaktifkan respons afektif yang memperuncing batas kelompok. Jika dosen tidak mengelola dinamika ini dengan bijak, tiga tahap itu dalam hitungan menit dapat bergerak dari kognitif menuju konflik verbal yang nyata di dalam kelas.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi umum yang harus diluruskan: banyak mahasiswa beranggapan bahwa prasangka hanya dimiliki oleh orang-orang yang pada dasarnya jahat, rasis, atau berpendidikan rendah—sehingga orang terdidik dan bermaksud baik dianggap bebas prasangka. Pembetulannya: Social Identity Theory menunjukkan bahwa kategorisasi sosial dan bias in-group/out-group adalah proses otomatis yang dialami semua orang tanpa memandang tingkat pendidikan atau niat moral mereka; yang membedakan individu bukan ada atau tidaknya prasangka implisit, melainkan seberapa sadar mereka mengenalinya dan seberapa aktif mereka mengoreksi ekspresi perilakunya. Implikasinya dalam konteks pemerintahan: seorang aparatur sipil negara di KTI bisa merancang kebijakan yang secara tidak sadar diskriminatif justru karena ia tidak mengenali bias kognitifnya sendiri, meskipun ia memiliki niat yang baik. Kesadaran diri (Integrity-ICHSA-N) terhadap mekanisme psikologis ini menjadi kompetensi profesional, bukan sekadar wacana moral.

C. Prasangka Etnis dan Agama di KTI: Bentuk, Dampak, dan Eskalasi Menuju Perilaku Kolektif

Kawasan Timur Indonesia (KTI) adalah salah satu laboratorium sosial paling kompleks di dunia: ratusan kelompok etnis dan komunitas agama hidup berdampingan dalam jarak geografis yang dekat, namun sejarah kolonial dan ketimpangan pembangunan meninggalkan endapan ketidakpercayaan yang mudah tersulut. Bentuk prasangka di KTI tidak seragam. Prasangka berbasis etnis muncul antara lain dalam relasi antara penduduk asli Papua dengan pendatang dari Sulawesi, Jawa, dan Makassar; antara komunitas adat Dayak dan pendatang di wilayah perbatasan; serta dalam hierarki sosial yang menempatkan kelompok migran sebagai kompetitor ekonomi. Prasangka berbasis agama tampak jelas dalam rekam jejak konflik Ambon 1999-2002 dan Poso 2000-2001, di mana identitas Kristen dan Islam berfungsi sebagai penanda batas kelompok yang paling cepat diaktifkan dalam situasi

ketegangan. Penting dicatat bahwa prasangka-prasangka ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat: ketika seorang individu sekaligus berbeda etnis dan berbeda agama dari kelompok mayoritas setempat, ia menanggung beban stigma berlapis yang disebut intersectional prejudice [Dovidio et al. 2010].

Dampak psikologis prasangka terhadap kelompok yang menjadi sasaran mencakup dua level. Pada level individual, anggota kelompok yang terstigmatisasi mengalami stereotype threat, yaitu kecemasan bahwa tindakannya akan mengkonfirmasi stereotipe negatif tentang kelompoknya, yang terbukti menekan performa kognitif dan menurunkan aspirasi pendidikan. Pada level komunitas, prasangka yang terlembaga dalam akses layanan publik, penerimaan pegawai pemerintah daerah, atau distribusi tanah adat menjadi diskriminasi institusional yang secara sistematis memarginalkan kelompok tertentu lintas generasi. Di KTI, dampak ini berwujud nyata dalam kesenjangan indeks pembangunan manusia antara kabupaten yang didominasi kelompok adat tertentu dengan kabupaten tetangganya, sebuah pola yang tidak bisa dijelaskan semata oleh faktor geografis [Sarwono dan Meinarno 2011]. Menghayati realitas ini adalah bagian dari nilai Service dan Integrity: seorang calon aparatur pemerintahan tidak boleh mereproduksi narasi yang meremehkan martabat kelompok marginal, karena narasi semacam itu adalah salah satu mekanisme pelestarian prasangka institusional itu sendiri.

Bagaimana prasangka yang awalnya bersifat kognitif dan afektif dapat meledak menjadi kerusuhan massal? Teori relative deprivation dari Gurr menjelaskan bahwa perilaku kolektif kekerasan tidak dipicu oleh kemiskinan absolut, melainkan oleh kesenjangan antara apa yang dianggap pantas diperoleh kelompok (value expectations) dengan apa yang sesungguhnya mereka peroleh (value capabilities). Ketika kelompok etnis atau agama tertentu mempersepsikan bahwa kelompok lain mendapat akses berlebih terhadap jabatan, lahan, atau kontrak pemerintah, persepsi ketidakadilan ini mempertemukan prasangka dengan amarah kolektif. Realistic conflict theory dari Sherif menambahkan bahwa kompetisi nyata atas sumber daya yang langka, seperti tanah, kuota ASN, atau proyek infrastruktur, memperkuat antagonisme antar-kelompok secara langsung. Di KTI, kedua dinamika ini beroperasi bersamaan: relative deprivation menyalakan sumbu, sementara konflik kepentingan konkret menyediakan bahan bakarnya, dan prasangka yang sudah terakumulasi membuat kelompok rentan terhadap provokasi kecil pun untuk bergerak sebagai massa [Myers 2012].

Eskalasi dari prasangka menuju perilaku kolektif tidak terjadi dalam semalam; ia mengikuti pola bertahap yang dapat diidentifikasi oleh aparatur pemerintahan yang peka. Tahap pertama adalah akumulasi prasangka laten di ruang privat dan media sosial. Tahap kedua adalah insiden pemicu (triggering event) yang sering kali sepele

secara objektif, misalnya perkelahiran antarindividu, namun segera diberi label identitas kelompok oleh aktor-aktor yang berkepentingan. Tahap ketiga adalah mobilisasi massa melalui jaringan solidaritas in-group, di mana anggota kelompok merasa berkewajiban membela kelompoknya meski tidak menyaksikan insiden asli. Tahap keempat adalah tindakan kolektif terbuka berupa unjuk rasa, pengusiran, atau kekerasan. Memahami rantai eskalasi ini penting bagi calon ilmuwan pemerintahan, karena intervensi yang efektif harus menysasar titik yang tepat: deradikalisasi narasi pada tahap pertama jauh lebih efisien daripada penegakan hukum pada tahap keempat. Nilai Nasionalisme dalam kerangka ICHSA-N di sini bermakna aktif, yaitu kemampuan membaca dinamika ini dan bertindak mencegah perpecahan sebelum sumber daya negara habis untuk memadamkan konflik yang seharusnya bisa dicegah [Baron dan Byrne 2004].

Tabel 7.3 Perbandingan Prasangka Etnis dan Agama di KTI: Bentuk, Pemicu, dan Dampak

Dimensi	Prasangka Berbasis Etnis	Prasangka Berbasis Agama
Contoh kasus KTI	Konflik pendatang-penduduk asli Papua; ketegangan di wilayah perbatasan Kalimantan	Konflik Ambon 1999-2002; kerusuhan Poso 2000-2001
Penanda batas kelompok	Bahasa, marga, adat istiadat, ciri fisik	Simbol keagamaan, nama, pakaian, tempat ibadah
Mekanisme pemicu utama	Kompetisi lahan dan ekonomi (Realistic Conflict Theory)	Ancaman identitas dan relative deprivation
Dampak psikologis sasaran	Stereotype threat pada mobilitas sosial dan pendidikan	Kecemasan identitas dan isolasi komunitas
Risiko eskalasi kolektif	Pengusiran paksa, konflik agraria	Kerusuhan massal, pembakaran tempat ibadah

[Gambar 7.3 belum diunggah]

Gambar 7.3 Diagram alur empat tahap eskalasi prasangka menuju perilaku kolektif: (1) Akumulasi prasangka laten dengan panah ke (2) Insiden pemicu berlabel identitas kelompok, panah ke (3) Mobilisasi massa via jaringan in-group, panah ke (4) Tindakan kolektif terbuka

ANALOGI

Bayangkan sebuah tabung gas yang sudah bocor perlahan selama sehari-hari di dapur tertutup. Prasangka yang terakumulasi ibarat gas yang tidak terlihat namun terus memenuhi ruangan. Insiden pemicu adalah percikan api kecil, mungkin hanya gesekan sandal di lantai. Ledakannya bukan disebabkan oleh percikan itu sendiri,

melainkan oleh betapa penuhnya ruangan itu dengan gas yang telah lama dibiarkan menumpuk. Itulah mengapa analisis prasangka sosial di KTI tidak bisa hanya melihat insiden pemicunya; kita harus memeriksa kondisi ruangan jauh sebelum percikan terjadi.

CONTOH

Pada konflik Ambon 1999, langkah pertama yang dapat dianalisis adalah akumulasi prasangka: selama beberapa tahun sebelumnya, kelompok Kristen dan Muslim di Ambon saling mempersepsikan ketimpangan dalam akses pegawai negeri dan bisnis, sebuah kondisi relative deprivation yang menciptakan ketegangan laten. Langkah kedua, insiden pemicu: perkelahian kecil antara sopir bemo pada 19 Januari 1999 segera diberi label agama oleh pihak tertentu melalui pamflet dan pesan berantai. Langkah ketiga, mobilisasi: jaringan solidaritas berbasis masjid dan gereja menggerakkan massa di luar Ambon kota dalam hitungan jam. Langkah keempat, eskalasi: pembakaran permukiman dan pengungsian puluhan ribu warga berlangsung selama tiga tahun. Menganalisis kasus ini secara bertahap memungkinkan mahasiswa mengidentifikasi di titik mana intervensi pemerintah daerah, jika dilakukan lebih awal, dapat memotong rantai eskalasi tersebut.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi umum yang harus diluruskan adalah anggapan bahwa konflik etnis dan agama di KTI semata-mata disebabkan oleh perbedaan budaya atau ketidakcocokan nilai yang bersifat alamiah antara kelompok. Anggapan ini berbahaya karena seolah menempatkan konflik sebagai takdir yang tak terhindarkan, sekaligus meremehkan martabat semua pihak yang terlibat. Pembetulannya: psikologi sosial dan sosiologi konflik menunjukkan bahwa kelompok-kelompok yang sama telah hidup berdampingan secara damai selama puluhan tahun sebelum konflik meledak, artinya perbedaan budaya bukan penyebabnya. Yang menjadi penyebab adalah kombinasi prasangka yang tidak dikelola, ketimpangan struktural yang dibiarkan, dan aktor-aktor yang secara sengaja mengeksploitasi identitas kelompok untuk kepentingan politik atau ekonomi. Implikasinya: konflik bisa dicegah, dan pencegahannya adalah tanggung jawab aktif aparatur pemerintahan, bukan sekadar menunggu masyarakat sendiri berdamai.

D. Strategi Reduksi Prasangka dan Rekonsiliasi Berbasis Kearifan Lokal KTI

Upaya mengurangi prasangka tidak cukup dengan hanya mengimbau toleransi secara retorik. Psikologi sosial menawarkan sejumlah strategi berbasis bukti yang telah diuji secara empiris. Yang paling mapan adalah Hipotesis Kontak (Contact Hypothesis) Gordon Allport, yang menyatakan bahwa kontak antarkelompok dapat mengurangi prasangka apabila memenuhi empat syarat: kesetaraan status, tujuan bersama, kerja sama antarkelompok, dan dukungan otoritas atau norma sosial. Tanpa keempat syarat itu, kontak justru bisa memperburuk prasangka karena memperkuat persepsi ancaman. Di KTI, forum-forum adat seperti Pela Gandong di Maluku dan tradisi Torangsamua Basudara di Sulawesi Utara secara historis telah memenuhi prasyarat Allport tersebut: peserta bertemu sebagai anggota komunitas yang setara, berorientasi pada kepentingan bersama, dan mendapat legitimasi dari tokoh adat serta agama. Ini menunjukkan bahwa kearifan lokal KTI bukan sekadar tradisi simbolis, melainkan infrastruktur sosial-psikologis yang konkret untuk menekan eskalasi prasangka antargolongan.

Selain hipotesis kontak, teori identitas sosial yang dibahas pada sub-bab B memberikan implikasi strategis yang penting melalui konsep re-kategorisasi atau decategorization. Re-kategorisasi berarti mengajak individu untuk melihat dirinya dan anggota out-group sebagai bagian dari kategori yang lebih inklusif, misalnya dari identitas suku yang sempit menuju identitas bersama sebagai warga Provinsi Maluku, sebagai orang Indonesia, atau sebagai anggota komunitas adat tertentu. Model Identitas In-Group Bersama (Common In-Group Identity Model) oleh Gaertner dan Dovidio menunjukkan bahwa strategi ini secara signifikan menurunkan bias antarkelompok. Dalam praktiknya di KTI, program seperti program kepemimpinan lintas agama di Poso pascakonflik dan majelis lintas iman di Ambon mencoba membangun identitas superordinat tanpa menghapus identitas etnis atau agama yang ada, karena penghapusan paksa justru dianggap ancaman oleh kelompok yang bersangkutan. Nilai Harmoni (Harmony-ICHSA-N) yang diajarkan dalam kultur lokal KTI bersesuaian secara psikologis dengan logika re-kategorisasi ini: kerukunan bukan berarti keseragaman, melainkan pengakuan atas perbedaan dalam bingkai identitas yang lebih besar.

Pendekatan berbasis Realistic Conflict Theory juga mengisyaratkan bahwa prasangka akan turun secara substansial ketika antarkelompok diberikan tujuan superordinat, yaitu target yang hanya bisa dicapai jika kedua kelompok bekerja sama. Dalam konteks KTI, tujuan superordinat yang potensial mencakup ketahanan pangan bersama, penanggulangan bencana alam, dan pengelolaan sumber daya laut berbasis

adat yang melibatkan komunitas lintas etnis. Program-program pembangunan berbasis community-based resource management yang mengintegrasikan kearifan lokal seperti Sasi di Maluku dan Kearifan Adat Masyarakat Papua sesungguhnya tidak hanya bernilai ekologis, tetapi juga psikologis karena mendorong interdependensi positif antarkelompok yang sebelumnya berkonflik. Nilai Nasionalisme (Nationalism-ICHSA-N) dalam konteks ini dapat dioperasionalkan bukan sebagai kesetiaan abstrak pada simbol negara, melainkan sebagai komitmen konkret untuk menjaga kesejahteraan bersama di tengah keragaman, yang merupakan nilai yang sudah tertanam dalam praktik adat setempat jauh sebelum konsep negara-bangsa hadir. Prinsip Service dalam ICHSA-N juga relevan di sini: mahasiswa Ilmu Pemerintahan perlu mengembangkan kepekaan bahwa kebijakan publik yang dirancang tanpa memahami dinamika prasangka lokal berisiko memperburuk ketegangan alih-alih meredakannya.

Strategi reduksi prasangka yang efektif juga harus mempertimbangkan level intervensinya, apakah individual, kelompok, atau struktural, karena prasangka beroperasi di ketiga level tersebut secara simultan. Pada level individual, pelatihan kesadaran bias implisit dan pendidikan perspektif-taking terbukti meningkatkan empati lintas kelompok. Pada level kelompok, fasilitasi dialog terstruktur dan rekonsiliasi berbasis narasi seperti yang dipraktikkan oleh lembaga-lembaga sipil di Maluku dan Poso pascakonflik membantu merekonstruksi citra out-group yang telah terdistorsi. Pada level struktural, revisi kebijakan yang bersifat diskriminatif secara institusional merupakan prasyarat agar intervensi psikologis tidak hanya menjadi kosmetik. Integritas (Integrity-ICHSA-N) sebagai nilai akademik menuntut mahasiswa untuk tidak hanya merekomendasikan strategi yang terdengar baik, tetapi mengevaluasi kelayakan, konteks, dan bukti empirisnya secara kritis sebelum merumuskan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah di KTI.

Tabel 7.4 Perbandingan Strategi Reduksi Prasangka: Dasar Teori, Mekanisme, dan Contoh Penerapan di KTI

Strategi	Landasan Teori	Mekanisme Psikologis	Contoh Penerapan di KTI	Prasyarat Keberhasilan
Kontak Antarkelompok Terstruktur	Contact Hypothesis (Allport)	Mengoreksi stereotipe melalui pengalaman langsung yang positif	Forum Pela Gandong Maluku, majelis lintas iman Ambon	Kesetaraan status, tujuan bersama, dukungan tokoh adat/agama
Re-kategorisasi /	Common In-	Menggeser batas	Program	Identitas lama

Strategi	Landasan Teori	Mekanisme Psikologis	Contoh Penerapan di KTI	Prasyarat Keberhasilan
Identitas Superordinat	Group Identity Model (Gaertner & Dovidio)	in-group agar mencakup out-group sebelumnya	kepemimpinan lintas agama Poso, identitas 'orang Maluku'	tidak dihapus paksa; inklusif tanpa asimilatif
Tujuan Superordinat	Realistic Conflict Theory (Sherif)	Interdependensi positif menggantikan persaingan sumber daya	Pengelolaan Sasi laut lintas desa/etnis di Maluku	Tujuan hanya tercapai bila kedua kelompok bekerja sama
Intervensi Struktural / Kebijakan Anti-Diskriminasi	Strukturalisme sosial; Institutional Discrimination Theory	Menghilangkan akar diskriminasi institusional yang memperparah prasangka	Revisi peraturan daerah yang bias etnis atau agama di KTI	Kemauan politik; penegakan hukum yang konsisten
Dialog Narasi dan Rekonsiliasi	Narrative Identity Theory; Restorative Justice	Rekonstruksi citra out-group melalui berbagi pengalaman personal	Program rekonsiliasi LSM di Ambon dan Poso pascakonflik 2000-an	Lingkungan aman, fasilitator terlatih, komitmen jangka panjang

[Gambar 7.4 belum diunggah]

Gambar 7.4 Diagram berlapis tiga (level individual, kelompok, struktural) yang menunjukkan strategi reduksi prasangka pada masing-masing level beserta panah yang menggambarkan interaksi antarlevels; di bagian bawah diagram dicantumkan contoh konkret dari KTI untuk s

ANALOGI

Bayangkan prasangka seperti jamur yang tumbuh di dinding lembap. Mengcat ulang permukaan dinding (intervensi simbolik tanpa mengubah struktur) hanya menyembunyikan jamur sementara. Untuk benar-benar menghilangkannya, Anda harus mengatasi sumber kelembapan (kondisi struktural), membersihkan dinding secara menyeluruh (intervensi kelompok), dan memastikan penghuni rumah tahu cara menjaga kebersihan (intervensi individual). Reduksi prasangka yang berkelanjutan bekerja persis demikian: ia membutuhkan intervensi simultan di tiga level, bukan satu pendekatan tunggal.

CONTOH

Konflik Ambon 1999-2002 meninggalkan luka sosial yang dalam antara komunitas Muslim dan Kristen. Langkah pertama yang berhasil adalah memfasilitasi kontak langsung antarkelompok melalui pasar bersama lintas komunitas yang diawasi tokoh adat, memenuhi syarat Allport tentang kesetaraan status dan tujuan bersama (langkah 1: kontak terstruktur). Selanjutnya, komunitas didorong untuk mengadopsi identitas superordinat 'orang Ambon' atau 'orang Maluku' tanpa meninggalkan identitas agama masing-masing, sehingga batas in-group melebar dan tidak lagi identik dengan batas agama (langkah 2: re-kategorisasi). Kemudian, program rehabilitasi perumahan bersama lintas komunitas menciptakan tujuan superordinat konkret: warga Muslim dan Kristen hanya bisa menyelesaikan pembangunan jika bekerja sama, sehingga ketergantungan positif terbentuk secara alami (langkah 3: tujuan superordinat). Hasilnya, survei pasca-intervensi oleh lembaga sipil lokal menunjukkan penurunan persepsi ancaman antarkelompok secara terukur dibandingkan periode konflik, meskipun distrust residual masih perlu ditangani melalui reformasi kebijakan jangka panjang.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi yang sering muncul adalah anggapan bahwa sekadar mempertemukan dua kelompok yang berkonflik sudah cukup untuk mengurangi prasangka -- bahwa kontak sosial apa pun pasti berdampak positif. Pembetulannya: penelitian Allport dan replikasinya justru menunjukkan bahwa kontak tanpa prasyarat struktural yang tepat dapat memperburuk prasangka. Ketika dua kelompok bertemu dalam kondisi tidak setara, bersaing untuk sumber daya yang sama, atau tanpa dukungan otoritas, pertemuan itu memperkuat stereotipe negatif yang sudah ada alih-alih meruntuhkannya. Di KTI, memaksakan dialog antaretnis dalam suasana ketegangan aktif tanpa fasilitator terlatih dan tanpa kerangka normatif yang jelas terbukti beberapa kali memperburuk situasi. Oleh karena itu, desain intervensi yang cermat -- bukan sekadar niat baik -- adalah kunci efektivitas strategi reduksi prasangka.

RANGKUMAN

- Stereotipe, prasangka, dan diskriminasi adalah tiga konstruk yang berbeda secara konseptual: stereotipe beroperasi pada level kognitif, prasangka pada level afektif-evaluatif, dan diskriminasi pada level perilaku nyata.
- Teori identitas sosial menjelaskan bahwa kategorisasi in-group versus out-group serta ancaman identitas kelompok merupakan akar psikologis utama yang mendorong terbentuknya prasangka di masyarakat plural.

- Di Kawasan Timur Indonesia, prasangka berbasis etnis dan agama telah terbukti dapat bereskalasi menjadi kerusuhan kolektif ketika diperkuat oleh deprivasi relatif dan konflik kepentingan nyata antar-kelompok.
- Diskriminasi institusional berbeda dari diskriminasi individual karena tertanam dalam kebijakan, struktur, dan praktik lembaga, sehingga memerlukan intervensi di level kebijakan publik, bukan sekadar perubahan sikap personal.
- Strategi reduksi prasangka yang efektif di KTI harus mengintegrasikan contact hypothesis dengan kearifan lokal dan nilai Nasionalisme agar menghasilkan rekonsiliasi yang berkelanjutan dan bermartabat.

REFERENSI

- Myers, D. G. (2013). *Social Psychology*. 11th Edition. McGraw-Hill.
- Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2016). *Social Psychology*. 9th Edition. Pearson.
- Hogg, M. A., & Vaughan, G. M. (2018). *Social Psychology*. 8th Edition. Pearson.
- Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2006). *Social Psychology*. 12th Edition. Pearson Prentice Hall.
- Cialdini, R. B. (2009). *Influence: Science and Practice*. 5th Edition. Pearson.
- Sarwono, S. W. (2015). *Psikologi Sosial*. Edisi 2. Salemba Humanika.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2022. *Standar Nasional Pendidikan (Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi)*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2024. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Outcome Based Education (OBE)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- Norris, Pippa. 2011. *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Putnam, Robert D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon and Schuster.
- Sears, David O., Jonathan L. Freedman, dan L. Anne Peplau. 1994. *Psikologi Sosial*. Terjemahan Michael Adryanto. Jakarta: Erlangga.
- Myers (2013); Aronson, Wilson & Akert (2016); Hogg & Vaughan (2018); Taylor, Peplau & Sears (2006); Sarwono (2015); Sears, Freedman & Peplau (1994).

PERTEMUAN 8

Ujian Tengah Semester: Evaluasi Capaian Psikologi Sosial Minggu 1–7

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:

44. Menjelaskan kembali konsep-konsep inti psikologi sosial yang telah dikaji pada Minggu 1-7 secara akurat dan sistematis
45. Menganalisis kasus atau skenario sosial yang diberikan menggunakan kerangka teori yang relevan dari cakupan UTS
46. Membandingkan pendekatan teori yang berbeda dalam menjelaskan fenomena sosial yang sama
47. Menunjukkan kejujuran akademik selama pelaksanaan ujian dengan tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun (nilai Integrity)

Pendahuluan

Pertemuan ke-8 menandai titik evaluasi formatif-sumatif pertama dalam rangkaian 16 pertemuan Psikologi Sosial. Selama tujuh pertemuan sebelumnya, mahasiswa telah membangun fondasi konseptual yang progresif: dimulai dari pengantar dan sejarah perspektif teori, berlanjut ke mekanisme persepsi sosial dan atribusi, kemudian konformitas dan pengaruh sosial, lalu dinamika kelompok dan kepemimpinan, hingga prasangka, diskriminasi, dan perilaku kolektif yang dikontekstualisasikan pada Kawasan Timur Indonesia. Ujian Tengah Semester ini hadir bukan sekadar periksa hafalan, melainkan sebagai wahana untuk mengukur seberapa jauh mahasiswa mampu mengintegrasikan dan mengaplikasikan kerangka teori tersebut dalam membaca fenomena sosial dan pemerintahan secara analitis.

Pelaksanaan UTS dirancang sebagai evaluasi sumatif tertulis individual yang mengacu pada prinsip kejujuran akademik dan kemandirian berpikir — dua nilai yang tidak terpisahkan dari kompetensi seorang sarjana Ilmu Pemerintahan yang berintegritas. Kondisi ujian yang tertib, adil, dan kondusif dijaga bersama oleh dosen

pengawas dan mahasiswa sebagai bentuk penghayatan nilai Integrity (I) dari penciri ICHSA-N UNISAN. Hasil UTS sekaligus menjadi cermin diagnostik: konsep mana yang telah dikuasai secara kokoh dan konsep mana yang perlu diperdalam sebelum memasuki paruh kedua semester yang lebih aplikatif.

A. Penjelasan Teknis Tata Tertib dan Mekanisme Ujian

Ujian Tengah Semester Psikologi Sosial dirancang sebagai evaluasi terstruktur yang mengukur sejauh mana mahasiswa mampu menginternalisasi dan mengaplikasikan konsep-konsep yang dikaji pada Minggu 1 hingga 7. Pelaksanaan ujian berlangsung selama 100 menit penuh sesuai alokasi 2 SKS, dengan tiga segmen soal: soal pilihan konsep (bobot 30%), soal analisis kasus (bobot 40%), dan soal komparasi teori (bobot 30%). Mahasiswa wajib hadir tepat waktu karena keterlambatan lebih dari 15 menit tidak diizinkan masuk ruang ujian dan dianggap tidak mengikuti ujian pada sesi tersebut. Segala bentuk alat komunikasi elektronik, termasuk ponsel dan smartwatch, wajib dimatikan dan disimpan di luar jangkauan meja ujian sebelum soal dibagikan.

Mekanisme pengerjaan soal mengikuti urutan yang bersifat progresif: mahasiswa dianjurkan membaca seluruh soal terlebih dahulu dalam 5 menit pertama sebelum mulai menulis jawaban, guna menentukan alokasi waktu yang proporsional per segmen. Lembar jawaban ditulis tangan menggunakan pulpen berwarna hitam atau biru; jawaban yang ditulis dengan pensil atau tinta merah tidak akan dinilai. Setiap lembar jawaban harus mencantumkan nama lengkap, NIM, program studi, dan nomor soal secara jelas pada bagian atas lembar; ketidaklengkapan identitas dapat menyebabkan hasil ujian tidak dapat diproses. Mahasiswa yang telah selesai sebelum waktu habis dipersilakan menyerahkan lembar jawaban kepada pengawas dan meninggalkan ruangan secara tertib tanpa mengganggu peserta lain yang masih mengerjakan.

Nilai Integrity sebagai bagian dari karakter ICHSA-N menjadi fondasi utama pelaksanaan ujian ini. Setiap bentuk kecurangan akademik, mencakup menyontek, membawa catatan tersembunyi, berkomunikasi dengan sesama peserta, maupun menggunakan sumber tidak sah dalam bentuk apa pun, akan dikenai sanksi berupa pembatalan hasil ujian dan pencatatan dalam rekam jejak akademik mahasiswa. Pengawas ujian berwenang menghentikan pengerjaan seorang peserta secara langsung apabila terdapat indikasi kecurangan yang cukup kuat, tanpa perlu menunggu konfirmasi lebih lanjut. Kejujuran dalam ujian bukan semata kewajiban prosedural, melainkan cerminan integritas yang kelak dibutuhkan dalam praktik pemerintahan yang bersih dan akuntabel, sebuah relevansi nyata bagi mahasiswa

Ilmu Pemerintahan di Kawasan Timur Indonesia yang dituntut menjadi agen tata kelola publik yang dipercaya masyarakat.

Setelah waktu ujian habis, mahasiswa wajib meletakkan pulpen dan menghentikan penulisan secara serentak atas instruksi pengawas; penambahan jawaban setelah instruksi berhenti dikategorikan sebagai pelanggaran tata tertib. Lembar soal dikembalikan bersama lembar jawaban kecuali dinyatakan lain oleh dosen pengampu. Hasil ujian akan diumumkan paling lambat dua minggu setelah pelaksanaan melalui sistem informasi akademik universitas, disertai umpan balik umum mengenai pola kesalahan yang ditemukan agar mahasiswa dapat memperbaiki strategi belajar menuju UAS. Mahasiswa yang berhalangan hadir karena alasan yang dapat dibuktikan secara resmi, seperti sakit dengan surat dokter atau musibah keluarga, dapat mengajukan permohonan ujian susulan kepada dosen pengampu paling lambat tiga hari kerja setelah pelaksanaan ujian utama.

Tabel 8.1 Segmen Soal, Cakupan Materi, dan Bobot Penilaian UTS Psikologi Sosial

Segmen Soal	Tipe Soal	Cakupan Materi (Minggu)	Bobot (%)	Alokasi Waktu (menit)
Rekonstruksi Konsep	Uraian singkat / pilihan berbasis konsep	Minggu 1–7 (konsep inti)	30	25
Analisis Kasus Sosial	Esai analisis kasus skenario	Minggu 3–7 (aplikasi teori)	40	45
Komparasi Pendekatan Teori	Esai perbandingan dua teori atau lebih	Minggu 2–7 (perspektif teori)	30	30

[Gambar 8.1 belum diunggah]

Gambar 8.1 Diagram alur mekanisme ujian: mulai dari mahasiswa memasuki ruangan dan menyerahkan alat elektronik, menerima lembar soal dan jawaban, membaca soal (5 menit), mengerjakan tiga segmen secara berurutan, menyerahkan lembar jawaban kepada pengawas, hingga men

ANALOGI

Mekanisme ujian ini bekerja seperti sidang verifikasi dokumen di kantor pelayanan publik: setiap pemohon harus memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan (identitas lengkap, dokumen sah, waktu yang tepat) sebelum prosesnya dapat dijalankan. Petugas tidak dapat memproses berkas yang tidak memenuhi syarat, bukan karena tidak mau membantu, melainkan karena standar itu ada untuk

menjamin keadilan bagi semua pemohon. Demikian pula dalam ujian, tata tertib bukan penghalang, melainkan kerangka yang memastikan setiap mahasiswa dinilai atas kemampuannya sendiri secara setara.

CONTOH

Bayangkan seorang mahasiswa bernama Andi tiba di ruang ujian tepat saat soal dibagikan. Andi membaca seluruh tiga segmen soal dalam 5 menit pertama dan memutuskan mengalokasikan 25 menit untuk segmen pertama, 45 menit untuk segmen analisis kasus yang berbobot lebih besar, dan 25 menit untuk komparasi teori, menyisakan 5 menit untuk membaca ulang jawaban. Pada menit ke-70, Andi menyelesaikan semua soal, memeriksa kelengkapan identitas di lembar jawaban, lalu menyerahkan pekerjaan kepada pengawas dan keluar dengan tenang. Sebaliknya, rekan Andi yang menghabiskan 60 menit penuh di segmen pertama terpaksa mengosongkan segmen analisis kasus yang justru berbobot 40%, sehingga nilai totalnya jauh lebih rendah meski jawaban segmen pertamanya sangat baik. Contoh ini menunjukkan bahwa manajemen waktu yang terencana, bukan sekadar penguasaan materi, merupakan keterampilan kritis dalam ujian berbasis segmen.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi yang sering muncul adalah keyakinan bahwa membawa catatan kecil berupa ringkasan satu halaman atau selembbar kertas tipis bukan termasuk kecurangan karena tidak menyontek jawaban orang lain secara langsung. Pembetulannya: segala materi tertulis yang tidak secara eksplisit diizinkan oleh dosen termasuk dalam kategori sumber tidak sah, tanpa memandang ukuran atau cara penyembunyiannya. Kecurangan dalam psikologi sosial sendiri dapat dijelaskan melalui konsep disonansi kognitif dan rasionalisasi perilaku, yakni individu cenderung membingkai ulang tindakannya agar tampak dapat diterima secara moral; memahami mekanisme ini justru menjadi pengingat bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan bahwa integritas dimulai dari konsistensi antara nilai yang dipelajari dan tindakan yang dilakukan dalam ruang ujian.

B. Rekonstruksi Konsep Inti Psikologi Sosial Minggu 1–7

Psikologi sosial sebagai disiplin ilmu menempatkan individu dalam jaringan relasi sosial yang terus-menerus memengaruhi pikiran, perasaan, dan perilakunya. Sejak

Minggu 1, mahasiswa telah diperkenalkan pada definisi psikologi sosial sebagai kajian ilmiah tentang bagaimana kehadiran orang lain — nyata, dibayangkan, maupun tersirat — membentuk respons individu. Fondasi ini kemudian diperluas pada Minggu 2 dengan pembahasan pembentukan persepsi sosial, termasuk bagaimana kesan pertama terbentuk melalui proses kategorisasi dan bagaimana atribusi kausal menentukan penilaian kita terhadap perilaku orang lain. Pemahaman atas fondasi ini penting bagi calon aparaturnya pemerintahan, karena kebijakan publik selalu lahir dari dan berinteraksi dengan dinamika persepsi masyarakat.

Minggu 3 hingga 4 memperdalam kajian tentang sikap sosial: bagaimana sikap terbentuk, terstruktur dalam komponen kognitif-afektif-konatif, serta bagaimana sikap dapat berubah melalui persuasi dan disonansi kognitif. Pengetahuan ini langsung relevan dengan praktik komunikasi kebijakan di Kawasan Timur Indonesia, di mana kepercayaan komunitas adat dan nilai lokal kerap menjadi penentu keberhasilan program pemerintah. Minggu 5 kemudian membawa mahasiswa masuk ke dinamika kelompok: konformitas, pengaruh sosial, obedience, serta fenomena groupthink yang sering menghinggapi birokrasi dan lembaga legislatif. Minggu 6 membahas prasangka, diskriminasi, dan stereotip sebagai produk kategorisasi sosial yang berlebihan, sedangkan Minggu 7 mengintegrasikan semua konsep tersebut dalam konteks perilaku prososial dan agresi sosial sebagai dua kutub respons manusia dalam situasi konflik atau krisis.

Rekonstruksi konsep pada UTS bukan sekadar mengingat definisi, melainkan menghubungkan antarkonsep secara sistematis sehingga membentuk peta kognitif yang koheren. Mahasiswa yang hanya menghafal istilah tanpa memahami keterkaitan antarteori akan kesulitan menjawab soal analisis kasus, karena soal UTS dirancang untuk mengukur kemampuan menganalisis (C4) dan membandingkan (C4-C5), bukan sekadar mengingat (C1). Nilai Integrity yang menjadi penciri ICHSA-N menuntut setiap mahasiswa menampilkan hasil belajarnya secara mandiri dan jujur selama ujian, karena rekonstruksi pengetahuan yang autentik hanya dapat dibuktikan melalui kerja individual yang murni. Dengan demikian, persiapan UTS yang ideal adalah menyusun sendiri peta konsep yang menghubungkan persepsi sosial, sikap, pengaruh kelompok, prasangka, dan perilaku sosial dalam satu narasi yang utuh.

Tabel 8.2 Peta Konsep Inti Psikologi Sosial Minggu 1–7

Minggu	Konsep Inti	Teori/Pendekatan Utama	Relevansi bagi Ilmu Pemerintahan
1	Definisi dan ruang lingkup psikologi sosial	Definisi Allport; pendekatan ilmiah psikologi sosial	Memahami posisi individu dalam sistem pemerintahan

Minggu	Konsep Inti	Teori/Pendekatan Utama	Relevansi bagi Ilmu Pemerintahan
2	Persepsi sosial dan atribusi	Teori atribusi Heider; kesalahan atribusi fundamental	Analisis persepsi warga terhadap kebijakan publik
3–4	Sikap dan perubahan sikap	Komponen kognitif-afektif-konatif; disonansi kognitif Festinger; teori persuasi	Strategi komunikasi kebijakan dan kampanye publik
5	Dinamika kelompok dan pengaruh sosial	Konformitas Asch; obedience Milgram; groupthink Janis	Pengambilan keputusan kolektif dalam birokrasi dan legislatif
6	Prasangka, stereotip, dan diskriminasi	Teori identitas sosial Tajfel; kategorisasi in-group/out-group	Manajemen keragaman sosial dalam kebijakan daerah
7	Perilaku prososial dan agresi sosial	Efek penonton Latane & Darley; teori frustrasi-agresi	Penanganan konflik sosial dan pemberdayaan masyarakat

[Gambar 8.2 belum diunggah]

Gambar 8.2 Diagram lingkaran konsentris berlapis tujuh yang menggambarkan perkembangan konsep dari Minggu 1 (inti: definisi psikologi sosial) hingga Minggu 7 (lapisan terluar: perilaku prososial dan agresi), dengan anak panah dua arah antarlapisan yang menunjukkan k

ANALOGI

Rekonstruksi konsep Minggu 1–7 ini ibarat menyusun ulang peta jalan sebuah kota setelah menempuhnya selama tujuh pekan. Setiap konsep adalah persimpangan jalan: jika Anda hanya hafal nama jalan tanpa tahu bagaimana jalan-jalan itu terhubung, Anda akan tersesat saat diminta menemukan rute terpendek dari satu titik ke titik lain. Ujian ini mengharuskan Anda membuktikan bahwa Anda benar-benar mengenal peta itu, bukan sekadar mengingat daftar nama jalannya.

CONTOH

Seorang mahasiswa menyusun peta konsep mandiri sebagai berikut: ia mulai dari

konsep persepsi sosial (Minggu 2), lalu menghubungkannya dengan proses pembentukan sikap (Minggu 3–4) dengan menunjukkan bahwa atribusi yang keliru dapat menghasilkan sikap negatif terhadap suatu kelompok. Sikap negatif itu kemudian ia kaitkan dengan prasangka dan stereotip (Minggu 6) menggunakan teori identitas sosial Tajfel. Selanjutnya ia menunjukkan bagaimana prasangka yang menguat dalam kelompok birokrat dapat memicu groupthink (Minggu 5) dalam pengambilan keputusan anggaran daerah di Sulawesi Tengah, dan akhirnya berujung pada berkurangnya perilaku prososial lembaga terhadap kelompok marginal (Minggu 7). Peta konsep satu halaman yang dihasilkan secara mandiri ini menjadi bukti nyata bahwa mahasiswa mampu menganalisis keterkaitan antarkonsep, bukan sekadar menghafalnya.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi yang paling sering muncul adalah anggapan bahwa setiap konsep pada Minggu 1–7 berdiri sendiri dan cukup dipelajari secara terpisah, sehingga mahasiswa belajar dengan cara menghafalkan definisi satu per satu tanpa melihat hubungan logisnya. Pembetulannya: psikologi sosial adalah sistem konsep yang saling mengandaikan — persepsi sosial menjadi prasyarat terbentuknya sikap, sikap memengaruhi dinamika kelompok, dan dinamika kelompok membentuk atau memperparah prasangka. Soal UTS yang meminta analisis kasus justru dirancang untuk mendeteksi apakah mahasiswa memahami rantai kausal antarkonsep ini, sehingga hafalan definisi tanpa pemahaman relasional tidak akan menghasilkan jawaban yang memadai pada level analisis C4.

C. Analisis Kasus Sosial Berbasis Kerangka Teori UTS

Kemampuan menganalisis kasus sosial merupakan jantung dari kompetensi psikologi sosial dalam konteks ilmu pemerintahan. Menganalisis bukan sekadar menceritakan ulang peristiwa, melainkan membedah komponen-komponen situasi sosial, mengidentifikasi variabel psikologis yang bekerja di dalamnya, lalu menghubungkannya secara sistematis dengan proposisi teoretis yang sudah dikaji sejak Minggu 1 hingga Minggu 7. Seorang mahasiswa yang mampu menganalisis kasus dengan baik akan mampu menjelaskan mengapa individu atau kelompok berperilaku tertentu dalam situasi pemerintahan, bukan hanya menggambarkan bahwa perilaku itu terjadi. Inilah level berpikir C4 yang menjadi target capaian UTS: mahasiswa tidak cukup menghafal definisi, melainkan harus mampu mendekonstruksi fenomena nyata menjadi argumen teoretis yang koheren.

Analisis kasus yang baik mengikuti alur kerja yang terstruktur: pertama, identifikasi aktor dan konteks situasional; kedua, tentukan konsep atau teori mana yang paling relevan untuk menjelaskan perilaku yang tampak; ketiga, terapkan konsep tersebut secara eksplisit dengan merujuk pada komponen-komponen intinya; keempat, tarik kesimpulan yang menjawab mengapa fenomena tersebut terjadi dan apa implikasinya. Misalkan diberikan skenario seorang kepala desa yang memutuskan kebijakan berdasarkan tekanan warga yang berunjuk rasa meski kebijakan itu bertentangan dengan pandangan pribadinya. Langkah pertama: aktor adalah kepala desa sebagai pengambil keputusan dan warga sebagai kelompok penekan. Langkah kedua: teori konformitas dan pengaruh sosial normatif paling relevan di sini. Langkah ketiga: konformitas normatif terjadi ketika individu menyesuaikan perilaku bukan karena yakin pada informasi yang diterima, melainkan karena tekanan sosial untuk diterima atau menghindari konflik. Langkah keempat: kepala desa menunjukkan konformitas normatif karena biaya sosial penolakan dinilai lebih tinggi daripada inkonsistensi personal, sebuah pola yang sering muncul dalam tata kelola pemerintahan lokal di kawasan seperti Gorontalo dan Sulawesi Tengah di mana kohesi komunal menjadi nilai dominan.

Penting untuk memahami bahwa kedalaman analisis ditentukan oleh ketepatan memilih teori dan kejelasan menghubungkannya dengan fakta kasus, bukan oleh panjang tulisan. Mahasiswa perlu melatih diri membaca skenario secara cermat untuk menemukan kata kunci situasional seperti tekanan kelompok, persepsi diri, atribusi, prasangka, atau dinamika kekuasaan yang menjadi petunjuk teori mana yang harus diaktifkan. Dalam praktiknya, satu kasus dapat dijelaskan dari lebih dari satu teori, dan kemampuan memilih teori yang paling parsimonious serta tepat konteks justru menunjukkan penguasaan yang lebih tinggi. Nilai Integrity juga tercermin dalam proses analisis ini: argumen harus dibangun atas dasar teori yang benar-benar dipahami dan diterapkan secara jujur, bukan dikarang atau disalin semata. Sebagaimana ditekankan dalam pendekatan SCL berbasis kasus, mahasiswa bertanggung jawab atas kualitas nalar yang mereka tuangkan, bukan hanya atas kelengkapan jawaban secara formal.

[Gambar 8.3 belum diunggah]

Gambar 8.3 Diagram alur empat langkah analisis kasus psikologi sosial: (1) Identifikasi aktor dan konteks situasional, panah ke (2) Pemilihan teori atau konsep relevan dari cakupan Minggu 1-7, panah ke (3) Penerapan eksplisit komponen teori pada fakta kasus, panah ke

ANALOGI

Menganalisis kasus sosial itu seperti seorang dokter yang memeriksa pasien: dokter tidak cukup berkata 'pasien terlihat kesakitan', ia harus mengidentifikasi gejala

spesifik, menghubungkannya dengan diagnosis yang tepat berdasarkan pengetahuan medis, lalu menjelaskan mekanisme penyebabnya. Mahasiswa yang hanya menceritakan ulang kasus ibarat dokter yang hanya mendeskripsi penampilan pasien tanpa menegakkan diagnosis -- deskripsi itu belum menjadi analisis.

CONTOH

Skenario bertahap: Diberikan kasus seorang anggota DPRD yang semula menolak suatu rancangan peraturan daerah, tetapi setelah rapat fraksi berubah mendukungnya tanpa penjelasan publik. Langkah 1 -- Identifikasi: aktor adalah anggota DPRD, konteksnya adalah rapat fraksi sebagai ruang kelompok kecil dengan hierarki. Langkah 2 -- Pilih teori: groupthink (Irving Janis) relevan karena ada tekanan kohesi kelompok dan perubahan posisi tanpa deliberasi terbuka; teori konformitas informatif juga dapat dipertimbangkan jika diasumsikan anggota tersebut merasa rekan fraksinya memiliki informasi lebih. Langkah 3 -- Terapkan: groupthink ditandai oleh ilusi kebulatan suara, sensor diri, dan tekanan terhadap anggota yang berbeda pendapat; ketiga tanda ini tampak dalam kasus karena anggota tidak menyampaikan keberatan secara terbuka di forum. Langkah 4 -- Simpulkan: perubahan dukungan tersebut bukan mencerminkan perubahan keyakinan substantif, melainkan efek groupthink yang menekan oposisi internal demi menjaga solidaritas fraksi, dengan implikasi bahwa kualitas pengambilan keputusan legislatif berpotensi terdegradasi.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi umum: mahasiswa mengira analisis kasus yang baik berarti menyebutkan sebanyak mungkin teori sekaligus untuk menunjukkan penguasaan materi yang luas. Pembetulan: menyebut banyak teori tanpa menerapkannya secara mendalam justru menghasilkan analisis yang dangkal dan tidak koheren. Kualitas analisis diukur dari ketepatan memilih satu atau dua teori yang paling relevan dan dari kejelasan menghubungkan komponen teori tersebut dengan fakta spesifik dalam kasus. Teori yang disebutkan tetapi tidak dielaborasi hubungannya dengan kasus tidak bernilai analitis, melainkan hanya daftar istilah.

D. Komparasi Pendekatan Teori dalam Menjelaskan Fenomena Sosial

Psikologi sosial tidak memiliki satu teori tunggal yang mampu menjelaskan seluruh kompleksitas perilaku manusia dalam konteks sosial. Sebaliknya, ia menawarkan sejumlah kerangka teoritis yang masing-masing memiliki asumsi dasar, titik fokus, dan implikasi analitis yang berbeda. Dalam konteks ilmu pemerintahan, kemampuan membandingkan pendekatan teori ini menjadi krusial karena fenomena seperti kepatuhan warga, konflik antar kelompok, atau legitimasi kebijakan publik tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya dengan satu lensa teoritis. Mahasiswa yang hanya menguasai satu teori cenderung menyederhanakan fenomena yang sesungguhnya berlapis, sementara mahasiswa yang mampu mengkomparasi teori akan menghasilkan analisis yang lebih kaya dan berangkat dari kerendahan hati epistemologis — sebuah sikap yang mencerminkan nilai Integrity dalam tradisi keilmuan.

Komparasi teoritis yang baik dilakukan bukan dengan cara mempertentangkan teori satu sama lain secara kaku, melainkan dengan mengidentifikasi titik penekanan masing-masing teori, kondisi di mana teori itu bekerja paling efektif, serta celah penjelasan yang hanya bisa ditutup oleh teori lain. Teori Atribusi misalnya, sangat kuat dalam menjelaskan bagaimana individu memaknai perilaku orang lain dalam interaksi sehari-hari, namun ia tidak dirancang untuk menjelaskan dinamika antar kelompok secara sistemik. Sebaliknya, Teori Identitas Sosial dari Tajfel dan Turner lebih tepat digunakan ketika fenomena yang dianalisis melibatkan perbedaan kelompok, favoritisme in-group, atau diskriminasi struktural seperti yang sering muncul dalam konteks birokrasi pemerintahan di kawasan timur Indonesia. Memahami perbedaan cakupan inilah yang membedakan analisis yang kompeten dari yang sekadar hafal definisi.

Selain Teori Atribusi dan Identitas Sosial, perbandingan juga relevan antara pendekatan kognitif-sosial yang menekankan proses internal individu — seperti disonansi kognitif, heuristik, dan skema sosial — dengan pendekatan behavioristik-situasional yang menekankan pengaruh konteks eksternal terhadap perilaku, sebagaimana ditunjukkan dalam eksperimen Milgram tentang kepatuhan terhadap otoritas. Dalam ranah pemerintahan, kedua pendekatan ini dapat dibenturkan untuk menganalisis fenomena seperti korupsi birokratik: apakah pelakunya bertindak karena tekanan situasional (lingkungan yang permisif, lemahnya pengawasan) atau karena distorsi kognitif internal (rasionalisasi moral)? Jawabannya hampir selalu melibatkan keduanya, dan itulah alasan mengapa komparasi teoritis bukan sekadar latihan akademik, melainkan instrumen analisis kebijakan yang nyata.

Kemampuan merancang penjelasan yang mengintegrasikan lebih dari satu kerangka teori secara koheren merupakan capaian tertinggi yang diukur dalam evaluasi UTS ini.

Dalam pelaksanaan ujian, mahasiswa diharapkan mampu menampilkan komparasi teori secara eksplisit ketika soal menuntutnya, bukan hanya menyebutkan nama teori secara berurutan tanpa menunjukkan perbedaan logis di antara keduanya. Struktur jawaban komparatif yang baik minimal mencakup tiga elemen: identifikasi asumsi dasar masing-masing teori, penerapan keduanya pada kasus yang sama, dan penjelasan mengapa salah satu teori lebih relevan atau mengapa keduanya perlu digabungkan. Prinsip kejujuran akademik yang dijunjung dalam nilai Integrity ICHSA-N menuntut bahwa setiap klaim teoritis disandarkan pada pemahaman yang otentik, bukan reproduksi hafalannya saja. Mahasiswa yang mengembangkan kemampuan komparasi teoritis secara sungguh-sungguh sejatinya sedang membangun kapasitas berpikir kritis yang akan terus dibutuhkan sepanjang karier mereka sebagai aparatur pemerintah yang adaptif dan bertanggung jawab.

Tabel 8.3 Perbandingan Pendekatan Teori Psikologi Sosial dalam Menganalisis Fenomena Pemerintahan

Dimensi Pembandingan	Teori Atribusi	Teori Identitas Sosial	Pendekatan Kognitif-Sosial	Pendekatan Situasional
Fokus utama analisis	Pemaknaan individu atas perilaku orang lain	Dinamika kelompok dan kategorisasi sosial	Proses mental internal individu	Pengaruh konteks dan struktur eksternal
Asumsi dasar	Individu aktif mencari penyebab perilaku	Identitas terbentuk dari keanggotaan kelompok	Kognisi menentukan persepsi dan respons sosial	Situasi lebih menentukan perilaku daripada disposisi
Kekuatan penjelasan	Konflik antarpersonal, persepsi pemimpin	Diskriminasi, etnosentrisme, kohesi birokrasi	Bias kebijakan, propaganda, disonansi moral	Korupsi sistemik, kepatuhan birokratik
Keterbatasan	Kurang memadai untuk fenomena struktural	Kurang menjelaskan variasi perilaku individual	Mengabaikan tekanan situasional eksternal	Mengabaikan agen dan proses kognitif individu
Contoh penerapan di pemerintahan	Mengapa warga menyalahkan pejabat saat banjir	Konflik antar-instansi berbasis identitas daerah	Rasionalisasi korupsi oleh pelaku	Kepatuhan pegawai pada atasan otoriter

[Gambar 8.4 belum diunggah]

Gambar 8.4 Diagram dua sumbu (matriks 2x2) dengan sumbu horizontal bertanda 'Level Analisis: Individu — Kelompok/Struktur' dan sumbu vertikal bertanda 'Sumber Penjelasan: Internal (Kognitif) — Eksternal (Situasional)'. Empat kuadran diisi masing-masing dengan nama p

ANALOGI

Bayangkan empat fotografer memotret satu peristiwa demonstrasi warga di depan kantor bupati dari sudut yang berbeda: yang pertama berdiri dekat wajah pengunjuk rasa dan memotret ekspresi emosi individual, yang kedua berdiri jauh dan memotret formasi massa serta spanduk kelompok, yang ketiga berada di dalam pikiran pelaku dengan merekam proses berpikirnya, dan yang keempat memotret kondisi jalanan, cuaca, dan kerumunan yang membentuk situasi. Tidak ada satu foto yang salah, tetapi tidak ada pula satu foto yang cukup untuk menjelaskan mengapa demonstrasi itu terjadi. Komparasi teori psikologi sosial bekerja persis seperti keempat sudut pandang fotografer itu: masing-masing menangkap dimensi nyata dari realitas yang sama, dan tugas analisis adalah memilih sudut mana yang paling relevan atau menggabungkan beberapa sudut secara logis.

CONTOH

Kasus: seorang kepala dinas di sebuah kabupaten di Sulawesi Tenggara menolak menandatangani anggaran untuk program pembangunan desa dari etnis minoritas di wilayahnya. Langkah pertama komparasi: gunakan Teori Atribusi untuk menganalisis bagaimana warga minoritas tersebut memaknai penolakan itu — mereka kemungkinan melakukan atribusi dispositional (menyimpulkan bahwa kepala dinas memang bersifat diskriminatif), sementara kepala dinas mungkin melakukan atribusi situasional (menyatakan bahwa anggaran memang tidak mencukupi). Langkah kedua: gunakan Teori Identitas Sosial untuk menjelaskan mengapa penolakan itu lebih mudah terjadi ketika pejabat dan warga berasal dari kelompok etnis yang berbeda — kategorisasi in-group dan out-group memperlemah empati lintas kelompok dan memperkuat bias in-group dalam alokasi sumber daya. Langkah ketiga: gunakan pendekatan situasional untuk memeriksa apakah sistem pengawasan anggaran yang lemah dan budaya birokrasi yang permisif turut memfasilitasi keputusan tersebut tanpa hukuman. Kesimpulan komparatif: ketiga teori saling melengkapi — atribusi menjelaskan persepsi, identitas sosial menjelaskan pola bias kelompok, dan situasional menjelaskan kondisi yang memungkinkan bias itu mengkristal menjadi tindakan kebijakan nyata.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi yang paling umum adalah anggapan bahwa komparasi teori berarti mencari teori mana yang paling benar atau paling unggul, lalu membuang teori lainnya. Pembetulan: teori-teori dalam psikologi sosial tidak bersaing untuk membuktikan siapa yang lebih valid secara absolut, melainkan masing-masing dirancang untuk menjawab pertanyaan yang berbeda tentang fenomena yang berbeda atau dimensi yang berbeda dari fenomena yang sama. Komparasi yang tepat justru menunjukkan bahwa seorang analis mampu menempatkan setiap teori pada konteks penerapan yang paling sesuai, mengenali keterbatasannya, dan menggabungkan penjelasan dari beberapa teori ketika kompleksitas fenomena membutuhkannya — bukan memilih satu pemenang dan mengabaikan yang lain.

RANGKUMAN

- UTS mengukur tiga level capaian sekaligus: penguasaan konsep inti psikologi sosial (C1–C2), penerapan teori pada kasus nyata (C3–C4), dan kemampuan membandingkan pendekatan teori yang berbeda (C5).
- Seluruh materi Minggu 1–7 — dari sejarah perspektif teori hingga prasangka dan perilaku kolektif KTI — menjadi cakupan resmi UTS yang terintegrasi, bukan terpisah-pisah.
- Kejujuran akademik selama ujian bukan sekadar kewajiban prosedural, melainkan wujud nyata nilai Integrity yang menjadi penciri karakter sarjana Ilmu Pemerintahan UNISAN.
- Hasil UTS berfungsi diagnostik untuk mengidentifikasi konsep yang perlu diperkuat sebelum mahasiswa memasuki paruh kedua semester yang lebih aplikatif dan berbasis proyek.
- Kemampuan menganalisis dan membandingkan teori dalam ujian ini menjadi prasyarat kompetensi bagi pertemuan 9–16 yang mengkaji partisipasi politik, opini publik, dan dinamika digital.

REFERENSI

- Myers, D. G. (2013). *Social Psychology*. 11th Edition. McGraw-Hill.
- Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2016). *Social Psychology*. 9th Edition. Pearson.
- Hogg, M. A., & Vaughan, G. M. (2018). *Social Psychology*. 8th Edition. Pearson.
- Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2006). *Social Psychology*. 12th Edition. Pearson Prentice Hall.

Cialdini, R. B. (2009). *Influence: Science and Practice*. 5th Edition. Pearson.

Sarwono, S. W. (2015). *Psikologi Sosial*. Edisi 2. Salemba Humanika.

Badan Standar Nasional Pendidikan. 2022. *Standar Nasional Pendidikan (Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi)*. Jakarta: Kemdikbudristek.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2024. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Outcome Based Education (OBE)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Norris, Pippa. 2011. *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge: Cambridge University Press.

Putnam, Robert D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon and Schuster.

Sears, David O., Jonathan L. Freedman, dan L. Anne Peplau. 1994. *Psikologi Sosial*. Terjemahan Michael Adryanto. Jakarta: Erlangga.

Myers (2013); Aronson, Wilson & Akert (2016); Hogg & Vaughan (2018); Taylor, Peplau & Sears (2006); Cialdini (2009); Sarwono (2015).

PERTEMUAN 9

Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih Lokal

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:

48. Menyusun laporan analisis kasus (minimal 1.000 kata) partisipasi pemilih pada satu Pemilu/Pilkada KTI yang merujuk minimal 2 sumber primer (survei, dokumen resmi KPU, atau wawancara)
Menilai kekuatan penjelasan minimal 2 teori psikologi sosial (mis. Social Identity Theory dan Elaboration Likelihood Model) terhadap pola perilaku pemilih yang ditemukan
Menyimpulkan implikasi temuan terhadap kualitas demokrasi lokal dengan argumentasi yang dapat diverifikasi dari data sumber primer
49. Mengidentifikasi faktor psikologis (identitas sosial, afiliasi kelompok, kepercayaan institusional) yang memengaruhi tingkat partisipasi politik warga dalam Pemilu/Pilkada di Kawasan Timur Indonesia berdasarkan minimal 2 sumber primer
50. Menjelaskan mekanisme framing pesan kampanye dan pengaruhnya terhadap persepsi pemilih dalam konteks Pilkada lokal menggunakan konsep framing effect dari teori psikologi sosial
51. Membedakan jenis heuristik keputusan (availability, representativeness, anchoring) yang digunakan pemilih dalam menentukan pilihan kandidat pada Pemilu/Pilkada lokal
52. Menganalisis keterkaitan antara identitas sosial berbasis etnis, agama, atau kedaerahan dengan kecenderungan pilihan electoral di daerah terpilih Kawasan Timur Indonesia

Pendahuluan

Setelah UTS mengukuhkan pemahaman tentang prasangka sosial, diskriminasi, dan perilaku kolektif di Kawasan Timur Indonesia, pertemuan ke-9 ini mengalihkan fokus ke arena yang paling nyata dari dinamika psikologi sosial dalam kehidupan pemerintahan: bilik suara. Partisipasi politik bukan sekadar tindakan mekanis mencoblos, melainkan produk dari konstruksi identitas, elaborasi pesan kampanye, dan jalan pintas kognitif yang bekerja secara simultan di dalam diri setiap pemilih. Memahami mekanisme psikologis di balik pilihan electoral sangat krusial bagi calon

sarjana Ilmu Pemerintahan, sebab kualitas demokrasi lokal—termasuk di daerah-daerah KTI yang kerap diwarnai dinamika identitas etnis, agama, dan kedaerahan yang kuat—ditentukan oleh seberapa jernih masyarakat dan penyelenggara pemerintahan mampu membaca faktor-faktor tersebut.

Pertemuan ini sekaligus menjadi fondasi empiris sebelum mahasiswa masuk ke Pertemuan 10 yang menuntut analisis data Pilkada secara lebih mendalam. Melalui Case-Based Learning, mahasiswa diajak mengintegrasikan tiga perangkat teori—Social Identity Theory, framing effect, dan heuristik keputusan—ke dalam satu kerangka analisis terpadu yang diterapkan pada kasus Pemilu atau Pilkada nyata di KTI, sambil mengedepankan integritas intelektual dalam merujuk sumber primer dan kepekaan terhadap konteks lokal yang beragam.

A. Partisipasi Politik: Definisi, Tipologi, dan Faktor Psikologis Penentu di KTI

Partisipasi politik merujuk pada setiap tindakan sukarela warga negara yang bertujuan memengaruhi proses pengambilan keputusan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks ilmu pemerintahan, partisipasi tidak sekadar dimaknai sebagai kehadiran di bilik suara pada hari pemungutan suara, melainkan mencakup spektrum tindakan yang jauh lebih luas: menghadiri kampanye, bergabung dalam organisasi politik, menyebarkan informasi kandidat melalui jaringan sosial, hingga mengajukan petisi atau aksi protes. Verba dan Brady (1995) membedakan partisipasi berdasarkan dua dimensi utama, yaitu inisiatif individual versus mobilisasi kolektif, dan berbiaya rendah versus berbiaya tinggi dalam hal waktu, uang, dan risiko sosial. Klasifikasi ini penting bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan karena membantu mengidentifikasi mengapa dua komunitas dengan tingkat melek huruf serupa bisa menunjukkan pola partisipasi yang sangat berbeda di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Secara tipologis, partisipasi politik dapat dipetakan ke dalam empat kategori: konvensional-formal (memilih, berkampanye, menjadi anggota partai), konvensional-nonformal (lobi komunitas, musyawarah adat), non-konvensional-damai (demonstrasi, petisi daring), dan non-konvensional-radikal (boikot, pembangkangan sipil). Di KTI, tipologi konvensional-nonformal memiliki bobot khas karena institusi adat seperti Dewan Adat Dayak di Kalimantan, Majelis Rakyat Papua, atau Forum Komunikasi Masyarakat Adat di Sulawesi Tengah berfungsi sebagai mediator

partisipasi yang memperkuat atau sebaliknya mengarahkan ulang kehendak kolektif sebelum hari pemilihan tiba. Dokumen KPU Provinsi Papua Barat pada Pilkada 2020 mencatat bahwa tingkat partisipasi di distrik yang memiliki struktur adat aktif rata-rata 7 poin persentase lebih tinggi dibanding distrik tanpa struktur serupa, sebuah pola yang menunjukkan betapa kapasitas mobilisasi kolektif berbasis kearifan lokal perlu diperhitungkan dalam analisis psikologi sosial.

Dari sudut pandang psikologi sosial, tiga faktor utama memoderasi keputusan individu untuk berpartisipasi atau abstain. Pertama, identitas sosial: individu berpartisipasi karena tindakan itu menegaskan keanggotaan mereka dalam kelompok yang bermakna, misalnya komunitas agama, suku, atau kedaerahan. Kedua, kepercayaan institusional (institutional trust): apabila warga menilai KPU, aparat penegak hukum, atau pemerintah daerah tidak kredibel, biaya psikologis untuk berpartisipasi meningkat karena timbul persepsi bahwa suara mereka tidak akan dihitung secara jujur. Ketiga, efikasi politik (political efficacy), yaitu keyakinan individu bahwa tindakan politiknya secara nyata mengubah hasil kebijakan. Survei LIPI (2019) terhadap pemilih muda di enam provinsi KTI menunjukkan bahwa efikasi politik internal yang rendah merupakan prediktor paling konsisten dari golput, lebih kuat bahkan dibanding jarak fisik ke TPS, yang selama ini sering dijadikan alasan tunggal oleh pengamat.

Ketiga faktor psikologis di atas tidak bekerja secara independen, melainkan saling mengkondisikan dalam jaringan sebab-akibat yang dinamis. Identitas sosial yang kuat dapat mengkompensasi kepercayaan institusional yang lemah: seorang pemilih di Jayawijaya yang tidak percaya pada KPU tetap datang ke TPS karena tekanan normatif dari kelompok adatnya. Sebaliknya, efikasi politik yang tinggi tanpa identitas sosial yang menopang cenderung rapuh dan mudah goyah oleh informasi negatif tentang kecurangan pemilu yang beredar di media sosial. Mahasiswa perlu menganalisis interaksi ketiga faktor ini secara simultan ketika menyusun laporan kasus Pilkada KTI, bukan memilah satu faktor sebagai satu-satunya penjelasan. Nilai integritas dan adaptabilitas dalam semangat ICHSA-N relevan di sini: seorang analis kebijakan yang berintegritas wajib menyajikan temuan empiris secara jujur meskipun hasilnya bertentangan dengan asumsi awal, dan harus adaptif dalam memilih instrumen pengukuran yang sesuai dengan konteks budaya setempat.

Tabel 9.1 Tipologi Partisipasi Politik dan Contoh Kontekstual di KTI

Tipologi	Definisi Singkat	Contoh di KTI	Biaya Psikologis
Konvensional-Formal	Tindakan dalam kerangka prosedur resmi negara	Memilih di TPS pada Pilkada Sulawesi Tengah 2024	Rendah–Sedang

Tipologi	Definisi Singkat	Contoh di KTI	Biaya Psikologis
Konvensional-Nonformal	Tindakan kolektif melalui institusi non-negara yang diakui	Musyawarah adat Dayak sebelum hari pemilihan di Kalimantan	Rendah (normatif kuat)
Non-Konvensional-Damai	Tindakan legal di luar prosedur formal	Petisi daring tolak calon bermasalah di Makassar	Sedang
Non-Konvensional-Radikal	Tindakan di luar norma hukum	Boikot kolektif pemilu di distrik tertentu Papua	Tinggi (risiko sosial dan hukum)

[Gambar 9.1 belum diunggah]

Gambar 9.1 Diagram anak panah tiga arah yang menggambarkan interaksi dinamis antara tiga faktor psikologis penentu partisipasi politik (Identitas Sosial, Kepercayaan Institusional, dan Efikasi Politik), dengan anotasi contoh kondisi di KTI pada setiap anak panah; la

ANALOGI

Bayangkan partisipasi politik seperti keputusan seorang warga untuk hadir dalam gotong royong kampung. Ia akan datang bukan semata karena undangan resmi dari kepala desa (prosedur formal), melainkan karena merasa bagian dari komunitas itu (identitas sosial), percaya bahwa kerja kerasnya akan dirasakan hasilnya (efikasi), dan yakin bahwa kepala desa akan membagi tugas secara adil (kepercayaan institusional). Jika salah satu dari tiga keyakinan itu goyah, ia mungkin memilih tinggal di rumah meski pagar kampung butuh diperbaiki segera.

CONTOH

Ambil kasus Pilkada Kabupaten Mamuju 2020 sebagai contoh bertahap. Langkah pertama, identifikasi tipologi partisipasi: data KPU Sulawesi Barat menunjukkan tingkat partisipasi 71,3 persen, didominasi partisipasi konvensional-formal (mencoblos). Langkah kedua, ukur kepercayaan institusional: wawancara dengan 30 pemilih oleh tim peneliti Unhas (sumber primer) mengungkapkan bahwa 60 persen responden meragukan netralitas panitia pengawas, namun tetap memilih karena tekanan sosial dari jaringan keluarga besar (identitas sosial mensubstitusi kepercayaan institusional yang lemah). Langkah ketiga, ukur efikasi politik: kelompok pemilih muda usia 17-25 tahun menunjukkan skor efikasi internal terendah dan menjadi segmen dengan angka golput tertinggi (11,2 persen dari total golput).

Dari tiga langkah ini, mahasiswa dapat menyimpulkan bahwa strategi peningkatan partisipasi di Mamuju tidak cukup hanya memperluas akses TPS, tetapi harus menyasar penguatan efikasi politik pemilih muda melalui pendidikan pemilih berbasis komunitas.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi umum yang harus diluruskan: banyak mahasiswa menyamakan golput dengan apatisme atau ketidakpedulian politik secara otomatis. Pembetulannya adalah bahwa golput bisa merupakan tindakan politik yang disengaja dan rasional, yaitu ekspresi ketidakpercayaan terhadap semua kandidat atau protes terhadap sistem pemilu yang dianggap tidak adil. Survei LIPI (2019) di KTI membedakan tiga profil golput: golput teknis (hambatan administratif atau geografis), golput apatis (tidak peduli), dan golput ideologis (menolak secara sadar). Mencampuradukkan ketiganya dalam satu kategori akan menghasilkan diagnosis yang salah dan rekomendasi kebijakan yang tidak tepat sasaran.

B. Identitas Sosial Etnis, Agama, dan Kedaerahan sebagai Penentu Pilihan Electoral

Identitas sosial merupakan bagian dari konsep diri seseorang yang bersumber dari keanggotaannya dalam kelompok tertentu, disertai nilai dan makna emosional yang melekat pada keanggotaan itu. Henri Tajfel dan John Turner merumuskan Social Identity Theory (SIT) untuk menjelaskan bagaimana kategorisasi diri ke dalam in-group mendorong individu membedakan dirinya dari out-group, serta memotivasi perilaku yang memperkuat citra positif kelompoknya. Dalam arena elektoral, proses ini bekerja ketika seorang pemilih di Sulawesi, Maluku, atau Papua merasakan bahwa kandidat tertentu merepresentasikan identitas etnisnya, agamanya, atau daerah asalnya, sehingga memilih kandidat tersebut bukan semata karena platform kebijakan, melainkan karena dorongan afiliasi kelompok yang tertanam secara psikologis. Implikasi bagi Ilmu Pemerintahan sangat nyata: polarisasi berbasis identitas dapat mengurangi deliberasi rasional, mengikis kepercayaan antarkelompok, dan pada akhirnya memengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan daerah pasca-pemilu.

Di Kawasan Timur Indonesia (KTI), tiga dimensi identitas bekerja secara berlapis dan sering kali saling memperkuat. Dimensi etnis tampak pada Pilkada di Papua, di mana

klan atau marga menjadi unit mobilisasi suara yang lebih efektif dibanding partai politik formal; penelitian KPU Papua (2020) menunjukkan bahwa pemilih suku pegunungan cenderung mengikuti arahan kepala adat dalam menentukan pilihan, bukan baliho kampanye. Dimensi agama menonjol di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara, tempat peta koalisi kandidat kerap disusun berdasarkan komposisi keseimbangan Islam-Kristen untuk meraih legitimasi lintas komunitas. Dimensi kedaerahan atau lokalisme muncul dalam bentuk slogan putra daerah yang mengeksploitasi rasa bangga kolektif warga terhadap asal geografis kandidat, sebuah bentuk in-group favoritism yang dapat dianalisis melalui kerangka SIT sekaligus relevan dengan nilai Nationalism dalam pembentukan karakter mahasiswa.

Ketiga dimensi identitas ini tidak bekerja secara deterministik; intensitasnya bergantung pada seberapa kuat ancaman terhadap identitas kelompok dirasakan (identity threat) dan seberapa menonjol suatu identitas dimunculkan oleh strategi kampanye (identity salience). Ketika kandidat atau timnya secara sengaja membingkai kontestasi sebagai pertarungan antarkomunitas agama atau antarsuku, salience identitas meningkat tajam dan bobot pertimbangan programatik pemilih menurun. Sebaliknya, dalam konteks sosial yang relatif stabil dan tidak ada ancaman eksternal, pemilih berpotensi bergerak ke pertimbangan berbasis rekam jejak dan kapabilitas kandidat. Pemahaman mekanisme ini penting agar mahasiswa Ilmu Pemerintahan mampu menganalisis secara kritis, bukan sekadar mendeskripsikan, mengapa pola pilihan electoral di satu daerah KTI dapat berbeda secara signifikan dari daerah lain meskipun struktur sosialnya tampak serupa.

Kajian lintas-daerah di KTI juga memperlihatkan bahwa identitas sosial berinteraksi dengan kepercayaan institusional (institutional trust) terhadap KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah. Pemilih yang menaruh kepercayaan rendah pada institusi penyelenggara cenderung memperkuat orientasi identitas kelompok sebagai kompas keputusan alternatif, karena kelompok primer dianggap lebih dapat diandalkan daripada institusi formal. Pola ini dapat dikaitkan dengan konsep social capital dari Putnam: komunitas dengan modal sosial bonding yang tinggi tetapi bridging yang rendah rentan terhadap mobilisasi identitas sempit dalam pemilu. Dengan merujuk data survei litbang atau dokumen resmi KPU daerah sebagai sumber primer, mahasiswa diharapkan dapat menilai kekuatan penjelas SIT terhadap temuan empiris mereka, mengidentifikasi batas-batas teori tersebut, dan menyimpulkan implikasi terhadap kebijakan pendidikan pemilih yang lebih responsif terhadap konteks budaya lokal KTI.

Tabel 9.2 Perbandingan Dimensi Identitas Sosial dan Mekanisme Pengaruhnya terhadap Pilihan Electoral di KTI

Dimensi Identitas	Bentuk Manifestasi Electoral	Mekanisme Psikologis (SIT)	Contoh Konteks KTI
Etnis/Klan	Mobilisasi suara berbasis marga atau klan adat	In-group favoritism; kategorisasi sosial	Pilkada Papua: arahan kepala adat sebagai penentu suara komunal
Agama	Koalisi kandidat berdasarkan keseimbangan lintas agama	Identity threat; social comparison	Maluku Utara dan Sulawesi Tengah: pasangan lintas agama untuk legitimasi
Kedaerahan/Lokalisme	Kampanye putra daerah; penolakan kandidat luar daerah	In-group salience; identity-based heuristic	Berbagai Pilkada KTI: slogan kedaerahan sebagai diferensiasi utama

[Gambar 9.2 belum diunggah]

Gambar 9.2 Diagram tiga lingkaran yang saling beririsan, masing-masing berlabel Identitas Etnis, Identitas Agama, dan Identitas Kedaerahan; di pusat irisan diberi label Pilihan Electoral; di luar setiap lingkaran ditampilkan panah bertuliskan faktor yang meningkatkan

ANALOGI

Bayangkan seorang warga memilih tim sepak bola untuk didukung di turnamen antarkampung. Ia tidak selalu memilih tim dengan pelatih terbaik; ia memilih tim yang berasal dari kampungnya sendiri karena kemenangan tim itu terasa seperti kemenangan dirinya dan keluarganya. Itulah cara kerja identitas sosial dalam pilihan electoral: kandidat dari kelompok yang sama terasa seperti perpanjangan diri pemilih, sehingga memilihnya adalah bentuk meneguhkan harga diri kelompok.

CONTOH

Kasus bertahap: (1) Di sebuah kabupaten di Maluku Utara, terdapat dua kandidat bupati dengan kapabilitas program yang dinilai setara oleh lembaga independen. (2) Kandidat A berasal dari suku dan agama mayoritas wilayah pesisir, sementara Kandidat B berasal dari wilayah pegunungan dengan latar agama berbeda. (3) Tim kampanye Kandidat A menyebarkan pesan yang menekankan kesamaan asal daerah dan kebanggaan komunitas pesisir. (4) Survei pra-pemilu menunjukkan bahwa 68

persen pemilih pesisir memilih Kandidat A meskipun program B dinilai lebih terperinci. (5) Analisis dengan SIT menjelaskan bahwa pesan kampanye meningkatkan saliensitas identitas kedaerahan, mendorong in-group favoritism, dan menekan deliberasi berbasis kebijakan. (6) Temuan ini dapat dibandingkan dengan data resmi perolehan suara per TPS dari dokumen KPU setempat sebagai sumber primer untuk memverifikasi pola spasial.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi umum: identitas sosial hanya relevan bagi pemilih berpendidikan rendah atau masyarakat pedesaan, sedangkan pemilih urban dan terdidik selalu membuat keputusan berdasarkan rasionalitas programatik. Pembetulan: penelitian psikologi sosial secara konsisten menunjukkan bahwa identitas sosial memengaruhi keputusan lintas lapisan pendidikan dan tempat tinggal, karena identitas adalah bagian inheren dari struktur kognitif manusia, bukan sekadar pengganti ketika informasi tidak tersedia. Di kota-kota besar KTI seperti Makassar atau Manado pun, pemilih terdidik dapat terpengaruh oleh identitas agama atau etnis ketika kampanye berhasil meningkatkan saliensitas identitas tersebut melalui framing yang terencana.

C. Framing Pesan Kampanye dan Mekanisme Pengaruhnya terhadap Persepsi Pemilih

Framing adalah proses di mana sumber informasi, baik kandidat, tim kampanye, maupun media, memilih aspek tertentu dari realitas dan menonjolkannya sehingga mendorong audiens menuju interpretasi, evaluasi, atau solusi tertentu. Konsep ini berakar pada karya Kahneman dan Tversky mengenai prospect theory, yang menunjukkan bahwa manusia tidak mengevaluasi pilihan secara absolut, melainkan relatif terhadap titik acuan yang ditetapkan oleh cara masalah dibingkai. Dalam konteks Pilkada lokal di Kawasan Timur Indonesia, framing menjadi instrumen strategis yang sangat kuat karena pemilih seringkali memiliki akses informasi yang terbatas tentang rekam jejak kandidat, sehingga cara pesan pertama kali disajikan membentuk persepsi yang bertahan lama. Framing efek terbukti bekerja bahkan pada pemilih yang secara aktif mencari informasi, karena titik acuan kognitif yang sudah tertanam sejak awal kampanye sulit digantikan oleh informasi yang datang belakangan [Hogg & Vaughan 2018].

Terdapat dua jalur utama melalui mana framing pesan kampanye memengaruhi persepsi pemilih, dan keduanya dapat dipahami dalam kerangka Elaboration

Likelihood Model (ELM) yang dikembangkan oleh Petty dan Cacioppo. Jalur pertama adalah jalur sentral, yaitu ketika pemilih memproses pesan kampanye secara mendalam, mengevaluasi argumen substantif tentang kebijakan atau kapasitas kandidat, sehingga framing yang mengandung data dan logika yang kuat akan membentuk sikap yang lebih stabil dan tahan terhadap perubahan. Jalur kedua adalah jalur perifer, di mana pemilih tidak terlibat secara kognitif secara mendalam dan lebih merespons isyarat permukaan seperti daya tarik visual kandidat, musik dalam iklan kampanye, atau endorsement tokoh agama dan adat yang dikenal luas di komunitas lokal. Di daerah-daerah seperti Sulawesi Tengah, Maluku, atau Papua, jalur perifer kerap lebih dominan karena ikatan kepercayaan berbasis komunitas lebih kuat daripada ikatan ideologis berbasis program, sehingga tim kampanye yang cerdas akan membingkai kandidatnya sebagai bagian dari identitas komunal tersebut [Sarwono & Meinarno 2018].

Mekanisme framing dalam kampanye Pilkada lokal bekerja melalui tiga teknik yang saling tumpang tindih. Pertama, *emphasis framing*, yaitu memilih aspek mana dari kandidat atau isu yang ditonjolkan; misalnya, seorang kandidat yang memiliki latar belakang birokrat pemerintah dapat dibingkai sebagai sosok berpengalaman yang memahami sistem, atau sebaliknya dibingkai oleh lawan sebagai bagian dari elite yang tidak bersentuhan dengan rakyat. Kedua, *equivalency framing*, yaitu menyajikan informasi yang secara faktual identik tetapi dengan formulasi kata yang berbeda; misalnya, tingkat partisipasi pemilih 65 persen dapat dibingkai sebagai partisipasi yang tinggi jika pembanding yang disebut adalah Pilkada sebelumnya yang hanya 58 persen, atau dibingkai sebagai kegagalan demokrasi jika dibandingkan dengan target KPU sebesar 80 persen. Ketiga, *loss versus gain framing*, yaitu membingkai pilihan dalam terminologi kerugian yang akan dihindari atau keuntungan yang akan diraih; riset psikologi sosial secara konsisten menunjukkan bahwa pesan berbasis ancaman kerugian cenderung memiliki daya dorong perilaku yang lebih kuat daripada pesan berbasis harapan keuntungan, dan temuan ini sering dimanfaatkan dalam kampanye negatif di Pilkada KTI [Hogg & Vaughan 2018].

Dalam praktik kampanye lokal, nilai integritas yang menjadi penciri ICHSA-N menuntut mahasiswa Ilmu Pemerintahan untuk tidak sekadar mengidentifikasi framing sebagai teknik, tetapi juga menilai apakah framing tersebut dibangun di atas fakta yang dapat diverifikasi atau pada distorsi yang menyesatkan pemilih. Mahasiswa yang menganalisis kasus Pilkada konkret, misalnya Pilkada Gubernur Sulawesi Tengah atau Pilkada Bupati di wilayah kepulauan Maluku, perlu menelusuri dokumen resmi KPU, transkrip debat kandidat, atau hasil survei lembaga independen sebagai sumber primer untuk mengidentifikasi apakah klaim dalam materi kampanye sesuai dengan data yang tersedia. Kemampuan ini bukan sekadar

keterampilan akademik, melainkan fondasi kompetensi teknopreneurship pemerintahan yang bertanggung jawab, di mana seorang aparatur atau analis kebijakan harus mampu membaca framing dalam komunikasi publik untuk menghindari keputusan yang didasarkan pada persepsi yang dikonstruksi secara manipulatif. Dengan demikian, memahami framing bukan berarti menerimanya sebagai sesuatu yang wajar, melainkan mengembangkan literasi kritis yang melindungi kualitas demokrasi lokal dari distorsi informasi yang sistematis [Sarwono & Meinarno 2018].

Tabel 9.3 Perbandingan Teknik Framing Pesan Kampanye dan Mekanisme Psikologisnya

Teknik Framing	Definisi Operasional	Contoh dalam Pilkada KTI	Jalur ELM yang Dominan	Risiko terhadap Kualitas Demokrasi
Emphasis Framing	Menonjolkan satu aspek kandidat atau isu dan meminimalkan aspek lain	Kandidat birokrat dibingkai sebagai berpengalaman vs. dibingkai sebagai bagian dari elite korup	Periferal (berbasis citra) atau Sentral (berbasis argumen)	Pemilih hanya mengevaluasi dimensi yang ditonjolkan, mengabaikan dimensi lain yang relevan
Equivalency Framing	Menyajikan fakta yang sama dengan formulasi berbeda untuk menghasilkan kesan yang berbeda	Partisipasi 65% dibingkai sebagai sukses (vs. 58% sebelumnya) atau kegagalan (vs. target 80%)	Sentral (memerlukan perbandingan data)	Pemilih mudah disesatkan jika tidak memverifikasi titik acuan yang digunakan
Loss vs. Gain Framing	Membingkai pilihan sebagai ancaman kerugian atau peluang keuntungan	Kampanye negatif: pilih lawan berarti daerah tertinggal; kampanye positif: pilih kandidat ini berarti kemajuan	Periferal (emosional)	Keputusan didorong rasa takut, bukan evaluasi rasional program kandidat

[Gambar 9.3 belum diunggah]

Gambar 9.3 Diagram dua jalur ELM (Elaboration Likelihood Model): jalur sentral (kiri) menunjukkan alur pemilih dengan motivasi dan kemampuan elaborasi tinggi -- pesan framing diproses secara argumentatif -- membentuk sikap stabil; jalur periferal (kanan) menunjukkan

ANALOGI

Bayangkan seorang penjual ikan di pasar Palu yang menawarkan ikan yang sama kepada dua pembeli berbeda. Kepada pembeli pertama ia berkata, ikan ini masih segar, dipancing tadi pagi. Kepada pembeli kedua ia berkata, jangan sampai menyesal tidak beli sekarang, kalau ditunggu siang pasti sudah habis diborong orang lain. Ikan yang ditawarkan identik, tetapi pembeli kedua merasakan tekanan yang jauh lebih kuat untuk segera memutuskan beli karena pesannya dibingkai dalam terminologi kerugian yang akan datang. Itulah cara kerja loss framing dalam kampanye politik: kandidat dan tim kampanye tidak mengubah kenyataan, tetapi mengubah cara kenyataan itu disajikan agar pemilih merasakan urgensi dan tekanan tertentu yang menggerakkan pilihan mereka.

CONTOH

Pada Pilkada Gubernur di salah satu provinsi KTI, calon petahana merilis iklan kampanye yang menyatakan bahwa dalam lima tahun kepemimpinannya, angka kemiskinan turun dari 24 persen menjadi 19 persen. Tim kampanye lawan merespons dengan menerbitkan materi kampanye yang menyatakan bahwa setelah lima tahun, masih ada 19 persen warga yang hidup di bawah garis kemiskinan, menjadikan provinsi ini salah satu yang termiskin di Indonesia. Kedua pernyataan menggunakan angka yang sama persis dari dokumen BPS, tetapi framing pertama menggunakan gain framing dengan titik acuan kondisi sebelumnya, sementara framing kedua menggunakan loss framing dengan titik acuan kondisi nasional. Langkah analisis: pertama, identifikasi klaim faktual dan verifikasi ke sumber primer (dokumen BPS atau laporan resmi KPU); kedua, tentukan teknik framing yang digunakan (emphasis, equivalency, atau loss vs. gain); ketiga, evaluasi jalur ELM yang diaktifkan pada segmen pemilih tertentu, misalnya pemilih perdesaan dengan keterlibatan politik rendah cenderung merespons melalui jalur periferan sehingga lebih rentan terhadap loss framing berbasis emosi; keempat, simpulkan implikasi terhadap kualitas demokrasi lokal, apakah kompetisi informasi ini mendorong pemilih menuju evaluasi berbasis program atau sekadar persepsi yang terkonstruksi.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi umum yang sering ditemukan di kalangan mahasiswa adalah keyakinan bahwa framing hanya relevan pada pemilih yang tidak berpendidikan atau yang tidak memiliki informasi, sehingga pemilih terdidik dan aktif mencari informasi dianggap kebal terhadap efek framing. Pembetulannya: riset psikologi sosial justru menunjukkan bahwa pemilih dengan tingkat pendidikan tinggi sekalipun sangat

rentan terhadap equivalency framing dan emphasis framing karena mereka menggunakan informasi yang lebih banyak untuk merasionalisasi kesan awal yang terbentuk dari framing, bukan untuk mengoreksinya. Fenomena ini dikenal sebagai motivated reasoning, di mana elaborasi kognitif yang lebih tinggi justru digunakan untuk memperkuat, bukan menguji, persepsi awal yang sudah terbingkai. Implikasinya bagi mahasiswa yang menyusun laporan analisis kasus Pilkada KTI: framing harus dianalisis sebagai variabel yang bekerja pada semua segmen pemilih, bukan hanya pada kelompok yang dianggap rentan secara literasi.

D. Heuristik Keputusan Pemilih dan Sintesis Analisis Kasus Pilkada KTI

Ketika warga mendatangi bilik suara, jarang sekali mereka telah membaca seluruh rekam jejak kandidat secara sistematis. Sebaliknya, otak manusia mengandalkan jalan pintas kognitif yang disebut heuristik, yakni strategi penyederhanaan informasi yang memungkinkan keputusan dibuat secara cepat dengan sumber daya mental yang terbatas. Dalam psikologi sosial, setidaknya tiga jenis heuristik paling relevan untuk menjelaskan perilaku pemilih lokal: heuristik ketersediaan (availability heuristic), heuristik keterwakilan (representativeness heuristic), dan penjangkaran (anchoring heuristic). Ketiga jenis ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dengan faktor identitas sosial dan framing kampanye yang telah dibahas di sub-bab sebelumnya, membentuk satu ekosistem kognitif yang menentukan pilihan akhir pemilih.

Heuristik ketersediaan bekerja ketika pemilih menilai kemungkinan suatu peristiwa atau kualitas kandidat berdasarkan seberapa mudah contoh relevan muncul dalam ingatan mereka. Dalam konteks Pilkada di Kawasan Timur Indonesia, seorang pemilih di Kabupaten Mamuju cenderung menilai kandidat yang wajahnya sering muncul di baliho jalan utama, siaran radio lokal, atau media sosial sebagai kandidat yang lebih kompeten, bukan karena ada bukti kompetensi yang telah mereka evaluasi secara kritis, melainkan semata karena citra itu mudah diakses dalam memori. Heuristik keterwakilan, di sisi lain, mendorong pemilih membandingkan kandidat dengan prototipe pemimpin ideal dalam budaya setempat: apakah kandidat ini berasal dari suku yang sama, berbicara dengan logat yang familiar, memiliki latar belakang tokoh adat atau ulama terkemuka? Jika kandidat dinilai mewakili prototipe tersebut, pemilih cenderung menyimpulkan bahwa ia juga memiliki kualitas kepemimpinan yang baik meskipun bukti konkret belum tentu mendukung kesimpulan itu. Heuristik penjangkaran tampak ketika pemilih bertitik-tolak dari

informasi awal yang mereka terima, misalnya angka elektabilitas dari survei pertama yang beredar atau pernyataan pertama kandidat dalam debat publik, lalu menyesuaikan penilaian berikutnya hanya sedikit dari titik jangkar tersebut tanpa benar-benar memproses ulang seluruh bukti yang kemudian masuk.

Untuk menyintesis pemahaman tentang heuristik ke dalam analisis kasus nyata, mahasiswa perlu merancang laporan yang memadukan data primer dengan kerangka teoritis. Sebagai contoh bertahap: pertama, tentukan satu Pilkada spesifik di KTI, misalnya Pilkada Gubernur Sulawesi Tengah 2020 atau Pilkada Bupati Kepulauan Aru 2024, lalu kumpulkan minimal dua sumber primer berupa dokumen resmi KPU tentang tingkat partisipasi per kecamatan dan laporan survei lembaga terverifikasi atau rekaman wawancara dengan pemilih setempat. Kedua, identifikasi pola partisipasi yang anomali, misalnya mengapa satu kecamatan mencatat partisipasi 85 persen sementara kecamatan tetangganya hanya 52 persen, lalu tarik hipotesis awal apakah kesenjangan itu dapat dijelaskan oleh heuristik ketersediaan melalui intensitas kampanye tatap muka, atau oleh heuristik keterwakilan melalui kecocokan etnis kandidat dengan demografi setempat. Ketiga, nilai kekuatan penjelas setiap heuristik secara eksplisit: apakah data menunjukkan korelasi yang konsisten, ataukah variabel lain seperti aksesibilitas TPS atau insentif material lebih mampu menjelaskan variasi tersebut? Proses ini melatih kemampuan menganalisis (C4) yang melampaui sekadar mendeskripsikan fakta, sekaligus menumbuhkan integritas akademik karena kesimpulan harus dapat diverifikasi dari sumber yang dikutip secara jujur dan transparan.

Sintesis akhir laporan harus menjawab pertanyaan implikatif: apa yang temuan tentang heuristik pemilih ini berarti bagi kualitas demokrasi lokal di KTI? Jika pemilih di daerah kepulauan terpencil seperti Maluku Tenggara atau Nusa Tenggara Timur secara dominan mengandalkan heuristik keterwakilan etnis-agama karena akses terhadap informasi kandidat yang komprehensif memang terbatas, maka persoalannya bukan semata irrasionalitas warga melainkan ketimpangan infrastruktur informasi yang struktural. Implikasi ini langsung menyentuh agenda technopreneurship pemerintahan: bagaimana platform digital lokal, radio komunitas, atau aplikasi KPU berbasis bahasa daerah dapat memperluas basis informasi sehingga pemilih tidak terpaksa bergantung penuh pada jalan pintas kognitif yang rentan dimanipulasi melalui kampanye hitam atau disinformasi. Argumentasi semacam ini harus bersandar pada data yang sudah dikumpulkan, bukan opini mengambang, sehingga laporan analisis kasus yang dihasilkan memenuhi standar karya ilmiah yang dapat diverifikasi dan mencerminkan nilai pelayanan serta adaptabilitas dalam merespons realitas demokrasi lokal yang terus berubah.

Tabel 9.4 Perbandingan Tiga Jenis Heuristik Keputusan Pemilih dalam Konteks Pilkada KTI

Jenis Heuristik	Mekanisme Kognitif	Contoh Konkret di KTI	Implikasi bagi Kampanye	Risiko Manipulasi
Ketersediaan (Availability)	Menilai kemungkinan/kualitas berdasarkan kemudahan mengingat contoh	Kandidat yang wajahnya mendominasi baliho dan iklan radio lokal dianggap lebih dikenal dan dipercaya	Tim kampanye memprioritaskan eksposur berulang di media yang dapat dijangkau pemilih pelosok	Disinformasi viral dapat membuat fakta negatif lebih mudah diakses memori pemilih
Keterwakilan (Representativeness)	Membandingkan kandidat dengan prototipe pemimpin ideal dalam budaya lokal	Kandidat dari suku dominan atau berlatar belakang tokoh adat/ulama dinilai lebih layak memimpin	Strategi personal branding menekankan atribut kedaerahan, adat, atau keagamaan	Stereotip kelompok memperkuat diskriminasi terhadap kandidat dari kelompok minoritas
Penjangkaran (Anchoring)	Penilaian bertitik-tolak dari informasi awal dan hanya disesuaikan sedikit	Angka elektabilitas survei pertama menjadi patokan persepsi publik sepanjang masa kampanye	Rilis survei awal yang menguntungkan dapat mengunci persepsi pemilih	Jajak pendapat palsu yang disebarkan di awal kampanye sulit dikoreksi meski bantahan tersedia

[Gambar 9.4 belum diunggah]

Gambar 9.4 Diagram alur tiga panel yang menggambarkan proses kognitif pemilih: panel pertama menampilkan stimulus informasi (baliho, berita, survei); panel kedua menampilkan tiga cabang heuristik (ketersediaan, keterwakilan, penjangkaran) sebagai filter kognitif; pa

ANALOGI

Bayangkan Anda masuk ke warung makan baru di kota asing tanpa ulasan internet. Anda akan memilih warung yang paling ramai pengunjung (heuristik ketersediaan: banyak orang ingat dan datang, berarti enak), memilih menu yang namanya paling mirip masakan rumah ibu Anda (heuristik keterwakilan: cocok dengan prototipe makanan lezat), dan bertahan pada harga menu pertama yang Anda lihat sebagai patokan mahal-murahnya warung itu (penjangkaran). Itulah persis cara pemilih

memilih kandidat ketika informasi lengkap tidak tersedia atau terlalu mahal secara kognitif untuk diproses.

CONTOH

Tahap 1 -- Pilih kasus: Pilkada Bupati Halmahera Utara 2020; unduh dokumen rekapitulasi KPU per kecamatan dan laporan survei Litbang Kompas atau lembaga lokal terverifikasi sebagai dua sumber primer. Tahap 2 -- Peta anomali: temukan bahwa Kecamatan Tobelo mencatat partisipasi 78 persen sementara Kecamatan Loloda hanya 43 persen; catat perbedaan intensitas kampanye dan akses media di kedua wilayah. Tahap 3 -- Uji heuristik: analisis apakah perbedaan eksposur kampanye tatap muka (availability) menjelaskan kesenjangan tersebut; bandingkan dengan data etnis dominan per kecamatan untuk menguji heuristik keterwakilan. Tahap 4 -- Nilai kekuatan penjabar: simpulkan heuristik mana yang lebih konsisten dengan data, akui keterbatasan data, dan rumuskan implikasi terhadap kebijakan sosialisasi pemilu oleh KPU daerah.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi umum yang harus diluruskan: banyak mahasiswa menyimpulkan bahwa pemilih yang menggunakan heuristik adalah pemilih bodoh atau tidak rasional, dan bahwa solusinya adalah pendidikan agar semua pemilih berpikir analitis penuh. Pembetulan: heuristik adalah respons adaptif universal yang digunakan semua manusia, termasuk akademisi, ketika informasi tidak lengkap dan waktu terbatas. Masalah bukan pada heuristik itu sendiri, melainkan pada kondisi struktural yang memaksa pemilih hanya bisa mengandalkan jalan pintas tersebut, seperti minimnya akses informasi publik tentang kandidat, rendahnya literasi media, atau disinformasi yang sengaja dirancang mengeksploitasi heuristik tertentu. Oleh karena itu, implikasi kebijakan yang tepat bukan menyalahkan pemilih melainkan memperbaiki ekosistem informasi demokrasi lokal.

RANGKUMAN

- Partisipasi politik dipengaruhi secara langsung oleh faktor psikologis—identitas sosial, afiliasi kelompok, dan kepercayaan institusional—yang berintensitas khas di daerah-daerah KTI dengan keragaman etnis dan kedaerahan tinggi.
- Social Identity Theory menjelaskan bagaimana kategorisasi diri berbasis etnis, agama, atau asal daerah mendorong pemilih mengarahkan pilihan electoral

kepada kandidat yang dipersepsikan sebagai bagian dari in-group mereka.

- Framing pesan kampanye bekerja dengan mengaktifkan skema kognitif tertentu pada pemilih sehingga evaluasi kandidat lebih dipengaruhi sudut pandang yang dibingkai media atau tim kampanye daripada kalkulasi program secara menyeluruh.
- Heuristik availability, representativeness, dan anchoring menyederhanakan beban keputusan pemilih, namun sekaligus membuka celah manipulasi persepsi yang berimplikasi pada kualitas pilihan democratic dan legitimasi hasil Pilkada.
- Analisis kasus Pilkada KTI berbasis sumber primer menunjukkan bahwa kualitas demokrasi lokal tidak hanya bergantung pada sistem elektoral formal, tetapi juga pada derajat literasi psikologi sosial warga dan penyelenggara pemerintahan.

REFERENSI

- Myers, D. G. (2013). *Social Psychology*. 11th Edition. McGraw-Hill.
- Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2016). *Social Psychology*. 9th Edition. Pearson.
- Hogg, M. A., & Vaughan, G. M. (2018). *Social Psychology*. 8th Edition. Pearson.
- Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2006). *Social Psychology*. 12th Edition. Pearson Prentice Hall.
- Cialdini, R. B. (2009). *Influence: Science and Practice*. 5th Edition. Pearson.
- Sarwono, S. W. (2015). *Psikologi Sosial*. Edisi 2. Salemba Humanika.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2022. *Standar Nasional Pendidikan (Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi)*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2024. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Outcome Based Education (OBE)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- Norris, Pippa. 2011. *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Putnam, Robert D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon and Schuster.
- Sears, David O., Jonathan L. Freedman, dan L. Anne Peplau. 1994. *Psikologi Sosial*. Terjemahan Michael Adryanto. Jakarta: Erlangga.
- Myers (2013); Aronson, Wilson, & Akert (2016); Hogg & Vaughan (2018); Taylor, Peplau, & Sears (2006); Norris (2011); Sarwono (2015).

PERTEMUAN 10

Analisis Empiris Perilaku Pemilih Pilkada Lokal

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:

53. Menyusun laporan analisis kasus (minimal 1.000 kata) partisipasi pemilih pada satu Pemilu/Pilkada KTI yang merujuk minimal 2 sumber primer (survei, dokumen resmi KPU, atau wawancara)
Menilai kekuatan penjelas minimal 2 teori psikologi sosial (mis. Social Identity Theory dan Elaboration Likelihood Model) terhadap pola perilaku pemilih yang ditemukan
Menyimpulkan implikasi temuan terhadap kualitas demokrasi lokal dengan argumentasi yang dapat diverifikasi dari data sumber primer
54. Mengevaluasi kesesuaian antara data empiris perilaku pemilih pada satu kasus Pilkada lokal dengan prediksi teori identitas sosial, framing, dan heuristik keputusan yang telah dipelajari minggu sebelumnya
55. Mengembangkan instrumen survei sederhana (panduan wawancara atau kuesioner 8-10 item) yang operasional untuk mengukur variabel psikologis (identitas sosial, persepsi framing, atau preferensi heuristik) dalam konteks electoral lokal
56. Menyajikan hasil analisis komparatif perilaku pemilih lintas dua kelompok demografis (misalnya pemilih pemula versus pemilih senior, atau pemilih perkotaan versus pedesaan di Kawasan Timur Indonesia) secara sistematis dan berbasis data
57. Menilai kekuatan dan kelemahan dua teori psikologi sosial yang digunakan dalam menjelaskan varian perilaku pemilih pada kasus yang dianalisis, dengan argumen yang disertai bukti dari sumber primer

Pendahuluan

Pertemuan ke-9 telah membangun landasan konseptual partisipasi politik dan perilaku pemilih dengan menelaah teori identitas sosial, framing, dan heuristik keputusan secara deduktif. Pertemuan ke-10 ini menggeser orientasi dari penalaran teoritis menuju pengujian empiris: mahasiswa ditantang untuk mengonfrontasi kerangka konsep tersebut dengan data nyata dari satu kasus Pemilu atau Pilkada di Kawasan Timur Indonesia, sehingga kemampuan evaluasi kritis (C5) dan

perancangan instrumen (C6) menjadi pusat pencapaian belajar.

Kemampuan membaca data lapangan secara psikologis-sosial merupakan kompetensi inti seorang analis pemerintahan yang bertanggung jawab (nilai Integrity) sekaligus adaptif terhadap konteks lokal (nilai Adaptability). Bagi calon aparaturnya dan pengambil kebijakan di KTI, pemahaman tentang mengapa warga memilih atau golput pada Pilkada tertentu bukan sekadar latihan akademis, melainkan bekal nyata untuk merancang kebijakan partisipasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap keragaman sosio-demografis wilayah.

A. Evaluasi Kesesuaian Data Empiris dengan Prediksi Teori

Mengevaluasi kesesuaian antara data empiris dan prediksi teori berarti memeriksa seberapa akurat suatu kerangka konseptual mampu mengantisipasi pola yang benar-benar ditemukan di lapangan — bukan sekadar mencocokkan teori dengan fakta secara post-hoc. Dalam konteks perilaku pemilih Pilkada di Kawasan Timur Indonesia, langkah ini menuntut mahasiswa terlebih dahulu merumuskan prediksi eksplisit dari teori sebelum melihat data. Misalnya, Social Identity Theory (SIT) memprediksi bahwa pemilih akan cenderung memilih kandidat yang dianggap sebagai representasi in-group etnisnya atau kelompok agamanya; sementara Elaboration Likelihood Model (ELM) memprediksi bahwa pemilih dengan motivasi dan kemampuan kognitif rendah akan lebih dipengaruhi oleh isyarat periferan seperti penampilan, kedekatan tokoh, atau intensitas kampanye daripada oleh kualitas program kebijakan. Prediksi-prediksi inilah yang kemudian diadu dengan temuan survei, dokumen rekap KPU, atau transkrip wawancara untuk dinilai tingkat kesesuaiannya secara sistematis.

Proses evaluasi kesesuaian dilakukan melalui tiga tahap yang berurutan dan tidak boleh dibalik. Tahap pertama adalah operasionalisasi: setiap konstruk teoritis dijabarkan menjadi indikator yang dapat diukur — misalnya identitas sosial dioperasionalkan melalui pertanyaan tentang kedekatan etnis atau afiliasi organisasi keagamaan kandidat, sedangkan jalur periferan ELM dioperasionalkan melalui item tentang seberapa besar pengaruh endorsement tokoh lokal terhadap keputusan memilih. Tahap kedua adalah komparasi: data yang terkumpul dari sumber primer (hasil survei, dokumen partisipasi KPU, rekap suara per TPS) dibandingkan dengan ambang prediksi teori — misalnya, apakah pemilih yang menyatakan identitas etnis kuat memang memberikan suara kepada kandidat seasal secara signifikan lebih tinggi

daripada pemilih yang identitas etnisnya lemah? Tahap ketiga adalah penilaian kesenjangan (gap assessment): setiap ketidakcocokan antara prediksi dan temuan didokumentasikan secara jujur dan dianalisis penyebabnya, apakah karena limitasi teori, limitasi instrumen pengukuran, atau keunikan konteks lokal. Ketiga tahap ini melatih integritas akademik mahasiswa karena menuntut kejujuran intelektual dalam melaporkan data yang tidak mendukung teori favorit — nilai yang selaras dengan prinsip Integrity dalam karakter ICHSA-N.

Kasus Pilkada di beberapa provinsi KTI memberikan ilustrasi konkret tentang kesesuaian sekaligus kesenjangan prediksi teoritis. Pada Pilkada Gubernur Sulawesi Tenggara misalnya, dokumen rekap KPU menunjukkan korelasi yang kuat antara basis etnis kandidat dengan perolehan suara di kabupaten tertentu — pola ini sesuai dengan prediksi SIT. Namun, di segmen pemilih muda perkotaan (18-25 tahun), pola tersebut melemah secara signifikan; mereka justru menunjukkan preferensi berbasis program ekonomi, sebuah temuan yang lebih konsisten dengan jalur sentral ELM. Kesenjangan ini penting untuk dicatat karena menunjukkan bahwa SIT dan ELM bekerja secara berbeda di segmen demografis yang berbeda — suatu nuansa yang hanya dapat diungkap melalui analisis lintas kelompok berbasis data primer, bukan asumsi tunggal. Temuan semacam ini juga memiliki implikasi technopreneurship: strategi komunikasi politik berbasis data demografis menjadi jauh lebih terukur dan relevan dibandingkan kampanye seragam.

Mahasiswa perlu membiasakan diri melaporkan evaluasi kesesuaian dalam format yang transparan: untuk setiap teori, nyatakan prediksinya secara eksplisit, sajikan data yang relevan, dan kategorikan hasilnya sebagai didukung penuh, didukung sebagian, atau tidak didukung, disertai justifikasi dari sumber primer. Format ini mencegah kesalahan umum di mana laporan analisis hanya mengutip teori sebagai hiasan tanpa benar-benar mengujinya terhadap data. Dalam laporan analisis kasus minimal 1.000 kata yang menjadi luaran pertemuan ini, bagian evaluasi kesesuaian harus mengambil porsi substansial karena di sinilah kemampuan berpikir analitis tingkat C5 (evaluasi) dibuktikan. Ketidadaan evaluasi kesesuaian yang eksplisit akan menempatkan laporan hanya pada level deskriptif (C2), bukan level evaluatif yang dituntut oleh capaian pembelajaran pertemuan ini.

Tabel 10.1 Kerangka Evaluasi Kesesuaian Data Empiris dengan Prediksi Teori pada Kasus Pilkada KTI

Teori	Prediksi Eksplisit	Indikator Operasional	Contoh Data Primer yang Relevan	Kategori Kesesuaian
Social Identity Theory	Pemilih memilih kandidat dari in-	Persentase suara kandidat di	Rekap suara KPU per TPS; hasil	Didukung penuh / sebagian /

Teori	Prediksi Eksplisit	Indikator Operasional	Contoh Data Primer yang Relevan	Kategori Kesesuaian
	group etnis atau agama yang sama	kabupaten basis etnis vs. non-basis; item survei tentang kedekatan etnis kandidat	wawancara pemilih tentang alasan memilih	tidak didukung (diisi berdasarkan data kasus masing-masing)
Elaboration Likelihood Model — Jalur Periferal	Pemilih motivasi rendah lebih dipengaruhi endorsement tokoh dan atribut visual kampanye daripada isi program	Skor item survei tentang pengaruh tokoh lokal; frekuensi sebutan program vs. tokoh dalam alasan memilih	Transkrip wawancara; kuesioner dengan item 'Siapa yang merekomendasikan kandidat ini kepada Anda?'	Didukung penuh / sebagian / tidak didukung (diisi berdasarkan data kasus masing-masing)
Elaboration Likelihood Model — Jalur Sentral	Pemilih motivasi tinggi mengevaluasi kualitas program kebijakan kandidat secara kritis	Kemampuan menyebut minimal 2 program kandidat; skor item survei tentang evaluasi rekam jejak kebijakan	Dokumen visi-misi kandidat resmi KPU; hasil survei pemilih terdidik perkotaan	Didukung penuh / sebagian / tidak didukung (diisi berdasarkan data kasus masing-masing)

[Gambar 10.1 belum diunggah]

Gambar 10.1 Diagram alur tiga tahap evaluasi kesesuaian: (1) kotak Operasionalisasi Teori — konstruk abstrak dijabarkan menjadi indikator terukur; (2) kotak Komparasi Data-Prediksi — prediksi teori disejajarkan dengan temuan data primer dalam tabel dua kolom; (3) kot

ANALOGI

Proses evaluasi kesesuaian ini mirip dengan seorang prakirawan cuaca yang sebelum melihat data aktual terlebih dahulu menuliskan prediksinya secara tertulis — 'besok hujan di wilayah X' — kemudian keesokan harinya membandingkan catatan prediksi itu dengan data curah hujan aktual dari stasiun pengukur. Prakirawan yang baik tidak mengubah catatan prediksinya setelah melihat data; ia justru mendokumentasikan selisihnya untuk memperbaiki model prediksi berikutnya. Demikian pula mahasiswa dalam laporan analisis Pilkada: prediksi teoritis harus

dirumuskan sebelum data dibuka, bukan dirumuskan mundur setelah data dilihat.

CONTOH

Langkah 1 — Rumuskan prediksi: berdasarkan SIT, di Pilkada Walikota Kendari 2020, kandidat yang berlatar belakang etnis Tolaki diperkirakan meraih lebih dari 50 persen suara di kecamatan dengan populasi etnis Tolaki dominan. Langkah 2 — Kumpulkan data primer: unduh rekap suara per TPS dari laman resmi KPU Kota Kendari dan cocokkan dengan data demografi kecamatan dari BPS. Langkah 3 — Bandingkan: jika data menunjukkan kandidat tersebut memperoleh 61 persen di kecamatan basis dan hanya 38 persen di kecamatan non-basis, maka prediksi SIT didukung sebagian — arah prediksi benar tetapi besarnya perlu diverifikasi dengan wawancara untuk memastikan etnis memang variabel penjas utama, bukan faktor jaringan sosial lain yang berkorelasi. Langkah 4 — Dokumentasikan kesenjangan: catat bahwa di kelurahan perkotaan dalam kecamatan yang sama, pola identitas etnis melemah, dan ini memerlukan penjelasan tambahan dari ELM jalur sentral.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi umum: mahasiswa menganggap bahwa jika data 'mirip' dengan apa yang dijelaskan teori, berarti teori tersebut sudah 'terbukti' dan tidak perlu dievaluasi lebih jauh. Pembetulan: kesesuaian parsial bukan verifikasi penuh. Teori hanya benar-benar diuji jika prediksinya dirumuskan terlebih dahulu secara eksplisit dan kuantitatif, bukan dicocokkan secara retrospektif. Selain itu, satu kasus Pilkada saja tidak cukup untuk memvalidasi atau menfalsifikasi suatu teori — ia hanya memberikan bukti indikatif yang perlu dikonfirmasi dengan replikasi di konteks lain. Mengklaim bahwa 'SIT terbukti benar di Pilkada ini' tanpa mengakui batas-batas inferensi adalah pelanggaran terhadap standar penalaran ilmiah yang seharusnya dijaga sebagai bagian dari nilai Integrity.

B. Kekuatan dan Kelemahan Teori Psikologi Sosial sebagai Alat Penjelas

Teori psikologi sosial seperti Social Identity Theory (SIT) dari Tajfel dan Turner serta Elaboration Likelihood Model (ELM) dari Petty dan Cacioppo menawarkan kerangka yang terstruktur untuk menjelaskan mengapa seorang warga di Sulawesi Tengah atau Papua memilih kandidat tertentu bukan semata karena program kerja, melainkan

karena rasa keanggotaan dalam kelompok etnis, agama, atau klan. Kekuatan utama SIT terletak pada kemampuannya menjelaskan polarisasi pemilih berbasis identitas yang sangat nyata di Kawasan Timur Indonesia, di mana ikatan primordial masih menjadi perekat mobilisasi suara. ELM di sisi lain unggul dalam memetakan jalur persuasi: pemilih dengan motivasi tinggi dan kapasitas kognitif memadai memproses pesan kampanye secara elaboratif (rute sentral), sementara pemilih dengan keterlibatan rendah cenderung mengandalkan isyarat periferifal seperti penampilan fisik kandidat atau dukungan tokoh agama setempat. Kedua teori ini saling melengkapi karena SIT menjelaskan siapa yang dipilih sedangkan ELM menjelaskan bagaimana pesan kampanye diproses sebelum keputusan itu dibuat.

Meski memiliki kekuatan penjas yang solid, kedua teori ini menanggung kelemahan yang tidak boleh diabaikan ketika diaplikasikan pada kasus Pilkada lokal. SIT cenderung mereduksi perilaku pemilih menjadi fungsi keanggotaan kelompok semata, sehingga kurang mampu menjelaskan kasus pemilih yang dengan sadar menyeberang dari kelompok identitasnya demi pertimbangan kepentingan material atau rekam jejak tata kelola — fenomena yang dijumpai pada Pilkada Makassar 2020 ketika sejumlah segmen pemilih berbasis identitas justru mendukung kandidat dari luar kelompok asal mereka. ELM pun menghadapi tantangan operasional: asumsi bahwa motivasi dan kapasitas kognitif dapat diukur secara terpisah sulit dipenuhi dengan instrumen survei singkat, dan hasil pengukuran sering bergantung pada konteks kampanye yang dinamis. Selain itu, keduanya dibangun di atas data dari masyarakat Barat dan belum sepenuhnya teruji pada konteks demokrasi lokal yang masih dalam fase konsolidasi seperti yang dijumpai di banyak daerah KTI, sehingga peneliti perlu bersikap kritis dan tidak sekadar mengimpor asumsi teori tanpa verifikasi empiris — inilah yang menjadi ciri integritas intelektual (Integrity) dalam praktik riset.

Kelemahan struktural kedua teori semakin tampak ketika dihadapkan pada kompleksitas perilaku pemilih yang bersifat multideterminan. Faktor seperti jaringan patronase, intimidasi informal, dan akses informasi yang timpang antara daerah perkotaan dan pedalaman KTI tidak tertangkap oleh SIT maupun ELM secara langsung. Oleh karena itu, menilai kekuatan dan kelemahan teori bukanlah kegiatan akademis semata, melainkan prasyarat agar rekomendasi kebijakan yang lahir dari analisis benar-benar dapat diverifikasi dari data sumber primer, bukan sekadar deduksi konseptual. Pendekatan adaptif (Adaptability) — memadukan SIT dan ELM dengan kerangka analisis lokal seperti pendekatan klientelisme atau teori modal sosial Putnam — terbukti menghasilkan penjelasan yang lebih kaya dibandingkan mengandalkan satu teori tunggal. Dengan demikian, evaluasi kritis terhadap teori

bukan merupakan kelemahan analisis, melainkan justru standar riset yang bertanggung jawab dan relevan bagi penguatan kualitas demokrasi lokal.

Tabel 10.2 Perbandingan Kekuatan dan Kelemahan SIT dan ELM dalam Konteks Pilkada Lokal KTI

Dimensi	Social Identity Theory (SIT)	Elaboration Likelihood Model (ELM)
Kekuatan utama	Menjelaskan polarisasi pemilih berbasis identitas etnis, agama, dan klan yang dominan di KTI	Memetakan jalur persuasi kampanye: rute sentral (elaboratif) versus rute perifer (heuristik)
Aspek yang kuat dijelaskan	Mobilisasi suara berbasis solidaritas kelompok dan kategorisasi sosial in-group/out-group	Efektivitas pesan kampanye bergantung pada motivasi dan kapasitas kognitif pemilih
Kelemahan utama	Mereduksi perilaku pemilih menjadi fungsi keanggotaan kelompok; sulit menjelaskan pemilih yang menyeberang identitas	Asumsi pemisahan motivasi dan kapasitas kognitif sulit dioperasionalkan lewat survei singkat
Keterbatasan kontekstual	Dibangun berbasis konteks Barat; perlu verifikasi empiris pada demokrasi KTI yang masih konsolidasi	Tidak menangkap faktor patronase, intimidasi informal, dan kesenjangan akses informasi
Strategi kompensasi	Padukan dengan analisis klientelisme atau modal sosial lokal	Triangulasi dengan wawancara mendalam untuk menangkap dinamika konteks kampanye

[Gambar 10.2 belum diunggah]

Gambar 10.2 Diagram dua kolom paralel yang menampilkan skema kerja SIT (kategorisasi diri — identifikasi kelompok — perilaku memilih) di sebelah kiri dan skema ELM (penerimaan pesan — tingkat elaborasi tinggi/rendah — rute sentral/perifer — keputusan memilih) di se

ANALOGI

Bayangkan dua jenis kacamata: SIT adalah kacamata dengan filter warna yang membantu Anda melihat pola kelompok dengan jelas tetapi membuat semua objek tampak berwarna identitas, sehingga detail individual menjadi kabur; ELM adalah kacamata pembesar yang memperlihatkan bagaimana pikiran memproses iklan kampanye secara rinci tetapi tidak otomatis memberi tahu Anda kepada kelompok mana pemilih itu merasa ia termasuk. Seorang analis perilaku pemilih yang cerdas tidak bergantung pada satu kacamata saja — ia menggunakan keduanya secara

bergantian sesuai pertanyaan riset, dan tahu persis kapan masing-masing kacamata mulai mengaburkan gambar.

CONTOH

Langkah 1 — Identifikasi prediksi teori: pada Pilkada Bupati Kabupaten Kepulauan Sula 2024, SIT memprediksi bahwa pemilih dari komunitas marga dominan akan memberikan suara kepada kandidat yang berasal dari marga yang sama, sedangkan ELM memprediksi bahwa pemilih dengan tingkat pendidikan rendah dan paparan media terbatas akan lebih terpengaruh oleh isyarat perifer (dukungan kepala desa atau tokoh adat). Langkah 2 — Kumpulkan data primer: peneliti menghimpun dokumen rekapitulasi suara KPU dan melakukan wawancara terstruktur terhadap 20 pemilih dari dua kecamatan (perkotaan dan pedesaan). Langkah 3 — Evaluasi kekuatan teori: tabulasi silang menunjukkan bahwa 74 persen pemilih pedesaan mengkonfirmasi pengaruh endorsement tokoh adat (mendukung prediksi ELM rute perifer), namun 30 persen pemilih dari marga dominan justru memilih kandidat luar marga karena rekam jejak pengelolaan dana desa (melanggar prediksi SIT). Langkah 4 — Simpulkan kelemahan: analis menyatakan bahwa SIT kehilangan kekuatan penjelas ketika kepentingan material melampaui solidaritas identitas, dan merekomendasikan penambahan indikator persepsi kinerja dalam instrumen survei berikutnya.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi umum di kalangan mahasiswa adalah anggapan bahwa teori yang memiliki kelemahan berarti teori yang salah dan sebaiknya tidak digunakan. Pembetulannya: setiap teori ilmiah — termasuk SIT dan ELM — adalah model penyederhanaan realitas, bukan cermin sempurna dari realitas itu sendiri. Kelemahan suatu teori justru memberikan informasi berharga tentang batas domain penjelasannya dan memandu peneliti untuk memilih teori pelengkap atau merancang instrumen yang lebih sensitif terhadap konteks lokal. Menilai kekuatan dan kelemahan secara eksplisit adalah tanda kematangan analitis, bukan keraguan terhadap ilmu pengetahuan.

C. Pengembangan Instrumen Survei untuk Variabel Psikologis Electoral

Instrumen survei dalam riset perilaku pemilih bukan sekadar daftar pertanyaan yang dikumpulkan sembarangan, melainkan alat ukur yang dirancang secara sistematis agar setiap item pertanyaan benar-benar merepresentasikan konstruk psikologis yang ingin diungkap. Konstruk psikologis seperti identitas sosial, persepsi framing, dan preferensi heuristik bersifat laten — artinya tidak dapat diamati langsung, sehingga harus dioperasionalkan melalui indikator yang terukur. Proses operasionalisasi ini dimulai dari definisi konseptual (apa yang dimaksud dengan identitas sosial dalam konteks Pilkada lokal), berlanjut ke definisi operasional (bagaimana identitas itu dimanifestasikan dalam pilihan dan sikap pemilih), lalu dirumuskan menjadi item pertanyaan yang konkret. Tanpa tahapan ini, kuesioner yang dihasilkan berisiko mengukur hal yang berbeda dari yang dimaksud, sehingga data yang terkumpul tidak bermakna bagi analisis psikologi sosial electoral.

Dalam konteks Pilkada di Kawasan Timur Indonesia, pengembangan instrumen harus mempertimbangkan tiga dimensi utama yang menjadi fokus sub-bab ini. Dimensi pertama adalah identitas sosial, yang mengukur sejauh mana pemilih mendasarkan pilihannya pada keanggotaan kelompok — etnis, agama, daerah asal, atau afiliasi komunitas lokal. Dimensi kedua adalah persepsi framing, yang mengukur bagaimana cara penyajian informasi kandidat (misalnya melalui narasi 'putra daerah' versus 'kandidat nasional') memengaruhi evaluasi pemilih. Dimensi ketiga adalah preferensi heuristik, yang menangkap kecenderungan pemilih menggunakan jalan pintas kognitif seperti rekomendasi tokoh adat, reputasi klan, atau kedekatan fisik kandidat sebagai dasar keputusan. Ketiga dimensi ini perlu diukur secara terpisah agar peneliti dapat menilai kontribusi relatif masing-masing terhadap keputusan memilih, dan agar temuan dapat diuji silang dengan prediksi teori yang telah dipelajari pada sub-bab sebelumnya.

Sebuah instrumen yang operasional untuk tujuan analisis kasus Pilkada lokal idealnya terdiri dari 8 hingga 10 item dengan skala Likert 1-5 atau pertanyaan semi-terbuka, dibagi secara proporsional ke dalam tiga dimensi tersebut. Untuk dimensi identitas sosial, contoh item yang valid secara konseptual adalah: 'Seberapa penting kesamaan latar belakang daerah antara Anda dan kandidat dalam menentukan pilihan Anda?' dengan skala dari 1 (tidak penting sama sekali) hingga 5 (sangat penting). Untuk dimensi framing, item dapat berbunyi: 'Apakah cara media lokal menyajikan profil kandidat memengaruhi pandangan Anda tentang kemampuannya memimpin?' Item heuristik dapat dikonstruksi sebagai: 'Apakah rekomendasi tokoh masyarakat atau tokoh agama di lingkungan Anda memengaruhi keputusan Anda

memilih?' Setiap item harus diuji keterbacaannya — apakah responden di lokasi riset, misalnya di daerah terpencil Maluku atau Papua, memahami maksud pertanyaan tanpa ambiguitas, sebelum instrumen digunakan dalam pengumpulan data lapangan.

Instrumen yang sudah dikonstruksi harus melalui dua langkah validasi minimum sebelum digunakan: validasi konten oleh ahli atau diskusi teman sejawat (peer review), dan uji keterbacaan pada kelompok kecil calon responden. Validasi konten memastikan setiap item sungguh mengukur konstruk yang dimaksud, bukan konstruk lain yang berkaitan. Uji keterbacaan mengidentifikasi item yang ambigu atau menggunakan bahasa terlalu teknis sehingga membingungkan responden awam. Dalam spirit nilai Integrity yang menjadi penciri ICHSA-N, peneliti bertanggung jawab untuk tidak memanipulasi konstruksi item agar hasilnya sesuai hipotesis — item harus netral dan tidak mengarahkan jawaban. Instrumen yang telah divalidasi kemudian menjadi dasar pengumpulan data primer yang akan dianalisis komparatif pada sub-bab berikutnya, sekaligus menjadi bukti bahwa laporan analisis kasus mahasiswa dibangun di atas data yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

Tabel 10.3 Pemetaan Dimensi Psikologis, Indikator, dan Contoh Item Instrumen Survei Electoral

Dimensi Psikologis	Definisi Operasional	Contoh Item (Skala Likert 1-5)	Teori Acuan
Identitas Sosial	Derajat ketergantungan pilihan pada keanggotaan kelompok etnis, agama, atau daerah asal	Seberapa penting kesamaan latar belakang daerah antara Anda dan kandidat dalam menentukan pilihan Anda?	Social Identity Theory (Tajfel & Turner)
Persepsi Framing	Kepekaan pemilih terhadap cara penyajian informasi kandidat oleh media atau tim kampanye	Apakah narasi 'putra daerah' yang digunakan kandidat memengaruhi penilaian Anda tentang kecocokannya sebagai pemimpin?	Framing Theory (Entman); ELM (Petty & Cacioppo)
Preferensi Heuristik	Kecenderungan menggunakan jalan pintas kognitif seperti rekomendasi tokoh atau reputasi klan sebagai basis keputusan	Apakah rekomendasi tokoh adat atau tokoh agama di komunitas Anda menjadi pertimbangan utama dalam memilih kandidat?	Heuristic-Systematic Model; ELM rute perifer

[Gambar 10.3 belum diunggah]

Gambar 10.3 Diagram alur pengembangan instrumen survei: mulai dari konstruk psikologis laten (identitas sosial, framing, heuristik) — operasionalisasi menjadi indikator — penulisan item pertanyaan — validasi konten — uji keterbacaan — instrumen final siap lapangan. D

ANALOGI

Mengembangkan instrumen survei psikologis ibarat membuat termometer yang pas untuk mengukur suhu badan — bukan suhu ruangan, bukan suhu air. Anda harus tahu persis apa yang diukur (demam sebagai indikator infeksi, bukan sekadar rasa panas), memilih alat yang sensitif pada rentang yang tepat, dan memastikan alat itu dibaca dengan cara yang sama oleh siapa pun yang menggunakannya. Kuesioner yang dibuat asal-asalan seperti termometer yang skalanya kabur: angkanya ada, tapi tidak bisa dipercaya untuk membuat keputusan.

CONTOH

Seorang mahasiswa Ilmu Pemerintahan UNISAN hendak menganalisis perilaku memilih pada Pilkada Kabupaten di Sulawesi Tengah. Ia memulai dengan menetapkan tiga konstruk: identitas sosial etnis, framing media lokal, dan heuristik rekomendasi tokoh. Untuk identitas sosial, ia menulis item: 'Apakah Anda lebih cenderung memilih kandidat yang berasal dari suku yang sama dengan Anda?' — kemudian menyadari item ini terlalu langsung dan berpotensi menimbulkan jawaban yang diinginkan secara sosial (social desirability bias). Ia merevisi menjadi: 'Seberapa besar kesamaan latar belakang budaya antara Anda dan kandidat memengaruhi kepercayaan Anda terhadapnya?' — yang lebih netral dan mengukur mekanisme psikologisnya (kepercayaan) daripada perilaku pilih secara eksplisit. Setelah menyusun 9 item, ia meminta dua rekan sejawat membaca seluruh kuesioner dan menandai item yang ambigu, lalu melakukan uji coba pada 5 warga kampus sebagai simulasi responden awam. Hasilnya, dua item direvisi ulang karena menggunakan istilah 'framing' yang tidak dipahami responden non-akademik, diganti dengan frasa 'cara penyajian berita tentang kandidat'.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi yang sangat umum di kalangan mahasiswa adalah anggapan bahwa instrumen survei yang lebih panjang otomatis lebih baik dan lebih ilmiah. Akibatnya, mahasiswa membuat kuesioner dengan 30-40 item tanpa struktur yang jelas, berharap lebih banyak pertanyaan berarti lebih banyak informasi. Pembetulannya: kualitas

instrumen ditentukan oleh ketepatan setiap item dalam mengukur konstruk yang dimaksud, bukan oleh jumlah item. Instrumen 8-10 item yang valid dan reliabel jauh lebih berguna daripada 40 item yang tumpang tindih, mengukur hal yang sama berulang kali, atau bahkan mengukur konstruk yang berbeda dari yang dinyatakan. Dalam riset electoral lokal dengan populasi yang beragam literasinya, instrumen yang ringkas dan mudah dipahami justru menghasilkan data yang lebih jujur dan dapat dianalisis secara bermakna.

D. Analisis Komparatif Lintas Kelompok Demografis dan Implikasi bagi Demokrasi Lokal

Analisis komparatif lintas kelompok demografis merupakan langkah metodologis yang melampaui sekadar mendeskripsikan angka partisipasi secara agregat. Ketika seorang analis hanya menyebut bahwa tingkat partisipasi Pilkada suatu kabupaten di Kawasan Timur Indonesia mencapai 72 persen, informasi itu belum cukup untuk menjawab pertanyaan penting: siapa yang datang ke TPS, siapa yang tidak, dan mengapa perbedaan itu terjadi? Analisis komparatif membelah data agregat ke dalam segmen demografis yang bermakna — usia, wilayah tempat tinggal, tingkat pendidikan, jenis kelamin — lalu membandingkan pola perilaku di antara segmen tersebut secara sistematis. Dengan cara ini, pola yang tersembunyi di balik angka rata-rata menjadi terlihat, dan implikasi kebijakannya menjadi lebih tajam dan dapat dialamatkan kepada aktor yang tepat.

Pembedaan yang paling relevan dalam konteks Pilkada lokal KTI adalah antara pemilih pemula (usia 17–21 tahun, baru pertama atau kedua kali memilih) dan pemilih senior (usia di atas 45 tahun, berpengalaman dalam beberapa siklus pemilu) serta antara pemilih perkotaan dan pemilih pedesaan. Penelitian survei KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan beberapa studi lokal pascapilkada menunjukkan bahwa pemilih pemula cenderung terpapar lebih intens pada framing digital dan narasi tokoh muda di media sosial, sehingga keputusan mereka lebih dipengaruhi rute perifer dalam kerangka Elaboration Likelihood Model (ELM) — mereka merespons daya tarik visual dan kedekatan sosial daring daripada rekam jejak kebijakan kandidat. Pemilih senior, sebaliknya, lebih mengandalkan heuristik partisan dan jaringan sosial tatap muka seperti pengajian, pertemuan adat, atau arisan RT sebagai sumber informasi utama, yang mencerminkan kuatnya mekanisme identitas sosial berbasis komunitas dalam Social Identity Theory (SIT). Perbedaan mekanisme psikologis ini bukan hal remeh: ia menentukan saluran komunikasi kampanye mana yang efektif untuk setiap

segmen, dan sekaligus menjelaskan mengapa pesan yang sama dapat diterima secara berbeda oleh dua kelompok usia di kabupaten yang sama.

Perbedaan geografis antara pemilih perkotaan dan pedesaan di KTI menambah lapisan analisis yang tidak kalah penting. Pemilih di kawasan perkotaan seperti Kota Makassar atau Kota Kendari umumnya memiliki akses lebih luas terhadap informasi lintas platform, namun justru menunjukkan gejala *information overload* yang berujung pada apatis selektif — mereka memiliki pengetahuan tentang kandidat tetapi memilih untuk abstain karena tidak merasa ada kandidat yang mewakili identitas kelompok mereka secara memadai. Di sisi lain, pemilih desa di wilayah kepulauan atau pedalaman NTT, Maluku, dan Papua sering kali menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi secara persentase, tetapi keputusan memilihnya lebih terkonsolidasi melalui figur otoritas lokal seperti kepala adat atau tokoh agama, yang berarti pilihan individu kerap merupakan ekspresi identitas kolektif komunitas. Dinamika ini relevan dengan nilai Harmoni (Harmony) dalam pembentukan karakter ICHSA-N karena ia mengingatkan bahwa demokrasi lokal di KTI tidak dapat dibaca semata-mata melalui lensa individualisme rasional — ada dimensi relasional dan komunal yang bekerja secara nyata dalam proses pemilihan. Mengabaikan dimensi ini dalam analisis empiris berarti memproduksi kesimpulan yang tidak ekologis valid untuk konteks setempat.

Implikasi temuan komparatif ini terhadap kualitas demokrasi lokal bersifat langsung dan dapat diverifikasi. Jika pemilih pemula memutuskan berdasarkan rute perifer dan pemilih pedesaan memutuskan berdasarkan konsolidasi komunal, maka kualitas keputusan elektoral yang dihasilkan tidak semata-mata bergantung pada kecerdasan individu, melainkan pada kualitas ekosistem informasi dan independensi relasional yang tersedia bagi masing-masing segmen. Demokrasi lokal yang sehat membutuhkan kondisi di mana pemilih dari semua kelompok demografis dapat mengakses informasi yang cukup dan memiliki kebebasan untuk menerjemahkan informasi itu ke dalam preferensi yang relatif otonom. Data komparatif yang diperoleh melalui survei atau wawancara langsung dapat menjadi dasar rekomendasi konkret bagi KPU Daerah, Bawaslu, dan organisasi masyarakat sipil untuk merancang program pendidikan pemilih yang tersegmentasi — bukan satu program generik untuk semua kelompok. Inilah titik di mana riset psikologi sosial bertemu langsung dengan praktik tata kelola pemerintahan lokal yang responsif, dan di sinilah mahasiswa Ilmu Pemerintahan memiliki kontribusi nyata sebagai *technopreneur* demokrasi yang merancang solusi berbasis data untuk masalah partisipasi yang selama ini hanya direspons dengan pendekatan seragam.

Tabel 10.4 Perbandingan Pola Perilaku Pemilih Lintas Kelompok Demografis di Konteks Pilkada KTI

Dimensi Perbandingan	Pemilih Pemula (17–21 tahun)	Pemilih Senior (45 tahun ke atas)	Pemilih Perkotaan	Pemilih Pedesaan/Kepulauan KTI
Sumber informasi utama	Media sosial, konten visual kandidat	Jaringan tatap muka (pengajian, adat, arisan)	Multi-platform digital dan media massa	Tokoh otoritas lokal (adat, agama)
Mekanisme psikologis dominan	Rute perifer ELM (daya tarik personal, viralitas)	Heuristik partisan dan identitas komunitas (SIT)	Apatitis selektif akibat informasi overload	Konsolidasi identitas kolektif komunal (SIT)
Pola partisipasi	Partisipasi fluktuatif, rentan demobilisasi	Partisipasi relatif stabil lintas siklus pemilu	Partisipasi tinggi namun potensi golput selektif	Partisipasi tinggi dengan homogenitas pilihan
Kerentanan terhadap framing	Tinggi — responsif terhadap narasi emosional dan estetika visual	Sedang — lebih resisten terhadap framing baru	Tinggi — terpapar banyak framing yang saling kontradiksi	Rendah — framing disaring oleh tokoh otoritas
Implikasi untuk pendidikan pemilih	Program literasi digital dan berpikir kritis electoral	Penguatan kanal komunitas untuk verifikasi informasi	Program counternarrative dan deliberasi publik	Penguatan independensi pemilih dari tekanan komunal

[Gambar 10.4 belum diunggah]

Gambar 10.4 Diagram batang ganda yang membandingkan persentase partisipasi pemilih pemula versus pemilih senior dan pemilih perkotaan versus pemilih pedesaan pada dua atau tiga kasus Pilkada kabupaten/kota di KTI (misalnya Pilkada Sulawesi Tengah, NTT, atau Maluku),

ANALOGI

Analisis komparatif demografis ibarat dokter yang tidak hanya melihat suhu rata-rata tubuh pasien di sebuah bangsal rumah sakit, tetapi memeriksa suhu setiap pasien secara individual dan mengelompokkannya berdasarkan usia, riwayat penyakit, dan pola makan. Angka rata-rata bisa tampak normal padahal ada pasien yang demam tinggi dan ada yang justru hipotermia — perbedaan itu tersembunyi di balik agregat. Demikian pula, angka partisipasi Pilkada yang terlihat 'baik' di level kabupaten bisa menyembunyikan fakta bahwa pemilih pemula hampir tidak datang sementara pemilih senior mendominasi TPS, atau bahwa pemilih pedesaan memilih secara

kolektif sementara pemilih perkotaan terbelah tajam.

CONTOH

Mahasiswa mengambil kasus Pilkada Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Langkah pertama: unduh data rekapitulasi perolehan suara dan DPT per kecamatan dari situs KPU Provinsi Sulteng, lalu pisahkan kecamatan perkotaan (Sigi Biromaru) dari kecamatan pegunungan terpencil (Kulawi, Lindu). Langkah kedua: bandingkan persentase partisipasi, perolehan suara per pasangan calon, dan sebaran suara antarwilayah — apakah ada kandidat yang unggul dominan di wilayah tertentu namun kalah di wilayah lain? Langkah ketiga: lakukan tiga hingga lima wawancara singkat dengan pemilih dari masing-masing segmen menggunakan panduan wawancara yang telah dikembangkan di sub-bab C (instrumen survei), dan tanyakan sumber informasi utama mereka serta alasan utama memilih kandidat tertentu. Langkah keempat: buat tabel komparasi dua kelompok berdasarkan data KPU dan temuan wawancara, lalu hubungkan polanya dengan prediksi SIT (apakah pemilih Kulawi/Lindu memilih berdasarkan identitas etnis atau ketokohan adat?) dan ELM (apakah pemilih muda Sigi Biromaru lebih merespons kampanye media sosial kandidat?). Laporan akhir mendeskripsikan perbedaan pola, menilai kesesuaian dengan teori, dan merumuskan satu rekomendasi konkret bagi KPU Sigi untuk program sosialisasi pemilu yang lebih tersegmentasi.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi yang sering muncul: mahasiswa mengira bahwa tingkat partisipasi yang tinggi di suatu kelompok demografis secara otomatis berarti kelompok itu lebih demokratis atau lebih sadar politik. Pembetulan: tingkat partisipasi yang tinggi bisa merupakan produk tekanan sosial atau konsolidasi komunal yang justru menekan otonomi individu, bukan ekspresi kesadaran politik yang reflektif. Di banyak wilayah pedesaan KTI, kehadiran di TPS adalah kewajiban sosial yang diatur oleh norma komunitas, bukan pilihan personal yang didasarkan pada evaluasi terhadap kandidat. Sebaliknya, golput di kalangan pemilih perkotaan terdidik bisa merupakan bentuk protes deliberatif yang justru menunjukkan keterlibatan kritis terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, analisis komparatif yang baik tidak berhenti pada angka partisipasi, tetapi menelusuri mekanisme psikologis dan sosial yang menghasilkan angka tersebut.

RANGKUMAN

- Pengujian teori identitas sosial, framing, dan heuristik keputusan terhadap data Pilkada KTI mengungkapkan bahwa kesesuaian antara prediksi teoritis dan fakta lapangan bersifat parsial dan konteks-dependen.
- Social Identity Theory dan Elaboration Likelihood Model memiliki kekuatan penjas yang berbeda-beda tergantung pada karakteristik demografis pemilih dan konteks sosio-kultural lokal, sehingga tidak ada satu teori yang cukup mandiri.
- Instrumen survei yang valid secara konseptual mensyaratkan operasionalisasi variabel psikologis yang presisi, termasuk indikator observable untuk identitas sosial, persepsi framing, dan preferensi heuristik dalam setting electoral.
- Analisis komparatif lintas kelompok demografis membuka diskriminasi pola perilaku pemilih yang bermakna dan relevan bagi perancangan kebijakan partisipasi politik yang inklusif di Kawasan Timur Indonesia.
- Keterbatasan teoritis psikologi sosial arus utama dalam menjelaskan partisipasi politik KTI menegaskan urgensi integrasi perspektif lokal dan data primer sebagai landasan argumentasi ilmiah yang dapat diverifikasi.

REFERENSI

- Myers, D. G. (2013). *Social Psychology*. 11th Edition. McGraw-Hill.
- Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2016). *Social Psychology*. 9th Edition. Pearson.
- Hogg, M. A., & Vaughan, G. M. (2018). *Social Psychology*. 8th Edition. Pearson.
- Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2006). *Social Psychology*. 12th Edition. Pearson Prentice Hall.
- Cialdini, R. B. (2009). *Influence: Science and Practice*. 5th Edition. Pearson.
- Sarwono, S. W. (2015). *Psikologi Sosial*. Edisi 2. Salemba Humanika.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2022. *Standar Nasional Pendidikan (Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi)*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2024. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Outcome Based Education (OBE)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- Norris, Pippa. 2011. *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Putnam, Robert D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon and Schuster.

Sears, David O., Jonathan L. Freedman, dan L. Anne Peplau. 1994. Psikologi Sosial. Terjemahan Michael Adryanto. Jakarta: Erlangga.

Myers (2013); Aronson, Wilson, & Akert (2016); Hogg & Vaughan (2018); Taylor, Peplau, & Sears (2006); Norris (2011); Putnam (2000); Sarwono (2015).

PERTEMUAN 11

Opini Publik, Media Sosial, dan Polarisasi Politik

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:

58. Mengklasifikasikan minimal 10 unggahan/artikel digital ke dalam kategori opini pro, kontra, dan netral disertai justifikasi kriteria klasifikasi; Mengidentifikasi minimal 2 mekanisme psikologis (mis. echo chamber, confirmation bias) yang bekerja dalam sampel konten yang dianalisis dengan bukti kutipan konten; Menyajikan hasil analisis dalam bentuk matriks temuan yang memuat: sumber, mekanisme psikologis, dan potensi dampak terhadap polarisasi
59. Menjelaskan mekanisme pembentukan opini publik melalui proses kognisi sosial (selective exposure, echo chamber, dan confirmation bias) berdasarkan teori psikologi sosial yang relevan
60. Mengidentifikasi indikator polarisasi afektif dan polarisasi ideologis dalam konten digital Indonesia menggunakan kerangka analisis psikologi sosial
61. Merancang protokol analisis konten yang sistematis untuk mengklasifikasikan minimal 10 unggahan atau artikel digital berdasarkan dimensi psikologis (emosional versus rasional, in-group versus out-group framing)
62. Membedakan pola naratif yang memperparah polarisasi dari pola naratif yang mempromosikan dialog konstruktif pada konten media sosial yang dianalisis

Pendahuluan

Pertemuan ini merupakan kelanjutan langsung dari analisis perilaku pemilih lokal pada Pertemuan 10, yang telah mengungkap bagaimana faktor psikologis memengaruhi pilihan politik individual dalam konteks Pilkada. Kini kajian diperluas ke dimensi kolektif: bagaimana jutaan individu membentuk opini publik secara bersama-sama di tengah ekosistem media sosial, dan mengapa proses itu kerap berujung pada perpecahan afektif maupun ideologis. Memahami mekanisme ini bukan sekadar kepentingan akademik—bagi calon penyelenggara pemerintahan di Kawasan Timur Indonesia, kemampuan membaca dinamika opini digital adalah prasyarat untuk merancang komunikasi publik yang menjembatani, bukan mempertajam, perbedaan di tengah masyarakat yang majemuk.

A. Pembentukan Opini Publik Melalui Kognisi Sosial

Opini publik tidak terbentuk secara tiba-tiba sebagai reaksi spontan terhadap suatu peristiwa, melainkan melewati serangkaian proses kognisi sosial yang berlapis dan saling memengaruhi. Kognisi sosial merujuk pada cara individu memproses, menyimpan, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial di sekitarnya, termasuk informasi politik yang ia temui setiap hari di media sosial. Dalam konteks pemilu atau kebijakan pemerintah, seorang warga tidak menyerap seluruh informasi secara setara; ia secara aktif memilih, menyaring, dan menafsirkan informasi sesuai dengan skema kognitif yang sudah ia miliki sebelumnya. Proses inilah yang menjelaskan mengapa dua orang yang membaca berita yang sama dapat tiba pada kesimpulan yang berlawanan, dan mengapa opini publik di Indonesia seringkali terbelah tajam pada isu-isu seperti kebijakan ibu kota nusantara, hukum pidana, atau desentralisasi di Kawasan Timur Indonesia.

Tiga mekanisme kognisi sosial yang paling sentral dalam pembentukan opini publik di era digital adalah selective exposure, echo chamber, dan confirmation bias, dan ketiganya bekerja secara berurutan seperti mata rantai. Selective exposure adalah kecenderungan individu untuk secara sengaja atau tidak sadar hanya memilih sumber informasi yang sesuai dengan keyakinan awalnya; seorang pendukung satu partai politik akan cenderung berlangganan kanal berita dan akun media sosial yang sejalan dengan pandangannya. Hasil dari pemilihan yang terus-menerus ini adalah echo chamber, yaitu ruang informasi tertutup di mana individu hanya terpapar pada pandangan yang seragam sehingga keyakinannya terus diperkuat tanpa pernah ditantang oleh perspektif berbeda; dalam konteks pemerintahan lokal, warga di satu kabupaten bisa hidup dalam ekosistem informasi yang sama sekali berbeda dari warga kabupaten tetangga meski membahas kebijakan yang sama. Confirmation bias kemudian mengunci siklus ini: ketika seseorang sesekali berhadapan dengan informasi yang bertentangan, mekanisme kognitif secara otomatis mencari kelemahan argumen tersebut dan mengabaikan kekuatannya, sehingga kepercayaan awal justru semakin mengakar. Ketiga mekanisme ini bukan kelemahan moral individu, melainkan fitur evolusioner otak manusia yang berfungsi menghemat energi kognitif, namun dalam lingkungan media sosial yang dirancang oleh algoritma untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna, fitur ini menjadi penggerak utama polarisasi.

Secara teoritis, landasan analisis ini bersandar pada teori kognisi sosial Bandura yang menekankan peran representasi mental dalam membentuk perilaku, serta pada model elaboration likelihood yang membedakan jalur pengolahan informasi secara sentral (analitis-rasional) dari jalur perifer (berbasis isyarat emosional dan kepercayaan pada sumber). Ketika individu mengolah konten politik melalui jalur perifer, yang

sering terjadi ketika pengguna menggulir laman media sosial dengan cepat, opini terbentuk berdasarkan siapa yang menyampaikan dan bagaimana framing-nya, bukan berdasarkan substansi argumen; inilah yang menjelaskan mengapa tokoh dengan jutaan pengikut mampu menggeser opini publik hanya dengan satu unggahan tanpa bukti faktual. Pemahaman atas dua jalur ini penting bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan karena aparaturnya negara yang ingin mengomunikasikan kebijakan secara efektif perlu merancang pesan yang menarget jalur sentral, bukan semata mengandalkan otoritas jabatan. Nilai integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut bahwa komunikasi publik dibangun di atas substansi dan transparansi, bukan manipulasi isyarat perifer yang memanfaatkan bias kognitif warga.

Tabel 11.1 Perbandingan Tiga Mekanisme Kognisi Sosial dalam Pembentukan Opini Publik

Mekanisme	Definisi Operasional	Cara Kerja di Media Sosial	Dampak terhadap Opini Publik
Selective Exposure	Pemilihan aktif sumber informasi yang selaras dengan keyakinan awal individu	Pengguna mengikuti, menyukai, dan berbagi akun atau konten yang sependapat; algoritma memperkuat pilihan ini	Persepsi bahwa mayoritas sepakat dengan pandangan sendiri; basis opini menyempit
Echo Chamber	Ruang informasi tertutup di mana pandangan yang beredar bersifat homogen dan saling memperkuat	Grup WhatsApp komunitas, kolom komentar yang bersifat seragam, fitur rekomendasi konten otomatis	Opini mengeras dan sulit direvisi meski ada fakta baru; polarisasi antara kelompok meningkat
Confirmation Bias	Kecenderungan mencari, menafsirkan, dan mengingat informasi yang mengonfirmasi keyakinan yang sudah ada	Pengguna menolak tautan yang disajikan pihak lawan dan menerima klaim pihak sendiri tanpa verifikasi	Opini yang salah secara faktual dapat bertahan lama; koreksi publik menjadi tidak efektif

[Gambar 11.1 belum diunggah]

Gambar 11.1 Diagram alur tiga tahap: (1) kotak berlabel Selective Exposure dengan ikon pengguna memilih sumber berita; anak panah ke (2) kotak berlabel Echo Chamber dengan ikon gelembung informasi tertutup berisi wajah-wajah serupa; anak panah ke (3) kotak berlabel C

ANALOGI

Bayangkan Anda sedang membangun playlist musik secara otomatis: sistem hanya merekomendasikan lagu-lagu yang mirip dengan lagu yang pernah Anda putar. Lama-kelamaan Anda merasa hanya genre itulah yang bernilai, padahal ribuan genre lain tetap ada dan dinikmati jutaan orang lain. Persis seperti itulah algoritma media sosial bekerja terhadap informasi politik: Anda tidak disugahi keseluruhan lanskap opini, melainkan hanya echo chamber dari pandangan Anda sendiri, sehingga Anda secara keliru meyakini bahwa pandangan Anda adalah suara mayoritas.

CONTOH

Kasus konkret dapat diamati pada diskusi kebijakan pemekaran provinsi di Papua yang ramai di Twitter/X pada 2022. Langkah pertama: seorang pengguna yang mendukung pemekaran cenderung mengikuti akun-akun pro-pemekaran dan mengabaikan akun yang kritis (selective exposure). Langkah kedua: berinteraksi setiap hari di dalam jaringan itu mengukuhkan keyakinan bahwa pemekaran adalah solusi terbaik dan hampir semua orang setuju, padahal suara kontra sama-sama keras di jaringan yang berbeda (echo chamber). Langkah ketiga: ketika peneliti atau jurnalis memaparkan data bahwa kapasitas fiskal daerah otonomi baru masih lemah, pendukung pemekaran cenderung mempertanyakan kredibilitas peneliti atau mencari studi lain yang mendukung posisinya, bukan mengkaji datanya secara netral (confirmation bias). Hasil akhirnya adalah dua kelompok opini publik yang masing-masing merasa memiliki dasar yang kuat, padahal keduanya memproses informasi dari kolam data yang berbeda dan melalui filter yang berbeda pula.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi yang paling umum di kalangan mahasiswa adalah anggapan bahwa echo chamber dan confirmation bias hanya menimpa orang yang berpendidikan rendah atau yang tidak kritis. Pembetulannya: riset psikologi sosial, termasuk studi Sunstein pada *What Is Populism?* dan meta-analisis Bail et al. (2018), menunjukkan bahwa individu berpendidikan tinggi justru lebih mahir mencari dan mengonstruksi argumen yang mengonfirmasi keyakinan mereka, sehingga bias mereka lebih sulit dipatahkan. Dalam konteks Ilmu Pemerintahan, ini berarti bahkan birokrat dan akademisi pun tidak kebal terhadap mekanisme ini, dan solusinya bukan sekadar menambah literasi informasi, melainkan merancang struktur deliberasi publik yang secara institusional memaksa paparan terhadap perspektif yang berbeda.

B. Polarisasi Afektif dan Ideologis: Definisi serta Indikator Empiris di Konteks Digital Indonesia

Polarisasi politik dalam kajian psikologi sosial dibedakan menjadi dua bentuk yang secara konseptual berbeda namun saling memperkuat satu sama lain di ruang digital. Polarisasi ideologis merujuk pada pelebaran jarak substansial antara dua kelompok dalam hal posisi kebijakan, nilai, dan keyakinan normatif, misalnya perbedaan pandangan yang semakin tajam tentang desentralisasi, kebijakan agraria, atau representasi daerah di Indonesia Timur. Polarisasi afektif, sebaliknya, tidak selalu mensyaratkan perbedaan ideologi yang nyata, melainkan mengacu pada intensitas perasaan negatif, ketidakpercayaan, bahkan kebencian terhadap kelompok lawan, terlepas dari apakah perbedaan kebijakan di antara mereka sebenarnya signifikan atau tidak. Iyengar dkk. menegaskan bahwa polarisasi afektif justru lebih berbahaya dalam konteks demokrasi karena ia menggerakkan perilaku warga berdasarkan identitas kelompok, bukan rasionalitas kebijakan [Iyengar et al. dalam Myers 2012]. Di Indonesia, kedua bentuk polarisasi ini tampil bersamaan, khususnya dalam kontestasi pemilu dan debat kebijakan publik yang diviralkan melalui Twitter/X, TikTok, dan grup WhatsApp.

Dalam konteks digital Indonesia, indikator polarisasi afektif dapat diamati secara empiris melalui beberapa penanda linguistik dan perilaku dalam konten daring. Pertama, framing in-group versus out-group yang ditandai oleh penggunaan dikotomi leksikal seperti 'kami yang benar' versus 'mereka yang sesat', atau label identitas yang bermuatan emosi negatif seperti 'kadrun' dan 'cebong' yang bermunculan pasca Pilpres 2019. Kedua, nada afektif negatif yang dominan, yaitu konten yang secara konsisten mengatribusikan niat buruk, kebobrokan moral, atau ancaman eksistensial kepada kelompok lain tanpa argumentasi berbasis fakta. Ketiga, engagement asimetris, yakni pola di mana unggahan bernada kemarahan atau jijik mendapatkan amplifikasi jauh lebih besar daripada unggahan analitis atau netral, sebuah mekanisme yang diperkuat oleh algoritma platform berbasis interaksi. Keempat, dehumanisasi simbolis, yaitu representasi kelompok lawan sebagai bukan manusia penuh, binatang, atau musuh bangsa, yang dalam psikologi sosial diidentifikasi sebagai prekursor tindakan kekerasan [Myers 2012]. Kelima, penolakan terhadap sumber informasi lintas kelompok, yang mencerminkan bahwa identitas afektif telah mengalahkan kapasitas evaluasi epistemis.

Polarisasi ideologis di ruang digital Indonesia dapat diidentifikasi melalui indikator yang berbeda. Indikator pertama adalah divergensi posisi kebijakan yang eksplisit dan terukur, misalnya dua kelompok pengguna media sosial yang secara konsisten mengambil posisi berlawanan terhadap isu otonomi daerah, investasi asing, atau

anggaran pendidikan. Indikator kedua adalah penyempitan wacana menjadi pilihan biner, di mana konten cenderung menyajikan setiap isu kebijakan kompleks sebagai pilihan mutlak antara dua kutub tanpa ruang untuk posisi moderat. Indikator ketiga adalah konsistensi ideologis lintas isu, artinya individu atau akun yang mengambil posisi X pada satu isu cenderung mengambil posisi yang dapat diprediksi pada isu lain yang berbeda, menunjukkan koherensi ideologis yang meningkat. Berbeda dari polarisasi afektif yang terbaca dari emosi dan identitas, polarisasi ideologis terbaca dari substansi argumen dan konsistensi posisi. Penting dicatat bahwa di Indonesia, polarisasi ideologis sering kali dikemas dalam bahasa identitas keagamaan dan kedaerahan, sehingga analisis konten perlu memisahkan antara perbedaan pandangan substantif yang sah dalam demokrasi dan kebencian berbasis identitas yang merusak kohesi sosial [Baron & Byrne dalam Myers 2012].

Kedua bentuk polarisasi ini memiliki konsekuensi psikologis sosial yang berbeda namun berlapis dalam dinamika pemerintahan dan partisipasi publik. Polarisasi ideologis yang sehat, yaitu perbedaan posisi kebijakan yang diartikulasikan secara rasional, sebenarnya merupakan bagian normal dari demokrasi deliberatif dan dapat mendorong akuntabilitas pemerintah. Namun ketika polarisasi afektif mendominasi, warga tidak lagi mengevaluasi kebijakan berdasarkan merit melainkan berdasarkan identitas aktor yang mengusulkannya, sebuah kondisi yang disebut *affective tribal reasoning*. Di lingkungan Kawasan Timur Indonesia, kondisi ini diperparah oleh ketimpangan akses informasi yang valid, sehingga warga lebih bergantung pada narasi kelompok primer sebagai heuristik evaluasi kebijakan. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan perlu menginternalisasi nilai integritas analitis dalam menilai konten digital, yaitu kemampuan membedakan apakah suatu perdebatan publik benar-benar mencerminkan perbedaan substantif kebijakan atau sekadar ekspresi permusuhan berbasis identitas, karena kekeliruan dalam membedakan keduanya akan menghasilkan rekomendasi kebijakan komunikasi yang tidak tepat sasaran.

Tabel 11.2 Perbandingan Indikator Empiris Polarisasi Afektif dan Polarisasi Ideologis pada Konten Digital Indonesia

Dimensi Perbandingan	Polarisasi Afektif	Polarisasi Ideologis
Definisi inti	Intensitas perasaan negatif terhadap out-group tanpa mensyaratkan perbedaan kebijakan	Pelebaran jarak posisi pada isu kebijakan dan nilai normatif
Basis penggerak perilaku	Identitas kelompok dan emosi (kemarahan, jijik, takut)	Keyakinan substantif tentang kebijakan dan ideologi
Indikator linguistik dalam	Label identitas bernada	Posisi kebijakan eksplisit,

Dimensi Perbandingan	Polarisasi Afektif	Polarisasi Ideologis
konten	kebencian, dikotomi moral, dehumanisasi simbolis	argumen nilai, konsistensi lintas isu
Contoh konten Indonesia	Penggunaan label 'kadrun'/'cebong' tanpa konteks kebijakan	Perdebatan terstruktur pro-kontra otonomi fiskal daerah
Mekanisme psikologis utama	In-group favoritism, out-group derogation, affective tribal reasoning	Selective exposure, confirmation bias, attitude polarization
Dampak terhadap pemerintahan	Merusak kepercayaan institusi dan menghambat dialog lintas kelompok	Dapat mempertajam akuntabilitas jika berbasis argumen rasional; destruktif jika ideologi menutup kompromi
Cara mengidentifikasi di ruang digital	Analisis nada afektif, pola engagement, framing identitas	Analisis posisi kebijakan, konsistensi argumentasi, divergensi platform

[Gambar 11.2 belum diunggah]

Gambar 11.2 Diagram dua sumbu: sumbu horizontal menunjukkan spektrum dari 'polarisasi afektif rendah' ke 'polarisasi afektif tinggi'; sumbu vertikal dari 'polarisasi ideologis rendah' ke 'polarisasi ideologis tinggi'. Empat kuadran dilabeli: (1) kanan-atas = kondisi

ANALOGI

Bayangkan dua kelompok suporter sepak bola yang mendukung kesebelasan berbeda. Polarisasi ideologis ibarat kedua kelompok memperdebatkan secara serius tentang strategi bermain mana yang lebih efektif secara teknis, sebuah perbedaan pendapat yang substantif dan dapat diverifikasi. Polarisasi afektif ibarat kedua kelompok itu saling membenci bukan karena perbedaan pendapat tentang strategi, melainkan semata karena identitas kostum yang dikenakan, sehingga bahkan jika kedua kesebelasan bermain dengan strategi yang sama, permusuhan tetap membara. Di ruang digital Indonesia, banyak perdebatan yang secara permukaan tampak ideologis ternyata sesungguhnya adalah ekspresi permusuhan berbasis identitas belaka, kostum yang berbeda tanpa perbedaan taktik yang nyata.

CONTOH

Seorang mahasiswa menganalisis 15 unggahan Twitter/X terkait debat kebijakan

pemindahan ibu kota negara. Langkah pertama, ia mengidentifikasi unggahan yang secara eksplisit menyerang identitas pendukung kebijakan dengan label seperti 'antek oligarki' atau 'penghianat Jawa' tanpa menyebut argumen kebijakan apa pun, lalu mengklasifikasikannya sebagai indikator polarisasi afektif karena berbasis permusuhan identitas. Langkah kedua, ia mengidentifikasi unggahan yang mengargumentasikan bahwa pemindahan ibu kota akan mengurangi ketimpangan infrastruktur Kawasan Timur Indonesia versus unggahan yang berpendapat pemindahan memboroskan anggaran pendidikan, lalu mengklasifikasikannya sebagai indikator polarisasi ideologis karena mencerminkan perbedaan posisi kebijakan substantif yang terukur. Langkah ketiga, ia mencatat bahwa unggahan afektif mendapatkan rata-rata 2.400 retweet sementara unggahan ideologis hanya 340 retweet, yang menjadi bukti empiris bahwa algoritma platform memperkuat polarisasi afektif secara tidak proporsional. Temuan ini kemudian dituangkan dalam matriks yang memuat sumber, jenis polarisasi, mekanisme psikologis pendukung, dan potensi dampak terhadap kualitas diskursus publik.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi yang sering muncul adalah anggapan bahwa polarisasi selalu buruk dan harus dihilangkan seluruhnya dari ruang publik. Pembetulannya: polarisasi ideologis dalam kadar tertentu adalah tanda demokrasi yang hidup, karena perbedaan posisi kebijakan yang diartikulasikan secara rasional justru mendorong akuntabilitas dan pilihan publik yang bermakna. Yang harus diidentifikasi dan direduksi adalah polarisasi afektif, yaitu permusuhan berbasis identitas yang menghalangi warga mengevaluasi kebijakan secara objektif. Kekeliruan menyamakan keduanya akan membuat analisis kebijakan merekomendasikan pendekatan yang salah sasaran, misalnya berupaya meredam semua perbedaan pandangan kebijakan padahal yang perlu ditangani adalah eskalasi kebencian berbasis identitas.

C. Protokol Analisis Konten Berbasis Psikologi Sosial untuk Konten Digital

Analisis konten berbasis psikologi sosial bukan sekadar membaca dan menilai sebuah unggahan secara intuitif, melainkan sebuah prosedur sistematis yang mengikuti tahapan terstandar agar temuan dapat direplikasi dan dipertanggungjawabkan secara akademis. Protokol ini berfungsi seperti resep masakan: tanpa urutan langkah yang jelas dan takaran yang terukur, dua peneliti yang menganalisis konten yang sama bisa menghasilkan kesimpulan yang bertolak belakang. Dalam konteks psikologi sosial,

protokol analisis konten dirancang untuk mengungkap mekanisme psikologis yang tersembunyi di balik pilihan kata, gambar, tagar, dan struktur narasi suatu unggahan digital. Standar ini penting khususnya di Kawasan Timur Indonesia, di mana konten lokal sering kali mencampurkan bahasa daerah, bahasa gaul digital, dan simbol budaya yang memerlukan instrumen analisis yang peka konteks.

Tahap pertama protokol adalah penentuan unit analisis dan pengumpulan sampel yang representatif. Peneliti menetapkan terlebih dahulu apa yang dimaksud satu unit analisis, apakah satu unggahan, satu komentar, satu artikel, atau satu utas (thread), lalu menentukan platform, rentang waktu, dan kata kunci penelusuran yang konsisten. Tahap kedua adalah pengodean dimensi psikologis: setiap unit diberi kode berdasarkan setidaknya dua dimensi, yaitu dimensi emosional-rasional (apakah pesan mengandalkan seruan perasaan takut, marah, bangga, atau menyajikan data dan argumen logis) dan dimensi in-group versus out-group framing (apakah narasi membangun batas tegas antara 'kami yang benar' dan 'mereka yang salah'). Tahap ketiga adalah identifikasi mekanisme psikologis yang aktif, misalnya apakah konten memperkuat selective exposure dengan hanya menampilkan bukti yang menguntungkan satu pihak, atau apakah konten memperlihatkan ciri echo chamber dengan kolom komentar yang seragam tanpa satu pun pendapat berbeda. Keseluruhan hasil dicatat dalam matriks temuan yang memuat kolom sumber, mekanisme psikologis teridentifikasi, kutipan bukti dari konten, dan penilaian potensi dampak terhadap polarisasi.

Tahap keempat dan paling kritis adalah uji reliabilitas antarpengode (intercoder reliability). Dua pengode yang berbeda menganalisis sekitar dua puluh persen sampel yang sama secara independen, lalu menghitung tingkat kesepakatan menggunakan koefisien Cohen's Kappa; nilai di atas 0,70 dianggap memadai untuk penelitian sosial. Tahap ini mencerminkan nilai Integrity dalam tradisi akademis ICHSA-N: peneliti tidak mengklaim objektivitas tanpa mengujinya secara empiris. Tahap kelima adalah interpretasi dan penarikan kesimpulan, di mana pola yang muncul dari matriks temuan dianalisis untuk menjawab pertanyaan tentang dominasi mekanisme psikologis tertentu dan hubungannya dengan potensi eskalasi polarisasi. Pada tahap ini kreativitas analitis (nilai Creativity) dibutuhkan agar peneliti tidak sekadar mendaftar temuan, tetapi mampu menjelaskan mengapa suatu mekanisme lebih dominan pada platform atau isu tertentu di Indonesia.

Tabel 11.3 Matriks Protokol Analisis Konten Berbasis Psikologi Sosial

Tahap	Aktivitas Utama	Instrumen/Alat	Luaran yang Diharapkan
1. Penentuan Sampel	Tetapkan unit analisis,	Panduan sampling,	Daftar sampel

Tahap	Aktivitas Utama	Instrumen/Alat	Luaran yang Diharapkan
	platform, rentang waktu, dan kata kunci; kumpulkan minimal 10 unggahan/artikel	lembar pencatatan URL dan metadata	terverifikasi dengan metadata lengkap (platform, tanggal, akun)
2. Pengodean Dimensi Psikologis	Beri kode tiap unit pada dimensi emosional-rasional dan in-group/out-group framing	Rubrik pengodean dengan definisi operasional dan contoh kode	Lembar kode per unit dengan justifikasi kutipan dari konten
3. Identifikasi Mekanisme Psikologis	Tandai mekanisme aktif: selective exposure, confirmation bias, echo chamber, dll.	Daftar periksa mekanisme psikologis beserta indikator perilakunya	Kolom mekanisme pada matriks temuan disertai bukti kutipan konten
4. Uji Reliabilitas Antarpengode	Dua pengode menganalisis 20% sampel secara independen; hitung Cohen's Kappa	Kalkulator Cohen's Kappa, lembar rekonsiliasi perbedaan	Nilai Kappa $\geq 0,70$; catatan rekonsiliasi perbedaan interpretasi
5. Interpretasi dan Kesimpulan	Analisis pola dominan; hubungkan dengan potensi dampak polarisasi	Matriks temuan lengkap, panduan interpretasi berbasis teori	Laporan analisis dengan narasi temuan dan rekomendasi kontekstual

[Gambar 11.3 belum diunggah]

Gambar 11.3 Diagram alir lima tahap protokol analisis konten berbasis psikologi sosial: kotak bertahap dari kiri ke kanan (Penentuan Sampel, Pengodean Dimensi, Identifikasi Mekanisme, Uji Reliabilitas, Interpretasi) dengan anak panah maju dan satu anak panah umpan ba

ANALOGI

Protokol ini bekerja seperti prosedur triase di instalasi gawat darurat: setiap pasien (konten) yang masuk tidak langsung ditangani berdasarkan kesan pertama petugas, melainkan diperiksa melalui urutan cek yang sama, mulai dari identitas, keluhan utama, tanda vital, hingga prioritas penanganan. Tanpa triase yang terstandar, pasien kritis bisa terlewat dan pasien ringan justru ditangani lebih dulu. Demikian pula tanpa protokol analisis, konten yang tampak netral bisa luput dari identifikasi mekanisme echo chamber yang sesungguhnya aktif di dalamnya.

CONTOH

Seorang mahasiswa Ilmu Pemerintahan UNISAN menganalisis isu pembangunan IKN di media sosial. Langkah 1: ia mengumpulkan 12 unggahan dari Twitter/X dan Instagram dalam periode satu minggu menggunakan kata kunci 'IKN Nusantara' dan mencatat metadata setiap unggahan. Langkah 2: ia mengode unggahan pertama, sebuah video berisi pernyataan pejabat dengan statistik pertumbuhan ekonomi, sebagai 'dominan rasional' dan 'netral-informatif' karena tidak menampilkan framing in-group/out-group eksplisit. Langkah 3: ia menemukan bahwa tujuh dari dua belas unggahan mengandung tanda confirmation bias karena hanya mengutip satu sisi argumen dan mengabaikan data pembandingan. Langkah 4: rekan sekelompok mengode ulang tiga unggahan yang sama dan keduanya memperoleh Kappa 0,76, berarti reliabilitas memadai. Langkah 5: dari matriks temuan, disimpulkan bahwa konten bernuansa afektif negatif cenderung memperoleh interaksi lebih tinggi, mengindikasikan potensi eskalasi polarisasi afektif pada isu pembangunan kawasan.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi yang paling umum di kalangan mahasiswa adalah anggapan bahwa analisis konten cukup dilakukan secara kualitatif murni berdasarkan 'rasa bahasa' peneliti, sehingga protokol formal dianggap berlebihan dan membuang waktu. Pembetulannya: analisis yang bergantung sepenuhnya pada intuisi menghasilkan temuan yang tidak dapat direplikasi dan rentan terhadap bias pribadi peneliti, yang justru merupakan mekanisme psikologis yang ingin kita identifikasi pada orang lain. Protokol terstandar bukan mempersulit, melainkan memastikan bahwa kesimpulan tentang polarisasi di konten digital benar-benar mencerminkan pola dalam data, bukan cerminan keyakinan awal peneliti itu sendiri.

D. Naratif Pemecah versus Naratif Pemersatu pada Konten Media Sosial

Setiap konten yang beredar di media sosial membawa muatan naratif yang secara psikologis dapat mendorong kohesi sosial atau justru memperdalam jurang pemisah antarkelompok. Dalam psikologi sosial, naratif pemecah (divisive narrative) didefinisikan sebagai pola penceritaan yang secara konsisten mengonstruksi realitas sosial melalui pembedaan in-group versus out-group yang keras, mengatribusikan sifat negatif permanen kepada kelompok lain, dan memperkuat identitas sosial partisanship dengan cara merendahkan. Naratif semacam ini bekerja melalui

mekanisme dehumanisasi simbolik, yaitu penggunaan metafora, label, atau diksi yang mereduksi kelompok lain menjadi ancaman abstrak alih-alih manusia dengan posisi yang dapat didiskusikan. Sebaliknya, naratif pemersatu (*bridging narrative*) mengonstruksi realitas dengan menonjolkan *superordinate identity*, yaitu identitas bersama yang melampaui batas-batas kelompok partisan, sehingga membuka ruang dialog konstruktif.

Perbedaan antara kedua pola naratif ini tidak terletak semata-mata pada topik yang dibahas, melainkan pada struktur retorik dan muatan emosional yang digunakan. Naratif pemecah cenderung mengandalkan emosi moral berbasis kebencian dan ketakutan seperti jijik, marah, dan cemas terhadap ancaman kelompok luar, sedangkan naratif pemersatu lebih banyak mengaktifkan emosi prososial seperti empati, harapan bersama, dan rasa tanggung jawab kolektif. Penelitian dalam kerangka *moral foundations theory* menunjukkan bahwa narasi yang menyentuh fondasi moral *purity/degradation* dan *loyalty/betrayal* cenderung menghasilkan polarisasi afektif yang lebih tajam dibandingkan narasi yang menyentuh fondasi *care/harm*. Di ruang digital Indonesia, pola ini tampak misalnya pada kontestasi framing isu kebijakan publik regional: unggahan yang menggunakan label kelompok etnis atau agama sebagai agen penyebab masalah sosial menunjukkan ciri naratif pemecah yang khas, sementara unggahan yang memaparkan data perbandingan kebijakan antardaerah dan mengundang respons berbasis fakta cenderung masuk kategori naratif pemersatu.

Untuk membedakan kedua pola naratif secara operasional, seorang analis konten perlu memeriksa setidaknya empat penanda linguistik-psikologis: pertama, penggunaan kata ganti orang jamak eksklusif (*kami* versus *mereka*) secara dominan; kedua, kehadiran atribusi kausal yang bersifat disposisional dan permanen terhadap kelompok luar; ketiga, ada-tidaknya ruang *epistemic openness*, yaitu apakah unggahan memberi celah bagi kemungkinan kebenaran pada pihak berbeda; dan keempat, nada ajakan yang tertera eksplisit maupun implisit, apakah menuju tindakan konfrontatif atau menuju deliberasi. Kerangka analisis ini relevan dengan nilai *Harmony* dalam tradisi akademik UNISAN, di mana kemampuan membaca dan memilah konten digital secara kritis merupakan bagian dari tanggung jawab intelektual warga kampus yang sekaligus mencerminkan jiwa *technopreneurship* bertanggung jawab dalam mengelola informasi publik. Mahasiswa ilmu pemerintahan secara khusus perlu menguasai pembedaan ini karena kebijakan publik di Kawasan Timur Indonesia kerap menjadi objek kedua jenis naratif sekaligus, tergantung aktor dan platform yang menyebarkannya.

Penting dipahami bahwa naratif pemersatu tidak identik dengan naratif yang menghindari konflik atau bersifat netral-basa. Narasi yang menampilkan keberanian

moral untuk menyebutkan ketidakadilan struktural, namun tetap mempertahankan pembungkaman manusiawi terhadap semua pihak dan menawarkan jalur penyelesaian, tetap masuk kategori pemersatu meskipun bernada kritis. Ini berbeda dari naratif yang bersikap seolah objektif tetapi secara selektif hanya menyajikan fakta yang memperparah stereotip kelompok tertentu. Dengan demikian, dimensi yang membedakan bukan keras-lemahnya nada, melainkan apakah naratif tersebut menutup atau membuka kemungkinan dialog.

Tabel 11.4 Perbandingan Penanda Naratif Pemecah dan Naratif Pemersatu pada Konten Digital

Dimensi Analisis	Naratif Pemecah	Naratif Pemersatu
Pembungkaman identitas	In-group versus out-group keras; atribusi negatif permanen pada kelompok luar	Superordinate identity; penekanan kesamaan tujuan lintas kelompok
Muatan emosi dominan	Kemarahan, jijik, ketakutan terhadap ancaman eksternal (moral foundations: purity, loyalty)	Empati, harapan, tanggung jawab bersama (moral foundations: care, fairness)
Struktur retorik	Klaim absolut; tidak memberi ruang epistemic openness; ajakan konfrontatif	Klaim bersyarat; membuka kemungkinan dialog; ajakan deliberatif
Penggunaan bahasa	Kata ganti eksklusif dominan (kami vs. mereka); label dehumanisasi; diksi ancaman	Kata ganti inklusif (kita); diksi permasalahan bersama; bahasa yang memanusiakan
Atribusi kausalitas	Disposisional dan permanen: kelompok lain sebagai sumber masalah inheren	Situasional dan dapat diubah: masalah bersumber dari kondisi yang bisa diperbaiki
Potensi dampak polarisasi	Memperkuat polarisasi afektif dan ideologis; menurunkan kepercayaan antargolongan	Meredam polarisasi afektif; membuka ruang rekonsiliasi dan kebijakan inklusif

[Gambar 11.4 belum diunggah]

Gambar 11.4 Diagram alur dua jalur paralel: jalur kiri menggambarkan proses naratif pemecah mulai dari stimulus peristiwa politik, pembungkaman in-group/out-group, aktivasi emosi moral negatif, penguatan echo chamber, hingga polarisasi afektif; jalur kanan menggambar

ANALOGI

Bayangkan sebuah ruang rapat warga di sebuah kelurahan di Sulawesi Tenggara yang membahas rencana pembangunan jalan. Fasilitator pertama membuka diskusi dengan kalimat: 'Warga RT 3 selalu menghalangi kemajuan kampung kita.' Kalimat

itu langsung membelah ruangan menjadi dua kubu dan menutup dialog. Fasilitator kedua membuka dengan kalimat: 'Kita semua ingin jalan ini selesai sebelum musim hujan; apa kekhawatiran masing-masing yang perlu kita selesaikan bersama?' Kalimat kedua mempertahankan ruang untuk setiap suara. Konten media sosial bekerja persis seperti dua fasilitator itu: struktur kalimat pembuka, pilihan kata, dan bingkai emosional yang dipilih menentukan apakah audiens akan saling berhadapan atau saling mendengarkan.

CONTOH

Kasus analisis bertahap: ambil dua unggahan Twitter/X tentang isu kebijakan pemekaran daerah di Papua. Unggahan A berbunyi: 'Kaum pendatang itu sengaja didesain untuk menguasai tanah kami; jangan percaya janji pemerintah yang berkhianat.' Langkah 1, identifikasi pembingkai: terdapat dikotomi kami (penduduk asli) versus mereka (pendatang dan pemerintah) yang bersifat permanen. Langkah 2, periksa atribusi kausal: masalah pemekaran dikaitkan dengan niat jahat disposisional kelompok luar, bukan pada proses kebijakan yang dapat diperbaiki. Langkah 3, ukur muatan emosi: dominan kemarahan dan ketidakpercayaan; tidak ada ajakan deliberatif. Kesimpulan: naratif pemecah. Unggahan B berbunyi: 'Proses konsultasi pemekaran di Papua perlu melibatkan lembaga adat secara formal sebelum keputusan diambil; ini bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang prosedur yang adil untuk semua.' Langkah 1: pembingkai superordinate yaitu prosedur adil untuk semua. Langkah 2: atribusi kausal pada proses yang dapat diubah. Langkah 3: muatan emosi berbasis fairness dan harapan prosedural. Kesimpulan: naratif pemersatu meski tetap kritis terhadap kebijakan.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi yang paling sering muncul adalah anggapan bahwa naratif pemersatu berarti naratif yang tidak berpihak, tidak mengkritik, atau bersifat abu-abu tanpa pendirian. Pembetulan: naratif pemersatu justru dapat mengandung kritik tajam terhadap ketidakadilan, namun kritik itu dibingkai sebagai masalah sistemik yang dapat diselesaikan bersama, bukan sebagai bukti kejahatan inheren suatu kelompok. Sebaliknya, miskonsepsi kedua adalah anggapan bahwa semua konten yang tampak 'menyerang kebijakan pemerintah' otomatis bersifat memecah belah. Pembetulan: konten kritis berbasis data, yang membingkai pemerintah sebagai aktor yang akuntabel dan dapat dikoreksi, tetap masuk kategori naratif pemersatu selama tidak menggunakan dehumanisasi atau atribusi permanen terhadap kelompok tertentu.

RANGKUMAN

- Opini publik terbentuk melalui proses kognisi sosial—terutama selective exposure, echo chamber, dan confirmation bias—yang diperkuat oleh algoritma platform digital sehingga pandangan individu makin terkonsolidasi dalam ruang informasi yang tertutup.
- Polarisasi afektif merujuk pada penguatan perasaan negatif terhadap out-group, sedangkan polarisasi ideologis mencerminkan jarak substantif antar posisi kebijakan; keduanya memiliki indikator empiris yang dapat dideteksi pada konten digital Indonesia.
- Protokol analisis konten berbasis psikologi sosial menyediakan prosedur sistematis untuk mengklasifikasikan unggahan digital ke dalam dimensi emosional-rasional dan framing in-group/out-group, sehingga temuan dapat disajikan dalam matriks yang terstandar dan dapat direplikasi.
- Naratif yang memperparah polarisasi umumnya mengandalkan bahasa emosional tinggi, stereotipisasi out-group, dan disinformasi, sedangkan naratif yang mendorong dialog konstruktif ditandai oleh argumen berbasis fakta, pengakuan perspektif berlawanan, dan bahasa yang inklusif.
- Kemampuan menganalisis konten digital secara kritis merupakan kompetensi etis dan profesional bagi penyelenggara pemerintahan, selaras dengan nilai Nationalism dan Integrity, karena narasi yang beredar di ruang digital berdampak langsung pada kohesi sosial masyarakat.

REFERENSI

- Myers, D. G. (2013). *Social Psychology*. 11th Edition. McGraw-Hill.
- Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2016). *Social Psychology*. 9th Edition. Pearson.
- Hogg, M. A., & Vaughan, G. M. (2018). *Social Psychology*. 8th Edition. Pearson.
- Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2006). *Social Psychology*. 12th Edition. Pearson Prentice Hall.
- Cialdini, R. B. (2009). *Influence: Science and Practice*. 5th Edition. Pearson.
- Sarwono, S. W. (2015). *Psikologi Sosial*. Edisi 2. Salemba Humanika.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2022. *Standar Nasional Pendidikan (Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi)*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2024. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Outcome Based Education (OBE)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Norris, Pippa. 2011. *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge: Cambridge University Press.

Putnam, Robert D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon and Schuster.

Sears, David O., Jonathan L. Freedman, dan L. Anne Peplau. 1994. *Psikologi Sosial*. Terjemahan Michael Adryanto. Jakarta: Erlangga.

Myers (2013); Aronson, Wilson, & Akert (2016); Hogg & Vaughan (2018); Taylor, Peplau, & Sears (2006); Cialdini (2009); Norris (2011); Sarwono (2015).

PERTEMUAN 12

Analisis Konten Digital: Polarisasi dan Opini Publik

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:

63. Mengklasifikasikan minimal 10 unggahan/artikel digital ke dalam kategori opini pro, kontra, dan netral disertai justifikasi kriteria klasifikasi; Mengidentifikasi minimal 2 mekanisme psikologis (mis. echo chamber, confirmation bias) yang bekerja dalam sampel konten yang dianalisis dengan bukti kutipan konten; Menyajikan hasil analisis dalam bentuk matriks temuan yang memuat: sumber, mekanisme psikologis, dan potensi dampak terhadap polarisasi
64. Melaksanakan analisis konten terhadap minimal 10 unggahan atau artikel digital menggunakan protokol yang telah dirancang, dengan tingkat konsistensi koding yang dapat dipertanggungjawabkan
65. Mengevaluasi pola polarisasi yang ditemukan dalam korpus konten digital dengan mengaitkannya pada mekanisme psikologis spesifik (selective exposure, in-group favoritism, dehumanisasi out-group) berdasarkan minimal 2 pustaka utama
66. Menyajikan temuan analisis konten dalam bentuk laporan tertulis yang mencakup distribusi kategori, kutipan representatif, dan interpretasi psikologis secara sistematis dan berbasis data
67. Merumuskan rekomendasi berbasis psikologi sosial tentang strategi komunikasi publik yang dapat meredam polarisasi dan memperkuat opini publik yang sehat di Indonesia, dengan mempertimbangkan konteks demokrasi lokal

Pendahuluan

Pertemuan 11 telah membangun landasan konseptual tentang bagaimana opini publik terbentuk dan bagaimana media sosial menjadi arena polarisasi politik. Pertemuan ke-12 ini bergerak dari tataran konsep ke tataran praktik ilmiah: mahasiswa kini dituntut membuktikan sendiri mekanisme psikologis yang telah dipelajari dengan cara menganalisis korpus konten digital secara sistematis menggunakan protokol koding yang terstandar. Kemampuan melakukan analisis

konten bukan sekadar keterampilan metodologis, melainkan bekal profesional bagi calon aparatur pemerintahan dan pengelola kebijakan publik yang harus mampu membaca dinamika opini warga secara berbasis data, bukan asumsi.

Dalam konteks demokrasi Indonesia, khususnya di Kawasan Timur Indonesia yang rentan terhadap isu identitas dan disinformasi lokal, kemampuan mendiagnosis pola polarisasi afektif di ruang digital menjadi kompetensi kritis. Pertemuan ini menyelenggarakan presentasi kelompok sebagai ruang uji publik temuan analisis, sekaligus melatih nilai Integrity dalam mempertanggungjawabkan argumen dan nilai Nationalism dalam memperkuat ruang publik digital yang sehat.

A. Protokol Koding dan Kategorisasi Konten Digital

Analisis konten digital dalam konteks polarisasi opini publik memerlukan protokol koding yang sistematis agar setiap peneliti atau mahasiswa dapat mengklasifikasikan unggahan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Protokol koding adalah seperangkat aturan operasional yang menetapkan definisi setiap kategori, kriteria penilaian, dan prosedur kerja yang harus diikuti secara ketat sebelum proses koding dimulai. Tanpa protokol yang baku, dua orang yang menganalisis konten yang sama bisa menghasilkan klasifikasi berbeda karena masing-masing bersandar pada penilaian subjektif, sehingga data yang dihasilkan tidak valid untuk dijadikan dasar kesimpulan ilmiah. Dalam studi psikologi sosial tentang opini publik, protokol koding menjadi fondasi yang memungkinkan mahasiswa mengidentifikasi mekanisme psikologis seperti echo chamber dan confirmation bias secara berbasis bukti, bukan asumsi [Hogg & Vaughan 2018].

Langkah pertama menyusun protokol koding adalah mendefinisikan unit analisis, yaitu satuan konten terkecil yang akan dikodekan. Dalam praktik analisis konten digital, unit analisis dapat berupa satu unggahan media sosial, satu paragraf artikel daring, atau satu komentar dalam kolom diskusi. Setelah unit analisis ditetapkan, peneliti menetapkan skema kategorisasi berisi tiga kategori utama: pro (konten yang secara eksplisit mendukung suatu posisi, kebijakan, atau kelompok), kontra (konten yang secara eksplisit menentang atau menyerang), dan netral (konten yang menyajikan informasi tanpa muatan sikap yang dominan). Setiap kategori wajib dilengkapi indikator operasional, misalnya kategori pro ditandai oleh penggunaan kata pujian, framing positif terhadap subjek, atau pengabaian argumen tandingan; kategori kontra ditandai oleh kata serangan, generalisasi negatif terhadap kelompok

lain, atau bahasa dehumanisasi; sedangkan kategori netral ditandai oleh kehadiran dua sisi argumen dan penggunaan data faktual tanpa muatan emosional [Krippendorff 2018].

Tahap berikutnya adalah uji reliabilitas antarkoder, yang bertujuan memverifikasi bahwa protokol yang dirancang menghasilkan keputusan konsisten meskipun digunakan oleh orang yang berbeda. Dalam praktik perkuliahan, dua mahasiswa mengkode sampel yang sama secara independen, kemudian hasil keduanya dibandingkan menggunakan koefisien kesepakatan sederhana: jumlah keputusan yang sama dibagi total unit analisis dikali seratus persen. Nilai konsistensi minimal yang dapat diterima untuk tugas analisis ini adalah 70 persen; bila di bawah angka tersebut, definisi kategori perlu direvisi hingga cukup jelas untuk diterapkan secara seragam. Langkah ini bukan formalitas, melainkan cerminan nilai integritas ilmiah karena memastikan temuan tidak hanya merepresentasikan bias satu orang, tetapi mencerminkan pola yang benar-benar ada dalam korpus konten yang dianalisis.

Setelah protokol divalidasi, mahasiswa menerapkannya pada minimal 10 unggahan atau artikel digital yang dikumpulkan dari platform yang relevan dengan isu pemerintahan dan politik Indonesia, seperti portal berita daring, Twitter/X, atau Facebook. Setiap unit yang dikodekan dicatat dalam lembar koding yang memuat: nomor urut, tautan atau identitas konten, tanggal terbit, platform, kutipan representatif, kode kategori (pro/kontra/netral), dan catatan justifikasi. Lembar koding ini menjadi bukti kerja yang akan diintegrasikan ke dalam matriks temuan pada sub-bab berikutnya, sehingga pengisian yang cermat dan lengkap di tahap ini sangat menentukan kualitas analisis psikologis yang akan dilakukan terhadap pola polarisasi yang ditemukan [Franzosi 2020].

Tabel 12.1 Skema Kategorisasi Konten Digital: Definisi Operasional dan Indikator Koding

Kategori	Definisi Operasional	Indikator Linguistik/Retorik	Contoh Penanda
Pro	Konten yang secara eksplisit mendukung suatu posisi, kebijakan, tokoh, atau kelompok tertentu tanpa menyajikan argumen tandingan secara berimbang	Framing positif dominan; penggunaan kata pujian; pengabaian atau peminggiran fakta yang bertentangan; penggunaan kata ganti inklusif 'kita'	"Kebijakan ini adalah langkah terbaik yang pernah diambil"; "Pemimpin kita membuktikan dirinya"
Kontra	Konten yang secara eksplisit menentang, menyerang, atau	Generalisasi negatif; bahasa serangan atau dehumanisasi; framing	"Mereka tidak pernah peduli rakyat"; "Rezim ini hanya melayani

Kategori	Definisi Operasional	Indikator Linguistik/Retorik	Contoh Penanda
	mendiskreditkan suatu posisi, kebijakan, tokoh, atau kelompok tertentu	ancaman; penggunaan kata ganti eksklusif 'mereka'	oligarki"
Netral	Konten yang menyajikan informasi factual atau dua sisi argumen secara berimbang tanpa muatan sikap yang dominan ke salah satu arah	Penggunaan data dan kutipan sumber; penyajian argumen dari lebih dari satu pihak; tidak ada muatan emosional yang dominan	"Menurut data BPS..."; "Pihak A menyatakan..., sementara pihak B berargumen..."
Ambigu	Konten yang tidak dapat dikodekan ke salah satu dari tiga kategori di atas karena konteks tidak cukup jelas atau mengandung campuran indikator yang setara	Ironi, sarkasme, atau konteks budaya lokal yang memerlukan penafsiran mendalam	Konten berupa meme dengan teks ambigu; komentar pendek tanpa konteks yang jelas -- wajib dicatat sebagai ambigu dan tidak dipaksakan ke kategori lain

[Gambar 12.1 belum diunggah]

Gambar 12.1 Diagram alur protokol koding empat tahap: (1) Penetapan unit analisis dan pengumpulan korpus konten; (2) Penyusunan dan uji coba skema kategorisasi oleh dua koder secara independen; (3) Perhitungan koefisien kesepakatan antarkoder dan revisi definisi bila

ANALOGI

Bayangkan dua petugas sortir surat di kantor pos yang harus memilah ribuan surat ke dalam tiga kotak: lokal, nasional, dan internasional. Jika tidak ada aturan tertulis tentang apa yang disebut 'lokal' dan apa yang disebut 'nasional', satu petugas bisa memasukkan surat antarprovinsi ke kotak lokal sementara petugas lain memasukkannya ke kotak nasional. Protokol koding bekerja persis seperti panduan sortir itu: ia menyamakan pengertian setiap koder sehingga keputusan klasifikasi tidak bergantung pada selera pribadi, melainkan pada kriteria yang disepakati bersama dan dapat diperiksa oleh siapa pun.

CONTOH

Misalkan mahasiswa mengumpulkan sebuah unggahan Twitter/X yang berbunyi: 'Pemerintah daerah kita akhirnya membangun jalan yang sudah kami tunggu 10 tahun. Bukti nyata kerja keras pemimpin yang amanah.' Langkah pertama: mahasiswa membaca protokol dan memeriksa indikator kategori pro -- apakah ada framing positif dominan? Ya. Apakah ada pujian eksplisit terhadap pemimpin? Ya. Apakah ada argumen tandingan? Tidak. Maka konten ini dikodekan sebagai Pro. Langkah kedua: mahasiswa menuliskan justifikasi di lembar koding: 'Framing positif dominan; pujian eksplisit pada subjek pemerintah daerah; tidak ada penyebutan kendala atau kritik yang menyeimbangkan.' Langkah ketiga: koder kedua melakukan hal yang sama secara independen. Bila keduanya menghasilkan kode Pro, kesepakatan tercatat. Bila berbeda, keduanya mendiskusikan kasus tersebut dan merevisi definisi protokol agar kasus serupa di masa depan dapat dikodekan secara konsisten.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi yang paling sering muncul adalah anggapan bahwa kategori netral berarti konten yang tidak menarik atau tidak penting secara analitis, sehingga mahasiswa cenderung memaksakan konten ambigu ke kategori pro atau kontra agar data terasa lebih dramatis. Pembetulannya: kategori netral justru sangat berharga karena menunjukkan di mana narasi berimbang masih bertahan di ruang digital, dan konten ambigu wajib dicatat apa adanya karena memaksanya ke kategori tertentu akan mendistorsi distribusi data dan menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan tentang tingkat polarisasi yang sesungguhnya ada dalam korpus yang dianalisis.

B. Identifikasi Mekanisme Psikologis dalam Sampel Konten

Setelah protokol koding diterapkan dan setiap unggahan diklasifikasikan ke dalam kategori pro, kontra, atau netral, langkah berikutnya adalah mengenali mekanisme psikologis yang bekerja di balik konten tersebut. Mekanisme psikologis dalam konteks ini merujuk pada proses kognitif dan afektif yang mendorong individu memproduksi, menyebarkan, atau merespons konten dengan cara-cara tertentu sehingga polarisasi terbentuk dan menguat. Tiga mekanisme yang paling sering terdeteksi dalam analisis konten media sosial politik adalah echo chamber, confirmation bias, dan selective exposure, meskipun dalam korpus yang sama dapat ditemukan mekanisme tambahan seperti in-group favoritism dan dehumanisasi out-group. Pemahaman tentang mekanisme ini bukan sekadar pelabelan, melainkan

langkah analitis yang menuntut mahasiswa mengaitkan kutipan konten aktual dengan teori psikologi sosial yang relevan, sebagaimana dituntut oleh pendekatan berbasis bukti dalam kajian opini publik.

Echo chamber terbentuk ketika suatu platform atau jaringan sosial secara algoritmik maupun sosial menyaring informasi sehingga pengguna hanya terpapar pada pandangan yang selaras dengan keyakinan mereka sendiri. Cara mengidentifikasinya dalam sampel konten adalah dengan menelusuri pola pengutipan, tagar, dan akun yang saling me-repost: jika 80 persen unggahan dalam sebuah thread hanya mengutip sumber dari kubu yang sama tanpa satu pun perspektif pembanding, itu adalah indikator kuat echo chamber sedang bekerja. Confirmation bias bekerja pada level individu, yakni kecenderungan untuk mencari, menafsirkan, dan mengingat informasi yang mengonfirmasi keyakinan yang sudah dimiliki sebelumnya; bukti tekstualnya tampak ketika pengguna mengutip statistik secara selektif, mengabaikan data yang bertentangan, atau membingkai ulang fakta agar sesuai dengan narasi awal. Selective exposure, yang berkaitan erat dengan keduanya, merujuk pada pilihan sadar maupun tak sadar untuk hanya mengonsumsi sumber berita tertentu; dalam sampel konten, hal ini dapat dibuktikan dengan memetakan domain tautan yang dibagikan oleh satu kelompok pengguna versus kelompok lain.

Identifikasi mekanisme psikologis harus didukung oleh kutipan konten yang dipilih secara representatif, bukan hanya berdasarkan kesan umum peneliti. Setiap mekanisme yang diklaim perlu disertai minimal dua kutipan verbatim dari sampel beserta penjelasan mengapa kutipan tersebut merupakan manifestasi dari mekanisme yang dimaksud, sesuai kerangka analitis yang dikemukakan oleh Sunstein dalam teori polarization cascade dan didukung oleh temuan empiris van Prooijen dan Krouwel tentang extremism sebagai produk proses psikologis bertingkat. Nilai integritas ilmiah dalam proses ini sangat penting: mahasiswa tidak boleh memilih kutipan yang paling dramatis semata untuk memperkuat argumen, melainkan harus merepresentasikan distribusi aktual mekanisme dalam keseluruhan korpus sehingga simpulan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Dalam konteks demokrasi lokal Kawasan Timur Indonesia, mekanisme-mekanisme ini kerap bekerja bersamaan dengan identitas kedaerahan dan kekerabatan, sehingga analisis perlu sensitif terhadap lapisan makna budaya yang membungkus konten politik sebelum menisbatkan sebuah unggahan pada satu mekanisme tunggal.

Tabel 12.2 Contoh Identifikasi Mekanisme Psikologis dalam Sampel Konten Digital

Mekanisme Psikologis	Definisi Operasional	Indikator Tekstual dalam Konten	Contoh Kutipan Representatif (ilustratif)	Potensi Dampak terhadap Polarisasi
----------------------	----------------------	---------------------------------	---	------------------------------------

Mekanisme Psikologis	Definisi Operasional	Indikator Tekstual dalam Konten	Contoh Kutipan Representatif (ilustratif)	Potensi Dampak terhadap Polarisasi
Echo Chamber	Kondisi di mana pengguna hanya terpapar pandangan yang selaras dengan keyakinan sendiri akibat filter algoritmik dan sosial	Seluruh sumber yang dikutip berasal dari satu kubu; tidak ada tautan ke perspektif berbeda; komentar yang berbeda pendapat dihapus atau diabaikan	Thread berisi 15 repost dari 4 akun yang saling mengikuti, semua menggunakan tagar yang sama tanpa satu pun sumber eksternal yang berbeda orientasi	Mempersempit rentang informasi yang diterima; memperkuat keyakinan awal; meningkatkan jarak persepsi antara kelompok
Confirmation Bias	Kecenderungan kognitif untuk mencari dan menafsirkan informasi yang mengonfirmasi keyakinan yang sudah ada	Pengutipan statistik parsial; pengabaian data yang bertentangan; penafsiran ulang fakta agar sesuai narasi awal	Unggahan mengutip survei dengan angka tertentu tetapi tidak menyebut margin of error atau temuan berlawanan dalam survei yang sama	Memperdalam keyakinan yang sudah terpolarisasi; mempersulit dialog lintas kelompok
Selective Exposure	Pilihan sadar atau tak sadar untuk hanya mengonsumsi sumber berita dari orientasi ideologis yang sama	Dominasi tautan dari satu atau dua portal berita dengan afiliasi ideologis serupa; tidak ada diversifikasi sumber dalam akun yang sama selama periode pengamatan	Dari 30 tautan berita yang dibagikan oleh satu akun dalam satu bulan, 28 berasal dari dua portal dengan garis editorial yang sama	Mempertegas batas kognitif antara kelompok; menurunkan toleransi terhadap narasi yang berbeda
In-Group Favoritism	Kecenderungan menilai anggota kelompok sendiri secara lebih positif daripada anggota kelompok lain	Penggunaan pronomina kolektif yang eksklusif; pujian atas tindakan in-group yang sama dinilai negatif jika	Komentar memuji kebijakan ketika dilakukan pemimpin yang didukung, tetapi mengkritik kebijakan identik	Memperkuat solidaritas internal sekaligus meningkatkan prasangka terhadap kelompok lain

Mekanisme Psikologis	Definisi Operasional	Indikator Tekstual dalam Konten	Contoh Kutipan Representatif (ilustratif)	Potensi Dampak terhadap Polarisasi
		dilakukan out-group	ketika dilakukan oleh lawan	
Dehumanisasi Out-Group	Proses mengurangi kemanusiaan anggota kelompok lain melalui bahasa atau citra yang merendahkan	Penggunaan metafora hewani, pelabelan kolektif negatif, atau generalisasi sifat buruk kepada seluruh kelompok lawan	Unggahan menggunakan istilah merendahkan untuk merujuk seluruh pendukung pihak lain tanpa diferensiasi individu	Menurunkan hambatan moral terhadap kekerasan simbolik; memperparah konflik afektif antara kelompok

[Gambar 12.2 belum diunggah]

Gambar 12.2 Diagram alir dua panel: panel kiri menggambarkan proses analitis dari korpus konten mentah menuju identifikasi mekanisme psikologis (dengan tahapan: baca konten, tandai indikator tekstual, cocokkan dengan definisi operasional, dukung dengan kutipan); pane

ANALOGI

Bayangkan sebuah ruangan besar yang dipenuhi banyak kelompok percakapan. Di setiap sudut, orang-orang hanya berbicara dengan mereka yang mengenakan warna baju yang sama, saling mengganggu setiap kali salah satu bersuara, dan segera berbalik badan setiap kali seseorang berwarna berbeda mencoba menyapa. Itulah cara kerja echo chamber di media sosial: algoritma platform bertindak seperti penjaga pintu tak kasat mata yang mengarahkan pengguna terus-menerus ke kelompok baju yang sama, sementara confirmation bias membuat mereka merasa puas karena semua yang didengar terasa benar.

CONTOH

Seorang mahasiswa mengambil sampel 12 unggahan Twitter/X tentang kebijakan pemekaran wilayah di Papua. Langkah pertama: ia membaca setiap unggahan dan menandai kata kunci serta pola pengutipan. Langkah kedua: ia menemukan bahwa 9 dari 12 unggahan hanya mengutip satu portal berita berbasis di Jakarta dengan garis editorial yang sama; ini adalah indikator selective exposure. Langkah ketiga: ia memilih dua unggahan yang paling representatif dari pola tersebut, misalnya

unggahan A yang mengutip satu angka dari laporan BPS tanpa menyebut data pembandingan, dan unggahan B yang menggunakan tagar eksklusif yang sama selama 30 hari tanpa satu pun tautan dari perspektif berbeda. Langkah keempat: ia menulis penjelasan analitis mengapa unggahan A merupakan manifestasi confirmation bias dan unggahan B mencerminkan echo chamber, dengan merujuk pada definisi operasional yang telah ditetapkan dalam protokol koding. Hasilnya adalah dua klaim mekanisme yang masing-masing didukung oleh kutipan verbatim dan penjelasan teoritis, bukan hanya kesan subyektif.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi yang paling umum adalah anggapan bahwa satu unggahan yang bernada keras atau memihak sudah cukup untuk membuktikan bekerjanya echo chamber atau confirmation bias. Pembetulannya: echo chamber adalah fenomena jaringan dan temporal, bukan fenomena satu konten tunggal; ia baru dapat diklaim jika analisis dapat menunjukkan pola berulang dalam keseluruhan korpus, misalnya dominasi sumber tunggal atau absennya perspektif berlawanan dalam rentang waktu tertentu. Demikian pula confirmation bias hanya dapat diatribusikan ketika ada bukti bahwa informasi yang bertentangan memang tersedia tetapi secara konsisten diabaikan atau disalahartikan oleh penulis konten, bukan sekadar karena kontennya bersifat partisan.

C. Evaluasi Pola Polarisasi Afektif dan Matriks Temuan

Setelah setiap unggahan diklasifikasikan dan mekanisme psikologisnya diidentifikasi, tahap berikutnya adalah mengevaluasi pola polarisasi yang muncul secara keseluruhan dari korpus konten. Polarisasi afektif — berbeda dari polarisasi ideologis — merujuk pada kondisi di mana anggota kelompok mengembangkan sentimen negatif yang kuat terhadap out-group bukan karena perbedaan kebijakan yang substantif, melainkan semata karena identitas kelompok itu sendiri [Hogg & Vaughan 2018]. Dalam konteks konten digital Indonesia, polarisasi afektif kerap tampak bukan pada argumen kebijakan yang saling berhadapan, melainkan pada pilihan kata, label, dan framing yang merendahkan pihak lawan. Mahasiswa dituntut untuk tidak sekadar menghitung frekuensi kategori pro-kontra, tetapi menganalisis intensitas emosional dan pola dehumanisasi yang tersebar di dalam sampel konten tersebut, sehingga evaluasi mencapai level analisis (C4) yang terukur.

Matriks temuan berfungsi sebagai instrumen pengorganisasian data analisis konten secara sistematis agar pola polarisasi dapat dibaca lintas-unggahan. Setiap baris matriks memuat: nomor urut unggahan, sumber platform, kategori (pro/kontra/netral), mekanisme psikologis yang teridentifikasi beserta kutipan pendukung, serta penilaian potensi dampak polarisasi pada skala rendah-sedang-tinggi. Skala potensi dampak ditentukan berdasarkan tiga indikator: jangkauan interaksi (jumlah respons/repost), intensitas bahasa afektif (kehadiran dehumanisasi atau labeling out-group), dan konsistensi dengan mekanisme selective exposure atau in-group favoritism yang terdokumentasi dalam literatur [Myers 2013]. Dengan matriks ini, mahasiswa dapat membangun argumen evaluatif yang bertumpu pada data, bukan kesan subjektif semata, selaras dengan nilai integritas (Integrity) dalam mengelola temuan penelitian.

Evaluasi pola polarisasi dilakukan dengan membaca matriks secara vertikal (satu unggahan secara mendalam) sekaligus horizontal (pola yang berulang lintas unggahan). Secara vertikal, mahasiswa menelaah bagaimana satu unggahan mengaktifkan lebih dari satu mekanisme psikologis secara bersamaan, misalnya confirmation bias yang diperkuat oleh in-group favoritism dalam satu narasi tunggal. Secara horizontal, mahasiswa mencari apakah mekanisme tertentu — misalnya dehumanisasi out-group — lebih dominan pada platform atau isu tertentu, sehingga dapat disimpulkan pola yang lebih luas tentang ekosistem informasi digital Indonesia, khususnya di Kawasan Timur Indonesia yang memiliki konteks identitas etnis dan agama yang berlapis [Hogg & Vaughan 2018]. Temuan pola ini menjadi fondasi bagi sub-bab berikutnya tentang perumusan rekomendasi strategi komunikasi publik, sehingga proses pembelajaran bersifat progresif dan setiap tahap analisis membangun pemahaman untuk tahap rancangan solusi.

Tabel 12.3 Matriks Temuan Analisis Konten Digital: Polarisasi dan Mekanisme Psikologis

No.	Sumber/Platform	Kategori Konten	Mekanisme Psikologis	Kutipan Representatif	Potensi Dampak Polarisasi (R/S/T)
1	Twitter/X — akun publik	Pro	In-group favoritism	"Hanya mereka yang peduli bangsa yang layak dipercaya"	Tinggi
2	Facebook — halaman berita	Kontra	Dehumanisasi out-group	"Kelompok itu memang tidak punya akal sehat"	Tinggi

No.	Sumber/Platform	Kategori Konten	Mekanisme Psikologis	Kutipan Representatif	Potensi Dampak Polarisasi (R/S/T)
3	YouTube — komentar video	Netral	Tidak teridentifikasi mekanisme dominan	"Ada beberapa sisi yang perlu dipertimbangkan di sini"	Rendah
4	Instagram — unggahan opini	Pro	Confirmation bias	"Bukti sudah jelas, hanya yang buta yang tidak melihat"	Sedang
5	Grup WhatsApp (screenshot publik)	Kontra	Echo chamber + selective exposure	"Jangan percaya siaran mana pun selain grup kita"	Tinggi

[Gambar 12.3 belum diunggah]

Gambar 12.3 Diagram alur dua arah yang menggambarkan proses evaluasi matriks temuan: sisi kiri menunjukkan analisis vertikal satu unggahan dengan panah ke bawah melewati kolom mekanisme psikologis dan dampak; sisi kanan menunjukkan analisis horizontal lintas unggahan

ANALOGI

Matriks temuan bekerja seperti peta cuaca: satu titik di peta hanya menunjukkan kondisi satu lokasi, tetapi ketika seluruh titik dibaca bersama, pola angin dan tekanan udara secara keseluruhan menjadi terlihat. Satu unggahan saja tidak cukup untuk menyimpulkan adanya polarisasi afektif sistemik; namun ketika sepuluh atau lebih unggahan dipetakan dalam matriks, pola dominan — seperti dehumanisasi yang berulang pada platform tertentu — mulai tampak dengan jelas dan dapat dievaluasi secara ilmiah.

CONTOH

Seorang mahasiswa menganalisis 10 unggahan terkait isu pemilihan kepala daerah di satu kabupaten Sulawesi. Langkah pertama: ia mengisi kolom kategori dan mekanisme untuk setiap baris. Langkah kedua: ia membaca secara vertikal unggahan nomor 2 dan menemukan bahwa satu tweet mengandung sekaligus in-group favoritism ('pendukung sejati') dan dehumanisasi ('lawan adalah pengkhianat daerah'). Langkah ketiga: ia membaca secara horizontal dan menemukan bahwa dari

10 unggahan, 6 mengandung dehumanisasi out-group dan 4 di antaranya berasal dari platform Facebook. Dari pola horizontal inilah ia merumuskan evaluasi bahwa polarisasi afektif dalam korpus ini bersifat platform-spesifik dan berbasis identitas kedaerahan, bukan perbedaan program kebijakan — sebuah temuan yang didukung kerangka Myers (2013) tentang social identity dan intergroup conflict.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi umum yang sering muncul adalah anggapan bahwa konten dengan jumlah 'pro' yang lebih banyak dari 'kontra' berarti polarisasi rendah atau tidak ada. Pembetulannya: polarisasi afektif tidak ditentukan oleh keseimbangan jumlah kategori, melainkan oleh intensitas emosional dan mekanisme psikologis yang aktif di dalam konten. Sebuah korpus yang didominasi 9 unggahan pro dan 1 kontra justru dapat menunjukkan polarisasi afektif yang ekstrem apabila semua unggahan pro mengandung dehumanisasi out-group dan labeling berulang. Hogg dan Vaughan (2018) menegaskan bahwa asimetri kategoris seperti ini adalah salah satu penanda paling kuat dari polarisasi afektif yang sudah mengakar dalam ekosistem informasi suatu komunitas.

D. Laporan Analisis dan Rekomendasi Komunikasi Publik Berbasis Psikologi Sosial

Setelah matriks temuan selesai disusun dan pola polarisasi afektif dievaluasi, langkah terakhir dan paling menuntut keterampilan sintesis adalah menyusun laporan analisis yang utuh serta merumuskan rekomendasi komunikasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Laporan ini bukan sekadar dokumentasi prosedur; ia adalah argumen akademik yang menghubungkan data korpus dengan teori psikologi sosial, lalu menghasilkan usulan kebijakan komunikasi yang relevan untuk konteks demokrasi lokal Indonesia, termasuk di Kawasan Timur Indonesia yang dinamika opini publiknya sering kali diwarnai oleh ikatan komunal yang kuat. Struktur laporan yang baik mencakup empat bagian pokok: (1) deskripsi korpus dan distribusi kategori pro, kontra, dan netral beserta frekuensinya; (2) kutipan representatif yang membuktikan keberadaan mekanisme psikologis seperti selective exposure, in-group favoritism, dan dehumanisasi out-group; (3) interpretasi psikologis sistematis yang mengaitkan temuan dengan minimal dua pustaka utama; dan (4) rekomendasi berbasis psikologi sosial yang operasional. Keempat bagian ini harus disusun secara berurutan karena masing-masing membangun fondasi bagi

bagian berikutnya: tanpa distribusi kategori yang jelas, interpretasi psikologis tidak memiliki pijakan empiris, dan tanpa interpretasi yang solid, rekomendasi akan bersifat normatif belaka.

Bagian distribusi kategori ditulis dengan menyajikan jumlah dan persentase unggahan per kategori, platform asal, serta rentang waktu pengambilan sampel. Kutipan representatif dipilih bukan sembarang kutipan yang paling mencolok secara emosional, melainkan kutipan yang paling jelas menggambarkan mekanisme psikologis tertentu -- misalnya, sebuah komentar yang secara eksplisit menyebut kelompok lawan dengan label negatif merupakan bukti dehumanisasi out-group yang dapat dikaitkan dengan teori identitas sosial Tajfel dan Turner. Interpretasi psikologis kemudian menjelaskan mengapa mekanisme tersebut muncul dalam konteks isu yang dianalisis, bukan hanya menamai mekanismenya. Mahasiswa yang hanya menulis kalimat seperti unggahan ini mengandung confirmation bias tanpa menjelaskan bagaimana algoritma platform memperkuat bias tersebut melalui echo chamber akan dianggap baru mencapai level identifikasi, bukan evaluasi -- dan laporan yang dituntut pertemuan ini berada pada level evaluasi sesuai indikator capaian yang telah ditetapkan.

Rekomendasi komunikasi publik merupakan puncak analitis laporan ini dan harus dirumuskan secara spesifik, bukan generik. Rekomendasi yang hanya menyarankan agar pemerintah meningkatkan literasi digital tidak bernilai karena tidak menunjukkan mekanisme psikologis mana yang disasar dan melalui jalur intervensi apa. Rekomendasi yang baik mengikuti logika: karena mekanisme X ditemukan dominan dalam korpus ini, maka strategi Y -- yang secara psikologis bekerja melawan mekanisme X -- perlu diterapkan oleh aktor Z pada konteks W. Sebagai contoh, apabila analisis menemukan bahwa in-group favoritism mendominasi diskusi pilkada di platform tertentu, rekomendasi yang tepat adalah mendorong pemerintah daerah dan KPU setempat untuk merancang kampanye deliberatif yang mengekspos pemilih pada narasi lintas identitas secara terencana, bukan hanya mengandalkan debat terbuka yang justru dapat memperkuat polarisasi afektif bila tidak difasilitasi dengan protokol psikologis yang memadai. Nilai kreativitas dan integritas ICHSA-N tercermin dalam kemampuan mahasiswa merumuskan rekomendasi yang inovatif sekaligus jujur mengakui keterbatasan sampel yang dianalisis.

Menyusun laporan jenis ini menuntut disiplin penulisan akademik yang ketat: setiap klaim interpretasi harus didukung oleh kutipan data dari korpus dan referensi teori, bukan intuisi pribadi penulis. Kesalahan struktural yang sering terjadi adalah mencampurkan deskripsi dan interpretasi dalam satu paragraf sehingga pembaca tidak dapat membedakan mana temuan empiris dan mana simpulan teoritis. Praktik yang disarankan adalah menggunakan penanda eksplisit seperti data menunjukkan

bahwa... untuk deskripsi dan secara psikologis, pola ini dapat dijelaskan oleh... untuk interpretasi. Laporan akhir yang memenuhi standar indikator pertemuan ini harus mampu menunjukkan distribusi kategori berbasis data, minimal dua kutipan yang membuktikan mekanisme psikologis berbeda, interpretasi yang berpijak pada pustaka, dan rekomendasi yang secara logis mengalir dari temuan -- bukan ditambahkan di akhir sebagai pelengkap formalitas.

Tabel 12.4 Komponen Wajib Laporan Analisis Konten dan Kriteria Kualitasnya

Komponen Laporan	Isi Minimum yang Disyaratkan	Kriteria Kualitas Tinggi
Distribusi Kategori	Frekuensi dan persentase unggahan pro, kontra, netral per platform	Disertai tabel silang platform x kategori dan penjelasan pola distribusi
Kutipan Representatif	Minimal 2 kutipan verbatim yang membuktikan mekanisme psikologis berbeda	Kutipan dipilih berdasarkan kriteria eksplisit, bukan kemenonjolan emosional
Interpretasi Psikologis	Penjelasan mekanisme psikologis dikaitkan minimal 2 pustaka utama	Menjelaskan mengapa mekanisme muncul dalam konteks isu spesifik yang dianalisis
Rekomendasi Komunikasi	Minimal 1 rekomendasi operasional berbasis mekanisme psikologis yang ditemukan	Menyebut aktor, mekanisme yang disasar, jalur intervensi, dan konteks demokrasi lokal
Refleksi Keterbatasan	Pengakuan atas batas ukuran sampel dan potensi bias koder	Membahas implikasi keterbatasan terhadap generalisasi temuan secara jujur

[Gambar 12.4 belum diunggah]

Gambar 12.4 Diagram alur empat tahap penyusunan laporan analisis konten: (1) kotak Distribusi Kategori mengarah ke (2) kotak Kutipan Representatif, lalu ke (3) kotak Interpretasi Psikologis berbasis pustaka, dan berakhir di (4) kotak Rekomendasi Komunikasi Publik; di

ANALOGI

Menyusun laporan analisis konten ini seperti seorang dokter yang menulis rekam medis lengkap: ia tidak cukup hanya mencatat gejala pasien (deskripsi data), melainkan harus mendiagnosis penyebab (interpretasi mekanisme psikologis), lalu meresepkan obat yang tepat sasaran (rekomendasi) -- dan setiap langkah harus bisa

dipertanggungjawabkan kepada koleganya, bukan hanya kepada pasiennya.

CONTOH

Misalkan seorang mahasiswa menganalisis 12 unggahan Twitter/X seputar isu Pemilu Kepala Daerah di Sulawesi. Pada bagian distribusi, ia menemukan 6 unggahan pro kandidat A, 4 kontra, dan 2 netral, dengan 9 dari 12 unggahan berasal dari akun yang hampir tidak pernah meretweet akun pendukung kandidat lain -- indikator awal echo chamber. Pada bagian kutipan representatif, ia mengutip secara verbatim satu cuitan yang menyebut pendukung kandidat lawan sebagai kelompok yang tidak layak dipercaya, lalu mengidentifikasinya sebagai dehumanisasi out-group dengan mengacu pada teori identitas sosial. Pada bagian interpretasi, ia menjelaskan bahwa temuan ini konsisten dengan argumen bahwa polarisasi afektif di media sosial Indonesia diperparah oleh arsitektur algoritma yang memprioritaskan konten bernada tinggi. Rekomendasi yang ditulisnya kemudian menyarankan agar tim komunikasi KPU di daerah tersebut merancang konten deliberatif lintas-komunitas yang sengaja menempatkan narasi dari kedua kubu secara berdampingan untuk melatih toleransi kognitif pemilih, sebuah strategi yang secara psikologis bekerja melawan mekanisme selective exposure yang teridentifikasi.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi yang paling sering muncul adalah keyakinan bahwa rekomendasi yang baik adalah rekomendasi yang panjang dan mencakup banyak pihak sekaligus, sehingga mahasiswa menulis daftar saran yang berlapis-lapis mulai dari pemerintah pusat hingga individu pengguna media sosial tanpa menjelaskan kaitan logisnya dengan temuan. Pembetulanannya: rekomendasi yang bernilai ilmiah bukan ditentukan oleh panjang atau jumlahnya, melainkan oleh ketepatan mekanisme psikologis yang disasar -- satu rekomendasi yang secara eksplisit menyebut mengapa strategi tertentu secara psikologis dapat melemahkan in-group favoritism jauh lebih kuat daripada sepuluh saran umum yang bisa dipakai untuk mata kuliah apa pun.

RANGKUMAN

- Analisis konten digital yang valid mensyaratkan protokol koding yang konsisten dan kriteria klasifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan penilaian subjektif.
- Mekanisme psikologis seperti echo chamber, confirmation bias, dan in-group

favoritism dapat diidentifikasi secara empiris melalui kutipan konten nyata dari platform digital Indonesia.

- Pola polarisasi afektif dalam media sosial Indonesia beroperasi melalui mekanisme selective exposure dan dehumanisasi out-group yang memperkuat jarak psikologis antarkelompok.
- Matriks temuan yang memuat sumber, mekanisme, dan dampak menjadi alat komunikasi ilmiah yang menjembatani data lapangan dengan interpretasi psikologi sosial secara sistematis.
- Rekomendasi komunikasi publik yang efektif untuk meredam polarisasi harus berakar pada diagnosis psikologis yang akurat dan mempertimbangkan kekhasan konteks demokrasi lokal Indonesia.

REFERENSI

- Myers, D. G. (2013). *Social Psychology*. 11th Edition. McGraw-Hill.
- Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2016). *Social Psychology*. 9th Edition. Pearson.
- Hogg, M. A., & Vaughan, G. M. (2018). *Social Psychology*. 8th Edition. Pearson.
- Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2006). *Social Psychology*. 12th Edition. Pearson Prentice Hall.
- Cialdini, R. B. (2009). *Influence: Science and Practice*. 5th Edition. Pearson.
- Sarwono, S. W. (2015). *Psikologi Sosial*. Edisi 2. Salemba Humanika.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2022. *Standar Nasional Pendidikan (Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi)*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2024. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Outcome Based Education (OBE)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- Norris, Pippa. 2011. *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Putnam, Robert D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon and Schuster.
- Sears, David O., Jonathan L. Freedman, dan L. Anne Peplau. 1994. *Psikologi Sosial*. Terjemahan Michael Adryanto. Jakarta: Erlangga.
- Myers (2013); Aronson, Wilson, & Akert (2016); Hogg & Vaughan (2018); Taylor, Peplau, & Sears (2006); Cialdini (2009); Norris (2011); Putnam (2000); Sarwono (2015).

PERTEMUAN 13

Presentasi Analisis Kelompok: Hoaks dan Polarisasi Sosial

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:

68. Mempresentasikan analisis kelompok (10–15 menit) tentang satu kasus hoaks atau polarisasi yang beredar di media, disertai minimal 3 bukti faktual dan rekomendasi respons berbasis nilai Integritas (Integrity-ICHSA-N)•Menunjukkan pembagian peran yang adil antaranggota tim dalam presentasi, tercermin pada lembar kontribusi yang ditandatangani seluruh anggota•Merumuskan usulan sikap/tindakan kolektif terhadap isu yang dianalisis yang selaras dengan prinsip Pancasila dan dapat diimplementasikan di lingkungan kampus/komunitas
69. Menyajikan argumen berbasis bukti empiris tentang mekanisme penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di konteks Kawasan Timur Indonesia secara sistematis di depan kelas
70. Menganalisis dinamika polarisasi sosial dalam kasus nyata menggunakan minimal dua perspektif teoretis psikologi sosial secara tepat
71. Mengajukan usulan respons etis terhadap hoaks atau ujaran kebencian yang koheren, kontekstual, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
72. Menampilkan sikap berintegritas dalam diskusi: memberikan tanggapan kritis berbasis data, bukan asumsi, terhadap pertanyaan audiens
73. Berkolaborasi secara harmonis dalam tim—menghormati peran anggota dan mendistribusikan kontribusi secara adil selama sesi presentasi

Pendahuluan

Pertemuan ke-13 ini merupakan puncak dari rangkaian kajian yang telah dibangun sejak Pertemuan 11 tentang opini publik dan polarisasi politik serta Pertemuan 12 tentang analisis konten digital. Mahasiswa kini dituntut bukan sekadar mengenali gejala disinformasi secara teoretis, melainkan mendemonstrasikan kemampuan menganalisis kasus nyata secara ilmiah, menyajikan argumen berbasis bukti di hadapan audiens kritis, dan merumuskan respons etis yang dapat diterapkan di

lingkungan kampus dan komunitas—khususnya dalam konteks Kawasan Timur Indonesia yang memiliki kerentanan unik terhadap hoaks dan polarisasi berbasis identitas lokal.

Pertemuan ini diselenggarakan dalam format Project-Based Learning dengan gallery presentation, di mana setiap kelompok berperan ganda sebagai penyaji sekaligus audiens kritis bagi kelompok lain. Proses ini melatih integritas akademik—nilai Integrity dalam ICHSA-N—karena argumen yang disajikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan didasarkan pada asumsi atau opini tanpa data. Pada akhir sesi, dosen memetakan pola temuan lintas kelompok di papan tulis sebagai jembatan menuju sintesis komprehensif di Pertemuan 14.

A. Orientasi Sesi: Tata Tertib dan Kriteria Penilaian Presentasi

Pertemuan ke-13 ini bukan sekadar sesi unjuk kerja rutin, melainkan puncak dari proses berpikir kritis yang telah dibangun sejak minggu-minggu sebelumnya tentang hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial. Seluruh kelompok tampil secara bergilir dengan alokasi 10 hingga 15 menit per kelompok, diikuti sesi tanya jawab singkat 5 menit dari audiens dan dosen. Urutan tampil ditentukan melalui undian yang dilakukan di awal kelas agar semua kelompok memiliki kesempatan yang setara, selaras dengan nilai Harmony dalam ICHSA-N. Mahasiswa yang tidak sedang presentasi berperan aktif sebagai audiens kritis: mencatat argumen kelompok lain, menyiapkan pertanyaan berbasis data, dan mengisi lembar observasi rekan sejawat yang akan dikumpulkan di akhir sesi.

Kriteria penilaian presentasi dirancang untuk mengukur kemampuan analisis dan integritas akademik secara sekaligus, bukan sekadar kelancaran berbicara di depan kelas. Terdapat empat dimensi utama yang dinilai: pertama, kualitas argumen dan bukti empiris yang disajikan (minimal tiga fakta terverifikasi dari sumber terpercaya); kedua, ketepatan penggunaan dua perspektif teoretis psikologi sosial dalam menganalisis kasus; ketiga, koherensi dan kontekstualitas usulan respons etis terhadap kasus yang dipilih; keempat, dinamika kolaborasi tim yang tercermin pada lembar kontribusi dan pembagian peran selama presentasi berlangsung. Setiap dimensi diberi bobot yang seimbang sehingga kelompok yang kuat secara teori tetapi lemah dalam kolaborasi tidak dapat menutupi kekurangan tersebut hanya dengan penguasaan konten.

Tata tertib sesi ini menegaskan bahwa kebebasan berekspresi akademik harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab intelektual. Selama sesi tanya jawab, pertanyaan wajib disampaikan dengan bahasa yang santun, berbasis data atau konsep, bukan serangan personal terhadap pendapat kelompok lain. Penyaji menjawab dengan mengacu pada bukti yang telah mereka siapkan, bukan berdasarkan asumsi atau perasaan. Sikap ini merupakan wujud konkret nilai Integrity dalam ICHSA-N: mahasiswa calon aparatur pemerintahan di Kawasan Timur Indonesia perlu melatih diri untuk berbicara dan merespons isu publik dengan kejujuran faktual sejak di bangku kuliah, karena kebiasaan ini kelak menentukan kualitas kebijakan yang mereka hasilkan.

Tabel 13.1 Kriteria dan Bobot Penilaian Presentasi Kelompok Pertemuan Ke-13

Dimensi Penilaian	Indikator Utama	Bobot (%)
Argumen dan Bukti Empiris	Minimal 3 bukti faktual terverifikasi; sumber relevan dan mutakhir; logika penyajian sistematis	30
Ketepatan Analisis Teoretis	Dua perspektif psikologi sosial digunakan secara tepat dan eksplisit untuk membedah kasus yang dipilih	25
Usulan Respons Etis	Rekomendasi koheren, kontekstual, dapat diimplementasikan di kampus/komunitas, selaras prinsip Pancasila	25
Kolaborasi dan Integritas Tim	Lembar kontribusi ditandatangani semua anggota; pembagian peran tampak adil; tanya jawab dijawab berbasis data	20

[Gambar 13.1 belum diunggah]

Gambar 13.1 Diagram alur sesi presentasi pertemuan ke-13: blok-blok berurutan menunjukkan tahapan (1) undian urutan tampil, (2) presentasi kelompok 10-15 menit, (3) tanya jawab audiens 5 menit, (4) pengisian lembar observasi rekan sejawat, (5) pemetaan temuan lintas

ANALOGI

Bayangkan sesi ini seperti sidang paripurna DPRD skala mini: setiap fraksi

(kelompok) menyampaikan pandangan berbasis data tentang isu publik, fraksi lain boleh menginterupsi dengan pertanyaan, dan pimpinan sidang (dosen) memastikan seluruh proses berjalan tertib dan berbobot. Tidak ada fraksi yang menang hanya karena suaranya paling keras, melainkan karena argumennya paling didukung oleh fakta.

CONTOH

Kelompok A memilih kasus hoaks kesehatan yang viral di grup WhatsApp warga Sulawesi Tenggara pada tahun 2023. Dalam 12 menit presentasi, Anggota 1 membuka dengan latar belakang kasus dan tiga tautan berita terverifikasi dari media arus utama; Anggota 2 menganalisis mekanisme penyebaran menggunakan teori konformitas sosial dan teori identitas sosial; Anggota 3 merumuskan rekomendasi literasi digital berbasis komunitas yang dapat diterapkan di kelurahan sekitar kampus UNISAN. Ketika audiens bertanya mengapa rekomendasi tidak menyentuh peran pemerintah daerah, Anggota 2 menjawab dengan mengutip data penetrasi internet di KTI dari laporan APJII 2023, bukan sekadar berpendapat. Lembar kontribusi yang ditandatangani keempat anggota menunjukkan pembagian tugas riset, penyusunan slide, dan latihan presentasi yang proporsional sejak dua minggu sebelumnya.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi umum yang muncul: mahasiswa mengira bahwa presentasi yang 'bagus' identik dengan slide yang rapi secara visual dan pembicara yang fasih, sehingga kelompok cenderung menghabiskan energi pada desain estetika dan latihan intonasi, bukan pada validasi bukti. Pembetulannya: dalam konteks mata kuliah Psikologi Sosial berbasis SCL ini, kualitas argumen dan ketepatan teori jauh lebih menentukan nilai daripada penampilan visual. Slide yang sederhana tetapi memuat tiga bukti empiris yang bisa dipertanggungjawabkan sumbernya akan mendapatkan skor lebih tinggi pada dimensi argumen dan bukti dibandingkan slide beranimasi yang tidak menyebutkan sumber data sama sekali.

B. Penyajian Kasus Hoaks dan Polarisasi: Argumen Berbasis Bukti Empiris

Penyajian kasus dalam sesi ini menuntut lebih dari sekadar menceritakan ulang sebuah isu viral. Mahasiswa dituntut mengonstruksi argumen yang bersandar pada

bukti empiris, yaitu data terverifikasi yang dapat ditelusuri sumbernya, bukan kesimpulan yang lahir dari perasaan atau asumsi kolektif. Dalam konteks Kawasan Timur Indonesia, isu hoaks dan polarisasi kerap berjalan beriringan dengan dinamika identitas etnis, agama, dan kedaerahan yang kuat, sehingga pemilihan kasus harus mempertimbangkan konteks lokal secara cermat. Kelompok yang mampu menghubungkan data faktual dengan konteks sosial lokal akan menghasilkan argumen yang lebih tajam dan relevan dibanding kelompok yang hanya mengutip berita nasional tanpa kontekstualisasi.

Struktur penyajian yang sistematis dimulai dari identifikasi kasus secara spesifik: kapan hoaks atau narasi polarisasi itu muncul, melalui platform apa ia menyebar, dan kelompok mana yang paling terdampak. Langkah berikutnya adalah menghadirkan minimal tiga bukti faktual, yang dapat berupa tangkapan layar terarsip dari platform seperti Kominfo atau Turn Back Hoax, data sebaran geografis dari laporan lembaga pemeriksa fakta, atau hasil riset akademis yang mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap narasi tersebut. Bukti-bukti ini bukan hiasan visual semata; setiap bukti harus dikaitkan secara eksplisit dengan klaim yang sedang dibangun, sehingga audiens dapat mengikuti logika argumentasi dari premis hingga kesimpulan. Integritas dalam penyajian, sebagai salah satu nilai ICHSA-N, mensyaratkan bahwa kelompok tidak memilih atau menyembunyikan bukti secara selektif demi memperkuat narasi yang disukai.

Mekanisme penyebaran hoaks di Kawasan Timur Indonesia memiliki kekhasan yang perlu dianalisis secara eksplisit dalam presentasi. Tingkat penetrasi internet yang bervariasi antarwilayah, dominasi komunikasi melalui grup WhatsApp berbasis komunitas, dan rendahnya kebiasaan verifikasi silang membentuk ekosistem yang mempercepat viralisasi informasi tidak akurat. Kelompok perlu menjelaskan mekanisme ini secara kausal: mengapa konten tertentu menyebar lebih cepat dari konten lain, siapa aktor penyebarannya, dan bagaimana algoritma platform memperparah efek ruang gema. Penjelasan mekanistik semacam ini yang membedakan presentasi berbasis bukti empiris dari presentasi berbasis opini.

Rekomendasi yang diajukan di akhir penyajian harus bersifat kontekstual dan dapat diimplementasikan, bukan sekadar imbauan normatif seperti 'jadilah bijak bermedia sosial'. Rekomendasi yang baik menyebutkan subjek pelaku yang konkret, misalnya mahasiswa Ilmu Pemerintahan UNISAN, perangkat desa di Gorontalo, atau pengelola akun media sosial organisasi mahasiswa, serta tindakan spesifik yang terukur hasilnya. Kohesi antar-anggota tim selama penyajian, yang tercermin pada kelancaran transisi giliran bicara dan konsistensi argumen antarnarasumber, merupakan bukti nyata dari kolaborasi harmonis yang telah dibangun dalam proses

persiapan. Lembar kontribusi yang ditandatangani seluruh anggota menjadi dokumen akuntabilitas yang menutup siklus kerja tim secara bertanggung jawab.

Tabel 13.2 Komponen Argumen Berbasis Bukti Empiris dalam Penyajian Kasus

Komponen	Pertanyaan Panduan	Contoh Pemenuhan
Identifikasi kasus	Kapan, di mana, dan melalui platform apa kasus ini muncul?	Hoaks vaksin beredar di grup WhatsApp komunitas Maluku Utara, Oktober 2023, terdokumentasi di arsip Kominfo
Bukti faktual 1	Data atau dokumen apa yang mengonfirmasi kasus ini nyata?	Laporan Mafindo: 47 konten teridentifikasi hoaks dalam satu minggu dengan kata kunci terkait
Bukti faktual 2	Siapa yang terdampak dan seberapa luas sebarannya?	Survei persepsi mahasiswa di tiga kampus: 62% mengaku pernah menerima konten yang sama
Bukti faktual 3	Apakah ada riset akademis yang menjelaskan mekanismenya?	Studi echo chamber di media sosial Indonesia relevan dengan pola sebaran yang ditemukan
Mekanisme penyebaran	Mengapa dan bagaimana hoaks ini menyebar secepat itu?	Algoritma reinforcement + komunitas WhatsApp tertutup mempercepat viralisasi tanpa verifikasi
Rekomendasi etis	Tindakan apa yang konkret, kontekstual, dan terukur?	Program literasi digital mingguan di BEM UNISAN dengan indikator: 50 peserta/sesi, 4 sesi/semester

[Gambar 13.2 belum diunggah]

Gambar 13.2 Diagram alur penyebaran hoaks: dari sumber asal (akun anonim/media partisan) menuju platform distribusi (Facebook, WhatsApp grup komunitas, TikTok), lalu ke simpul-simpul penerus (tokoh informal, admin grup), hingga akhirnya ke penerima akhir di tingkat k

ANALOGI

Membangun argumen berbasis bukti empiris dalam presentasi ini serupa dengan proses seorang hakim di pengadilan: hakim tidak memutus perkara berdasarkan kesan atau simpati, melainkan berdasarkan rangkaian alat bukti yang sah, saling

menguatkan, dan dapat diverifikasi. Mahasiswa yang tampil di depan kelas hari ini menjalankan fungsi yang setara: meyakinkan audiens bukan dengan retorika yang emosional, melainkan dengan rantai logika yang setiap mata rantainya terhubung pada fakta yang dapat diperiksa kebenarannya.

CONTOH

Kelompok memilih kasus hoaks tentang dugaan penimbunan sembako oleh kelompok etnis tertentu yang beredar di media sosial Sulawesi Tengah pada periode menjelang Ramadan. Langkah pertama: kelompok mendokumentasikan tangkapan layar konten asli yang sudah diarsipkan oleh lembaga pemeriksa fakta Mafindo beserta cap waktu unggahannya. Langkah kedua: kelompok menyajikan data penjualan resmi dari Dinas Perdagangan setempat yang menunjukkan tidak ada anomali distribusi pada periode yang dimaksud, sehingga klaim penimbunan terbantah secara kuantitatif. Langkah ketiga: kelompok mengutip satu studi tentang stereotip etnis dan prasangka dalam konteks ekonomi untuk menjelaskan mengapa narasi semacam ini mudah dipercaya meski tanpa bukti. Dari ketiga bukti itu, kelompok kemudian merumuskan rekomendasi berupa modul edukasi anti-stereotip berbasis kearifan lokal yang dapat dipraktikkan oleh mahasiswa Ilmu Pemerintahan dalam program pengabdian masyarakat di lingkungan kampus UNISAN.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi yang kerap muncul adalah anggapan bahwa 'banyaknya orang yang mempercayai sebuah informasi' merupakan bukti bahwa informasi tersebut benar, atau sebaliknya bahwa informasi yang sudah viral secara otomatis telah melalui proses verifikasi. Pembetulannya: popularitas dan kebenaran adalah dua hal yang sepenuhnya berbeda dalam logika argumentasi ilmiah. Hoaks justru menyebar lebih cepat justru karena mekanisme psikologis seperti bias konfirmasi dan efek pengulangan membuat orang cenderung menerima informasi yang sesuai dengan keyakinan awal mereka tanpa memeriksa sumbernya. Oleh karena itu, kelompok wajib membedakan secara tegas antara 'informasi yang beredar luas' sebagai data fenomena sosial yang perlu dijelaskan, dengan 'bukti empiris' sebagai dasar klaim kebenaran yang diajukan dalam presentasi.

C. Analisis Teoretis Polarisasi: Dua Perspektif Psikologi Sosial

Polarisasi sosial bukan sekadar perbedaan pendapat biasa; ia adalah proses psikologis sistematis yang menarik individu ke kutub-kutub ekstrem sehingga ruang tengah—tempat dialog dan kompromi—menyempit drastis. Untuk menganalisis fenomena ini secara ilmiah dalam presentasi kelompok, mahasiswa perlu menyandarkan argumennya pada kerangka teoretis yang mapan, bukan pada intuisi atau kesan umum. Psikologi sosial menyediakan sejumlah perspektif yang telah diuji secara empiris untuk menjelaskan mengapa kelompok manusia bisa bergerak dari perbedaan menuju permusuhan. Dua perspektif yang paling relevan dan saling melengkapi untuk konteks hoaks dan ujaran kebencian adalah Teori Identitas Sosial (Social Identity Theory, SIT) dari Tajfel dan Turner, serta Teori Kognisi Sosial yang menekankan peran bias kognitif—khususnya *confirmation bias* dan *group polarization*—dalam membentuk persepsi kolektif.

Teori Identitas Sosial menjelaskan bahwa manusia secara alami mengategorikan diri ke dalam kelompok (*in-group*) dan memandang kelompok lain sebagai *out-group*. Proses kategorisasi ini memicu *favoritisme in-group*, yaitu kecenderungan menilai anggota kelompok sendiri secara lebih positif dan menginterpretasikan informasi yang menguntungkan kelompoknya sebagai kebenaran. Dalam konteks penyebaran hoaks di Kawasan Timur Indonesia, mekanisme ini bekerja ketika narasi palsu yang menyerang tokoh atau etnis tertentu justru disebarluaskan lebih cepat oleh kelompok yang sudah merasakan ancaman terhadap identitas sosialnya. Hoaks berfungsi sebagai 'alat konfirmasi' status *in-group*, bukan semata-mata sebagai informasi yang dinilai kebenarannya. Oleh karena itu, kelompok penyaji perlu mengidentifikasi secara eksplisit: dalam kasus yang dianalisis, batas *in-group* dan *out-group* ditarik berdasarkan dimensi apa—agama, etnis, afiliasi politik, atau kombinasi ketiganya—karena garis batas ini menentukan pola penyebaran dan dampak hoaks tersebut.

Perspektif kedua, Teori Kognisi Sosial, menyoroti dua proses mental yang memperparah polarisasi. Pertama, *confirmation bias* mendorong individu untuk mencari, menafsirkan, dan mengingat informasi yang sesuai dengan keyakinan yang telah ada, sembari mengabaikan atau mendiskreditkan bukti yang bertentangan. Kedua, *group polarization*—yang ditunjukkan oleh eksperimen Moscovici dan Zavalloni—membuktikan bahwa diskusi dalam kelompok yang homogen tidak menghasilkan moderasi pendapat, melainkan justru mendorong pendapat awal ke arah yang lebih ekstrem. Ketika kedua proses ini bekerja bersamaan di ruang digital—di mana algoritma media sosial menciptakan *echo chamber* yang memperkuat homogenitas pandangan—polarisasi menjadi *self-reinforcing*: semakin sering seseorang terpapar konten yang seragam, semakin kuat bias konfirmasinya,

dan semakin tajam polarisasinya. Dalam presentasi, kelompok dituntut menunjukkan bagaimana kedua perspektif ini tidak bertentangan melainkan bekerja pada lapisan analisis yang berbeda: SIT menjelaskan dimensi identitas dan motivasi kelompok, sedangkan kognisi sosial menjelaskan mekanisme pemrosesan informasi individual yang memungkinkan narasi hoaks bertahan dan menyebar. Mengintegrasikan keduanya akan menghasilkan analisis yang lebih utuh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sekaligus mencerminkan nilai Integritas dalam berpikir—yaitu jujur terhadap kompleksitas fenomena, bukan menyederhanakannya demi narasi yang lebih mudah dikonsumsi.

Tabel 13.3 Perbandingan Dua Perspektif Teoretis untuk Analisis Polarisasi Sosial

Dimensi Pembanding	Teori Identitas Sosial (Tajfel & Turner)	Teori Kognisi Sosial (Confirmation Bias & Group Polarization)
Unit analisis utama	Kelompok sosial dan batas in-group/out-group	Individu dalam konteks kelompok homogen
Mekanisme kunci	Kategorisasi sosial, identifikasi, komparasi sosial	Bias konfirmasi, polarisasi kelompok, echo chamber
Penjelasan penyebaran hoaks	Hoaks memperkuat batas in-group dan mengancam out-group	Hoaks dikonsumsi selektif sesuai keyakinan yang sudah ada
Penjelasan eskalasi polarisasi	Favoritisme in-group meningkat saat ancaman identitas dirasakan	Diskusi kelompok homogen mendorong pandangan awal ke ekstrem
Implikasi untuk respons etis	Membangun narasi lintas kelompok yang melemahkan batas in-group/out-group	Menyajikan informasi yang memaksa pertemuan dengan bukti yang bertentangan
Contoh aplikasi di KTI	Hoaks bernuansa SARA yang mempertajam batas etnis/agama di daerah konflik laten	Grup WhatsApp komunitas adat yang terus-menerus saling menguatkan narasi tanpa koreksi eksternal

[Gambar 13.3 belum diunggah]

Gambar 13.3 Diagram alur dua jalur yang menunjukkan bagaimana satu konten hoaks diproses melalui dua perspektif secara paralel: jalur kiri menggambarkan proses SIT (konten masuk -> kategorisasi in-group/out-group -> favoritisme -> penyebaran selektif -> eskalasi perm

ANALOGI

Bayangkan dua orang yang menonton pertandingan sepak bola antara tim kesebelasan kampung mereka melawan kampung tetangga. Ketika wasit meniup peluit untuk pelanggaran yang sama, pendukung tim tuan rumah menyebutnya 'keputusan tepat', sementara pendukung tamu menyebutnya 'kecurangan'. Bukan karena mereka melihat kejadian yang berbeda, melainkan karena identitas kelompok mereka sudah terlebih dahulu menentukan kaca mata mana yang mereka pakai — itulah cara kerja SIT. Setelah pertandingan, masing-masing kubu berkumpul dengan sesama pendukungnya dan saling menceritakan 'kecurangan' yang mereka rasakan; diskusi itu tidak meredakan emosi, justru membuatnya semakin membara — itulah group polarization dalam Teori Kognisi Sosial.

CONTOH

Kasus: Beredar narasi di grup WhatsApp komunitas di salah satu kabupaten di Sulawesi bahwa seorang pejabat daerah dari etnis tertentu diduga mengorupsi dana bantuan bencana, disertai tangkapan layar dokumen yang belum terverifikasi. Langkah analisis bertahap menggunakan dua perspektif: Pertama, dengan lensa SIT, kelompok penyaji mengidentifikasi bahwa batas in-group/out-group dalam kasus ini ditarik berdasarkan afiliasi etnis. Narasi tersebut memperkuat stereotip negatif terhadap out-group dan meningkatkan solidaritas in-group. Penyebarannya cepat karena berfungsi sebagai 'bukti' ancaman yang sudah dirasakan kelompok. Kedua, dengan lensa kognisi sosial, kelompok menganalisis bahwa anggota komunitas yang sudah tidak percaya pada pejabat tersebut (keyakinan awal) menerima dokumen itu sebagai konfirmasi tanpa memverifikasi sumbernya. Setelah narasi beredar dalam grup yang homogen — yang beranggotakan orang-orang dengan pandangan serupa — ketidakpercayaan tidak hanya dipertahankan melainkan meningkat menjadi kemarahan kolektif yang mendorong tuntutan tindakan segera. Dengan mengintegrasikan kedua perspektif, kelompok mampu merumuskan rekomendasi yang menysar dua lapisan sekaligus: intervensi lintas kelompok untuk melemahkan batas in-group/out-group, dan penyediaan informasi pembanding (counter-narrative berbasis fakta) untuk memutus rantai confirmation bias.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi yang sering muncul dalam presentasi mahasiswa adalah anggapan bahwa polarisasi semata-mata disebabkan oleh hoaks itu sendiri — artinya, jika hoaks dihapus, polarisasi akan mereda dengan sendirinya. Pembetulan: hoaks adalah akselerator, bukan akar penyebab. Baik SIT maupun Teori Kognisi Sosial menunjukkan bahwa polarisasi didorong oleh kondisi psikologis dan sosial yang

sudah ada sebelumnya—identitas kelompok yang rapuh, ketimpangan sosial yang menciptakan ancaman terhadap status, dan lingkungan informasi yang homogen. Menghapus satu konten hoaks tanpa menyentuh kondisi-kondisi ini hanya menghilangkan gejala tanpa menyembuhkan penyakit. Miskonsepsi kedua adalah menganggap kedua perspektif ini saling bertentangan sehingga kelompok 'harus memilih satu'. Pembetulan: SIT dan kognisi sosial bekerja pada lapisan berbeda—yang satu menjelaskan dinamika antar-kelompok, yang lain menjelaskan proses kognitif individual—sehingga menggunakannya secara bersamaan menghasilkan analisis yang lebih komprehensif, bukan kontradiktif.

D. Respons Etis, Tanya Jawab Kritis, dan Pemetaan Temuan Lintas Kelompok

Setelah setiap kelompok menyajikan kasus hoaks atau polarisasi beserta analisis teoretisnya, sesi ini beralih ke tiga kegiatan yang saling terhubung: merumuskan respons etis terhadap isu yang dianalisis, merespons pertanyaan audiens secara kritis berbasis data, dan memetakan temuan seluruh kelompok secara lintas kasus. Respons etis bukan sekadar pernyataan normatif seperti 'kita harus saling menghormati', melainkan sebuah usulan tindakan kolektif yang koheren, kontekstual, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Artinya, usulan tersebut harus menjelaskan mekanisme psikologis yang mendasarinya, merujuk pada minimal satu bukti empiris, dan menunjukkan bagaimana ia dapat diimplementasikan secara konkret di lingkungan kampus atau komunitas lokal, khususnya di Kawasan Timur Indonesia. Prinsip Integritas dalam nilai ICHSA-N menuntut bahwa rekomendasi yang diajukan tidak dilebih-lebihkan melampaui data yang tersedia, dan bahwa keterbatasan analisis diakui secara terbuka—bukan disembunyikan demi terkesan meyakinkan.

Tanya jawab kritis merupakan ujian sesungguhnya atas pemahaman mahasiswa, karena di sinilah kedalaman analisis dan kejujuran intelektual diperlihatkan secara langsung. Ketika audiens mengajukan pertanyaan, penyaji dituntut merespons berbasis data yang telah dikumpulkan, bukan berdasarkan asumsi pribadi atau intuisi semata. Analogi yang tepat untuk fase ini adalah sidang skripsi dalam skala kecil: penguji tidak bertanya untuk menjatuhkan, melainkan untuk menguji sejauh mana penyaji benar-benar menguasai materinya dan mampu mempertahankan argumennya secara logis. Bila pertanyaan menyentuh wilayah yang belum dikaji, jawaban yang berintegritas adalah mengakui celah tersebut dan menawarkan langkah verifikasi lanjutan, bukan menutup-nutupinya dengan jawaban spekulatif. Dosen dan

sesama mahasiswa bertindak sebagai audiens kritis yang menilai kualitas argumen, bukan sekadar keberanian berbicara di depan kelas.

Pada bagian penutup sesi, dosen memfasilitasi pemetaan temuan lintas kelompok: setiap kelompok menyumbangkan satu temuan kunci dari kasus yang mereka analisis, lalu seluruh kelas bersama-sama mengidentifikasi pola berulang, perbedaan konteks, dan celah yang belum terjawab. Kegiatan ini melatih kemampuan sintesis—yaitu kemampuan melihat gambar besar dari serpihan-serpihan kasus yang berbeda—yang merupakan kompetensi penting bagi calon aparatur pemerintah yang harus merumuskan kebijakan lintas isu. Contoh konkret: satu kelompok menganalisis hoaks vaksinasi yang menyebar di grup WhatsApp komunitas adat di Maluku, kelompok lain mengkaji polarisasi pilkada di media sosial Sulawesi, dan kelompok ketiga menelaah ujaran kebencian berbasis SARA di forum daring Papua; ketiga kasus ini mungkin berbeda konten, tetapi pemetaan lintas kelompok dapat mengungkap mekanisme penyebaran yang serupa, misalnya peran echo chamber dan bias konfirmasi yang muncul berulang di ketiga konteks tersebut. Harmoni antartim dalam nilai ICHSA-N bukan berarti menghindari perbedaan temuan, melainkan mengelola perbedaan itu secara produktif untuk menghasilkan peta pemahaman yang lebih kaya dan lebih jujur terhadap realitas sosial Kawasan Timur Indonesia.

Miskonsepsi yang kerap muncul adalah anggapan bahwa respons etis yang 'aman' adalah respons yang paling umum dan tidak kontroversial, sehingga kelompok cenderung mengajukan rekomendasi generik seperti 'tingkatkan literasi digital' tanpa menjelaskan siapa yang melakukannya, bagaimana caranya, dalam konteks apa, dan dengan sumber daya apa. Pembetulanannya: rekomendasi yang baik justru harus spesifik dan terukur, misalnya 'Badan Eksekutif Mahasiswa UNISAN merancang program peer-education dua sesi per semester tentang verifikasi fakta menggunakan platform Turnbackhoax.id, menyasar mahasiswa semester satu yang baru masuk dan belum terpapar kurikulum literasi digital.' Kekhususan ini bukan mempersulit, melainkan menunjukkan bahwa analisis psikologi sosial benar-benar dioperasionalkan menjadi tindakan nyata, bukan berhenti sebagai wacana akademik. Nilai Adaptabilitas dalam ICHSA-N mendorong mahasiswa untuk merancang respons yang realistis sesuai kapasitas dan konteks lokal, bukan menyalin template kebijakan nasional yang belum tentu relevan di tingkat komunitas kampus.

Tabel 13.4 Kriteria Penilaian Respons Etis dan Tanya Jawab Kritis

Komponen	Indikator Kinerja Minimal	Indikator Kinerja Unggul
Rumusan respons etis	Usulan tindakan ada, tetapi bersifat umum dan tidak merujuk mekanisme psikologis	Usulan tindakan spesifik, merujuk minimal satu mekanisme psikologis dan satu

Komponen	Indikator Kinerja Minimal	Indikator Kinerja Unggul
		bukti empiris, serta menjelaskan konteks implementasi lokal
Koherensi dengan data	Rekomendasi sesuai dengan isu yang diangkat tetapi tidak dikaitkan langsung dengan temuan kelompok	Rekomendasi secara eksplisit bersumber dari temuan analisis kelompok dan mengakui keterbatasan data
Kualitas tanya jawab	Menjawab pertanyaan tetapi sebagian bersifat spekulatif atau tidak merujuk sumber	Menjawab berbasis data yang dikutip secara tepat; bila tidak tahu, menyatakan celah dan menawarkan tindak lanjut verifikasi
Kontribusi ke pemetaan lintas kelompok	Menyebutkan temuan kunci kelompok sendiri saja	Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dengan temuan kelompok lain serta menarik implikasi lintas kasus
Integritas dalam diskusi	Tidak menyampaikan informasi yang sengaja menyesatkan	Secara proaktif mengakui keterbatasan analisis dan mendorong diskusi berbasis fakta

[Gambar 13.4 belum diunggah]

Gambar 13.4 Diagram alur tiga fase sesi presentasi pertemuan ke-13: (1) kotak 'Penyajian Kasus dan Analisis Teoretis' mengarah ke (2) kotak 'Respons Etis dan Tanya Jawab Kritis' yang di dalamnya terdapat dua anak panah bolak-balik antara penyaji dan audiens, lalu ke

ANALOGI

Sesi respons etis dan tanya jawab kritis ini ibarat proses peer review dalam jurnal ilmiah: penulis menyampaikan temuan, reviewer mengajukan pertanyaan tajam untuk menguji validitas argumen, dan pada akhirnya editor—dalam hal ini dosen dan seluruh kelas—merangkum pelajaran dari semua naskah untuk menghasilkan pengetahuan yang lebih kokoh dari sekadar satu artikel tunggal.

CONTOH

Kelompok A menganalisis hoaks 'air sumur tercemar limbah tambang' yang viral di grup WhatsApp warga Halmahera dan merumuskan respons etis berupa usulan protokol klarifikasi dua langkah: (1) mahasiswa Ilmu Pemerintahan bermitra dengan

Dinas Lingkungan Hidup setempat untuk menerbitkan satu lembar fakta terverifikasi dalam 48 jam setelah hoaks muncul, dan (2) tokoh adat dilibatkan sebagai penyampai pesan karena penelitian komunikasi risiko menunjukkan bahwa kepercayaan pada sumber lokal lebih tinggi daripada sumber pemerintah formal di komunitas adat. Saat audiens bertanya 'bagaimana jika Dinas tidak merespons dalam 48 jam?', penyaji menjawab dengan merujuk studi Wardle dan Derakhshan tentang ekosistem informasi yang menunjukkan bahwa jeda respons lebih dari 72 jam melipatgandakan jangkauan hoaks, lalu mengakui bahwa kelompok mereka belum mengkaji kapasitas SDM Dinas setempat sebagai celah yang perlu diteliti lebih lanjut. Dalam pemetaan lintas kelompok, temuan ini kemudian disandingkan dengan kasus kelompok B dan C, dan kelas bersama menemukan bahwa ketiga kasus sama-sama menunjukkan peran aktor lokal terpercaya sebagai variabel kunci dalam strategi kontranarasi.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi umum: respons etis yang paling aman adalah rekomendasi yang paling luas cakupannya, seperti 'semua pihak harus meningkatkan literasi digital', karena tidak bisa disalahkan. Pembetulan: rekomendasi yang terlalu luas justru menunjukkan bahwa analisis berhenti di permukaan dan tidak memanfaatkan kerangka psikologi sosial yang telah dibangun. Respons etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah harus menyebut aktor spesifik, mekanisme psikologis yang ditarget, konteks implementasi yang realistis, dan ukuran keberhasilan yang dapat diamati; generalisasi tanpa spesifikasi bukan kehati-hatian intelektual, melainkan penghindaran dari tanggung jawab argumentatif.

RANGKUMAN

- Presentasi kelompok berbasis kasus nyata melatih mahasiswa mengubah analisis teoretis tentang hoaks dan polarisasi menjadi argumen ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan di depan audiens kritis.
- Mekanisme penyebaran hoaks di Kawasan Timur Indonesia dapat dijelaskan melalui kerangka psikologis konformitas, pengaruh sosial, dan pembentukan sikap yang telah dikaji sejak Pertemuan 4 dan 11.
- Analisis yang kuat mensyaratkan penerapan minimal dua perspektif teoretis psikologi sosial secara konsisten terhadap satu kasus, bukan sekadar deskripsi peristiwa.
- Respons etis terhadap hoaks dan ujaran kebencian wajib bersifat kontekstual, berbasis data, dan selaras dengan prinsip Pancasila agar dapat diimplementasikan secara nyata di komunitas kampus.

- Kolaborasi yang harmonis dan pembagian peran yang adil dalam tim — tercermin pada lembar kontribusi bertandatangan—merupakan wujud konkret nilai Integrity dan Harmony dalam ICHSA-N.

REFERENSI

- Myers, D. G. (2013). *Social Psychology*. 11th Edition. McGraw-Hill.
- Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2016). *Social Psychology*. 9th Edition. Pearson.
- Hogg, M. A., & Vaughan, G. M. (2018). *Social Psychology*. 8th Edition. Pearson.
- Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2006). *Social Psychology*. 12th Edition. Pearson Prentice Hall.
- Cialdini, R. B. (2009). *Influence: Science and Practice*. 5th Edition. Pearson.
- Sarwono, S. W. (2015). *Psikologi Sosial*. Edisi 2. Salemba Humanika.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2022. *Standar Nasional Pendidikan (Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi)*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2024. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Outcome Based Education (OBE)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- Norris, Pippa. 2011. *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Putnam, Robert D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon and Schuster.
- Sears, David O., Jonathan L. Freedman, dan L. Anne Peplau. 1994. *Psikologi Sosial*. Terjemahan Michael Adryanto. Jakarta: Erlangga.
- Myers, D. G. (2013); Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2016); Hogg, M. A., & Vaughan, G. M. (2018); Cialdini, R. B. (2009); Sarwono, S. W. (2015).

PERTEMUAN 14

Diskusi Lanjut, Sintesis, dan Umpan Balik Komprehensif

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:

74. Mempresentasikan analisis kelompok (10–15 menit) tentang satu kasus hoaks atau polarisasi yang beredar di media, disertai minimal 3 bukti faktual dan rekomendasi respons berbasis nilai Integritas (Integrity-ICHSA-N);Menunjukkan pembagian peran yang adil antaranggota tim dalam presentasi, tercermin pada lembar kontribusi yang ditandatangani seluruh anggota;Merumuskan usulan sikap/tindakan kolektif terhadap isu yang dianalisis yang selaras dengan prinsip Pancasila dan dapat diimplementasikan di lingkungan kampus/komunitas
75. Mensintesis temuan lintas kelompok dengan mengidentifikasi pola mekanisme psikologis yang berulang dalam berbagai kasus hoaks dan polarisasi yang dipresentasikan
76. Merevisi dan memperkuat argumen presentasi berdasarkan umpan balik peer dan dosen secara kritis dan bertanggung jawab
77. Memformulasikan rekomendasi respons etis yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan perspektif kelompok lain yang baru diterima
78. Mengevaluasi kualitas argumen sendiri maupun argumen kelompok lain menggunakan kriteria validitas bukti dan koherensi teoritis
79. Menampilkan sikap tanggung jawab intelektual dengan mengakui keterbatasan analisis dan menyebutkan arah pengembangan lebih lanjut

Pendahuluan

Pertemuan ke-14 ini merupakan kelanjutan langsung dari sesi presentasi kelompok pada pertemuan ke-13, di mana setiap kelompok telah memaparkan analisis kasus hoaks dan polarisasi sosial berbasis bukti. Kini saatnya melampaui batas satu kasus tunggal: mahasiswa diajak melihat pola mekanisme psikologis yang berulang lintas kasus—mulai dari dinamika prasangka, deindividuasi dalam ruang digital, hingga pengaruh kelompok terhadap perilaku kolektif—sebagai satu kerangka psikologi

sosial yang kohesif. Kemampuan mensintesis dan merevisi argumen berdasarkan umpan balik merupakan kompetensi inti berpikir kritis yang dibutuhkan calon penyelenggara pemerintahan yang berintegritas.

Pertemuan ini juga menjadi titik penting dalam lintasan perkuliahan menuju UAS: sintesis lintas kelompok yang dihasilkan hari ini menjadi fondasi revisi laporan akhir dan bahan refleksi kritis pada pertemuan ke-15. Nilai Integrity dan Service dalam ICHSA-N diuji secara nyata di sini—mahasiswa ditantang untuk mengakui keterbatasan analisis sendiri, menghargai perspektif kelompok lain, dan bersama-sama merumuskan respons etis yang dapat diimplementasikan di lingkungan kampus maupun komunitas lokal Kawasan Timur Indonesia.

A. Presentasi dan Verifikasi Argumen Kelompok Berbasis Bukti

Presentasi kelompok pada pertemuan ke-14 bukan sekadar laporan akhir, melainkan arena pengujian argumen secara terbuka di hadapan rekan sejawat dan dosen. Setiap kelompok telah memilih satu kasus hoaks atau polarisasi yang nyata beredar di ruang digital Indonesia — misalnya narasi keliru seputar pemilu, isu kesehatan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia, atau provokasi berbasis identitas di media sosial — dan kini dituntut mempertahankan analisisnya dengan minimal tiga bukti faktual yang dapat ditelusuri. Bukti faktual di sini merujuk pada data konkret: tangkapan layar dengan metadata waktu dan sumber, laporan resmi lembaga pengecekan fakta seperti Kominfo atau Turn Back Hoax, atau hasil survei yang terpublikasi. Tanpa bukti semacam ini, argumen kelompok hanya bersifat opini, bukan analisis ilmiah yang layak dipertahankan dalam forum akademik.

Struktur presentasi yang baik mengikuti alur: deskripsi kasus secara ringkas, identifikasi mekanisme psikologis yang bekerja (misalnya konfirmasi bias, efek echo chamber, atau disonansi kognitif), analisis dampak sosial-pemerintahan, lalu rekomendasi respons yang berakar pada nilai Integritas sebagai bagian dari karakter ICHSA-N. Rekomendasi yang dirumuskan harus spesifik dan dapat diimplementasikan di lingkungan kampus atau komunitas lokal — bukan seruan abstrak seperti 'mari berpikir kritis', melainkan langkah konkret seperti prosedur verifikasi mandiri sebelum berbagi informasi atau mekanisme pelaporan konten menyesatkan di grup media sosial organisasi kemahasiswaan. Pembagian peran antaranggota tim harus terlihat nyata dalam jalannya presentasi dan terdokumentasi

dalam lembar kontribusi yang ditandatangani seluruh anggota, sehingga tanggung jawab intelektual tidak menumpuk pada satu orang saja.

Verifikasi argumen terjadi melalui dua jalur: pertanyaan dari kelompok lain dan evaluasi dosen. Pada sesi tanya-jawab, penyaji ditantang membuktikan relevansi teori yang digunakan terhadap kasus konkret yang dipilih, bukan sekadar menyebutkan nama teori. Kelompok yang argumennya kuat akan mampu menunjukkan rantai logis dari bukti ke konsep psikologis, lalu ke implikasi kebijakan atau tindakan kolektif yang selaras dengan prinsip Pancasila — khususnya sila ketiga dan keempat yang menekankan persatuan dan musyawarah. Kemampuan ini sekaligus mencerminkan integritas akademik: berani mengakui bila ada celah dalam analisis dan tidak memaksakan kesimpulan yang tidak didukung data, sebuah sikap yang menjadi fondasi tanggung jawab intelektual seorang calon aparatur pemerintahan.

Tabel 14.1 Komponen Wajib dan Kriteria Verifikasi Presentasi Kelompok

Komponen Presentasi	Indikator Terpenuhi	Alat Verifikasi
Deskripsi kasus hoaks/polarisasi	Kasus nyata, lokasi/waktu jelas, sumber dapat ditelusuri	Tangkapan layar + metadata sumber
Minimal 3 bukti faktual	Berasal dari lembaga terpercaya, bukan opini anonim	Daftar referensi tertulis dalam slide
Identifikasi mekanisme psikologis	Nama konsep tepat, dikaitkan langsung ke perilaku dalam kasus	Pertanyaan dosen/peer tentang relevansi teori
Rekomendasi respons berbasis Integritas	Spesifik, dapat dilakukan di kampus/komunitas, tidak abstrak	Rubrik penilaian rekomendasi
Pembagian peran adil	Setiap anggota berbicara, peran tercatat di lembar kontribusi	Lembar kontribusi ditandatangani semua anggota

[Gambar 14.1 belum diunggah]

Gambar 14.1 Diagram alur presentasi kelompok: lima tahap berurutan (1-Deskripsi Kasus, 2-Bukti Faktual, 3-Mekanisme Psikologis, 4-Dampak Sosial-Pemerintahan, 5-Rekomendasi Berbasis Integritas) dengan panah dua arah antara tahap 2 dan 3 untuk menggambarkan proses verifikasi

ANALOGI

Bayangkan seorang jaksa di persidangan: ia tidak cukup berkata 'saya yakin terdakwa bersalah' — ia harus menghadirkan barang bukti, saksi, dan rantai logis yang

menghubungkan keduanya. Presentasi kelompok bekerja dengan logika yang sama: keyakinan analitis Anda baru menjadi argumen yang sah ketika ditopang bukti yang dapat diperiksa oleh siapa pun yang hadir di ruangan.

CONTOH

Kelompok memilih kasus hoaks video 'kecurangan pemungutan suara' yang viral di WhatsApp menjelang pilkada di salah satu provinsi Sulawesi. Langkah pertama: kelompok menampilkan tangkapan layar video beserta cap waktu penyebaran pertama yang ditemukan di database Turn Back Hoax (bukti 1). Langkah kedua: mereka menyertakan klarifikasi resmi KPU setempat yang dirilis 48 jam kemudian (bukti 2). Langkah ketiga: mereka mengutip data survei literasi digital Kominfo 2023 yang menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten video lebih tinggi daripada teks (bukti 3). Dari tiga bukti ini, kelompok menarik benang merah ke mekanisme psikologis 'ilusi kebenaran' — semakin sering konten dilihat, semakin dipercaya kebenarannya — dan merekomendasikan program verifikasi cepat berbasis panduan langkah demi langkah yang dapat ditempel di papan pengumuman BEM sebagai tindakan konkret di lingkungan kampus UNISAN.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi umum: 'Semakin banyak sumber yang dikutip, semakin kuat argumen kami.' Pembetulan: Kualitas dan relevansi bukti jauh lebih penting daripada kuantitasnya. Sepuluh sumber yang hanya mengulang klaim yang sama tidak lebih kuat dari satu laporan resmi yang langsung menjawab pertanyaan riset kelompok. Yang dinilai bukan panjangnya daftar referensi, melainkan apakah setiap bukti benar-benar menyokong klaim spesifik yang diajukan — inilah yang membedakan argumen ilmiah dari akumulasi kutipan tanpa arah.

B. Pemetaan Konseptual Lintas Kasus: Mekanisme Psikologis yang Berulang

Ketika seluruh kelompok telah memaparkan kasusnya masing-masing, langkah berikutnya bukan sekadar membandingkan cerita, melainkan mengidentifikasi pola mekanisme psikologis yang muncul berulang di balik berbagai kasus hoaks dan polarisasi yang berbeda-beda. Pola inilah yang menjadi inti dari sintesis lintas kasus: bahwa meskipun topik kasus berbeda — mulai dari hoaks kesehatan, isu politik lokal

Kawasan Timur Indonesia, hingga ujaran kebencian berbasis identitas — mekanisme kognitif dan sosial yang menggerakkannya cenderung sama. Mekanisme tersebut antara lain konfirmasi bias, efek echo chamber, deindividuasi dalam kelompok daring, serta social identity threat yang memicu in-group favoritism dan out-group derogation. Dengan memetakan mekanisme ini secara lintas kasus, mahasiswa tidak hanya memahami satu kejadian, tetapi menganalisis struktur psikologis yang mendasari fenomena disinformasi secara lebih sistematis — kemampuan yang berada pada level C4 taksonomi Bloom dan sangat relevan bagi calon aparatur pemerintahan yang kelak menghadapi dinamika opini publik.

Pemetaan konseptual lintas kasus dilakukan dengan cara menempatkan setiap kasus yang dipresentasikan sebagai data poin, lalu menelusuri mekanisme mana yang hadir dalam lebih dari satu kasus. Proses ini mirip dengan cara dokter mendiagnosis penyakit: bukan hanya melihat gejala pasien satu per satu, melainkan mencari sindrom yang menjelaskan sekumpulan gejala sekaligus. Mahasiswa diajak mengisi matriks pemetaan sederhana berupa baris berisi nama kasus dan kolom berisi nama mekanisme psikologis; sel yang terisi menunjukkan mekanisme mana yang aktif pada kasus tersebut. Semakin banyak sel yang terisi pada satu kolom, semakin kuat indikasi bahwa mekanisme itu bersifat lintas konteks dan perlu diprioritaskan dalam rekomendasi kebijakan komunikasi publik. Pendekatan ini melatih integritas intelektual karena mahasiswa harus jujur mencatat mekanisme yang ditemukan pada kasus kelompok lain, sekalipun berbeda dengan temuan kelompoknya sendiri — cerminan nilai Integrity dalam ICHSA-N.

Dari pemetaan tersebut biasanya ditemukan setidaknya tiga pola dominan. Pertama, konfirmasi bias hampir selalu hadir: audiens menerima informasi yang selaras dengan keyakinan awal dan menolak informasi yang bertentangan, sehingga hoaks yang beredar di kelompok tertentu jarang dikoreksi dari dalam kelompok itu sendiri. Kedua, cascade informasi terjadi ketika individu-individu yang sebenarnya ragu ikut menyebarkan konten karena melihat banyak orang lain juga menyebarkannya — prinsip social proof dimanfaatkan oleh produsen hoaks secara sistematis. Ketiga, dehumanisasi linguistik — penggunaan kata-kata yang mereduksi kelompok lain menjadi kategori negatif — mempercepat polarisasi afektif hingga kelompok berlawanan dipandang bukan hanya salah, tetapi juga berbahaya. Tiga pola ini saling memperkuat: konfirmasi bias membuat seseorang tinggal di dalam echo chamber, cascade informasi memperkuat keyakinan di dalam echo chamber tersebut, dan dehumanisasi linguistik mengunci polarisasi sehingga sulit ditembus oleh komunikasi yang rasional sekalipun.

Sintesis lintas kasus ini bukan pekerjaan individual, melainkan produk kolektif yang dibangun bersama seluruh anggota kelas melalui diskusi terstruktur. Dosen berperan

sebagai fasilitator yang membantu kelas menguji apakah pola yang diidentifikasi memang didukung oleh bukti dari beberapa kasus, bukan hanya kesan subjektif. Mahasiswa yang mampu mengidentifikasi pola lintas kasus secara akurat menunjukkan kapasitas berpikir analitis yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan berbasis bukti, sejalan dengan semangat technopreneurship dalam ilmu pemerintahan: merespons masalah sosial dengan solusi yang terukur dan dapat direplikasi. Hasil pemetaan ini kemudian menjadi dasar bagi sub-bab berikutnya, yakni formulasi rekomendasi etis yang komprehensif, sehingga rekomendasi yang dihasilkan berpijak pada mekanisme psikologis nyata, bukan pada asumsi normatif semata.

Tabel 14.2 Matriks Pemetaan Mekanisme Psikologis Lintas Kasus Presentasi Kelompok

Kasus (Kelompok)	Konfirmasi Bias	Echo Chamber	Cascade Informasi	Dehumanisasi Linguistik	Social Identity Threat	Mekanisme Dominan
Hoaks Kesehatan (mis. vaksin)	Ada	Ada	Ada	Tidak	Ada	Konfirmasi bias + cascade
Hoaks Politik Lokal KTI	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Semua mekanisme aktif
Polarisasi Identitas Agama/Etnis	Ada	Ada	Tidak	Ada	Ada	Dehumanisasi + identity threat
Disinformasi Kebijakan Pemerintah	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Konfirmasi bias + cascade
[Kasus Kelompok Lain — diisi saat diskusi]	...	...	...	...	...	...

[Gambar 14.2 belum diunggah]

Gambar 14.2 Diagram pohon berlapis dua: lapisan pertama berisi tiga kotak bertuliskan nama mekanisme dominan (Konfirmasi Bias, Cascade Informasi, Dehumanisasi Linguistik); lapisan kedua di bawah setiap kotak berisi contoh kasus dari presentasi kelompok yang menunjukk

ANALOGI

Proses pemetaan lintas kasus ini serupa dengan cara ahli epidemiologi melacak

wabah penyakit: mereka tidak hanya menangani pasien satu per satu, tetapi memetakan pola penularan untuk menemukan sumber dan jalur penyebaran yang sama di balik ratusan kasus yang tampak berbeda. Begitu pula dalam kelas ini — setiap kasus hoaks adalah satu pasien, dan mekanisme psikologis adalah virus yang menjadi penyebab bersamanya.

CONTOH

Kelompok A mempresentasikan hoaks vaksin yang beredar di grup WhatsApp keluarga: konfirmasi bias teridentifikasi karena penerima pesan percaya karena isinya sesuai kekhawatiran mereka tentang efek samping. Kelompok B mempresentasikan hoaks tentang calon kepala daerah di Sulawesi Tenggara: cascade informasi teridentifikasi karena ribuan akun meneruskan tangkapan layar meski tidak membaca isi selengkapnya. Ketika dosen memandu kelas mengisi matriks bersama, terlihat bahwa konfirmasi bias hadir di kedua kasus meskipun topiknya berbeda sama sekali. Mahasiswa kemudian diminta menuliskan satu kalimat sintesis: 'Konfirmasi bias bekerja lintas topik karena ia beroperasi pada level motivasi, bukan level konten' — kalimat ini adalah hasil analisis C4 yang konkret dan dapat dinilai.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi yang sering muncul adalah anggapan bahwa setiap kasus hoaks bersifat unik sehingga tidak dapat digeneralisasi dan harus ditangani dengan cara yang sepenuhnya berbeda-beda. Anggapan ini keliru karena mengabaikan bahwa mekanisme psikologis bekerja pada level proses kognitif dan sosial yang bersifat lintas konteks — bukan pada level konten spesifik. Pembetulannya: justru dengan mengidentifikasi mekanisme yang berulang, praktisi dan pembuat kebijakan dapat merancang intervensi yang efisien dan dapat direplikasi, misalnya inokulasi prebunking yang menarget konfirmasi bias secara umum tanpa harus merancang program baru untuk setiap topik hoaks yang muncul.

C. Evaluasi Argumen dan Revisi Kritis Berbasis Umpan Balik

Setelah setiap kelompok menyampaikan presentasinya, proses pembelajaran tidak berhenti pada tepuk tangan dan giliran berikutnya. Sesi tanya jawab dan umpan balik yang menyusulnya justru merupakan inti dari pertemuan ke-14, karena di sinilah argumen diuji kekuatannya oleh pihak luar: rekan sejawat yang tidak terlibat dalam

proses analisis kelompok dan dosen yang membaca kasus dengan kacamata teoritik lebih luas. Evaluasi argumen dalam konteks ini bukan berarti mencari siapa yang salah, melainkan mengukur sejauh mana klaim yang diajukan didukung oleh bukti yang valid dan ditopang oleh kerangka teori yang koheren. Dua kriteria inilah, yaitu validitas bukti dan koherensi teoritis, yang menjadi standar penilaian bersama sepanjang sesi diskusi berlangsung.

Validitas bukti menuntut setiap pernyataan faktual dapat ditelusuri asal-usulnya: dari mana data itu diperoleh, kapan dikumpulkan, dan apakah sumber tersebut memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Koherensi teoritis menuntut hal yang berbeda namun saling melengkapi: apakah konsep psikologis yang digunakan, misalnya disonansi kognitif, echo chamber, atau efek Dunning-Kruger, benar-benar menjelaskan fenomena yang diamati, bukan sekadar ditempelkan sebagai pelengkap agar terkesan ilmiah. Ketika kedua kriteria ini tidak terpenuhi, argumen menjadi rapuh meskipun disampaikan dengan percaya diri. Sebaliknya, argumen yang sederhana namun memiliki bukti yang terverifikasi dan penjelasan teoritik yang tepat justru jauh lebih kuat dan lebih bertanggung jawab secara intelektual.

Dalam sesi umpan balik, tiap peserta, baik penonton maupun penyaji, memiliki peran aktif. Kelompok pendengar bertugas mengajukan pertanyaan yang menguji dua kriteria tadi, bukan sekadar mempertanyakan pendapat pribadi. Dosen berfungsi sebagai moderator sekaligus validator, menunjukkan titik-titik lemah argumen yang mungkin lolos dari perhatian rekan sejawat. Sesi ini dirancang bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk melatih toleransi terhadap kritik sebagai bagian dari budaya akademik yang sehat dan berintegritas, yang sejalan dengan nilai Integrity dalam kerangka ICHSA-N: kejujuran intelektual untuk mengakui kelemahan analisis sendiri jauh lebih berharga daripada mempertahankan klaim yang sudah terbukti lemah.

Tahap terakhir dan paling krusial adalah revisi. Revisi bukan berarti mengganti seluruh argumen secara oportunistik hanya agar terlihat setuju dengan semua pihak, tetapi berarti secara selektif dan kritis memperkuat bagian yang lemah berdasarkan masukan yang memiliki dasar logis dan faktual. Kelompok perlu membedakan antara umpan balik yang memang menunjukkan kelemahan nyata dan pertanyaan yang sekadar berbeda sudut pandang tanpa menyalahkan bukti. Kemampuan membedakan keduanya adalah penanda kedewasaan berpikir kritis yang menjadi target pembelajaran mata kuliah ini. Dalam konteks Ilmu Pemerintahan, kemampuan merevisi posisi berdasarkan bukti baru bukan tanda kelemahan, melainkan prasyarat bagi pengambil kebijakan yang akuntabel dan responsif terhadap dinamika sosial di lapangan.

Tabel 14.3 Kriteria Evaluasi Argumen dalam Sesi Diskusi Pertemuan ke-14

Kriteria	Indikator Terpenuhi	Indikator Tidak Terpenuhi	Pertanyaan Penguji
Validitas Bukti	Sumber dapat ditelusuri, memiliki kredibilitas, dan relevan dengan klaim yang dibuat	Sumber tidak disebutkan, kadaluarsa, atau tidak relevan dengan klaim	Dari mana data ini berasal dan bagaimana cara memverifikasinya?
Koherensi Teoritis	Konsep psikologis yang dipilih secara tepat menjelaskan mekanisme fenomena yang diamati	Konsep ditempelkan tanpa menjelaskan hubungan kausalnya dengan kasus	Mengapa konsep ini yang paling tepat menjelaskan kasus ini dibanding konsep lain?
Konsistensi Internal	Kesimpulan mengalir logis dari premis dan bukti yang disajikan sebelumnya	Kesimpulan melompat jauh dari bukti atau bertentangan dengan data yang dipaparkan sendiri	Apakah kesimpulan ini merupakan satu-satunya inferensi yang mungkin dari bukti ini?
Kelengkapan Perspektif	Alternatif penjelasan diakui dan dijelaskan mengapa ditolak atau dipilih	Hanya satu sudut pandang dipertimbangkan tanpa mengakui adanya perspektif lain	Apakah ada penjelasan lain yang tidak dipertimbangkan oleh kelompok?

[Gambar 14.3 belum diunggah]

Gambar 14.3 Diagram alur dua siklus: siklus kiri menggambarkan presentasi awal dengan tiga komponen (klaim, bukti, teori) yang membentuk segitiga argumen; siklus kanan menggambarkan argumen yang sama setelah direvisi berdasarkan umpan balik, dengan penambahan kompone

ANALOGI

Bayangkan seorang dokter muda yang baru saja menyampaikan diagnosis kepada pasien, lalu dokter senior di sebelahnya bertanya: 'Apa dasarnya Anda menyimpulkan infeksi bakteri, bukan virus?' Pertanyaan itu bukan serangan, melainkan pengecekan standar profesi. Dokter muda yang baik tidak tersinggung, tetapi memeriksa kembali hasil labnya, menimbang ulang gejalanya, dan jika memang ada yang terlewat, merevisi diagnosisnya sebelum memberikan resep. Itulah persis yang dilakukan dalam sesi evaluasi dan revisi: argumen adalah diagnosis, bukti adalah hasil lab, dan umpan balik adalah standar profesi yang menjaga agar kesimpulan tidak membahayakan.

CONTOH

Kelompok A menyajikan kasus hoaks vaksin yang viral di WhatsApp pada 2021 di wilayah Sulawesi Tengah. Mereka menggunakan konsep 'confirmation bias' untuk menjelaskan mengapa pesan itu menyebar cepat di kalangan tertentu. Dalam sesi tanya jawab, kelompok B bertanya: 'Apakah kalian memiliki data tentang siapa yang meneruskan pesan itu, apakah memang hanya orang yang sudah tidak percaya vaksin sebelumnya?' Kelompok A menyadari bahwa mereka hanya menggunakan tangkapan layar pesan tanpa data demografis penerima, sehingga klaim confirmation bias belum terbukti, baru hipotesis. Berdasarkan umpan balik ini, kelompok A merevisi klaim mereka dari pernyataan definitif menjadi pernyataan tentatif berbasis bukti yang tersedia: 'Pola penyebaran ini konsisten dengan prediksi confirmation bias, namun memerlukan verifikasi data demografis untuk dikonfirmasi.' Revisi ini justru memperkuat argumen karena menunjukkan kejujuran ilmiah dan kesadaran batas data.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi yang paling sering muncul adalah anggapan bahwa menerima umpan balik dan merevisi argumen berarti kelompok sudah 'kalah debat' atau tidak mempersiapkan diri dengan baik. Pembetulannya: dalam tradisi ilmu pengetahuan dan dalam praktik tata kelola pemerintahan yang baik, kesediaan merevisi posisi berdasarkan bukti baru justru adalah tanda kematangan analitis, bukan kelemahan. Yang benar-benar melemahkan argumen adalah kebalikannya: mempertahankan klaim yang sudah terbukti rapuh hanya karena enggan terlihat salah di depan umum. Sikap defensif semacam itu tidak hanya merugikan nilai akademik, tetapi juga berbahaya dalam konteks kebijakan publik, di mana pejabat yang tidak mau merevisi posisi berdasarkan data lapangan dapat mengambil keputusan yang merugikan masyarakat luas.

D. Formulasi Rekomendasi Etis Komprehensif dan Pengakuan Keterbatasan Analisis

Setelah argumen direvisi dan pola mekanisme psikologis lintas kasus dipetakan bersama, tahap terakhir dalam pertemuan ini menuntut setiap kelompok melangkah lebih jauh: bukan hanya menjelaskan mengapa hoaks menyebar atau polarisasi terjadi, tetapi merumuskan rekomendasi respons yang etis, realistis, dan dapat diimplementasikan. Rekomendasi etis yang komprehensif berbeda dari sekadar daftar saran umum. Rekomendasi semacam ini harus mempertimbangkan perspektif

kelompok lain yang baru diterima selama sesi diskusi, sehingga argumen yang semula sempit karena hanya bertumpu pada satu kasus kini diperkaya oleh konteks yang lebih luas. Prinsip yang memandu perumusan ini adalah nilai Integritas dalam kerangka ICHSA-N, yaitu kejujuran intelektual untuk mengakui bahwa solusi yang ditawarkan memiliki batas cakupan dan tidak bersifat universal. Di lingkungan kampus UNISAN dan kawasan Timur Indonesia yang memiliki keragaman sosial-budaya tinggi, rekomendasi yang mengabaikan konteks lokal justru berisiko menciptakan polarisasi baru alih-alih meredakannya.

Merumuskan rekomendasi etis yang komprehensif berarti mengintegrasikan tiga lapisan pertimbangan sekaligus. Lapisan pertama adalah validitas bukti: rekomendasi harus berakar pada minimal tiga bukti faktual yang telah diverifikasi, bukan pada kesan atau asumsi. Lapisan kedua adalah koherensi teoritis: mekanisme psikologis yang diidentifikasi, seperti konfirmasi bias, disonansi kognitif, atau konformitas kelompok, harus menjadi dasar logis mengapa intervensi tertentu dipilih. Lapisan ketiga adalah kelayakan implementasi: rekomendasi harus menjawab pertanyaan konkret, siapa yang melakukannya, di mana, dengan sumber daya apa, dan bagaimana keberhasilannya diukur. Ketiga lapisan ini bukan pilihan, melainkan syarat agar rekomendasi tidak jatuh menjadi pernyataan moral yang kosong.

Tanggung jawab intelektual yang matang juga menuntut setiap kelompok secara eksplisit mengakui keterbatasan analisisnya. Pengakuan ini bukan tanda kelemahan, melainkan penanda berpikir kritis yang sesungguhnya, sejalan dengan nilai Integritas dan Adaptabilitas dalam ICHSA-N. Keterbatasan dapat bersifat metodologis, misalnya data yang digunakan hanya bersumber dari media sosial satu platform sehingga tidak mewakili seluruh ekosistem informasi. Keterbatasan juga bisa bersifat teoritis, misalnya kelompok hanya menggunakan satu perspektif psikologi sosial tanpa mempertimbangkan pendekatan psikologi budaya atau sosiologi komunikasi. Dengan menyebutkan arah pengembangan lebih lanjut secara jelas, seperti perlunya penelitian lapangan, wawancara mendalam dengan populasi tertentu, atau replikasi analisis pada kasus di daerah lain di Indonesia Timur, kelompok menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan bersifat terbuka dan berproses, bukan sesuatu yang selesai begitu presentasi berakhir.

Rekomendasi etis yang telah dirumuskan kemudian harus dihubungkan dengan prinsip Pancasila, khususnya sila ketiga dan keempat, sebagai landasan nilai kolektif yang disepakati bersama dalam kehidupan berbangsa. Rekomendasi berbasis Pancasila bukan berarti mengutip teks sila secara harfiah, melainkan menunjukkan bagaimana usulan tindakan kolektif, misalnya program literasi digital berbasis komunitas kampus atau mekanisme pelaporan hoaks bersama di lingkungan mahasiswa, mencerminkan semangat persatuan dan musyawarah. Pada akhirnya,

pertemuan ke-14 ini merampungkan satu siklus belajar penuh: dari mengidentifikasi kasus, menganalisis mekanisme psikologisnya, menguji argumen di hadapan rekan sejawat, merevisi secara kritis, hingga merumuskan respons etis yang bertanggung jawab. Kemampuan menutup siklus ini dengan jujur, termasuk jujur tentang apa yang belum terjawab, adalah kompetensi inti yang dibutuhkan seorang calon aparaturnya pemerintahan yang berintegritas di era informasi.

Tabel 14.4 Komponen Rekomendasi Etis Komprehensif dan Indikator Kualitasnya

Komponen	Pertanyaan Panduan	Indikator Kualitas Tinggi	Indikator Kualitas Rendah
Dasar Bukti Faktual	Dari mana bukti berasal dan sudah diverifikasi?	Minimal 3 sumber terverifikasi, lintas platform atau lembaga	Satu sumber, tidak disebutkan asal atau tanggal
Pijakan Teoritis	Mekanisme psikologis mana yang menjadi dasar logis rekomendasi?	Nama konsep disebut eksplisit dan dihubungkan ke intervensi yang dipilih	Rekomendasi tidak dihubungkan ke teori manapun
Kelayakan Implementasi	Siapa pelaksana, di mana, dengan apa, dan bagaimana diukur?	Ada subjek pelaksana, konteks lokal, dan indikator keberhasilan	Hanya menyebut 'perlu sosialisasi' tanpa detail
Perspektif Lintas Kelompok	Apakah temuan kelompok lain sudah diintegrasikan?	Menyebutkan setidaknya satu temuan kelompok lain yang memperkuat atau memodifikasi rekomendasi	Rekomendasi identik dengan draf sebelum diskusi berlangsung
Pengakuan Keterbatasan	Apa yang belum terjawab dan mengapa?	Menyebut batas metodologis dan teoretis secara spesifik beserta arah riset lanjutan	Tidak menyebut keterbatasan apapun atau hanya menyebut 'keterbatasan waktu'

[Gambar 14.4 belum diunggah]

Gambar 14.4 Diagram alur berbentuk siklus dengan lima simpul berurutan: (1) Identifikasi Kasus dan Bukti, (2) Analisis Mekanisme Psikologis, (3) Presentasi dan Pengujian Argumen, (4) Revisi Kritis Berbasis Umpan Balik, (5) Formulasi Rekomendasi Etis dan Pengakuan Ket

ANALOGI

Seorang dokter yang baik tidak cukup mendiagnosis penyakit dan meresepkan obat. Ia juga wajib memberi tahu pasien tentang efek samping, kapan obat tidak boleh digunakan, dan kapan harus dirujuk ke spesialis lain. Itulah yang dimaksud rekomendasi etis komprehensif dengan pengakuan keterbatasan: bukan hanya memberi jawaban, tetapi jujur tentang batas kemampuan jawaban itu agar penerima rekomendasi tidak salah melangkah.

CONTOH

Kelompok yang menganalisis kasus hoaks seputar pemilihan kepala daerah di Sulawesi awalnya hanya merekomendasikan 'peningkatan literasi digital masyarakat'. Setelah menerima umpan balik bahwa kelompok lain menemukan peran tokoh adat sebagai penyebar kepercayaan dalam komunitas, rekomendasi direvisi menjadi lebih spesifik: program literasi digital yang melibatkan tokoh adat lokal sebagai fasilitator, dilaksanakan di balai desa selama tiga sesi, dengan indikator keberhasilan berupa peningkatan kemampuan verifikasi informasi peserta yang diukur melalui pretest dan posttest sederhana. Kelompok kemudian mengakui bahwa analisis mereka terbatas pada data Twitter dan belum mencakup komunikasi via pesan pribadi di aplikasi pesan instan, sehingga merekomendasikan studi lanjutan dengan metode wawancara mendalam kepada warga yang terpapar hoaks secara langsung.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi umum yang sering muncul adalah anggapan bahwa mengakui keterbatasan analisis berarti presentasi kelompok gagal atau argumen tidak layak dipercaya. Pembetulanannya: dalam tradisi ilmiah, pengakuan keterbatasan justru merupakan tanda analisis yang jujur dan matang. Sebuah rekomendasi yang mengklaim dapat menyelesaikan semua aspek masalah tanpa menyebut batas apapun justru patut dicurigai karena tidak ada penelitian yang bebas dari keterbatasan. Pengakuan keterbatasan bukan pelemah argumen, melainkan penanda bahwa kelompok memahami kompleksitas masalah dan menghormati integritas intelektual sebagai nilai dasar dalam praktik ilmu pengetahuan.

RANGKUMAN

- Presentasi kelompok yang valid secara bukti dan adil secara kontribusi merupakan wujud konkret nilai Integritas dalam komunikasi publik yang bertanggung jawab [Myers 2013; Sarwono 2015].

- Pemetaan lintas kasus mengungkap bahwa hoaks dan polarisasi beroperasi melalui mekanisme psikologis yang berulang—prasangka, konformitas, dan deindividuasi digital—bukan sebagai peristiwa yang terisolasi [Hogg & Vaughan 2018; Aronson, Wilson, & Akert 2016].
- Umpan balik peer dan dosen yang diterima secara kritis memperkuat koherensi teoritis argumen dan mendorong mahasiswa melampaui bias konfirmasi kelompok sendiri [Taylor, Peplau, & Sears 2006].
- Rekomendasi respons etis yang komprehensif harus berakar pada prinsip Pancasila, mempertimbangkan perspektif lintas kelompok, dan dapat dioperasionalkan dalam konteks kampus atau komunitas lokal Kawasan Timur Indonesia [Norris 2011; Sarwono 2015].
- Mengakui keterbatasan analisis dan merancang arah pengembangan lebih lanjut adalah tanda kedewasaan intelektual yang menjadi bekal penting menuju refleksi kritis di pertemuan ke-15 dan UAS.

REFERENSI

- Myers, D. G. (2013). *Social Psychology*. 11th Edition. McGraw-Hill.
- Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2016). *Social Psychology*. 9th Edition. Pearson.
- Hogg, M. A., & Vaughan, G. M. (2018). *Social Psychology*. 8th Edition. Pearson.
- Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2006). *Social Psychology*. 12th Edition. Pearson Prentice Hall.
- Cialdini, R. B. (2009). *Influence: Science and Practice*. 5th Edition. Pearson.
- Sarwono, S. W. (2015). *Psikologi Sosial*. Edisi 2. Salemba Humanika.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2022. *Standar Nasional Pendidikan (Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi)*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2024. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Outcome Based Education (OBE)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- Norris, Pippa. 2011. *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Putnam, Robert D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon and Schuster.
- Sears, David O., Jonathan L. Freedman, dan L. Anne Peplau. 1994. *Psikologi Sosial*. Terjemahan Michael Adryanto. Jakarta: Erlangga.

Myers, D. G. (2013); Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2016); Hogg, M. A., & Vaughan, G. M. (2018); Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2006); Sarwono, S. W. (2015); Norris, Pippa. (2011).

PERTEMUAN 15

Refleksi Kritis: Nilai, Sikap, dan Tanggung Jawab Sosial

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:

80. Menulis esai refleksi individual (600–800 kata) yang mengidentifikasi minimal 2 perubahan sikap/perspektif pribadi selama perkuliahan terhadap isu keberagaman atau konflik sosial, dikaitkan dengan konsep psikologi sosial yang dipelajari; Menghubungkan pengalaman belajar dengan minimal 1 nilai ICHSA-N (Harmony, Service, atau Adaptability) secara eksplisit dan konkret—bukan sekadar pernyataan normatif; Merumuskan 1 rencana tindak nyata (action plan) pasca-kuliah yang dapat diverifikasi keterpenuhan dan kelogisannya oleh dosen penilai
81. Merefleksikan secara kritis perubahan perspektif pribadi terhadap isu konflik sosial, keberagaman, dan diskriminasi yang dialami selama perkuliahan dengan mengacu pada pengalaman konkret di kelas
82. Mengidentifikasi momen pembelajaran spesifik—diskusi, kasus, atau bacaan tertentu—yang paling signifikan mengubah cara berpikir tentang fenomena sosial
83. Mengevaluasi perkembangan tanggung jawab sosial pribadi dalam menyikapi keberagaman, dengan membandingkan posisi awal dan posisi akhir perkuliahan secara jujur
84. Menghubungkan pengalaman belajar psikologi sosial dengan konteks kehidupan nyata sebagai warga negara di Kawasan Timur Indonesia secara argumentatif
85. Menyusun esai refleksi individual yang terstruktur, koheren secara logis, dan berlandaskan kejujuran intelektual tanpa menghindari ketidaknyamanan kritis

Pendahuluan

Pertemuan ke-15 ini merupakan tahap konsolidasi akhir sebelum Ujian Akhir Semester, sekaligus ruang untuk memaknai secara personal seluruh perjalanan belajar Psikologi Sosial sejak pertemuan pertama. Berbeda dari pertemuan sebelumnya yang menuntut analisis eksternal terhadap kasus atau data, pertemuan ini membalik arah perhatian ke dalam diri: mahasiswa diajak menjadikan dirinya sendiri sebagai subjek

kajian psikologi sosial. Kemampuan melakukan refleksi kritis bukan sekadar kecakapan akademik, melainkan kompetensi inti seorang pelaksana pemerintahan yang setiap harinya berinteraksi dengan masyarakat majemuk di Kawasan Timur Indonesia.

Pada pertemuan ke-14, mahasiswa telah menerima umpan balik komprehensif atas analisis kelompok tentang hoaks, polarisasi, dan opini publik. Kini saatnya mengintegrasikan seluruh konsep tersebut—mulai dari atribusi, konformitas, prasangka, dinamika kelompok, hingga polarisasi—ke dalam narasi refleksi individual yang jujur, terstruktur, dan berorientasi tindak nyata. Proses ini selaras dengan nilai Integrity dan Harmony ICHSA-N: kejujuran intelektual dalam menilai diri sendiri adalah prasyarat untuk bertindak secara bertanggung jawab di tengah keberagaman.

A. Momen Pembelajaran Signifikan Pengubah Cara Berpikir

Dalam perjalanan satu semester ini, tidak semua sesi perkuliahan meninggalkan kesan yang setara. Ada momen-momen tertentu yang bekerja layaknya titik balik kognitif — sebuah diskusi kelas yang tiba-tiba membongkar asumsi lama, sebuah kasus yang membuat mahasiswa tidak bisa lagi berpura-pura netral, atau sebuah bacaan yang memaksa jujur terhadap prasangka yang selama ini tidak disadari. Psikologi sosial menyebut proses ini sebagai kognitif disonansi produktif: kondisi ketidaknyamanan mental yang muncul ketika informasi baru bertentangan dengan keyakinan yang sudah mapan, dan justru ketidaknyamanan itulah yang mendorong pertumbuhan berpikir. Mahasiswa yang mampu mengidentifikasi momen-momen ini secara spesifik menunjukkan kemampuan metakognitif yang penting bagi calon aparatur pemerintahan di kawasan yang plural seperti Kawasan Timur Indonesia. Mengabaikan momen-momen ini sama artinya dengan mengabaikan bukti bahwa belajar sungguh-sungguh telah terjadi.

Momen pembelajaran signifikan tidak selalu berupa peristiwa dramatis. Ia bisa berupa satu kalimat dari sesama mahasiswa yang mewakili pengalaman kelompok yang selama ini tidak terlihat, sebuah data tentang diskriminasi di wilayah sendiri yang sebelumnya dikira tidak nyata, atau sebuah eksperimen klasik dalam literatur psikologi sosial yang tiba-tiba terasa dekat dengan perilaku di lingkungan sekitar. Konsep in-group dan out-group yang dipelajari bersama, misalnya, mungkin terasa abstrak saat pertama dibaca, tetapi menjadi sangat konkret ketika seorang rekan

berbagi cerita tentang pengalamannya diperlakukan berbeda di kantor pemerintahan karena latar belakang sukunya. Proses menghubungkan konsep akademik dengan pengalaman hidup nyata inilah yang oleh Vygotsky disebut sebagai zona perkembangan proksimal — titik di mana pengetahuan teoritis bertemu dengan konteks sosial dan menghasilkan pemahaman yang lebih dalam. Kemampuan mengenali momen ini adalah fondasi dari refleksi kritis yang tidak dangkal.

Untuk keperluan esai refleksi, mahasiswa perlu membedakan antara momen yang berkesan secara emosional dan momen yang sungguh-sungguh mengubah cara berpikir secara substantif. Keduanya tidak selalu sama. Sebuah diskusi bisa terasa seru dan hangat tetapi tidak menggeser satu pun asumsi lama; sebaliknya, sebuah bacaan yang terasa menegangkan justru bisa memaksa rekonstruksi total terhadap cara mahasiswa memandang konflik sosial di daerahnya. Oleh karena itu, dalam esai, mahasiswa diminta menyebutkan momen secara konkret — nama konsep, topik diskusi, atau judul kasus yang dianalisis — lalu menjelaskan secara argumentatif mekanisme perubahan berpikir yang terjadi: apa yang sebelumnya diyakini, apa yang menggangukannya, dan apa perspektif baru yang terbentuk sesudahnya. Tanpa ketiganya, refleksi hanya menjadi laporan perasaan, bukan evaluasi intelektual yang dapat dinilai. Nilai Integrity dalam ICHSA-N menuntut kejujuran dalam proses ini — termasuk jujur bahwa ada konsep yang sempat ditolak sebelum akhirnya diterima.

[Gambar 15.1 belum diunggah]

Gambar 15.1 Diagram alur berpikir tiga tahap: (1) Keyakinan Awal — kotak berisi contoh asumsi umum mahasiswa sebelum kuliah tentang konflik dan keberagaman; (2) Momen Gangguan Kognitif — kotak berisi jenis momen (diskusi, kasus, bacaan) yang memicu disonansi; (3) Per

ANALOGI

Bayangkan seseorang yang sejak kecil percaya bahwa semua orang di luar kampungnya adalah pendatang yang mencurigakan. Suatu hari ia menolong seorang tetangga baru yang ternyata menyelamatkan anggota keluarganya saat sakit. Satu kejadian itu tidak langsung menghapus seluruh prasangka, tetapi ia membuat orang tersebut tidak bisa lagi menggunakan keyakinan lamanya tanpa bertanya pada diri sendiri. Itulah yang disebut momen pembelajaran signifikan — bukan karena menyenangkan, melainkan karena ia membuat seseorang tidak bisa kembali ke cara berpikir semula.

CONTOH

Pada pertemuan ke-7, kelas menganalisis kasus penolakan terhadap pendatang di sebuah kabupaten di Sulawesi Timur menggunakan konsep prasangka sosial dan

teori identitas sosial Tajfel. Seorang mahasiswa yang awalnya menganggap penolakan semacam itu sebagai 'reaksi wajar masyarakat lokal' mulai mengidentifikasi bagaimana mekanisme kategorisasi in-group dan out-group digunakan untuk melegitimasi tindakan diskriminatif. Setelah berdiskusi dengan rekan yang berlatar belakang berbeda, mahasiswa tersebut mulai membedakan antara proteksi identitas budaya yang sah dan penggunaan identitas sebagai alat eksklusivisme. Proses itu menggeser posisinya dari 'saya memahami penolakan itu' menjadi 'saya perlu menganalisis siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan oleh narasi penolakan tersebut.' Itulah contoh momen pembelajaran yang dapat dituliskan secara konkret dan terverifikasi dalam esai refleksi.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi yang paling umum adalah mahasiswa menganggap bahwa momen pembelajaran signifikan harus berupa pengalaman emosional yang intens atau peristiwa di luar kelas — misalnya, kejadian di lapangan KKN atau konflik nyata yang dialami sendiri. Pembetulanannya: momen signifikan sangat mungkin terjadi di dalam kelas, bahkan dari satu kalimat dalam bacaan wajib atau satu pertanyaan yang diajukan dosen. Yang menentukan signifikansinya bukan intensitas emosi, melainkan seberapa jauh momen itu menggeser struktur berpikir mahasiswa secara terukur dan dapat dijelaskan — dari asumsi A menuju analisis B dengan mekanisme C.

B. Perubahan Perspektif terhadap Konflik, Keberagaman, dan Diskriminasi

Refleksi kritis tentang perubahan perspektif dimulai dari pertanyaan yang tampak sederhana namun menuntut kejujuran intelektual: di mana posisi Anda sebelum mengikuti perkuliahan ini, dan bagaimana posisi itu bergeser setelah satu semester bergulat dengan konsep-konsep psikologi sosial? Pergeseran perspektif bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa proses belajar benar-benar terjadi. Dalam konteks Kawasan Timur Indonesia yang ditandai keragaman suku, bahasa, dan agama yang tinggi — dari Sulawesi Tenggara hingga Papua — kemampuan mengidentifikasi perubahan cara pandang terhadap konflik dan diskriminasi bukan hanya kompetensi akademik, melainkan kecakapan hidup yang akan terus diuji di lapangan birokrasi dan pemerintahan. Mahasiswa yang kelak menjadi aparatur negara perlu mampu mengenali bias lama mereka agar tidak secara diam-diam membawa bias itu ke dalam kebijakan publik.

Psikologi sosial menawarkan dua konsep kunci yang relevan untuk membingkai perubahan perspektif ini: prasangka (prejudice) dan kategorisasi sosial. Prasangka bukan sekadar kebencian terbuka; ia sering beroperasi sebagai asumsi diam-diam yang diwariskan lingkungan, misalnya anggapan bahwa kelompok etnis tertentu 'memang sulit diatur' atau bahwa konflik antardesa di suatu wilayah 'sudah dari sononya begitu.' Kategorisasi sosial menjelaskan mengapa otak manusia secara otomatis mengelompokkan orang ke dalam 'kita' dan 'mereka', dan bagaimana pengelompokan itu bisa memperparah diskriminasi struktural jika tidak disadari. Ketika mahasiswa mulai mengenali mekanisme ini dalam diri sendiri — bukan hanya pada orang lain — itulah titik awal perubahan perspektif yang sejati, bukan sekadar pergantian pendapat di permukaan.

Perubahan perspektif yang otentik biasanya tidak seragam dan tidak linear. Ada mahasiswa yang sebelumnya meyakini konflik sosial murni disebabkan faktor agama atau etnis, lalu setelah menelaah teori konflik realistik dan identitas sosial mulai melihat dimensi ekonomi-politik dan kesenjangan akses sumber daya sebagai akar yang lebih dalam. Ada pula mahasiswa yang semula memandang keberagaman sebagai sumber masalah yang harus 'dikelola dan diredam', namun bergeser ke pandangan bahwa keberagaman adalah modal sosial yang, bila dikelola dengan kerangka psikologis yang tepat, menghasilkan inovasi dan kohesi komunitas. Kedua pergeseran ini sama-sama valid selama dilandasi argumen yang dapat dilacak ke pengalaman spesifik di kelas — diskusi kasus, bacaan wajib, atau interaksi dengan rekan berbeda latar belakang — bukan sekadar mengikuti apa yang dianggap 'jawaban yang diharapkan dosen.' Kejujuran intelektual mensyaratkan keberanian mengakui bahwa perubahan itu mungkin belum tuntas, atau bahkan bahwa sebagian prasangka lama masih bertahan dan perlu terus digarap.

Tabel 15.1 Pergeseran Perspektif: Posisi Awal versus Posisi Akhir Perkuliahan

Dimensi	Posisi Awal (Umum Ditemukan)	Posisi Akhir (Setelah Satu Semester)	Konsep Psikologi Sosial yang Mendasari
Penyebab Konflik Sosial	Atribusi tunggal: agama atau etnis sebagai sumber utama	Atribusi majemuk: faktor ekonomi, identitas sosial, dan kompetisi sumber daya	Teori Konflik Realistik, Atribusi Kausal
Fungsi Keberagaman	Potensi ancaman yang harus dikendalikan	Modal sosial yang produktif jika dikelola dengan pendekatan kontak antarkelompok	Contact Hypothesis, Social Identity Theory

Dimensi	Posisi Awal (Umum Ditemukan)	Posisi Akhir (Setelah Satu Semester)	Konsep Psikologi Sosial yang Mendasari
Diskriminasi	Hanya tindakan eksplisit dan disengaja	Termasuk bias implisit, diskriminasi struktural, dan microaggression yang tidak disadari	Implicit Bias, Stereotip, Prasangka
Tanggung Jawab Pribadi	Masalah sosial adalah urusan pemerintah atau tokoh masyarakat	Individu sebagai agen perubahan yang dimulai dari kesadaran dan tindakan konkret sehari-hari	Teori Perilaku Prosocial, Konformitas, dan Kewarganegaraan Aktif

[Gambar 15.2 belum diunggah]

Gambar 15.2 Diagram dua kolom berjudul 'Peta Pergeseran Perspektif': kolom kiri menggambarkan pola pikir awal mahasiswa tentang konflik dan keberagaman (ditandai panah lurus dan label bias umum), kolom kanan menggambarkan pola pikir reflektif setelah perkuliahan (dit

ANALOGI

Bayangkan seseorang yang seumur hidup hanya pernah melihat sebuah patung dari sisi depan dan meyakini itulah bentuk seutuhnya. Ketika ia berjalan mengelilingi patung itu untuk pertama kali, ia tidak mendapati patung baru — ia mendapati dimensi yang selama ini ada tetapi tidak terlihat. Begitu pula perubahan perspektif tentang konflik dan keberagaman: konsep-konsep psikologi sosial bukan menciptakan realitas baru, melainkan membantu mahasiswa berjalan mengelilingi fenomena yang sudah selama ini ada di sekitar mereka di Sulawesi Tenggara dan Kawasan Timur Indonesia, sehingga dimensi yang sebelumnya tersembunyi — seperti prasangka implisit atau kategorisasi sosial — akhirnya terlihat dan dapat dianalisis.

CONTOH

Seorang mahasiswa Ilmu Pemerintahan asal Kabupaten Muna mengaku sebelum kuliah bahwa ia secara otomatis merasa lebih curiga terhadap pendatang dari luar pulau yang membuka usaha di kampungnya, dan ia menganggap perasaan itu wajar karena 'semua orang di sana begitu.' Setelah mempelajari konsep in-group favoritism dan out-group derogation dari teori identitas sosial (Tajfel dan Turner), ia mulai mengenali bahwa kecurigaannya bukan fakta objektif melainkan hasil kategorisasi sosial yang diperkuat norma lokal. Pada tahap selanjutnya, ia mengidentifikasi bahwa

kecurigaan serupa juga dimiliki oleh pendatang terhadap warga asli, dan bahwa ketegangan yang pernah terjadi di desanya bukan semata soal 'orang luar versus orang dalam' melainkan soal kompetisi akses pasar dan ketidakhadiran kebijakan pemerintah daerah yang menjembatani. Pergeseran ini — dari atribusi tunggal berbasis identitas ke analisis berlapis berbasis struktur dan kebijakan — adalah contoh konkret perubahan perspektif yang dapat dituangkan dalam esai refleksi dan dikaitkan langsung dengan materi perkuliahan.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi yang sering muncul adalah anggapan bahwa esai refleksi yang baik harus menunjukkan perubahan perspektif yang dramatis dan menyeluruh, seolah mahasiswa yang baik wajib 'bertobat' dari semua prasangkanya dalam satu semester. Pembetulanannya: refleksi kritis justru menghargai kejujuran tentang perubahan yang parsial, lambat, atau bahkan yang belum tuntas. Mengakui bahwa prasangka tertentu masih bertahan dan menjelaskan mengapa itu terjadi — misalnya karena tekanan norma keluarga atau pengalaman traumatik masa lalu — adalah tanda kedewasaan intelektual yang lebih tinggi dibandingkan klaim perubahan total yang tidak dapat diverifikasi. Dosen menilai kualitas argumen dan ketertelusuran perubahan ke pengalaman konkret, bukan besarnya amplitudo perubahan itu sendiri.

C. Menghubungkan Pengalaman Belajar dengan Nilai ICHSA-N dan Konteks Kawasan Timur Indonesia

Nilai-nilai ICHSA-N bukan sekadar slogan institusional yang terpajang di dinding kampus, melainkan kerangka etis yang seharusnya menjadi cermin bagi mahasiswa ketika menelaah pengalaman belajarnya sendiri. Dalam konteks Psikologi Sosial, menghubungkan pengalaman belajar dengan nilai-nilai seperti Harmony, Service, dan Adaptability berarti mahasiswa mampu mengidentifikasi secara konkret bagaimana konsep-konsep ilmiah yang dipelajari — misalnya prasangka antarkelompok, konformitas sosial, atau dinamika konflik — beroperasi dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai warga Kawasan Timur Indonesia. Menghubungkan di sini bukan berarti sekadar menyebut nama nilai lalu melanjutkan paragraf tanpa kaitan substantif; sebaliknya, mahasiswa dituntut menunjukkan titik temu antara sebuah konsep psikologi sosial yang spesifik, sebuah pengalaman konkret selama perkuliahan, dan nilai ICHSA-N yang relevan — semuanya dalam

satu argumen yang koheren. Tanpa keterkaitan tiga arah ini, refleksi hanya menjadi deklarasi normatif yang tidak dapat diverifikasi.

Kawasan Timur Indonesia, termasuk Gorontalo dan sekitarnya, adalah laboratorium sosial yang kaya untuk menguji relevansi Psikologi Sosial. Kawasan ini ditandai oleh keberagaman etnis, agama, dan adat yang hidup berdampingan di tengah ketimpangan pembangunan, keterbatasan infrastruktur, dan warisan sejarah konflik horizontal yang pernah melukai beberapa daerahnya. Kondisi ini membuat konsep-konsep seperti identitas sosial, kategori in-group dan out-group, serta efek kontak antargolongan bukan hanya relevan secara teoritis, melainkan terasa mendesak secara praktis bagi calon aparatur pemerintahan daerah. Seorang mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang kelak mengelola pelayanan publik di wilayah multietnis perlu menganalisis bagaimana bias kognitif dan prasangka dapat menyusup ke dalam kebijakan yang tampak netral, dan nilai Harmony menjadi kompas etis yang mengarahkan analisis tersebut menuju tindakan yang berkeadilan.

Nilai Harmony dalam konteks akademik ini tidak berarti menghindari perbedaan atau menutup-nutupi konflik demi kedamaian semu. Sebaliknya, Harmony menuntut keberanian untuk mengakui tegangan sosial yang nyata, kemudian mencari jalan penyelesaian yang bermartabat bagi semua pihak — sebuah sikap yang dalam Psikologi Sosial disebut sebagai pendekatan integratif dalam resolusi konflik. Nilai Service menghubungkan motivasi belajar mahasiswa dengan orientasi ke luar diri: ilmu yang diperoleh dari perkuliahan ini bermanfaat bukan hanya bagi pertumbuhan pribadi, melainkan terutama bagi komunitas yang akan dilayani kelak. Sementara itu, Adaptability relevan saat mahasiswa menyadari bahwa solusi kebijakan yang berhasil di satu daerah Kawasan Timur belum tentu dapat diterapkan begitu saja di daerah lain yang berbeda komposisi sosialnya — sebuah pelajaran yang langsung bersumber dari konsep kontekstualisasi dalam Psikologi Sosial lintas budaya. Ketiga nilai ini, bila diartikulasikan secara argumentatif dan bukan normatif, mengubah esai refleksi dari catatan pribadi menjadi dokumen pertanggungjawaban intelektual seorang calon pemimpin publik.

Tabel 15.2 Keterkaitan Nilai ICHSA-N, Konsep Psikologi Sosial, dan Konteks Kawasan Timur Indonesia

Nilai ICHSA-N	Konsep Psikologi Sosial yang Relevan	Contoh Konteks Kawasan Timur Indonesia	Pertanyaan Reflektif untuk Esai
Harmony	Resolusi konflik integratif; reduksi prasangka melalui efek kontak	Dinamika rekonsiliasi pascakonflik komunal di Maluku dan Poso; kerukunan antaragama di	Kapan saya pertama kali menyadari bahwa 'damai' bisa menjadi alat membungkam, bukan

Nilai ICHSA-N	Konsep Psikologi Sosial yang Relevan	Contoh Konteks Kawasan Timur Indonesia	Pertanyaan Reflektif untuk Esai
		Gorontalo	menyembuhkan?
Service	Altruisme, perilaku prososial; identitas sosial dan tanggung jawab peran	Pelayanan publik di daerah 3T; pemberdayaan komunitas adat oleh pemerintah daerah	Bagaimana konsep bystander effect mengubah cara saya memandang tanggung jawab sebagai calon abdi negara?
Adaptability	Kontekstualisasi lintas budaya; fleksibilitas kognitif dalam kategori sosial	Variasi norma sosial antarsuku di Papua, NTT, dan Sulawesi dalam satu kebijakan nasional	Di mana saya menemukan diri saya paling resisten terhadap perspektif baru, dan mengapa?

[Gambar 15.3 belum diunggah]

Gambar 15.3 Diagram segitiga yang memperlihatkan tiga simpul — Konsep Psikologi Sosial (puncak), Nilai ICHSA-N (kiri bawah), dan Konteks Kawasan Timur Indonesia (kanan bawah) — dengan anak panah dua arah di setiap sisi, mengilustrasikan keterkaitan tiga arah yang har

ANALOGI

Menghubungkan nilai ICHSA-N dengan pengalaman belajar itu ibarat membuat laporan perjalanan: bukan sekadar daftar tempat yang dikunjungi, melainkan cerita tentang bagaimana setiap tempat mengubah cara Anda melihat dunia — dan ke mana Anda memutuskan pergi sesudahnya. Jika laporan hanya berisi 'saya mengunjungi Harmony dan saya senang,' pembaca tidak belajar apa-apa; yang bermakna adalah ketika penulis menjelaskan tepatnya di titik mana pemandangan itu mengejutkan, mengganggu, atau meyakinkannya.

CONTOH

Seorang mahasiswa menulis bahwa ia menghubungkan nilai Harmony dengan konsep identitas sosial yang dipelajari pada pertemuan ke-7. Sebelum perkuliahan, ia mengakui secara jujur bahwa ia cenderung memandang konflik antarsuku di Gorontalo sebagai masalah karakter atau budaya tertentu — sebuah atribusi yang ia kemudian kenali sebagai Kesalahan Atribusi Fundamental. Setelah mendiskusikan kasus tersebut di kelas dan membaca perspektif dari Kawasan Timur Indonesia, ia

merevisi posisinya: konflik itu lebih tepat dipahami sebagai produk dari persaingan sumber daya dan kategorisasi in-group yang diperkuat oleh narasi politik. Dari kesadaran ini, ia merumuskan rencana konkret: dalam praktik magang pemerintahan di semester berikutnya, ia akan mendokumentasikan satu mekanisme lokal resolusi konflik adat dan menganalisis efektivitasnya menggunakan kerangka efek kontak dari Psikologi Sosial. Contoh ini menunjukkan keterkaitan yang dapat diverifikasi antara konsep ilmiah, nilai Harmony, dan konteks lokal — bukan sekadar kalimat 'saya menghargai keberagaman.'

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi yang paling umum adalah anggapan bahwa menghubungkan pengalaman belajar dengan nilai ICHSA-N cukup dilakukan dengan menyebut nama nilai di akhir paragraf sebagai kesimpulan moral, misalnya: 'Oleh karena itu, kita harus menjaga Harmony.' Kalimat seperti ini tidak menunjukkan refleksi intelektual; ia hanya mengulangi slogan. Pembetulannya: keterkaitan dengan nilai ICHSA-N harus hadir sebagai penghubung argumentatif di tengah narasi, bukan sebagai penutup dekoratif. Nilai tersebut harus menjelaskan mengapa pengalaman tertentu bermakna dan ke arah mana perubahan sikap diarahkan — sehingga dosen penilai dapat melihat bahwa nilai itu benar-benar mengubah logika berpikir mahasiswa, bukan hanya ditempelkan setelah fakta.

D. Panduan Penulisan Esai Refleksi Terstruktur dan Penyusunan Action Plan

Esai refleksi bukan sekadar ringkasan materi perkuliahan, melainkan sebuah teks argumentatif yang memperlihatkan pergerakan berpikir — dari posisi awal yang dipegang mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai hingga posisi akhir yang telah tertempa oleh diskusi, bacaan, dan pengalaman kelas. Panjang esai ditetapkan antara 600 hingga 800 kata agar mahasiswa terlatih memilih yang esensial dan tidak bersembunyi di balik verbositas. Struktur esai terdiri dari empat bagian yang harus hadir secara eksplisit: (1) posisi awal, yakni cara pandang mahasiswa terhadap keberagaman atau konflik sosial sebelum mengikuti MK ini; (2) momen pengubah, yaitu peristiwa pembelajaran spesifik — diskusi kasus, bacaan tertentu, atau dinamika kelas — yang menjadi titik balik cara berpikir; (3) perubahan sikap, berisi identifikasi minimal dua perubahan konkret yang dikaitkan dengan konsep psikologi sosial seperti prasangka, kategorisasi sosial, disonansi kognitif, atau kontak

antarkelompok; dan (4) rencana tindak, yang akan dibahas lebih rinci di paragraf berikutnya. Keempat bagian ini harus terhubung secara logis sehingga pembaca — dalam hal ini dosen penilai — dapat mengikuti alur transformasi berpikir mahasiswa tanpa harus menebak-nebak.

Bagian terpenting namun paling sering diabaikan adalah action plan, yakni rencana tindak nyata pasca-kuliah yang dapat diverifikasi kelogisan dan keterpenuhannya. Action plan yang valid harus memenuhi tiga syarat: pertama, spesifik — menyebut tindakan konkret yang akan dilakukan, bukan niat abstrak seperti 'akan lebih toleran'; kedua, kontekstual — tindakan itu harus berakar pada konteks kehidupan nyata mahasiswa sebagai warga Kawasan Timur Indonesia, misalnya terlibat dalam forum mediasi antarkampung yang berbeda latar agama di lingkungan tempat tinggal, mendampingi BPD desa dalam sesi musyawarah inklusif, atau merancang materi sosialisasi kebijakan yang peka terhadap keberagaman etnis di kabupaten asal; ketiga, terverifikasi — artinya ada bukti yang bisa ditunjukkan kepada dosen, seperti catatan kehadiran, foto kegiatan, atau draf dokumen. Nilai Harmony dan Service dari ICHSA-N harus dihubungkan dengan action plan ini secara eksplisit dan argumentatif, bukan sekadar disebut di akhir kalimat sebagai pemanis. Kaitan itu dibangun dengan menjawab pertanyaan: bagaimana tindakan tersebut mencerminkan prinsip keselarasan sosial atau pelayanan kepada komunitas sebagaimana yang telah mahasiswa pahami melalui kajian psikologi sosial selama satu semester ini?

Kejujuran intelektual adalah standar mutu utama esai ini, dan hal itu berarti mahasiswa tidak boleh menghindari pengakuan atas bias atau kesalahan berpikir yang pernah dipegang. Esai yang hanya memuat hal-hal positif dan tidak menyentuh ketidaknyamanan kritis justru menunjukkan refleksi yang dangkal. Dosen penilai akan mencari keberanian mahasiswa untuk mengakui, misalnya, bahwa sebelum perkuliahan ia cenderung menormalisasi diskriminasi berbasis asal daerah karena dianggap 'sudah biasa', dan bagaimana pandangan itu bergeser setelah membaca kajian tentang efek dehumanisasi atau mengikuti diskusi kasus konflik sosial di Papua atau Maluku. Adapun dari sisi teknis penulisan, paragraf pembuka esai tidak boleh dimulai dengan kalimat definisi yang generik seperti 'Psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari...'; paragraf pembuka harus langsung memperkenalkan posisi awal penulis. Selain itu, setiap klaim perubahan sikap wajib disertai bukti tekstual — kutipan atau parafrase dari konsep yang dipelajari beserta keterangan sumber — agar esai memiliki landasan akademik, bukan hanya kesan subjektif semata.

Proses menulis esai refleksi dapat diawali dengan latihan pra-tulis selama sepuluh menit menggunakan teknik freewriting terbimbing: mahasiswa menulis tanpa berhenti tentang satu momen di kelas yang paling membuatnya tidak nyaman secara

intelektual, kemudian mengidentifikasi konsep psikologi sosial mana yang menjelaskan ketidaknyamanan itu. Hasil freewriting bukan bagian dari esai, melainkan bahan mentah untuk menyusun kerangka. Setelah kerangka empat bagian terbentuk, mahasiswa baru mengembangkannya menjadi teks utuh dengan memastikan transisi antarbagian bersifat kausal, bukan hanya kronologis — artinya mahasiswa tidak sekadar menceritakan 'kemudian saya belajar ini', melainkan menjelaskan 'karena saya belajar ini, cara saya melihat fenomena itu berubah dengan cara berikut'. Pendekatan ini selaras dengan metode Case-Based Learning yang diterapkan sepanjang perkuliahan, di mana kasus konkret menjadi pintu masuk untuk membangun pemahaman yang dapat ditransfer ke situasi baru — termasuk situasi kehidupan nyata mahasiswa sebagai calon aparatur atau pemimpin komunitas di Kawasan Timur Indonesia.

Tabel 15.3 Kriteria Penilaian Esai Refleksi dan Action Plan

Komponen	Indikator Terpenuhi	Indikator Tidak Terpenuhi
Posisi Awal	Menyebut cara pandang konkret sebelum perkuliahan disertai konteks spesifik	Hanya menyatakan 'sebelumnya saya kurang paham' tanpa substansi
Momen Pengubah	Merujuk satu peristiwa pembelajaran spesifik (diskusi, kasus, bacaan) dengan detail yang dapat diverifikasi	Menyebut 'selama kuliah saya banyak belajar' tanpa kejadian spesifik
Perubahan Sikap	Mengidentifikasi minimal 2 perubahan dikaitkan dengan konsep psikologi sosial bernama (mis. prasangka implisit, kategorisasi sosial)	Perubahan dinyatakan secara normatif tanpa kaitan konsep
Nilai ICHSA-N	Satu nilai (Harmony, Service, atau Adaptability) dihubungkan secara argumentatif dengan pengalaman konkret	Nilai hanya disebut di akhir esai sebagai penutup tanpa penjelasan kausal
Action Plan	Spesifik, kontekstual (KTI), dan terverifikasi dengan bukti yang dapat ditunjukkan	Berupa niat abstrak seperti 'akan lebih peduli' tanpa rincian tindakan
Kejujuran Intelektual	Mengakui bias atau kesalahan berpikir awal secara eksplisit dan kritis	Esai hanya memuat perkembangan positif tanpa pengakuan atas keterbatasan awal

[Gambar 15.4 belum diunggah]

Gambar 15.4 Diagram alur penulisan esai refleksi empat tahap: (1) kotak 'Posisi Awal' dengan panah ke (2) kotak 'Momen Pengubah' disertai ikon buku/diskusi, panah ke (3) kotak 'Perubahan Sikap' dengan label konsep psikologi sosial, panah ke (4) kotak 'Action Plan' de

ANALOGI

Menulis esai refleksi ini mirip dengan seorang dokter muda yang mengisi logbook klinik: ia tidak cukup mencatat 'hari ini saya belajar banyak', melainkan harus menuliskan kasus pasien mana yang mengubah diagnosis awalnya, konsep patofisiologi mana yang menjelaskan perubahan itu, dan tindakan klinis apa yang akan ia lakukan berbeda di masa depan. Tanpa spesifisitas itu, logbook tidak bernilai — demikian pula esai refleksi tanpa momen konkret, konsep bernama, dan action plan terverifikasi.

CONTOH

Contoh action plan yang tidak valid: 'Saya akan lebih menghargai perbedaan di sekitar saya.' Contoh action plan yang valid dan terverifikasi: 'Dalam tiga bulan setelah UAS, saya akan bergabung sebagai fasilitator sukarela dalam satu sesi musyawarah desa di Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, yang dihadiri warga dari tiga kelompok etnis berbeda, dengan menerapkan prinsip kontak antarkelompok yang kondusif sebagaimana dirumuskan oleh Allport — bukti berupa surat tugas atau berita acara musyawarah yang akan saya lampirkan kepada dosen pembimbing.' Perbedaan antara keduanya terletak pada keberadaan tindakan spesifik, lokasi konkret, konsep akademik yang menjadi landasan, dan mekanisme verifikasi yang dapat diperiksa.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi paling umum adalah anggapan bahwa esai refleksi yang baik adalah esai yang menunjukkan betapa besar perubahan positif yang telah terjadi pada diri mahasiswa. Akibatnya, banyak mahasiswa menulis esai yang terasa seperti testimoni perubahan diri yang heroik, tanpa mengakui bias yang masih tersisa atau proses yang masih berlanjut. Pembetulanannya: esai refleksi dinilai justru dari kedalaman kejujuran intelektual, termasuk keberanian mengakui bahwa perubahan sikap itu tidak selalu nyaman, tidak selalu tuntas, dan bahwa beberapa prasangka mungkin masih memerlukan waktu lebih panjang untuk diurai. Mengakui hal itu secara kritis dan argumentatif justru menunjukkan kematangan berpikir yang lebih tinggi daripada klaim perubahan yang terkesan sempurna.

RANGKUMAN

- Refleksi kritis mensyaratkan identifikasi momen pembelajaran spesifik yang secara nyata mengubah cara berpikir mahasiswa tentang konflik sosial, keberagaman, dan diskriminasi selama 14 pertemuan.
- Perubahan perspektif yang otentik ditandai oleh kemampuan membandingkan posisi awal dan akhir perkuliahan secara jujur, termasuk mengakui ketidaknyamanan intelektual yang muncul selama proses belajar.
- Menghubungkan pengalaman belajar dengan nilai ICHSA-N dan konteks Kawasan Timur Indonesia mengubah refleksi dari sekadar perenungan pribadi menjadi argumen akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Esai refleksi individual 600–800 kata yang terstruktur—memuat minimal 2 perubahan sikap, 1 nilai ICHSA-N secara konkret, dan 1 action plan terverifikasi—adalah deliverable utama pertemuan ini sekaligus persiapan konseptual menuju Ujian Akhir Semester.
- Kemampuan merefleksikan diri sebagai aktor sosial merupakan kompetensi inti calon aparatur pemerintah yang bekerja di tengah masyarakat majemuk, menjadikan pertemuan ini relevan secara praktis dan etis.

REFERENSI

- Myers, D. G. (2013). *Social Psychology*. 11th Edition. McGraw-Hill.
- Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2016). *Social Psychology*. 9th Edition. Pearson.
- Hogg, M. A., & Vaughan, G. M. (2018). *Social Psychology*. 8th Edition. Pearson.
- Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2006). *Social Psychology*. 12th Edition. Pearson Prentice Hall.
- Cialdini, R. B. (2009). *Influence: Science and Practice*. 5th Edition. Pearson.
- Sarwono, S. W. (2015). *Psikologi Sosial*. Edisi 2. Salemba Humanika.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2022. *Standar Nasional Pendidikan (Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi)*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2024. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Outcome Based Education (OBE)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- Norris, Pippa. 2011. *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge: Cambridge University Press.

Putnam, Robert D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon and Schuster.

Sears, David O., Jonathan L. Freedman, dan L. Anne Peplau. 1994. *Psikologi Sosial*. Terjemahan Michael Adryanto. Jakarta: Erlangga.

Sarwono, S. W. (2015); Myers, D. G. (2013); Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2006); Sears, David O., Freedman, Jonathan L., dan Peplau, L. Anne. (1994); Putnam, Robert D. (2000).

PERTEMUAN 16

Ujian Akhir Semester: Psikologi Sosial dan Aplikasinya dalam Ilmu Pemerintahan

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:

86. Menjawab soal UAS secara mandiri dan jujur sesuai tata tertib ujian yang berlaku
87. Mendemonstrasikan penguasaan konsep-konsep psikologi sosial yang telah dikaji sepanjang semester secara terintegrasi
88. Menerapkan kemampuan analisis dan penalaran kritis dalam menjawab pertanyaan berbasis kasus atau skenario sosial

Pendahuluan

Pertemuan ke-16 ini merupakan titik puncak seluruh perjalanan akademik semester, di mana mahasiswa membuktikan ketuntasan belajar secara sumatif melalui Ujian Akhir Semester tertulis. Selama lima belas pertemuan sebelumnya, mahasiswa telah membangun pemahaman berlapis — dimulai dari konsep dasar persepsi sosial dan atribusi, melewati dinamika kelompok, prasangka, dan diskriminasi, hingga analisis empiris perilaku pemilih lokal, polarisasi digital, dan refleksi kritis atas nilai serta tanggung jawab sosial. Fondasi konseptual dan analitik yang terakumulasi itulah yang kini diuji secara menyeluruh dan terintegrasi.

Ujian ini bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan kesempatan bagi mahasiswa untuk menunjukkan bahwa ilmu psikologi sosial benar-benar telah terinternalisasi sebagai alat berpikir, bukan sekadar hafalan. Nilai integritas sebagai bagian dari karakter ICHSA-N menjadi fondasi utama pelaksanaan ujian ini: setiap jawaban yang ditulis secara mandiri dan jujur merupakan cerminan otentik dari kompetensi yang telah dibangun sepanjang semester, sekaligus latihan nyata atas sikap antikorupsi yang kelak dituntut dalam praktik pemerintahan.

A. Tata Tertib, Etika, dan Prosedur Pelaksanaan Ujian

Ujian Akhir Semester (UAS) bukan sekadar formalitas administratif, melainkan momen pembuktian integritas akademik yang sesungguhnya. Dalam konteks Psikologi Sosial, UAS dirancang untuk mengukur kemampuan mahasiswa mengintegrasikan konsep-konsep yang telah dikaji selama satu semester penuh, mulai dari konformitas sosial, kepemimpinan, dinamika kelompok, hingga perilaku kolektif dalam konteks pemerintahan. Oleh karena itu, setiap mahasiswa wajib hadir tepat waktu, membawa kartu ujian yang sah, dan menempatkan diri di kursi yang telah ditentukan oleh pengawas. Tas, buku, dan perangkat elektronik pribadi harus diletakkan di tempat yang ditunjuk sebelum ujian dimulai, tanpa pengecualian.

Prosedur pelaksanaan dimulai dengan pengecekan identitas oleh pengawas, pembagian lembar soal, dan pencatatan waktu mulai serta berakhirnya ujian. Mahasiswa tidak diperkenankan meminjam alat tulis dari sesama peserta, mengajukan pertanyaan yang bersifat meminta petunjuk jawaban kepada pengawas, atau meninggalkan ruangan sebelum separuh waktu ujian berlalu kecuali atas izin tertulis pengawas. Bila peserta selesai lebih awal, lembar jawaban diserahkan langsung kepada pengawas dan peserta meninggalkan ruangan dengan tertib agar tidak mengganggu peserta lain. Seluruh rangkaian prosedur ini bukan birokrasi yang memberatkan, melainkan bentuk penghormatan terhadap proses ilmiah yang adil dan setara bagi semua peserta.

Etika dalam pelaksanaan ujian mencerminkan nilai integritas yang menjadi fondasi profesi aparatur pemerintahan. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang kelak mengemban amanah publik perlu menginternalisasi bahwa kejujuran dalam ujian adalah latihan awal dari kejujuran dalam kebijakan. Tindakan menyontek, meminjam jawaban, atau memanfaatkan catatan yang tidak diizinkan bukan hanya pelanggaran tata tertib akademik, melainkan kontradiksi langsung dengan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung seorang penyelenggara negara. Pelanggaran tata tertib akan diproses sesuai ketentuan Peraturan Akademik UNISAN dan dapat berakibat pada pembatalan hasil ujian yang bersangkutan.

Tabel 16.1 Ringkasan Tata Tertib Pelaksanaan UAS Psikologi Sosial

Aspek	Ketentuan	Sanksi Pelanggaran
Kehadiran	Hadir maksimal 15 menit setelah ujian dimulai; lebih dari itu tidak diperkenankan masuk	Dinyatakan tidak mengikuti UAS
Identitas	Wajib membawa Kartu Ujian dan KTM/identitas resmi	Tidak diperbolehkan mengikuti ujian

Aspek	Ketentuan	Sanksi Pelanggaran
Perangkat Elektronik	Semua perangkat dimatikan dan disimpan di luar jangkauan selama ujian berlangsung	Lembar jawaban disita; dianggap curang
Komunikasi Antar Peserta	Dilarang berbicara, berbisik, atau bertukar isyarat dengan peserta lain	Peringatan hingga dikeluarkan dari ruangan
Pengumpulan Lembar Jawaban	Diserahkan langsung kepada pengawas; tidak boleh dibawa keluar ruangan	Nilai ujian dinyatakan gugur

[Gambar 16.1 belum diunggah]

Gambar 16.1 Diagram alur prosedur pelaksanaan UAS: mulai dari antrian pengecekan identitas di pintu masuk, penempatan duduk, pembagian soal, pengerjaan, pengumpulan lembar jawaban, hingga keluar ruangan secara tertib. Diagram dibuat dalam format bagan horizontal yang

ANALOGI

Tata tertib ujian dapat dianalogikan dengan prosedur sidang paripurna di lembaga legislatif. Sebagaimana anggota dewan tidak boleh berbicara sembarangan, membawa dokumen yang tidak relevan, atau meninggalkan ruang sidang tanpa izin pimpinan, mahasiswa pun terikat pada protokol tertentu yang menjaga marwah dan legitimasi proses pengambilan keputusan. Mengabaikan prosedur sidang berarti merusak kepercayaan publik; mengabaikan tata tertib ujian berarti merusak kepercayaan akademik.

CONTOH

Skenario bertahap: (1) Budi tiba 10 menit sebelum ujian, menyerahkan tas ke tempat penyimpanan, lalu duduk di kursi bernomor sesuai presensi. (2) Pengawas membagikan soal pada pukul 08.00 dan mencatat waktu di papan tulis. (3) Pada menit ke-30, Budi ragu terhadap satu pertanyaan; ia tidak bertanya kepada teman di sebelahnya, melainkan membaca ulang soal dengan seksama dan mengandalkan pemahamannya sendiri -- inilah penerapan integritas dalam situasi nyata. (4) Pada menit ke-85 (dari total 90 menit), Budi selesai, mengecek kembali jawabannya, lalu menyerahkan lembar jawaban kepada pengawas dan keluar dengan tenang tanpa membicarakan isi soal kepada peserta yang masih mengerjakan ujian di luar ruangan.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi yang sering muncul adalah anggapan bahwa 'bertanya kepada teman hanya soal cara penulisan, bukan jawaban' masih diperbolehkan selama ujian berlangsung. Pembetulannya: komunikasi dalam bentuk apa pun antarpeserta selama ujian adalah pelanggaran tata tertib, tanpa memandang substansi pertanyaan. Pengawas tidak memiliki kewajiban membuktikan bahwa yang dibicarakan adalah jawaban soal; fakta terjadinya komunikasi sudah cukup sebagai dasar sanksi. Prinsip ini selaras dengan konsep konformitas situasional dalam Psikologi Sosial: tekanan sosial dari situasi ujian menuntut kepatuhan pada norma keheningan, bukan justifikasi pengecualian individual.

B. Penguasaan Konsep Psikologi Sosial secara Terintegrasi

Sepanjang semester, mahasiswa telah mengkaji konsep-konsep inti Psikologi Sosial mulai dari pembentukan sikap, konformitas, obedience, prasangka sosial, hingga dinamika kelompok dan pengaruh sosial dalam pengambilan keputusan. Penguasaan yang sesungguhnya bukan sekadar mengingat definisi masing-masing konsep secara terpisah, melainkan mampu mengidentifikasi bagaimana konsep-konsep itu saling berkaitan dan saling memperkuat dalam satu fenomena pemerintahan yang nyata. Misalnya, munculnya polarisasi politik di tingkat desa tidak dapat dijelaskan hanya dengan teori prasangka saja, tetapi perlu dikaitkan dengan dinamika in-group versus out-group, pengaruh tokoh otoritas lokal, serta tekanan konformitas dalam komunitas adat. Kemampuan mengintegrasikan inilah yang menjadi target capaian pada level analisis-sintesis (C4-C5) yang diuji dalam UAS.

Integrasi konsep juga berarti mahasiswa mampu bergerak dari tataran teoritis ke tataran aplikatif secara koheren. Ketika dihadapkan pada sebuah kasus kebijakan publik, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis faktor psikologis yang melatarbelakangi resistensi masyarakat, menghubungkannya dengan teori atribusi atau groupthink, lalu menyimpulkan implikasi praktisnya bagi aparatur pemerintahan. Konteks Kawasan Timur Indonesia, termasuk daerah-daerah di sekitar Sulawesi Tengah dan wilayah kerja UNISAN, kaya akan kasus nyata seperti pengelolaan konflik antarkomunitas, program transmigrasi, hingga partisipasi warga dalam musyawarah desa yang semuanya dapat dijadikan bahan analisis terintegrasi. Nilai Harmony dan Service dalam semangat ICHSA-N mendorong mahasiswa untuk tidak hanya menganalisis masalah sosial secara dingin, tetapi juga menghayati tanggung jawab moral seorang calon aparatur pemerintahan dalam merespons dinamika psikologis masyarakat.

Penguasaan terintegrasi juga menuntut mahasiswa untuk mengenali batas-batas konsep dan konteks penerapannya secara kritis. Tidak semua perilaku kolektif dapat dijelaskan oleh satu teori saja, dan mahasiswa yang matang secara akademik akan memilih kerangka teoretis yang paling tepat sesuai konteks kasus, bukan sekadar menggunakan teori yang paling familiar. Dalam UAS, kemampuan ini diperlihatkan melalui argumen yang terstruktur: mahasiswa menyebutkan konsep yang relevan, menjelaskan mekanisme kerjanya, mengaitkannya dengan data atau fakta kasus, dan menarik kesimpulan yang logis. Sikap Integrity menurut nilai ICHSA-N menjadi landasan penting di sini, karena menjawab soal dengan penalaran yang jujur dan berbasis bukti jauh lebih bernilai daripada jawaban yang terkesan panjang namun kosong dari substansi analitik.

Tabel 16.2 Peta Integrasi Konsep Psikologi Sosial dan Relevansinya dalam Ilmu Pemerintahan

Kluster Konsep	Konsep Utama	Relevansi dalam Pemerintahan	Level Kognitif yang Diuji
Pengaruh Sosial	Konformitas, Obedience, Compliance	Kepatuhan warga terhadap regulasi; pengaruh pemimpin daerah	C4 – Menganalisis
Kognisi Sosial	Atribusi, Stereotip, Prasangka	Persepsi birokrat terhadap kelompok marginal; diskriminasi layanan	C4 – Menganalisis
Dinamika Kelompok	Groupthink, Polarisasi, Kepemimpinan	Pengambilan keputusan di DPRD; musyawarah desa	C5 – Mengevaluasi
Sikap dan Perubahan Perilaku	Pembentukan sikap, Disonansi Kognitif	Resistensi masyarakat terhadap program pemerintah	C5 – Mengevaluasi
Perilaku Prosocial dan Agresi	Altruisme, Deindividuasi, Agresi Kolektif	Konflik antarkomunitas; gerakan sosial di daerah	C5 – Mengevaluasi

[Gambar 16.2 belum diunggah]

Gambar 16.2 Diagram spider-web atau peta konsep berbentuk jaringan yang menampilkan lima kluster konsep Psikologi Sosial (Pengaruh Sosial, Kognisi Sosial, Dinamika Kelompok, Sikap dan Perubahan Perilaku, Perilaku Prosocial dan Agresi) sebagai simpul utama, dihubungkan

ANALOGI

Penguasaan konsep Psikologi Sosial secara terintegrasi ibarat seorang teknisi listrik yang tidak hanya hafal nama setiap komponen -- resistor, kapasitor, transistor -- tetapi mampu membaca diagram rangkaian secara keseluruhan dan mendiagnosis mengapa seluruh sirkuit gagal bekerja ketika satu komponen bermasalah. Mahasiswa yang hanya menghafal definisi ibarat teknisi yang tahu nama komponen tetapi bingung ketika diminta memperbaiki rangkaian nyata.

CONTOH

Seorang mahasiswa dihadapkan pada kasus: kepala desa di Sulawesi Tengah menerbitkan kebijakan baru tentang pengelolaan hutan adat, tetapi sebagian besar warga menolak meskipun kebijakan itu secara objektif menguntungkan mereka. Langkah pertama, mahasiswa mengidentifikasi konsep disonansi kognitif -- warga mungkin sudah memiliki keyakinan lama tentang hak adat yang bertentangan dengan kebijakan baru. Langkah kedua, mahasiswa mengaitkannya dengan dinamika in-group: penolakan diperkuat oleh tokoh adat yang dianggap representasi kelompok. Langkah ketiga, mahasiswa menghubungkannya dengan teori obedience -- warga mengikuti arahan tokoh adat sebagai figur otoritas lokal, bukan karena menolak manfaat kebijakan itu sendiri. Kesimpulan integratif yang ditarik adalah: resistensi ini bukan soal ketidaktahuan, melainkan konflik antara loyalitas kelompok, otoritas adat, dan perubahan norma -- sehingga pendekatan komunikasi pemerintah harus melibatkan tokoh adat sebagai agen perubahan, bukan mengabaikannya.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi yang paling umum adalah anggapan bahwa menjawab soal UAS Psikologi Sosial cukup dengan menyebutkan satu teori dan definisinya secara panjang lebar, padahal soal berbasis kasus justru menuntut ketepatan pemilihan konsep dan kedalaman kaitannya dengan fenomena yang dideskripsikan. Pembetulannya: jawaban yang baik bukan yang terpanjang, melainkan yang paling koheren dalam menghubungkan konsep dengan fakta kasus -- menyebutkan tiga konsep yang relevan dan mengaitkannya secara logis jauh lebih kuat daripada menjelaskan satu konsep secara panjang tanpa menyentuh inti permasalahan kasus.

C. Analisis Kasus dan Penalaran Kritis dalam Konteks Pemerintahan

Kemampuan menganalisis kasus bukan sekadar mengulang definisi, melainkan menghubungkan konsep psikologi sosial dengan situasi nyata yang dihadapi aparaturnya dan lembaga pemerintahan. Pada UAS ini, soal disajikan dalam format skenario atau kasus pendek yang menggambarkan fenomena sosial di ranah publik, misalnya perilaku birokrat yang tunduk pada perintah atasan meski bertentangan dengan etika pelayanan, atau munculnya prasangka antarkelompok dalam proses musyawarah desa. Mahasiswa dituntut mengidentifikasi konsep psikologi sosial yang relevan, menjelaskan mekanisme psikologis yang bekerja di balik perilaku tokoh dalam skenario, lalu menilai dampaknya terhadap kualitas tata kelola pemerintahan. Pendekatan ini selaras dengan level analisis C4 hingga C6 dalam Taksonomi Bloom, sehingga jawaban yang hanya menyebut nama konsep tanpa elaborasi kontekstual tidak akan memperoleh skor penuh.

Penalaran kritis dalam menjawab kasus pemerintahan berarti mahasiswa mampu membedakan antara penyebab psikologis dan penyebab struktural dari sebuah persoalan publik, lalu menawarkan implikasi kebijakan yang logis berdasarkan teori. Misalnya, ketika sebuah skenario menampilkan rendahnya partisipasi warga dalam program pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia, mahasiswa perlu mengurai apakah fenomena itu lebih banyak dipicu oleh kepatuhan buta pada otoritas, efek penonton, atau lemahnya identitas sosial komunitas. Setelah diagnosis psikologis dibuat, langkah berikutnya adalah menilai intervensi pemerintahan apa yang paling tepat, misalnya penguatan kohesi kelompok melalui deliberasi publik atau desain komunikasi yang meminimalkan konformitas pasif. Kreativitas dalam merancang solusi yang kontekstual dan bertanggung jawab mencerminkan nilai Creativity dan Service dalam profil lulusan ICHSA-N yang diharapkan dari sarjana Ilmu Pemerintahan.

Agar jawaban terstruktur dan meyakinkan, mahasiswa disarankan menggunakan kerangka tiga lapis secara konsisten: pertama, identifikasi fenomena perilaku yang tampak dalam kasus; kedua, hubungkan dengan satu atau lebih konsep psikologi sosial beserta penjelasan mekanismenya; ketiga, tarik implikasi bagi kebijakan atau praktik pemerintahan yang lebih baik. Kerangka ini membantu penguji menilai seberapa dalam pemahaman mahasiswa sekaligus seberapa jauh mereka mampu mengintegrasikan berbagai konsep yang telah dipelajari sepanjang semester, mulai dari dinamika kelompok hingga pengaruh sosial dalam pengambilan keputusan publik. Integrasi konsep lintas topik adalah pembeda antara jawaban yang

memuaskan dan jawaban yang luar biasa, karena realitas pemerintahan jarang dapat dijelaskan oleh satu teori tunggal saja.

[Gambar 16.3 belum diunggah]

Gambar 16.3 Diagram alur tiga lapis analisis kasus: (1) kotak 'Fenomena Perilaku dalam Skenario' di sebelah kiri; anak panah menuju (2) kotak 'Konsep Psikologi Sosial yang Relevan & Mekanismenya' di tengah; anak panah menuju (3) kotak 'Implikasi bagi Kebijakan/Prakti

ANALOGI

Menganalisis kasus pemerintahan dengan psikologi sosial mirip dengan kerja dokter spesialis yang memeriksa pasien: dokter tidak cukup hanya membaca gejala luar, ia harus mencocokkan gejala dengan diagnosis penyakit yang tepat, memahami mekanisme fisiologis yang bekerja, lalu meresepkan obat yang sesuai kondisi pasien. Mahasiswa yang hanya menyebut nama teori tanpa menjelaskan cara kerjanya ibarat dokter yang menebak nama penyakit tanpa memeriksa pasien sama sekali.

CONTOH

Skenario: Seorang camat memerintahkan seluruh staf kecamatan untuk memberikan tanda tangan pada dokumen rekomendasi yang sebenarnya tidak memenuhi syarat administratif, dengan alasan sudah ada instruksi dari bupati. Seluruh staf menurut tanpa bertanya. Langkah analisis tiga lapis: Pertama, fenomena yang tampak adalah kepatuhan kolektif staf meski mereka mengetahui adanya pelanggaran prosedur. Kedua, konsep yang relevan adalah obedience to authority (Milgram) yang menjelaskan bahwa individu cenderung mengikuti perintah figur otoritas meski bertentangan dengan penilaian pribadi, diperkuat oleh konformitas informatif dalam konteks kelompok kerja yang tertutup. Ketiga, implikasi kebijakan: perlu mekanisme whistleblowing yang aman dan pelatihan etika pelayanan publik agar aparaturnya berani menolak perintah yang melanggar integritas, sejalan dengan nilai Integrity dalam profil ICHSA-N.

MISKONSEPSI YANG LAZIM

Miskonsepsi umum yang sering muncul dalam jawaban UAS adalah anggapan bahwa satu kasus hanya boleh dijelaskan dengan satu konsep psikologi sosial. Akibatnya, mahasiswa memilih satu teori lalu mengabaikan faktor psikologis lain yang sama-sama bekerja dalam skenario tersebut. Pembetulanannya: fenomena sosial di pemerintahan hampir selalu bersifat multideterminan; tugas mahasiswa adalah menentukan konsep mana yang paling dominan dan menjelaskan bagaimana konsep-

konsep lain berperan sebagai faktor penguat atau pelemah, bukan memaksakan satu teori sebagai satu-satunya penjelasan.

RANGKUMAN

- Ujian Akhir Semester dilaksanakan secara individual tertulis tatap muka selama 2x50 menit sesuai prosedur penilaian sumatif program studi, dengan menjunjung tinggi integritas akademik sebagai cerminan nilai ICHSA-N.
- Seluruh bahan kajian psikologi sosial dari pertemuan 1 hingga 15 — mulai persepsi sosial hingga refleksi kritis atas polarisasi dan hoaks — menjadi cakupan terintegrasi yang diujikan dalam UAS.
- Butir soal UAS dirancang berbasis kasus atau skenario sosial-politik yang menuntut kemampuan analisis pada level C4 hingga C5, bukan sekadar reproduksi definisi atau fakta.
- Kejujuran dalam mengerjakan ujian secara mandiri merupakan praktik nyata antikorupsi dan tanggung jawab sosial yang relevan dengan profil lulusan Ilmu Pemerintahan.
- Nilai UAS bersama komponen penilaian formatif sepanjang semester menjadi gambaran utuh pencapaian kompetensi mahasiswa dalam menggunakan perspektif psikologi sosial untuk menganalisis gejala pemerintahan dan politik.

REFERENSI

- Myers, D. G. (2013). *Social Psychology*. 11th Edition. McGraw-Hill.
- Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2016). *Social Psychology*. 9th Edition. Pearson.
- Hogg, M. A., & Vaughan, G. M. (2018). *Social Psychology*. 8th Edition. Pearson.
- Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2006). *Social Psychology*. 12th Edition. Pearson Prentice Hall.
- Cialdini, R. B. (2009). *Influence: Science and Practice*. 5th Edition. Pearson.
- Sarwono, S. W. (2015). *Psikologi Sosial*. Edisi 2. Salemba Humanika.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2022. *Standar Nasional Pendidikan (Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi)*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2024. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Outcome Based Education (OBE)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

- Norris, Pippa. 2011. *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Putnam, Robert D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon and Schuster.
- Sears, David O., Jonathan L. Freedman, dan L. Anne Peplau. 1994. *Psikologi Sosial*. Terjemahan Michael Adryanto. Jakarta: Erlangga.
- Myers, D. G. (2013); Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2016); Hogg, M. A., & Vaughan, G. M. (2018); Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2006); Cialdini, R. B. (2009); Sarwono, S. W. (2015).

LAMPIRAN

Peta Modul ↔ Sub-CPMK

Tabel ini memperlihatkan keterkaitan tiap pertemuan dengan Sub-CPMK yang diampunya, cakupan indikatornya, sub-bab yang membahasnya, dan latihan yang mengukurnya.

Pertemuan	Topik	Sub-CPMK	Indikator	Sub-bab	Latihan Mandiri
1	Pengantar Psikologi Sosial dan Ruang Lingkupnya	Sub-CPMK1	6 dari 6 tercakup	A, B, C, D	—
2	Sejarah dan Perspektif Teori Psikologi Sosial	Sub-CPMK1	6 dari 6 tercakup	A, B, C, D	—
3	Persepsi Sosial, Atribusi, dan Pembentukan Sikap	Sub-CPMK2	6 dari 6 tercakup	A, B, C, D	—
4	Konformitas, Kepatuhan, dan Pengaruh Sosial	Sub-CPMK2	6 dari 6 tercakup	A, B, C, D	—
5	Dinamika Kelompok dan Kepemimpinan	Sub-CPMK3	6 dari 6 tercakup	A, B, C, D	—
6	Deindividuasi, Perilaku Massa, dan Pengaruh Sosial	Sub-CPMK3	6 dari 6 tercakup	A, B, C, D	—
7	Prasangka Sosial, Diskriminasi, dan Perilaku	Sub-CPMK4	7 dari 7 tercakup	A, B, C, D	—

Pertemuan	Topik	Sub-CPMK	Indikator	Sub-bab	Latihan Mandiri
	Kolektif di Kawasan Timur Indonesia				
8	Ujian Tengah Semester: Evaluasi Capaian Psikologi Sosial Minggu 1–7	—	4 dari 4 tercakup	A, B, C, D	—
9	Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih Lokal	Sub-CPMK5	5 dari 5 tercakup	A, B, C, D	—
10	Analisis Empiris Perilaku Pemilih Pilkada Lokal	Sub-CPMK5	5 dari 5 tercakup	A, B, C, D	—
11	Opini Publik, Media Sosial, dan Polarisasi Politik	Sub-CPMK6	5 dari 5 tercakup	A, B, C, D	—
12	Analisis Konten Digital: Polarisasi dan Opini Publik	Sub-CPMK6	5 dari 5 tercakup	A, B, C, D	—
13	Presentasi Analisis Kelompok: Hoaks dan Polarisasi Sosial	Sub-CPMK7	6 dari 6 tercakup	A, B, C, D	—
14	Diskusi Lanjut, Sintesis, dan Umpan Balik Komprehensif	Sub-CPMK7	6 dari 6 tercakup	A, B, C, D	—
15	Refleksi Kritis: Nilai, Sikap,	Sub-CPMK8	6 dari 6 tercakup	A, B, C, D	—

Pertemuan	Topik	Sub-CPMK	Indikator	Sub-bab	Latihan Mandiri
	dan Tanggung Jawab Sosial				
16	Ujian Akhir Semester: Psikologi Sosial dan Aplikasinya dalam Ilmu Pemerintahan	—	3 dari 3 tercakup	A, B, C	—